

# NOAM CHOMSKY



## PIRATES AND EMPERORS

Pelaku  
Terorisme  
Internasional  
yang  
Sesungguhnya

"Karya yang sangat cerdas,  
kuat, dan provokatif."  
—*The Guardian*



# **PIRATES AND EMPERORS**

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

# **PIRATES AND EMPERORS**

**NOAM CHOMSKY**



**Pirates and Emperors:**

**Pelaku Terorisme Internasional yang Sebenarnya**

Diterjemahkan dari *Pirates and Emperors*, terbitan Pluto Press, London 2016

Karya Noam Chomsky

Cetakan Pertama, November 2017

Penerjemah: Eka Saputra & Khanifah

Penyunting: Adham T. Fusama

Perancang sampul: Wahyudi

Pemeriksa aksara: Titish A.K.

Penata aksara: Arya Zendi

*Pirates and Emperors: International Terrorism in the Real World (Second Edition)*. Copyright ©Noam Chomsky, 2016. First Published by Pluto Press, London

[www.plutobooks.com](http://www.plutobooks.com)

Hak terjemahan ke dalam bahasa Indonesia ada pada Penerbit Bentang.

Diterbitkan oleh Penerbit Bentang

(PT Bentang Pustaka)

Anggota Ikapi

Jln. Plemburan No. 1 Pogung Lor, RT 11 RW 48 SIA XV, Sleman, Yogyakarta  
55284

Telp. (0274) 889248 – Faks. (0274) 883753

Surel: [info@bentangpustaka.com](mailto:info@bentangpustaka.com)

Surel redaksi: [redaksi@bentangpustaka.com](mailto:redaksi@bentangpustaka.com)

<http://www.bentangpustaka.com>

**Chomsky, Noam**

*Pirates and Emperors: Pelaku Terorisme Internasional yang Sebenarnya*/Noam Chomsky; penerjemah, Eka Saputra & Khanifah, penyunting, Adham T. Fusama.

—Yogyakarta: Bentang, 2017.

Judul asli: *Pirates and Emperors*

xxvi + 346 hlm; 20,5 cm

ISBN 978-602-291-425-9

*E-book* ini didistribusikan oleh:

Mizan Digital Publishing

Jl. Jagakarsa Raya No. 40

Jakarta Selatan - 12620

Telp.: +62-21-7864547 (Hunting)

Faks.: +62-21-7864272

Surel: [mizandigitalpublishing@mizan.com](mailto:mizandigitalpublishing@mizan.com)

# Daftar Isi

Kata Pengantar Edisi Baru

Kata Pengantar Edisi Pertama (1986)

Pendahuluan (2002)

1

Pengendalian Pikiran: Kasus Timur Tengah

2

Terorisme Timur Tengah dan Sistem Ideologis Amerika  
(1986)

3

Libia dalam Demonologi (Rekayasa Sistematis  
untuk Membuat Sesuatu Menjadi Menakutkan) Amerika  
Serikat (1986)

4

Peran Amerika Serikat di Timur Tengah  
(15 November 1986)

5

Terorisme Internasional:  
Bayangan dan Kenyataan (1989)

6

Dunia Setelah 11 September (2001)

7

Amerika Serikat/Israel-Palestina (Mei 2001)

## Kata Pengantar Edisi Baru

**K**ETIKA saya menulis catatan ini, media melaporkan, “Di Irak, mantan kepala organisasi intelijen Iran yang sangat lihai, Mayor Jenderal Qassim Suleimani, sekaligus komandan pasukan Quds yang menghabiskan karier di bawah sorotan sebagai dalang serangan teroris—termasuk yang menewaskan tentara Amerika di Irak—telah tampil sebagai tokoh masyarakat.”<sup>1</sup> Uraian laporannya biasa saja sehingga tidak terlalu menyita perhatian. Namun, justru karena alasan itu menjadi menarik dan penting.

Tanpa banyak kontroversi, Amerika Serikat menyerbu Irak—tindakan agresi yang sewenang-wenang—dan menyisakan kehancuran di negeri tersebut. Nah, bagaimana bisa serangan yang menewaskan tentara penyerbu disebut “serangan teroris”? Ada satu cara: para penyerbu memiliki hak istimewa untuk menyerang dan menghancurkan sesuka hati, sehingga setiap bentuk perlawanan terhadap aksinya merupakan terorisme. Singkatnya, para penyerbu “mengganggu keamanan dunia dengan armada laut yang hebat”, sehingga menjadi bagian dari kuasa kekaisaran, bukan pencuri atau perompak,

seperti dalam kisah bajak laut dan sang kaisar yang diturunkan Santo Agustinus.

Sebagaimana dibahas dalam bab-bab selanjutnya, “Kisah St. Agustinus menyiratkan makna konsep terorisme internasional yang digunakan di Barat pada era kontemporer, dan menyentuh jantung persoalan terkait sejumlah insiden terorisme terkini yang diatur sedemikian rupa, dengan sinisme tertinggi, sebagai selubung atas kekerasan Barat.”

Adakalanya, pemahaman atas hak kekaisaran ini cukup mengesankan. Misalnya, pernah terjadi perdebatan mengenai memberi bantuan militer kepada pemberontak Suriah atau tidak. Berita utama *New York Times* mewartakan kajian CIA yang memengaruhi perdebatan tersebut dengan meninjau kembali kasus-kasus intervensi masa lalu untuk mendukung pemberontak, dan “mendapati upaya itu jarang berhasil”.<sup>2</sup> Artikel tersebut mengutip Presiden Obama yang mengatakan telah meminta CIA untuk melakukan penyelidikan guna menemukan kasus “pembiayaan dan pemasokan senjata untuk pemberontakan di suatu negara yang benar-benar berjalan dengan baik. Dan, mereka tidak bisa menyebutkan banyak kasus.” Jadi, ia enggan melanjutkan upaya tersebut.

Paragraf pertama artikel itu memuat tiga contoh penting: Kuba, Angola, dan Nikaragua. Masing-masing kasus berupa perang teroris yang kejam dan berkepanjangan, yang dipimpin Washington.



Presiden Kennedy meluncurkan kampanye untuk menghadirkan “teror dunia” di Kuba—demikian yang dituliskan oleh sejarawan kepercayaannya, Arthur Schlesinger, dalam biografi Robert Kennedy, yang menetapkan tugas tersebut sebagai prioritas tertinggi. Kekejaman teroris ini sangat ekstrem. Dan, seperti yang diketahui, terorisme memainkan peran dalam krisis rudal Kuba, yang disebut Schlesinger sebagai “momen paling berbahaya dalam sejarah”. Serangan teroris dilanjutkan saat krisis mereda, dan terus berlanjut selama bertahun-tahun.

Di Angola, pemerintahan Reagan—yang kukuh menyokong politik apartheid Afrika Selatan—mendukung tentara UNITA yang kejam dan brutal, bahkan setelah pemimpinnya, Jonas Savimbi, dikalahkan dengan telak dalam pemilihan bebas yang diawasi secara ketat. Dan, setelah Afrika Selatan menarik dukungan terhadap “monster yang nafsu kekuasaannya membawa kesengsaraan mengerikan bagi bangsanya” (meminjam kalimat Murrack Goulding), duta besar Inggris untuk Angola—yang diamini oleh kepala kantor CIA di dekat Kinshasa—mengatakan bahwa “bukan ide bagus untuk” mendukung monster itu “karena besarnya kejahatan Savimbi. Dia sangat brutal”.<sup>3</sup>

Perang teroris melawan Nikaragua yang dilancarkan Reagan, yang mematikan dan menghancurkan, bahkan dikecam Pengadilan Internasional. Mereka memerintahkan AS untuk menghentikan “penggunaan kekerasan secara tidak sah” dan membayar ganti rugi

kerusakan kepada Nikaragua. Perintah tersebut tentu saja diabaikan. Perang meningkat, dan AS malah memveto resolusi Dewan Keamanan yang menyeru setiap negara untuk mematuhi hukum internasional—tidak ada negara tertentu yang disebut secara spesifik, tetapi maksudnya jelas.

Akan tetapi, tiga kampanye teroris berskala besar ini—yang mengakibatkan kesengsaraan dan kehancuran tak terperi bagi korban—tidak terlalu berhasil sehingga bukan model kebijakan yang baik. Ada satu pelajaran yang bisa dipetik dari penyelidikan ini. Pesan yang paling jelas, tegas, dan benderang adalah bahwa AS merupakan negara teroris terdepan di dunia. Namun, hal itu tak menjadi masalah dan malah patut-patut saja, sebab kaisar “menggangu keamanan dunia” sesuai dengan haknya.

Bagaimanapun, sang kaisar tidak dapat dihukum karena mengganggu wilayahnya sendiri—yaitu dunia. Atau, karena berusaha mempertahankannya. Toh, kita bisa memahami rasa sakit ketika harta milik kita dicuri. Kasus yang sangat penting terjadi pada Oktober 1949, ketika Tiongkok mendeklarasikan kemerdekaan. “Kehilangan Tiongkok” bukan sekadar peristiwa sejarah besar, melainkan juga berdampak buruk bagi masyarakat Amerika Serikat.

Pertanyaan penting masa itu, “Siapa yang bertanggung jawab atas lepasnya Tiongkok?” Inilah motif utama gelombang represi McCarthyite. Hal ini pula yang menyebabkan AS terjun dalam Perang Vietnam, karena khawatir juga akan “kehilangan Indochina”, sehingga

mungkin akan memicu serangkaian kerugian yang bahkan dapat menjangkau Jepang yang merupakan “kartu domino utama” (demikianlah Jepang disebut oleh sejarawan Asia, John Dower, dalam analisisnya seputar kebijakan AS di wilayah tersebut). Kennedy sangat cemas akan disalahkan atas “lepasnya Indochina” jika gagal meningkatkan serangan terhadap Vietnam Selatan, dan kemudian seluruh Indochina.

Jelas, kita hanya bisa kehilangan apa yang sudah dimiliki. Mentalitas kekaisaran mengakar sedemikian kuat, sehingga ungkapan ini tak terlalu diperhatikan untuk jangka waktu yang lama, dan masih berlaku.

Segala yang dimiliki kaisar pun harus dipertahankan. Presiden Lyndon Johnson mengartikulasikan prinsip tersebut dengan semangat yang menggebu-gebu dalam pidatonya di hadapan tentara Amerika di Asia pada 1966. Ia menjelaskan kepada mereka, “Kita harus berdiri dan berkata, ‘Kekuatan tidak serta-merta menghasilkan kebenaran.’ Ada 3 miliar orang di dunia dan kita hanya punya 200 juta di antaranya. Kita kalah jumlah 15 banding 1. Jika kekuatan niscaya menghasilkan kebenaran, mereka akan menyapu Amerika Serikat dan mengambil apa yang kita miliki. Kita memiliki apa yang mereka inginkan.” Jadi, kita harus “mempertahankan kebebasan” dengan menghancurkan Vietnam, untuk mempertahankan diri dari serangan mereka.<sup>4</sup>

Alasannya tak jauh berbeda dengan ketika Presiden Obama melancarkan serangan *drone*, guna menghabisi

orang-orang yang dicurigai “mungkin punya” rencana untuk mencelakakan kita suatu hari nanti.

Prinsip serupa pun dinyatakan secara gamblang di dunia akademik. Dalam penelitian tentang sejarah “perang pencegahan” George W. Bush terhadap Irak (tidak ada yang dicegah, tetapi hal itu diabaikan), sejarawan Perang Dingin yang terkenal, John Lewis Gaddis, menelusuri “kerangka kerja Bush untuk memerangi terorisme dengan tradisi luhur dan idealistis” yang dikukuhkan idola Bush, John Quincy Adams—ahli strategi besar sekaligus intelektual penggubah *Manifest Destiny*<sup>5</sup>.

Adams mengadopsi prinsip yang senantiasa menjadi kebijakan strategis AS ini, Gaddis menjelaskan: “Ekspansi, bagi kita, adalah jalan untuk mewujudkan keamanan.” Karenanya, ketika Bush memperingatkan bahwa “orang Amerika harus ‘siap melakukan tindakan pencegahan jika diperlukan demi mempertahankan kebebasan dan kehidupan kita’, ia menggemakan tradisi lama alih-alih menegakkan yang baru”. Bush mengulangi prinsip-prinsip yang “sudah dipahami ... dengan baik” oleh setiap presiden sejak era Adams.<sup>6</sup>

Keamanan tentu saja merupakan tujuan yang sah. Dengan demikian, ekspansi tidak bisa terbatas. Sebab, bagian terluar dari apa yang kita miliki selalu berada di bawah ancaman potensial; jangan-jangan ancaman perampokan harta kita oleh orang-orang yang tinggal di luar sana, adalah bentuk serangan paling keji terhadap kita.

Selain itu, ancaman “mereka” juga ada di dalam rumah —kekhawatiran lain yang mengakar kuat dalam sejarah Amerika Serikat. Para pendatang di daerah koloni harus membela diri dari “suku Indian yang buas dan tak kenal ampun”, yang dikecam Thomas Jefferson dalam Deklarasi Kemerdekaan. Ancaman utama lainnya adalah populasi budak. Seperti yang diresahkan oleh Jefferson, sangat berbahaya untuk membebaskan mereka. Masing-masing dari mereka memiliki “seribu satu kenangan” tentang perlakuan mengerikan dalam kamp kerja paksa kaum barbar, yang merupakan sumber utama revolusi industri penopang masyarakat modern, dan mereka mungkin akan membalas jika bebas, memimpin perang yang hanya akan berakhir dengan “pemusnahan satu ras atau ras lainnya”.<sup>7</sup>

Potensi ancaman tidak akan pernah berakhir. Karena itu, demi keamanan, kita perlu memiliki senjata dengan lengkap, menodongkan senapan ke gereja, restoran, dan ke mana pun mereka bersembunyi, menyusun rencana untuk mencelakakan kita.

Dan, kekaisaran harus dipertahankan jika kita ingin hidup aman. Adalah wajar jika AS memiliki seribu basis militer di seluruh dunia, anggaran militer yang mendekati anggaran gabungan seluruh dunia, dengan teknologi paling maju dan penelitian termutakhir untuk mencapai “dominasi sempurna” di dunia dan luar angkasa.

Inilah hak prerogatif sang kaisar, sekaligus kebutuhan mendasarnya.

## Kata Pengantar Edisi Pertama

(1986)

**A**LKISAH, seperti dituturkan oleh Santo Agustinus, Alexander Agung menangkap seorang bajak laut dan bertanya kepadanya, “Heh, berani-beraninya kamu mengganggu keamanan di lautan?”

“Heh, berani-beraninya kamu mengganggu keamanan di SELURUH DUNIA?” Bajak laut tersebut melanjutkan jawabannya, “Karena hanya menyerang dengan kapal kecil saya disebut pencuri; sementara kamu, menyerbu dengan armada laut yang hebat, tetapi disebut Kaisar.”

Jawaban bajak laut itu “cerdas dan bagus”, menurut Santo Agustinus. Dan, kisah ini cukup menggambarkan hubungan terkini antara Amerika Serikat dan sejumlah aktor pendukung di panggung terorisme internasional: seperti Libia, faksi-faksi PLO<sup>8</sup>, dan lainnya. Secara lebih umum, cerita Santo Agustinus menyiratkan makna konsep terorisme internasional yang digunakan di Barat pada era kontemporer, dan menyentuh jantung persoalan terkait sejumlah insiden terorisme terkini yang diatur sedemikian rupa, dengan sinisme tertinggi, sebagai selubung atas kekerasan Barat.

Istilah “terorisme” mulai digunakan pada akhir abad ke-18, terutama untuk merujuk pada tindak kekerasan yang dirancang pemerintah demi memastikan kepatuhan umum. Konsep ini jelas kurang menguntungkan bagi pelaku terorisme negara yang—dengan memegang kekuasaan—berada dalam posisi untuk mengendalikan sistem pemikiran dan wacana publik. Karenanya, pengertian awal ini ditinggalkan, dan istilah “terorisme” diterapkan terutama pada “terorisme skala kecil” oleh individu atau kelompok.<sup>9</sup> Kendati pernah disematkan pada kaisar yang berlaku aniaya terhadap rakyatnya dan dunia, kini istilah tersebut hanya terbatas bagi pencuri yang mengusik penguasa—meski tidak sepenuhnya dibatasi: istilah itu masih berlaku untuk musuh sang kaisar, kategori yang berubah-ubah sesuai kebutuhan kekuasaan dan ideologi.

Supaya terbebas dari praktik semacam itu, kita menggunakan istilah “terorisme” untuk merujuk pada ancaman atau penggunaan kekerasan guna mengintimidasi atau memaksa (umumnya demi tujuan politik, agama, atau lainnya), entah itu terorisme sang kaisar atau si pencuri.

Aforisme bajak laut di atas hanya menjelaskan sebagian konsep “terorisme internasional” yang berkembang belakangan ini. Perlu ditambahkan corak kedua, yakni aksi terorisme berbenturan dengan norma umum jika dilakukan oleh kubu mereka, bukan kita. Itulah doktrin kampanye kehumasan tentang “terorisme internasional” yang dilancarkan pemerintahan Reagan saat mulai

berkuasa. Hal ini bertumpu pada klaim akademik yang mengukuhkan wabah tersebut sebagai instrumen yang “terinspirasi Soviet” atau “yang bertujuan untuk mengusik kestabilan masyarakat demokratis Barat”. Seperti yang diperlihatkan oleh dugaan bahwa terorisme tidak “ditujukan terhadap Uni Soviet atau negara satelit atau sekutunya”, melainkan terjadi “hampir secara eksklusif di negara-negara demokratis atau yang relatif demokratis”.<sup>10</sup>

Tesis tersebut benar, bahkan tepat secara definisi, mengingat istilah “terorisme” digunakan oleh kaisar dan pengikut setianya. Hanya aksi “kubu mereka”-lah yang dianggap terorisme, tesis tersebut tentu benar, apa pun faktanya. Di dunia nyata, ceritanya sangat berbeda. Korban utama terorisme internasional<sup>11</sup> adalah rakyat Kuba, orang-orang Amerika Latin, dan penduduk Lebanon, tetapi tidak satu pun diperhitungkan, secara definisi.

Contohnya saja, ketika Israel mengebom kamp pengungsi Palestina yang menewaskan banyak warga sipil—bahkan sering kali tanpa dalih “pembalasan”—atau mengirim pasukan ke desa-desa Lebanon dalam operasi “kontra-teror”. Di sana mereka membunuh, melakukan penghancuran, membajak kapal, atau mengirim ratusan sandera ke kamp penjara dengan kondisi mengerikan, ini bukanlah “terorisme”.

Nyatanya, suara protes yang jarang terdengar pun dikecam keras oleh kelompok partai yang loyal dengan alasan “anti-semitisme” dan “standar ganda”. Alasannya karena tidak bergabung melantunkan puja-puja untuk



“sebuah negara yang peduli terhadap kehidupan umat manusia” (*Washington Post*), dengan “tujuan moral tertinggi” (*Time*) yang dikagumi di mana-mana dan dielukan tanpa henti; sebuah negara yang, menurut pengagumnya, “dibentuk demi hukum yang lebih tinggi, sebagaimana dipahami para wartawan” (Walter Goodman).<sup>12</sup>

Demikian pula, bukanlah terorisme ketika pasukan paramiliter yang beroperasi dari basis pangkalan AS dan dilatih CIA membombardir hotel-hotel di Kuba, menenggelamkan kapal nelayan, dan menyerang sejumlah kapal Rusia di pelabuhan Kuba, meracuni tanaman dan ternak, mencoba membunuh Castro, dan seterusnya, dalam misi yang berlangsung hampir setiap minggu pada masa puncaknya.<sup>13</sup> Hal ini, dan banyak tindakan serupa lainnya dari kubu kaisar dan sekutunya, bukanlah subjek bahasan dalam konferensi dan kajian akademik, atau ulasan dan kecaman dalam opini berbagai media dan jurnal.

Standar untuk sang kaisar dan istananya terbilang unik dalam dua hal yang berkaitan erat. *Pertama*, aksi teror mereka dikecualikan dari ukuran norma umum. *Kedua*, sementara serangan teroris terhadap mereka ditanggapi sangat serius—bahkan sampai mewajibkan penggunaan kekerasan dalam “pertahanan diri dari serangan pada masa depan” seperti akan kita lihat kemudian—tetapi serangan teroris yang sebanding atau lebih serius kepada orang lain dipandang tidak perlu ditanggapi dengan aksi balas dendam atau tindakan pencegahan dini. Jika

dilakukan justru malah menimbulkan kemarahan dan respons yang menakutkan.

Beberapa serangan teroris serupa bahkan dirasa tidak signifikan, sehingga hampir tidak dilaporkan, dan pasti tidak diingat. Bayangkan saja, misalnya, pasukan laut Libia menyerang tiga kapal Amerika di pelabuhan Israel, Haifa, lalu menenggelamkan salah satunya dan merusak yang lain menggunakan rudal buatan Jerman Timur. Kita tidak perlu menduga-duga reaksinya. Namun, beralih ke dunia nyata, pada 5 Juni 1986, “pasukan laut Afrika Selatan menyerang tiga kapal Rusia di pelabuhan Namibe, Angola Selatan, menenggelamkan salah satu dari mereka”, menggunakan “rudal Scorpion buatan Israel [Gabriel]”.<sup>14</sup>

Jika Uni Soviet merespons serangan teroris terhadap pelayaran komersial ini, seperti akan dilakukan AS dalam keadaan serupa—mungkin lewat pengeboman yang menghancurkan Johannesburg, dalam ukuran skala respons tindakan “balasan” AS dan Israel—AS mungkin mempertimbangkan serangan nuklir sebagai “balasan” yang sah terhadap setan Komunis. Di dunia nyata, Uni Soviet tidak merespons, dan kejadian tersebut dianggap tidak begitu penting sehingga tidak disinggung media AS.<sup>15</sup>

Atau, bayangkan Kuba menyerang Venezuela pada akhir 1976 untuk membela diri dari serangan teroris, dengan tujuan membentuk “Orde Baru” yang diatur kelompok-kelompok di bawah kendalinya, membunuh 200 orang Amerika Serikat yang bertugas menjalankan sistem pertahanan udara, menembaki Kedutaan Besar AS, dan akhirnya mendudukinya beberapa hari selama

penaklukan di Caracas, dengan melanggar kesepakatan gencatan senjata.<sup>16</sup>

Dan, kembali ke dunia nyata, pada 1982 Israel menyerang Lebanon dengan dalih melindungi Galilea melawan serangan teroris (dikarang untuk penonton AS, sebagaimana diam-diam diakui secara internal) demi membentuk “Orde Baru” yang diatur kelompok-kelompok di bawah kendalinya, membunuh 200 orang Rusia yang bertugas menjalankan sistem pertahanan udara, menembaki Kedutaan Besar Rusia, dan akhirnya mendudukinya selama 2 hari dalam penaklukan di Beirut Barat dengan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Fakta-fakta ini diwartakan sambil lalu saja di AS, dengan konteks dan latar belakang penting diabaikan atau disangkal. Untungnya, tidak ada respons dari Soviet, atau kita tidak akan berada di sini sekarang untuk membahas masalah ini.

Di dunia nyata, tentu kita menganggap bahwa Uni Soviet dan musuh resmi lainnya, yang sebagian besar tidak berdaya sebagai persoalan biasa. Kita akan dengan tenang akan menanggung provokasi. Namun, kita baru marah kepada aksi kekerasan, baik secara verbal maupun militer, jika kaisar dan istananya yang menjadi korban.

Kemunafikan yang diilustrasikan berbagai kasus ini—dan tak terhitung banyak kasus lainnya yang akan dibahas nanti—tidak terbatas pada masalah terorisme internasional. Untuk contoh kasus yang berbeda, simak saja kesepakatan Perang Dunia II yang membagi-bagi kontrol atas sejumlah wilayah Eropa dan Asia ke kubu

Sekutu dan menyerukan penarikan pasukan pada waktu yang sudah ditentukan.

Tindakan Soviet di Eropa Timur menyebabkan kemarahan luar biasa (bahkan sangat keterlaluan), karena mirip dengan tindakan AS di wilayah yang diserahkan pada kontrol Barat berdasarkan kesepakatan masa perang (Italia, Yunani, Korea Selatan, dll.). Kemarahan juga terjadi atas keterlambatan penarikan mundur pasukan Soviet dari Iran utara, padahal AS sendiri melanggar perjanjian untuk menarik pasukan dari Portugal, Islandia, Greenland, dan di tempat lain, dengan alasan bahwa “pertimbangan militer” menilai penarikan semacam itu “tidak bijak”. Demikianlah yang dinyatakan Kepala Staf Gabungan dengan persetujuan Departemen Luar Negeri.

Dan, sampai hari ini, tidak ada protes atas fakta bahwa operasi spionase Jerman Barat, yang ditujukan terhadap Uni Soviet, dijalankan di bawah kendali Reinhard Gehlen, yang telah melakukan operasi serupa untuk Nazi di Eropa Timur. Atau, bahwa CIA mengirim agen dan perbekalan untuk membantu tentara dalam pertempuran Hitler di Eropa Timur dan Ukraina sampai akhir 1950-an sebagai bagian dari “strategi dorong balik”<sup>17</sup> yang diresmikan di NSC-68 (April 1950).<sup>18</sup> Sedangkan dukungan Soviet untuk tentara dalam pertempuran Hitler di Rockies pada 1952 mungkin menimbulkan reaksi yang berbeda.<sup>19</sup>

Ada demikian banyak contoh. Salah satu yang paling terkenal adalah contoh yang kerap diajukan sebagai bukti utama bahwa Komunis tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kesepakatan: Persetujuan Damai Paris 1973

mengenai Vietnam dan dampaknya. Sejatinya, lewat contoh ini, AS sekaligus mengumumkan bahwa mereka akan menolak setiap lembar kertas yang telah terpaksa ditandatangani dan akan terus begitu.

Sementara itu, media, dalam kepatuhan yang melampaui kepatutan, menerima keterangan versi AS soal perjanjian tersebut (dengan mengabaikan setiap elemen penting) sebagai teks yang sebenarnya, sehingga pelanggaran AS “sesuai” dengan perjanjian. Sedangkan reaksi Komunis terhadap pelanggaran ini membuktikan watak khianat mereka. Contoh ini sekarang biasanya diajukan sebagai pembenaran untuk penolakan AS terhadap penyelesaian politik yang dinegosiasikan di Amerika Tengah, menunjukkan manfaat sistem propaganda yang dijalankan dengan baik.<sup>20</sup>

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, “terorisme internasional” (dalam pengertian khas Barat) menjadi fokus utama pemerintahan Reagan saat mulai menjabat pada 1981.<sup>21</sup> Alasannya tidak sulit untuk dipahami, meskipun tetap—dan masih—tak terungkap dalam sistem doktrin.

Pemerintah menerapkan tiga kebijakan terkait, semua menuai capaian sukses: 1) pemindahan sumber daya dari orang miskin ke orang kaya; 2) peningkatan skala besar dalam sektor ekonomi dengan cara tradisional melalui sistem Pentagon, sebagai perangkat untuk memaksa masyarakat membiayai industri teknologi tinggi lewat pasar yang dijamin negara untuk pemborosan produksi teknologi tinggi, sehingga berkontribusi pada program

subsidi masyarakat, dengan keuntungan bagi pihak swasta, yang disebut “usaha bebas”; dan 3) peningkatan substansial dalam intervensi, subversi, dan terorisme internasional AS (dalam pengertian harfiah). Kebijakan semacam ini tidak dapat ditampilkan ke hadapan publik dalam pengertian yang dimaksudkan. Hanya dapat diterapkan jika masyarakat benar-benar dibikin takut oleh monster yang mengancam keamanan kita, dan kita harus menyelamatkan diri darinya.

Perangkat standarnya berupa seruan soal ancaman yang oleh Presiden disebut “persekongkolan monolitik dan kejam” untuk menaklukkan dunia lewat “Kerajaan Setan” sebagaimana disebut Reagan—juga Presiden Kennedy, karena meluncurkan program yang agak mirip<sup>22</sup>. Namun, konfrontasi langsung dengan Kerajaan itu akan sangat berbahaya. Jauh lebih aman untuk berperang melawan musuh tak berdaya yang dianggap sebagai wakil Kerajaan Setan, pilihan yang sejalan dengan agenda ketiga Reagan, yang diterapkan dengan alasan yang cukup independen: memastikan “stabilitas” dan “ketertiban” di wilayah global Washington. “Terorisme” dari bajak laut yang dipilih dengan saksama, atau musuh-musuh seperti petani Nikaragua atau Salvador yang berani membela diri melawan serangan teroris internasional, adalah sasaran yang lebih mudah. Dan dengan sistem propaganda yang efisien, hal itu dapat dimanfaatkan untuk menimbulkan rasa takut yang dibutuhkan dan menggerakkan penduduk lokal.

Dalam konteks inilah, “terorisme internasional” menggantikan hak asasi manusia sebagai “jiwa kebijakan luar negeri kita” pada 1980-an. Hak asasi manusia mencapai status ini sebagai bagian dari kampanye untuk memukul balik peningkatan penting terkait iklim moral dan intelektual sepanjang 1960-an, yang disebut dengan “sindrom Vietnam”. Sekaligus demi mengatasi “krisis demokrasi” mengerikan yang terjadi pada konteks yang sama ketika sebagian besar masyarakat menjadi demikian terorganisasi untuk mengambil tindakan politik, mengancam sistem keputusan elite yang mengatasnamakan publik, yang disebut “demokrasi” dalam langgam bahasa Barat.<sup>23</sup>

Selanjutnya, saya akan berfokus pada terorisme internasional di dunia nyata, dengan memusatkan perhatian terutama di wilayah Mediterania. “Terorisme Timur Tengah/Mediterrania” dipilih sebagai tema berita utama pada 1985 oleh para editor dan penyiar—sebagian besar orang Amerika—yang disurvei Associated Press. Survei dilakukan sebelum serangan teroris di bandara Roma dan Wina pada Desember, yang mungkin akan menghilangkan keraguan yang tersisa.<sup>24</sup> Pada bulan-bulan awal 1986, kekhawatiran terhadap terorisme Timur Tengah/Mediterrania mencapai tingkat tertinggi, yang berujung pada pengeboman AS terhadap Libia pada April. Kisah versi resmi menyatakan bahwa tindakan berani terhadap pelaku utama terorisme internasional berhasil mencapai tujuannya. Qaddafi dan penjahat besar lainnya kini meringkuk di bunker, dijinakkan oleh pembela hak

asasi dan harkat dan martabat manusia nan gagah perkasa.

Akan tetapi, terlepas dari kemenangan besar atas kuasa kegelapan ini, isu terorisme yang mengemuka dari dunia Islam dan respons yang tepat bagi demokrasi demi mempertahankan nilai-nilai beradab tetap tampil sebagai topik utama yang menjadi pusat perhatian dan perdebatan, seperti digambarkan dalam banyak buku, konferensi, artikel dan editorial, serta ulasan televisi. Toh, sejauh yang dapat dijangkau masyarakat umum atau kalangan elite, pembahasannya semata menyoal prinsip-prinsip yang baru saja disampaikan: perhatian dibatasi pada terorisme para pencuri, bukan kaisar dan sekutunya; pada kejahatan mereka, bukan kita. Dan saya, bagaimanapun, tidak akan mengikuti kecenderungan ini.



# Pendahuluan

(2002)

**D**AMPAK kejahatan teroris pada 11 September 2001 luar biasa besar, sehingga tidak perlu disematkan identitas lagi: cukup disebut “9/11” saja. Kini dipahami bersama bahwa dunia telah memasuki era baru ketika segalanya akan berbeda: “zaman teror”. Tak diragukan lagi, 9/11 akan menempati posisi penting dalam sejarah terorisme, walaupun kita harus memikirkan dengan hati-hati mengapa demikian. Siapa pun yang akrab dengan sejarah masa lalu dan masa kini tahu betapa alasan terjadinya teror, sayangnya, bukanlah skala kejahatannya—ini memang perlu disesalkan—melainkan orang-orang tak bersalah yang menjadi korban. Maka, konsekuensinya akan sangat bergantung pada cara kelompok elite dan penguasa menerjemahkan kejadian dramatis ini, betapa mereka tidak lagi kebal dari kejahatan serupa yang rutin ditimpakan kepada orang lain, dan reaksi mereka.

Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa fakta yang perlu dipertimbangkan: 1) “zaman teror” bukan sesuatu yang tidak terduga; 2) “perang melawan teror” yang dikumandangkan pada 11 September bukan sesuatu yang baru, dan bagaimana hal yang sama yang dilakukan pada

masa lalu sedikit-banyak mengandung pelajaran bagi masa kini.

Mengenai poin 1), meskipun tidak ada yang bisa memperkirakan secara persis kejahatan 9/11, sudah dipahami selama beberapa waktu, bahwa dengan teknologi kontemporer, dunia industrial cenderung kehilangan monopolinya atas kekerasan. Sebelum 9/11, diketahui bahwa “operasi terencana untuk menyelundupkan [senjata pemusnah massal] ke Amerika Serikat setidaknya memiliki kemungkinan berhasil 90 persen”.<sup>25</sup> Beberapa ancaman yang dimaksud antara lain “senjata nuklir skala kecil”, “bom kotor”, dan berbagai senjata biologis. Proses pembuatannya mungkin tidak memerlukan kemampuan teknis yang luar biasa atau organisasi khusus.

Lebih lanjut, sumber teror mungkin sulit dikenali, sehingga sukar dihadapi. Sembilan bulan setelah 9/11 dan ketakutan akan serangan antraks yang didapati banyak analis semakin mengerikan<sup>26</sup>. FBI melaporkan bahwa mereka baru memiliki sebatas dugaan tentang sumber dan perencanaan serangan 9/11. Pada dasarnya, semua itu adalah asumsi, padahal apa yang seharusnya menjadi penyelidikan internasional paling luar biasa dalam sejarah, justru hanya menghasilkan keterangan yang sangat sedikit. Itulah yang mereka akui. Dan, FBI melaporkan tidak ada kemajuan berarti dalam mengidentifikasi pelaku teror antraks, meskipun sumber penyakitnya telah dilokalisasi di laboratorium FBI di Amerika Serikat, dan

tenaga khusus telah dikerahkan untuk melakukan penyelidikan.

Beralih ke poin 2), penting untuk diingat bahwa George W. Bush pada 9/11 bukanlah pihak pertama yang mengumumkan “perang melawan teror”. Pernyataan tersebut pernah diserukan 20 tahun sebelumnya oleh pemerintahan Reagan-Bush Sr., dengan retorika serupa dan personel yang sama di posisi terdepan. Mereka berjanji akan melenyapkan “kanker” yang membawa “kembali ke barbarisme pada era modern”. Mereka mengidentifikasi dua pusat utama “momok jahat terorisme”, yakni Amerika Tengah dan Timur Tengah/wilayah Mediterania. Kampanye mereka untuk memberantas wabah teror di kedua wilayah tersebut menempati peringkat atas di antara isu-isu kebijakan luar negeri lain pada dekade ini.

Dalam kasus Amerika Tengah, kampanye ini dengan cepat menyebabkan mobilisasi massa yang tak pernah terjadi sebelumnya. Hal ini memiliki akar yang kuat pada sebagian besar masyarakat Amerika, dan mengoyak landasan baru dalam aksi yang dilakukan. Selama perang AS di Indochina, seperti pada sejumlah kasus amuk Barat sebelumnya di sebagian besar dunia, beberapa orang bahkan berpikir untuk tinggal di desa guna membantu para korban dan, dengan kehadiran mereka, memberikan perlindungan semampunya dari penjajah asing dan sekutu lokalnya. Juga ada banyak karya-pustaka mengenai “perang melawan teror” ala pemerintahan Reagan. Karya-karya ini menemukan tempatnya dalam gerakan populer

yang berusaha melawan terorisme internasional yang disokong negara, meskipun tetap nyaris tidak disinggung dalam bahasan arus utama karena sudah disepakati bahwa hanya kejahatan orang lain yang harus diperhatikan dan dikecam sengit. Sebagian dari kajian berikut diambil dari tulisan-tulisan 1980-an mengenai tema ini<sup>27</sup>, yang saya yakin masih relevan dengan kenyataan pada masa mendatang.

Pangkalan Washington di Amerika Tengah untuk mengatasi wabah teror ada di Honduras. Dan, pejabat yang bertanggung jawab sepanjang tahun-tahun yang penuh kekerasan ini adalah Duta Besar John Negroponte, yang ditunjuk George Bush Jr. pada 2001 untuk memimpin komponen diplomatik deklarasi ulang “perang melawan teror” di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sedangkan utusan khusus Reagan di Timur Tengah sepanjang periode kekejaman paling mengerikan tak lain adalah Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, yang mengerahkan komponen militer pada tahap baru kampanye tersebut. Para perencana utama lainnya di Washington juga menyertakan pengalaman yang didapat dari tahap pertama dalam wajah baru “perang melawan teror”.

Di kedua wilayah tersebut, pemerintahan Reagan melakukan kekejaman teroris besar-besaran, bahkan jauh melebihi tindakan pihak yang tengah mereka perangi. Di Timur Tengah, dengan perbedaan mencolok, jejak kekejaman terburuk mengarah kepada AS dan sekutu lokalnya, yang menyisakan pertumpahan darah dan

kehancuran, terutama di masyarakat Lebanon yang luluh lantak dan di wilayah-wilayah di bawah pendudukan militer Israel. Amerika Tengah bahkan mengalami bencana yang lebih buruk lagi di tangan komandan teroris di Washington dan antek-anteknya.

Salah satu sasarannya adalah Nikaragua, yang (karena diserang) dapat mengikuti ketentuan sesuai undang-undang dan kesepakatan resmi yang berlaku bagi sebuah negara yang diserang: mengajukan banding ke pihak berwenang di level internasional. Pengadilan Dunia memutuskan untuk mendukung Nikaragua, dengan menetapkan AS bersalah karena “penggunaan kekerasan secara tidak sah” dan pelanggaran terhadap perjanjian, memerintahkan Washington untuk menghentikan kejahatan teroris internasionalnya dan mengganti biaya ganti rugi mendasar.

AS menolak putusan Pengadilan dengan penuh penghinaan. Mereka beralasan bahwa karena negar-negara lain tidak setuju, kita seharusnya memutuskan sendiri sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam “yurisdiksi domestik” kita; dalam kasus ini, perang teroris melawan Nikaragua. Dengan dukungan bipartisan, pemerintah pun meningkatkan tindak kejahatan tersebut. Nikaragua mengajukan banding ke Dewan Keamanan, dan AS memveto resolusi yang mendukung keputusan pengadilan serta meminta semua negara untuk mematuhi undang-undang internasional. AS juga mengeluarkan keputusan sepihak (dengan satu atau dua

negara sekutu) terkait resolusi serupa dari Majelis Umum PBB.

AS meningkatkan serangan lebih lanjut seraya merongrong upaya para pemimpin Amerika Tengah untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan. Ketika orang-orang akhirnya mengalah, pers nasional—kendati mengakui metode teroris yang digunakan—tanpa berusaha mencoba menyembunyikan sukacitanya, mengabarkan kepada dunia bahwa rakyat Amerika “Bersatu dalam kegembiraan” pada momen “Kemenangan untuk Sikap Adil AS” (*New York Times*).

Di tempat lain di Amerika Tengah, tidak ada tentara yang melindungi penduduk. Kekejaman pasukan yang dipersenjatai dan dilatih AS serta negara-negara yang bergabung dengan jaringan teroris internasionalnya jauh lebih ekstrem daripada di Nikaragua, padahal di sana mereka sudah cukup mengerikan. Dilakukan dengan barbarisme dan kebrutalan yang tak terkatakan, perang AS menisakan sekitar 200 ribu mayat serta jutaan pengungsi dan anak yatim di negara-negara yang remuk redam.

Salah satu sasaran utama “perang melawan teror” adalah Gereja Katolik, yang telah melakukan dosa memilukan. Mengabaikan peran tradisional pelayanan terhadap kelompok kaya dan berkuasa, Gereja di sini justru mengadopsi “pilihan preferensial untuk orang miskin”. Para pendeta, biarawati, dan pekerja awam di gereja berusaha mengorganisasi orang-orang yang hidup dalam penderitaan untuk setidaknya mengambil kendali

atas hidup mereka sendiri, dan dengan demikian mereka menjadi “Komunis” yang harus disingkirkan. Bukan sekadar simbol bahwa dasawarsa yang mengerikan ini dimulai dengan pembunuhan seorang Uskup Agung konservatif yang telah menjadi “suara untuk mereka yang bisu”, dan diakhiri dengan pembunuhan brutal terhadap enam intelektual Yesuit terkemuka. Semuanya dilakukan oleh sekutu kesayangan Washington. Peristiwa tersebut hanya menyita sedikit perhatian dari pihak yang bertanggung jawab. Bahkan, sedikit yang tahu nama-nama intelektual terbunuh, kontras dengan para pembangkang di negara-negara musuh. Kita bisa membayangkan reaksinya jika mereka tidak hanya dipenjara dan diasingkan, tetapi kepalanya ditembak pasukan elite yang dilatih dan dipersenjatai Kremlin, menutupi catatan kekejaman yang menghebohkan.

Fakta dasarnya dapat dipahami. *The School of the Americas*<sup>28</sup> mengumumkan dengan bangga bahwa “teologi pembebasan ... berhasil diberangus berkat bantuan tentara AS”, berterima kasih banyak atas pelatihan yang diberikan kepada perwira militer dari negara sekutu.

“Kemenangan untuk Sikap Adil AS” tak semata menyisakan mayat-mayat yang dimutilasi dan kehidupan yang hancur lebih, di tengah bencana ekologis. Setelah AS mengambil alih lagi pada 1990, Nikaragua merosot hingga menempati peringkat negara paling miskin di sepanjang bumi setelah Haiti—yang, secara kebetulan, telah menjadi sasaran utama intervensi dan kekerasan AS selama 1 abad, dan sekarang berbagi keistimewaan dengan Kuba

dalam hal embargo AS yang mengimpit tak berujung. Di tempat lain di wilayah ini,

kebijakan ekonomi neoliberal, seperti penghapusan subsidi harga dan kenaikan pajak penjualan, telah memperburuk situasi bagi masyarakat miskin, demikian diyakini PBB. Belanja sosial tahunan di empat wilayah di Amerika Tengah mencapai US\$100 per kepala, seperenam dari rata-rata Amerika Latin [hal ini cukup memilukan]. Statistik yang dihimpun untuk pertemuan tahunan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB di Roma minggu ini [11 Juni 2002] menunjukkan jumlah orang dengan kelaparan kronis di Amerika Tengah meningkat hampir sepertiga dalam dekade terakhir, dari 5 juta menjadi 6,4 juta dari 28 juta populasi.<sup>29</sup>

Perwakilan PBB mengupayakan pemulihan, “tetapi tanpa reformasi agraria yang efektif, sejumlah langkah yang diambil hanya memiliki dampak terbatas”. Sejumlah organisasi kemasyarakatan mungkin telah merintis jalan menuju reformasi agraria dan melakukan langkah lain untuk memberdayakan sebagian besar rakyat miskin yang secara efektif dihancurkan oleh “perang melawan teror” ala Washington. Demokrasi formal dilembagakan, tetapi melulu bersifat ideologis. Jajak pendapat di seluruh belahan dunia mengungkapkan kepercayaan terhadap demokrasi terus menurun. Sebagian beralasan karena



kehancuran basis sosial untuk demokrasi yang efektif, dan sebagian lagi, kemungkinan besar, karena institusi demokrasi formal cenderung disertai kebijakan neoliberal yang mereduksi ruang untuk partisipasi demokratis.

Mengkaji ulang program “membawa demokrasi ke Amerika Latin”, Thomas Carothers—yang terlibat dalam proyek “peningkatan demokrasi” pada pemerintahan Reagan—menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut “tulus”, tetapi “gagal” dalam cara yang sangat sistematis. Di daerah dengan pengaruh Washington paling kecil—di Kerucut Selatan (wilayah Amerika Selatan yang terdiri atas Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Cile)—kesuksesan program justru menjadi yang terbesar, terlepas dari upaya pemerintah Reagan untuk menghalanginya. Sementara di tempat pengaruh Washington paling besar, keberhasilannya paling sedikit. Alasannya, Carothers menyimpulkan, karena Washington berusaha untuk mempertahankan “tatanan dasar ... masyarakat yang tidak demokratis” dan menghindari “perubahan berbasis kerakyatan .... Dan, tak pelak lagi hanya [mengupayakan] bentuk perubahan demokratis yang terbatas, dengan pendekatan hierarkis [atas ke bawah], yang tidak berisiko mengganggu struktur kekuasaan tradisional yang telah lama bersekutu dengan Amerika Serikat”. Ia mengabaikan “kritik liberal” soal pendekatan ini karena “kelemahan abadi”, yakni tidak menawarkan alternatif. Pilihan untuk membolehkan penduduk memiliki suara yang signifikan dalam

menjalankan urusan mereka sendiri tidak masuk agenda program.<sup>30</sup>

Dalam kuasa budaya terorisme, kejahatan “perang melawan teror” dan berbagai dampaknya menimbulkan sedikit kekhawatiran yang nyata, terlepas dari sejumlah pertimbangan taktis. Fakta-fakta itu banyak dilaporkan organisasi hak asasi manusia, kelompok gereja, dan lain-lain, kadang-kadang bahkan pers, tetapi sebagian besar dikesampingkan dengan apologetika memalukan. Mereka tidak mengajari kita apa pun tentang “perang melawan teror”. Sebagian besar cerita dihapus dari sejarah, dan ini bahkan dipuji sebagai “inspirasi bagi kemenangan demokrasi di zaman kita” (*New Republic*). Dengan ancaman terhadap demokrasi yang bermakna dan kebutuhan akan reformasi yang sangat mendarah daging, wilayah tersebut kembali pada ketidakjelasan tahun-tahun sebelumnya, ketika sebagian besar orang merasa demikian menderita tetapi memilih bungkam, sementara investor asing dan “struktur tradisional kekuasaan yang telah lama bersekutu dengan Amerika Serikat” memperkaya diri sendiri.

Reaksi tersebut masuk akal terkait asumsi yang mengemuka bahwa korban adalah “makhluk biasa” yang hidupnya “tidak bernilai”—meminjam istilah elegan Hegel untuk kelompok yang lebih rendah. Jika mencoba “mendongakkan kepala”, mereka harus dihancurkan oleh terorisme internasional, yang akan dihormati dengan mulia. Jika bertahan dalam kebisuan, kesengsaraan mereka bisa diabaikan. Sejarah menunjukkan beberapa pelajaran dengan sangat gamblang.

Meskipun Amerika Tengah memudar dari pandangan pada 1990-an, teror di tempat lain tetap menonjol dalam agenda kebijakan. Dan, setelah mengalahkan teologi pembebasan, militer AS memiliki tugas baru. Di belahan bumi Barat, Haiti dan Kolombia menjadi fokus perhatian. Di Haiti, AS memberikan dukungan yang cukup besar untuk kekerasan negara sampai 1980-an (seperti sebelumnya). Namun, masalah baru muncul pada 1990, ketika dengan mengejutkan semua orang, pemilihan demokratis pertama di Haiti dimenangkan secara telak oleh seorang imam populis, berkat gerakan rakyat berskala besar di daerah kumuh, dan daerah perdesaan yang diabaikan.

Pemerintahan demokratis segera digulingkan lewat kudeta militer. Junta sekaligus teror mengerikan dikerahkan untuk menghancurkan gerakan populer tersebut, dengan dukungan diam-diam dari Bush (pertama) dan Clinton. Presiden terpilih akhirnya dipulihkan, tetapi dengan syarat untuk mematuhi kebijakan neoliberal kejam dari kandidat yang didukung AS, yang telah memenangi 14 persen suara dalam pemilihan 1990. Haiti mengalami kesengsaraan lebih lanjut, sementara Washington kembali dipuji karena dedikasinya mengilhami kebebasan, keadilan, dan demokrasi.

Yang jauh lebih penting untuk kebijakan AS adalah Kolombia, tempat kejahatan mengerikan tahun-tahun sebelumnya meningkat tajam pada 1990-an. Kolombia menjadi penerima utama senjata dan latihan militer AS di

dunia, sesuai dengan pola yang konsisten. Pada akhir dekade, ditengarai sepuluh nyawa melayang dalam 1 hari karena masalah politik (bahkan mungkin dua kali lipatnya menurut organisasi hak asasi manusia Kolombia), jumlah pengungsi meningkat menjadi dua juta, dan bertambah 300 ribu lebih setiap tahun secara reguler. Departemen Luar Negeri dan Rand Corporation sependapat dengan organisasi hak asasi manusia bahwa sekitar 75—80 persen kekejaman disebabkan militer dan paramiliter. Yang terakhir ini sangat terpaut erat dengan militer yang oleh Human Rights Watch disebut tentara “divisi keenam”, di luar lima divisi resmi.

Tindak kejahatan yang dikaitkan dengan divisi keenam cukup konstan sepanjang dekade ini, tetapi dengan pergeseran dari militer ke paramiliter mengingat teror telah diswastakan—siasat yang lazim diterapkan dalam beberapa tahun terakhir oleh Serbia, Indonesia, dan negara-negara teror lain yang mencari “penyangkalan yang masuk akal” atas kejahatan mereka. AS menggunakan taktik yang sama, menswastakan pelatihan dan pengendalian kejahatan, dan juga pelaksanaannya, seperti dalam operasi perang senjata kimia (“fumigasi”) yang memiliki dampak buruk bagi sebagian besar petani dengan dalih perang obat bius.<sup>31</sup> Setelah meningkat pesat, operasi ini dialihkan ke perusahaan swasta (MPRI, Dyncorps), yang didanai Washington dan mempekerjakan perwira militer AS, perangkat yang berguna untuk menghindari pengawasan kongres yang terbatas untuk keterlibatan langsung dalam teror negara.

Pada 1999, saat kekejaman meningkat, Kolombia menjadi penerima utama bantuan militer AS di seluruh dunia (selain pelanggan abadi, Israel-Mesir), menggantikan Turki. Sebagai sekutu strategis, Turki telah menerima bantuan dan pelatihan militer AS yang besar sejak 1940-an, dan terjadi peningkatan tajam pada pertengahan 1980-an saat Turki meluncurkan kampanye kontra-pemberontakan menysasar penduduk Kurdi yang tertindas. Operasi teror negara meningkat pada 1990-an, membuahkan sejumlah kejahatan terburuk pada dekade berdarah itu. Sejumlah operasi, yang dilakukan dengan merajalela dan barbarisme tak terkatakan, mengusir jutaan orang dari perdesaan yang hancur serta membunuh puluhan ribu orang. Populasi yang tersisa dikurung di penjara bawah tanah yang ketat, dengan kehilangan hak-hak paling dasar.<sup>32</sup> Seiring meningkatnya teror negara, demikian pula dukungan AS untuk kejahatan tersebut. Clinton memberi Turki 80 persen senjata. Pada 1997 saja, aliran senjata melebihi keseluruhan periode Perang Dingin digabungkan hingga awal kampanye kontra pemberontakan.<sup>33</sup>

Penting diingat, dalam hujan komentar pada fase kedua dari “perang melawan teror”, betapa sejarah yang terkini dan relevan tidak lagi mendapat perhatian. Juga tidak ada kekhawatiran yang nyata mengenai fakta bahwa fase kedua ini dipimpin oleh satu-satunya negara yang telah dikecam karena terorisme internasional oleh otoritas internasional tertinggi, dan bahwa koalisi yang sebanding menyatukan beragam negara teroris: Rusia, Tiongkok, dan

lainnya, dengan penuh semangat sehingga mendapatkan otorisasi atas kekejaman teror mereka dari pemimpin global yang berjanji untuk melenyapkan kejahatan dari muka bumi.

Tidak ada yang terkejut saat pertahanan Kabul melawan teror berpindah dari tangan salah satu negara teroris (Inggris) ke negara lainnya, Turki, yang memenuhi syarat untuk tugas tersebut dengan “pengalaman positifnya” dalam memerangi teror, menurut Departemen Luar Negeri dan pers. Turki telah menjadi “sekutu penting dalam perang baru Washington melawan terorisme”, sebagaimana dijelaskan dalam kajian Brookings Institution. Negara ini telah “berjuang menghadapi kekerasan teroris” dalam beberapa tahun terakhir dan “dengan demikian ditempatkan secara khusus untuk membantu membentuk usaha global baru guna menghapus ancaman ini”.<sup>34</sup>

Seperti beberapa contoh yang telah dipaparkan—dan masih ada banyak lagi—peran Washington dalam terorisme internasional yang diatur negara bertahan tanpa adanya perubahan penting pada masa di antara dua fase “perang melawan teror”, sejalan dengan reaksi terhadapnya.

Dan, sama seperti yang terjadi selama fase pertama “perang melawan teror”, ada banyak informasi tentang eksploitasi terorisme internasional yang disokong negara dari organisasi hak asasi manusia dan sumber tepercaya lainnya. Informasi itu sangat dicari ketika mengandung cerita yang berguna secara ideologis. Tentu bukan hal

tersebut yang menjadi masalah. Karenanya, fakta tersebut diabaikan, atau jika tidak mungkin, disisihkan sebagai cacat kecil atau penyimpangan yang tidak disengaja dari jalan kebenaran kita.

Pertunjukan tersebut sangat mengesankan pada 1990-an, ketika peran AS dan sekutu-sekutunya di Turki, Kolombia, Timor Timur, Timur Tengah, dan tempat lain perlu disudahi, sembari memuji Washington karena memasuki “fase mulia” dalam kebijakan luar negeri dengan “cahaya suci” sebagai pemimpin “Dunia Baru idealistis yang bertekad mengakhiri ketidakmanusiawian”, untuk kali pertama dalam sejarah, serta mendedikasikan diri bagi “prinsip dan nilai” demi menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan. Bahwa hal ini mencuat tanpa rasa malu sudah cukup luar biasa; bahwa hal itu leluasa melenggang tanpa hambatan tokoh-tokoh suci yang sama dalam beberapa kejahatan terburuk pada dekade ini bahkan membungkam Jonathan Swift.<sup>35</sup>

Keberhasilan tahap pertama “perang melawan teror” di Amerika Tengah tecermin di wilayah yang menjadi pusat perhatian kedua, yaitu Timur Tengah/Mediterrania. Di Lebanon, pengungsi Palestina dilumat oleh operasi teror yang didukung AS, dan masyarakat Lebanon mengalami trauma berkepanjangan. Sekitar 20 ribu orang terbunuh selama invasi Israel pada 1982, dan bertambah lebih banyak lagi karena kekejaman Pasukan Pertahanan Israel<sup>36</sup> dan tentara bayaran di wilayah pendudukan Lebanon pada tahun-tahun berikutnya, berlanjut sampai 1990-an dengan invasi Israel secara berkala mendesak

ratusan ribu orang meninggalkan rumahnya, membunuh ratusan di antaranya. Pemerintah Lebanon melaporkan 25 ribu orang tewas setelah invasi 1982. Tidak banyak dalih yang dapat dipercaya untuk membela diri, sebagaimana diakui penguasa Israel (terlepas dari propaganda untuk AS) bahwa dukungan AS konsisten dan menentukan.

Di wilayah yang diduduki Israel, teror dan represi meningkat sampai 1980-an. Israel melarang pembangunan di wilayah-wilayah yang diduduki, mengambil alih lahan penting dan sebagian besar sumber daya, seraya mengorganisasi proyek pemukiman sedemikian rupa sehingga membiarkan penduduk asli terisolasi dan tidak berdaya. Rencana dan program ini sangat bergantung pada dukungan militer, ekonomi, diplomatik, dan ideologis AS.

Pada hari-hari awal dari 35 tahun pendudukan militer, Moshe Dayan—salah satu pemimpin Israel yang paling bersimpati terhadap penderitaan orang Palestina—menyarankan kepada rekan sejawat kabinetnya bahwa Israel harus memberi tahu orang-orang Palestina bahwa mereka akan, “hidup seperti anjing, dan siapa pun boleh pergi jika mau.”<sup>37</sup> Seperti banyak aksi serupa, ciri pendudukan adalah penghinaan dan pelecehan terhadap “Araboushim” (istilah yang sepadan dengan “negro” dan *kikes*—untuk orang Yahudi), yang dalam ungkapan biasa harus diajari untuk tidak “mendongakkan kepala mereka”.

Dua puluh tahun yang lalu, meninjau salah satu kekerasan pemukim/IDF sebelumnya, ilmuwan politik



Yoram Peri dengan sedih menyatakan tiga perempat dari 1 juta anak muda Israel telah belajar dari dinas militer “bahwa tugas tentara tidak hanya membela negara di medan perang melawan tentara asing, tetapi juga menghancurkan hak orang-orang yang tidak bersalah hanya karena mereka, Araboushim, tinggal di wilayah yang dijanjikan Allah kepada kita”.

“Binatang berkepala dua” (menurut Perdana Menteri Menahem Begin) kemudian hanya bisa “berlarian seperti kecoak mabuk di dalam botol” (Kepal Staf Rafael Eitan). Atasan Eitan, Ariel Sharon, tak lama setelah penyerbuan ke Lebanon dan pembantaian Sabra-Shatila, mengatakan cara menghadapi para demonstran adalah “memotong testikel mereka”. Pers arus utama berbahasa Ibrani mewartakan “laporan rinci tentang tindakan teroris [oleh IDF Dan pemukim] di wilayah yang ditaklukkan”, yang ditunjukkan kepada Perdana Menteri Begin oleh tokoh politik terkemuka, termasuk para penganjur kebijakan agresif. Ini termasuk aksi penghinaan secara teratur, seperti memaksa Araboushim untuk saling mengencingi dan buang air besar dan merangkak di lapangan sambil berteriak, “Dirgahayu Negara Israel” atau menciumi tanah; atau pada hari Holocaust, menulis angka di tangan mereka sendiri “untuk mengenang orang-orang Yahudi di kamp pemusnahan”. Tindakan itu sendiri menghebohkan publik Israel, dan terulang lagi sepanjang invasi Sharon pada April 2002.

Aktivis hak asasi manusia dan pakar hukum yang disegani, Raja Shehadah, menulis 20 tahun yang lalu

bahwa bagi orang-orang Palestina yang berada di bawah pendudukan, ada beberapa pilihan: “Hidup seperti ini, Anda harus terus-menerus menolak buah simalakama untuk menerima perlakuan sipir penjara dalam keputusan yang memuakkan, atau menjadi gila dengan menelan kebencian terhadap sipir penjara dan dirimu sendiri, tahanan.” Satu-satunya alternatif adalah menjadi salah satu dari “*samidin*”, mereka yang dalam diam menahan diri dan mengendalikan amarah.

Salah satu penulis Israel yang paling terkemuka, Boaz Evron, menggambarkan teknik pendudukan secara ringkas: “tetap merantai mereka”, memastikan mereka tahu bahwa “cambuk terentang di atas kepala mereka”. Itu lebih masuk akal daripada pembantaian karena masyarakat yang beradab bisa “menerima dengan damai”, dengan bertanya, “Apa yang begitu mengerikan? Apakah ada yang terbunuh?”

Kritik tajam Evron tepat sasaran. Bahkan kritik tersebut telah berulang kali dilayangkan, dengan sangat tajam pada April 2002, ketika kejahatan perang Sharon yang terakhir dikemas rapi lewat lobi pro-Israel yang menunjukkan bahwa, di luar AS, dunia dikuasai anti-semitisme yang tidak dapat dihilangkan. Alasannya, ketakutan awal akan pembantaian besar terbukti tidak berdasar, dan yang terjadi hanya penghancuran kamp pengungsi Jenin, kota tua Nablus, pusat kebudayaan dan institusi sipil lainnya di Ramallah, penghinaan tidak senonoh yang lazim dilakukan, hukuman brutal terhadap ratusan ribu orang yang tidak bersalah, serta makhluk

biasa lainnya dari kategori yang bisa “diterima dengan damai” oleh orang Amerika dan banyak orang Israel yang terdidik. Tentunya tidak seorang pun, kecuali rasis anti-Irak, yang histeris dan keberatan jika pasukan Saddam Hussein melakukan tindakan serupa di Israel atau AS.

Sejumlah kasus mengungkapkannya betapa sikap terhadap teror lebih bertumpu pada keterangan simbol daripada gambaran umum. Tidak ada simbol “momok mengerikan terorisme” yang lebih nyata dan kekal daripada pembunuhan brutal terhadap warga Amerika lumpuh di kursi roda, Leon Klinghoffer, dalam pembajakan Achille Lauro pada Oktober 1985. Tingkat kekejaman aksi ini tidak berkurang dengan adanya klaim teroris bahwa pembajakan tersebut merupakan balasan atas pengeboman Israel yang didukung AS di Tunisia seminggu sebelumnya, yang telah menewaskan 75 orang Tunisia dan Palestina tanpa alasan masuk akal. Reaksi yang sangat berbeda muncul ketika wartawan Inggris menemukan “sisa kursi roda lumat, rata dengan tanah” di kamp pengungsi Jenin setelah serangan Sharon.

“Benar-benar hancur, seperti digilas rata dalam film kartun,” demikian dilaporkan. “Di tengah puing-puing ada bendera putih yang rusak.” Seorang warga Palestina yang lumpuh, Kemal Zughayer, “ditembak mati saat mencoba untuk menyingkir dari jalan raya. Tank-tank Israel pasti telah melindasnya, karena ketika (seorang teman) menemukannya, satu kaki dan dua lengannya putus, dan wajahnya, katanya, terbelah dua”.<sup>38</sup> Hal ini tampaknya bahkan tidak layak diwartakan di AS, dan jika diberitakan,

akan disangkal seiring derasnya tuduhan anti-semitisme yang mungkin akan mengarah pada permintaan maaf dan pencabutan laporan. Kalaupun kemudian diakui, kejahatan tersebut akan disisihkan sebagai kesalahan yang tidak disengaja dalam aksi balasan yang bisa dibenarkan, sangat berbeda dengan kekejaman Achille Lauro. Kemal Zughayer tidak akan memasuki lorong sejarah terorisme bersama Leon Klinghoffer.

Sangat mudah untuk menambahkan contoh semacam itu. Sekutu AS harus dibedakan dari Araboushim yang mereka gilasi, sama seperti umumnya terjadi selama berabad-abad, manusia tidak boleh limbung karena “makhluk biasa”.

Mantan kepala intelijen Israel, Shlomo Gazit, pejabat senior pada tahun-tahun awal pemerintahan militer, menggambarkan pendudukan 1985 sebagai “kisah sukses”. Penduduk tidak menimbulkan masalah sama sekali. Mereka, *samidin* yang tidak mendongakkan kepalanya. Tujuan utama telah dicapai: “mencegah penduduk berpartisipasi membentuk masa depan wilayahnya secara politik” atau “dipandang sebagai mitra untuk berurusan dengan Israel”. Itu berarti “larangan mutlak terhadap organisasi politik mana pun, karena jelas dipahami semua orang bahwa jika aktivisme politik dan organisasi diizinkan, para pemimpinnya akan menjadi peserta potensial dalam urusan politik”.

Pertimbangan yang sama mengharuskan “penghancuran semua inisiatif dan setiap upaya dari penduduk wilayah tersebut untuk mengusahakan

negosiasi, untuk dijadikan saluran masuk bagi kepemimpinan Arab Palestina di luar wilayah”. Prinsip panduannya diumumkan pada 1972 oleh diplomat Israel yang ternama, Chaim Herzog, yang kemudian menjadi presiden: “Saya tidak menolak suatu tempat atau sikap atau pendapat mengenai setiap masalah bagi orang Palestina .... Namun, tentu saja saya tidak bersedia untuk menganggap mereka sebagai mitra dalam hal apa pun di tanah yang telah dikuduskan di tangan bangsa kita selama ribuan tahun. Bagi orang Yahudi di negeri ini, tidak ada yang namanya mitra.”<sup>39</sup>

Bagi para pendukung, masalah hanya muncul jika kecoak yang sudah dibikin mabuk menjadi begitu “gila karena menelan kebencian” sehingga mereka mendongakkan kepala dan bahkan menembaki sipir penjara. Dalam hal ini hukuman sangat berat, mencapai tingkat kebrutalan yang ekstrem—selalu diiringi kekebalan hukum selama para tuan donatur setuju. Sampai Desember 1987, ketika Intifadah pertama pecah, orang-orang Palestina di wilayah tersebut benar-benar ditundukkan. Ketika mereka akhirnya mendongakkan kepala di wilayah pendudukan, maka IDF, Patroli Perbatasan (yang menyerupai paramiliter), dan para pemukim akan sangat marah serta melancarkan teror yang keji.<sup>40</sup>

Hanya ada sedikit pemberitaan di AS terkait hal ini. Pers dan pandangan publik secara umum tetap sama, sementara Washington dengan gagah berani pura-pura “tidak melihat” tawaran dari PLO dan yang lainnya untuk

menempuh penyelesaian politik. Akhirnya, karena menjadi sasaran cemooh internasional, Washington setuju untuk berbicara dengan PLO. Dan, dengan sikap pura-pura yang kekanak-kanakan, komunitas intelektual dan media menelannya tanpa keraguan, bahwa PLO telah menyerah dan setuju untuk menerima sikap AS tanpa perlawanan.

Dalam pertemuan pertama (yang dilaporkan di Israel dan Mesir, tetapi tidak di media arus utama AS), Washington menuntut agar PLO menyudahi “kerusuhan” di wilayah-wilayah yang ada di bawah pendudukan militer, “yang kami anggap sebagai tindakan teroris terhadap Israel”, bertujuan untuk “mengganggu keamanan dan stabilitasnya”. “Terorisme” bukanlah tentang tentara pendudukan; kekerasan mereka sah, berdasarkan prioritas pemerintah AS, sama seperti di Lebanon. Mereka yang berani mendongakkan kepala itulah yang bersalah. Perdana Menteri Rabin memberi tahu para pemimpin Peace Now bahwa tujuan negosiasi AS-PLO “terdekat” adalah menyediakan waktu yang cukup bagi Israel untuk menghancurkan Intifadah dengan “tekanan militer dan ekonomi yang keras”, dan meyakinkan mereka bahwa Palestina “akan luluh lantak”.

Kemudian, seperti biasanya, kekerasan terjadi. Ketika Palestina “luluh lantak” dan kembali ke keadaan *samidin*, takluk, kekhawatiran di AS berkurang, seperti dalam kasus lain, menunjukkan lagi keakuratan analisis Evron yang dikutip sebelumnya.

Jadi, keadaan berlanjut sampai 1990-an, yang kemudian memasuki “proses perdamaian Oslo”. Di Jalur Gaza, beberapa ribu pemukim Yahudi tinggal dalam kemewahan, dengan kolam renang, kolam ikan, dan hasil pertanian melimpah berkat penggunaan sebagian besar sumber air daerah yang minim. Satu juta orang Palestina nyaris tidak bertahan dalam kesengsaraan, dipenjarakan di balik tembok dan tidak diberi akses ke laut atau Mesir, sering dipaksa untuk berjalan atau berenang di tengah adangan IDF, yang tak terlalu menjalankan fungsi keamanan, tetapi memberlakukan hukuman yang keras dan merendahkan martabat. Sering kali mereka menghadapi api yang membara jika berusaha menyusuri ruang bawah tanah. Gaza telah menjadi “koloni hukuman” atau “pulau iblis, Alcatraz,” ala Israel, demikian ditulis kolumnis terkenal Nahum Barnea.

Seperti di Amerika Tengah, kondisi memburuk dengan stabil sampai 1990-an.<sup>41</sup> Proposal Clinton-Barak pada musim panas 2000 di Kamp David dipuji secara berlebihan sebagai sikap “dermawan” dan “murah hati”, dan tampaknya mereka memang menawarkan perbaikan. Saat itu, orang-orang Palestina dikurung di lebih dari 200 wilayah kantong kecil di Tepi Barat. Bill Clinton dan Ehud Barak dengan murah hati menawarkan untuk mengurangi jumlahnya menjadi tiga kantong, yang secara efektif terpisah satu sama lain dan terpencil dari pusat kehidupan, budaya, dan komunikasi rakyat Palestina di Jerusalem Timur. Entitas Palestina kemudian akan menjadi “tanah jajahan” neokolonial yang akan menjadi

“permanen”, demikian Menteri Luar Negeri Barak menggambarkan tujuan proses Oslo, mengulangi pengamatan Moshe Dayan 30 tahun sebelum pendudukan itu “permanen”. Di Gaza, sebaris tembok dibangun pada musim panas 2002 untuk mengurung penduduk, dengan palang bagian dalam yang dapat dilintasi, jika ada yang mau, setelah pelecehan jangka panjang dan penghinaan yang disengaja terhadap orang-orang yang ingin mencapai rumah sakit, mengunjungi kerabat, pergi ke sekolah, mencari pekerjaan, mengirim barang, atau sebaliknya, bertahan dalam ruang bawah tanah. Jika tindakan semacam itu dapat memulihkan monopoli kekerasan dan teror yang sebelumnya dinikmati rezim sekutu Washington, kebijakan di Tepi Barat juga akan dianggap sukses.

Pada pertengahan 2002, World Food Programme<sup>42</sup> PBB mencari dukungan donor untuk program pemberian makan setengah juta rakyat Palestina yang menderita kelaparan dan kekurangan gizi, karena “semakin banyak keluarga di wilayah yang diduduki Israel dipaksa untuk tidak makan atau mengurangi asupan makanan mereka,” WFP memperingatkan, mengantisipasi bahwa situasinya akan memburuk karena Israel mencegah pengiriman barang secara bebas di delapan daerah yang dibangun dalam “koloni hukuman”.<sup>43</sup>

Seperti model Gaza, tembok Tepi Barat akan “semi-permeabel”. IDF, pemukim Yahudi, dan turis asing dapat bebas bepergian ke segala arah, tetapi bukan “makhluk biasa” yang hidupnya “tidak bernilai” bagi penguasa.



Selama orang-orang penting tetap kebal, nasib korban bisa diabaikan. Jika lantas mendongakkan kepala, mereka harus diajari soal kepatuhan. Kekerasan biasanya menjadi pilihan pertama, karena itulah terorisme internasional yang disokong negara menjadi wabah yang merajalela. Jika gagal, cara lain harus dipertimbangkan. Semasa Intifadah pertama bahkan pendukung teror ekstrem Israel sudah mulai menyerukan penarikan sebagian pasukan karena kerugian yang dialami.

Pada hari-hari awal Intifadah kedua, pembunuhan ratusan orang Palestina dan hukuman kolektif skala besar tidak menghalangi pengiriman helikopter baru dan senjata teror lainnya. Namun saat Intifadah berbalik lepas kendali, menjangkau Israel sendiri, langkah-langkah baru diambil. Presiden Bush bahkan memproklamasikan “visinya” tentang sebuah negara Palestina yang diakui, dan menuai pujian, saat tampak mendekati (dari bawah) sikap kubu rasis di Afrika Selatan 40 tahun sebelumnya, yang tidak hanya memiliki “visi” negara yang dikelola orang kulit hitam, tetapi benar-benar menerapkannya.

Hanya saja, bagaimana dan di mana negara itu akhirnya terwujud tetap menjadi pertanyaan terbuka. House Majority Leader, Dick Armey, mengamati bahwa “ada banyak bangsa Arab” yang memiliki banyak “tanah dan properti dan kesempatan untuk menciptakan sebuah negara Palestina”, sehingga Israel harus “merebut seluruh Tepi Barat” dan “orang-orang Palestina harus pergi”. Rekan-rekannya menyatakan betapa ada banyak orang Yahudi di New York dan Los Angeles dan negara terkaya

di dunia yang tidak akan keberatan menyerap beberapa juta orang atau lebih, dan memecahkan masalah. Di seberang spektrum yang berlawanan, Anthony Lewis memuji “tentara tua yang tidak sentimental” Yitzhak Rabin, seorang pria yang “dengan segenap kejujuran intelektual” bersedia menandatangani Perjanjian Oslo. Namun, kubu sayap kanan Israel, tidak seperti Rabin, “menentang solusi yang akan menjadikan Palestina negara yang layak—kecil, tak bersenjata, miskin, didominasi Israel, tetapi milik mereka sendiri”. Itulah “inti permasalahannya”, dan jika visi luhur Rabin gagal, proses perdamaian akan mati.<sup>44</sup>

Sementara itu, teror negara tetap menjadi alat kontrol yang disetujui. Pada hari-hari pertama Intifadah, Israel menggunakan helikopter AS untuk menyerang warga sipil, membunuh dan melukai puluhan orang. Clinton menanggapi dengan pengiriman helikopter militer terbesar dalam 1 dekade, dan pengiriman berlanjut saat Israel mulai menggunakannya untuk pembunuhan politik dan tindakan teroris lainnya. AS bersikukuh menolak untuk mengizinkan pengawas internasional, yang kehadirannya akan cenderung mengurangi kekerasan. Desember 2001, bersamaan dengan aksi veto atas resolusi lain Dewan Keamanan yang meminta pengiriman pengawas, pemerintah Bush mengambil langkah lebih lanjut untuk “meningkatkan teror” (kejahatan Arafat, menurut Presiden) dengan merongrong upaya internasional menghentikan “pelanggaran berat” Israel terhadap Konvensi Jenewa Keempat.

Gambaran sikap umum diungkapkan dengan baik oleh Presiden dalam pernyataan politik utama mengenai konflik Arab-Israel 24 Juni 2002: prinsip panduannya hanyalah “pemimpin yang tidak berkompromi dengan teror” akan diterima dalam proses diplomatik yang dijalankan AS. Ariel Sharon secara otomatis memenuhi syarat tersebut, sekalipun fakta yang tampaknya tidak menimbulkan komentar, meskipun beberapa orang meringis saat Presiden menyatakan dirinya “pencinta perdamaian”—seperti ditunjukkan catatan 50 tahun kekejaman teroris yang dilakukannya. Tidak ada pemimpin AS yang bisa berkompromi, berdasarkan pengertian ini.

Dan, para pemimpin Palestina harus memenuhi permintaan tuannya agar kekerasan dan represi mereka semata ditujukan terhadap binatang berkepala dua lainnya, seperti pada masa lalu, ketika praktik ini mendapat dukungan dan pengakuan dari aliansi AS-Israel sepanjang tahun-tahun perjanjian Oslo. Jika menyimpang dari misi tersebut atau kehilangan kendali, mereka harus disingkirkan dan digantikan oleh boneka yang lebih dapat diandalkan, diutamakan lewat proses pemilihan yang bisa disebut “bebas” jika orang yang tepat menang.

Prinsip dasar tentang teror telah diuraikan secara terbuka oleh negarawan yang jujur: Winston Churchill, misalnya. Ia memberi tahu Parlemen sebelum Perang Dunia I bahwa,

kita bukan anak muda yang lugu dan punya sedikit warisan. Kita telah asyik dengan diri sendiri ... menikmati kekayaan dan perdagangan dunia dengan cara yang sama sekali tidak proporsional. Kita mendapatkan semua yang diinginkan di wilayah ini, dan tuntutan kita untuk dibiarkan menikmati harta yang melimpah dan mewah, terutama didapatkan dengan kekerasan, dan sebagian besar dipertahankan dengan paksa, sering kali tampak kurang masuk akal bagi orang lain.

Seiring kemenangan AS dan Inggris pada 1945, Churchill menarik kesimpulan yang tepat berdasarkan pengamatan realistiknya:

pemerintahan dunia harus dipercayakan kepada negara-negara yang berkecukupan, yang tidak menginginkan apa pun untuk dirinya sendiri lebih dari apa yang sudah mereka miliki. Jika pemerintahan dunia berada di tangan negara-negara yang kelaparan, selalu ada bahaya. Namun, tak satu pun dari kita punya alasan untuk mencari lebih banyak lagi. Kedamaian akan dijaga oleh orang-orang yang hidup dengan cara mereka sendiri dan tidak ambisius. Kekuatan kita menempatkan kita di atas yang lain. Kita seperti orang kaya yang hidup tenang di lingkungannya.<sup>45</sup>

Pihak lain yang telah mendapatkan “harta yang melimpah ruah”, serta tidak terlalu beradab, memahami prinsip Churchillian dengan baik. Pemerintahan Kennedy dan Reagan dianggap berada di kutub berlawanan dalam spektrum politik AS, tetapi terkait hal ini keduanya sama. Keduanya mengakui kebutuhan untuk menggunakan teror guna memastikan subordinasi demi orang kaya yang ingin menikmati hartanya tanpa gangguan. Setelah beberapa bulan menjabat, Kennedy memerintahkan agar “teror dunia” menerjang Kuba sampai Fidel Castro tersingkir. Terorisme berskala besar berlanjut sepanjang masa pemerintahan Kennedy. Ia menyetujui operasi teror 10 hari sebelum pembunuhannya. Alasannya jelas dan nyata: Kuba telah mendongakkan kepalanya. Dan, yang lebih buruk lagi, Kuba memberikan “contoh dan rangsangan umum” yang mungkin “mendorong agitasi dan perubahan radikal” di bagian lain Amerika Latin, tempat “kondisi sosial dan ekonomi ... memicu oposisi terhadap otoritas penguasa”.

Yang menjadi masalah bukan langkah yang diambil Castro. Sebaliknya, para intelektual Kennedy menyadari bahwa “eksistensi rezimnya (Castro) ... merepresentasikan pembangkangan yang berhasil terhadap AS, semacam negasi dari seluruh kebijakan kita di sepenjuru dunia selama hampir setengah abad”, berdasarkan asas subordinasi atas kehendak Colossus of the North<sup>46</sup>. Penasihat Kennedy memperingatkan Presiden yang akan datang bahwa ancaman yang ditimbulkan Castro adalah “penyebaran gagasan Castro untuk mengatasi masalah

dengan bertumpu pada diri sendiri”, sebuah bahaya besar ketika “pembagian tanah dan bentuk kekayaan nasional lainnya sangat menguntungkan kelas atas .... [Dan] Orang miskin dan kurang mampu, dengan dirangsang contoh revolusi Kuba, sekarang menuntut kesempatan untuk hidup layak”.<sup>47</sup>

Bahkan tanpa ancaman contoh yang bagus, “pembangkangan yang sukses terhadap AS” tidak dapat ditoleransi. Secara umum, upaya “mempertahankan kredibilitas” menjadi prinsip utama perundang-undangan dan standar justifikasi resmi untuk setiap kebijakan. Jika dunia sungguh menakutkan, akan sangat menguntungkan. Para ahli rencana Reagan memperingatkan Eropa bahwa jika mereka tidak bergabung dalam “perang melawan teror” Washington, “orang-orang Amerika yang nekat” mungkin “menanggapi masalah dengan caranya sendiri”. Pers memuji keteguhan sikap berani ini dalam menyeret “pengecut” Eropa ke medan laga. Strategic Command<sup>48</sup> Clinton menyarankan bahwa “bagian dari kepribadian nasional yang kita tonjolkan” harus berupa kekuatan “irasional dan pendendam”, dengan beberapa elemen yang “berpotensi ‘tidak terkendali’”.

Sejumlah pakar hubungan internasional terkemuka telah memperingatkan sejak 1980-an bahwa AS dianggap oleh banyak orang sebagai “negara adidaya kurang ajar” dan ancaman serius bagi keberadaan mereka. Namun, itu semua untuk kebaikan, kendati menimbulkan ketakutan dan subordinasi.

Pembuat kebijakan terkini—banyak di antara mereka tumbuh besar pada periode Reagan—cukup blakblakan terkait sikap ini. Ketika mengunjungi AS pada April 2002—untuk mendesak Washington agar memperhatikan kesulitan yang dihadapi para sekutunya di dunia Arab akibat dukungan terhadap teror dan penindasan Israel—Pangeran Saudi Abdullah secara terang-terangan diberi tahu bahwa kekhawatirannya bukanlah masalah: “Ide dasarnya adalah, jika menurutnya kita cukup kuat dalam Desert Storm (nama sandi untuk Perang Teluk 1990—1991), hari ini kita sepuluh kali lebih kuat,” kata seorang pejabat. “Ini untuk memberinya pemahaman tentang apa yang bisa kita lakukan di Afghanistan.”

Pemikiran di level atas Departemen Pertahanan diuraikan Jay Farrar, mantan pejabat senior Departemen Pertahanan yang mengarahkan proyek khusus di Center for Strategic and International Studies, lembaga pemikir moderat Washington: jika AS “tegas, tangguh, bertekad bulat, terutama di sepenjuru dunia, seluruh dunia akan menghormati kita atas ketangguhan kita dan tidak mengganggu kita.”<sup>49</sup>

Ringkasnya, enyahlah. Kamu ikut kami, atau melawan kami, seperti dikatakan Presiden. Dan, jika tidak mengikut kami, kamu akan hancur lebur. Itulah sebabnya kita mengebom negara seperti Afghanistan: memberi para pembangkang pemahaman tentang hal-hal yang dapat kita lakukan jika seseorang menghalangi kita. Konsekuensi untuk terorisme hanya kepentingan sekunder. Faktanya, intelijen AS menyimpulkan

pengeboman di Afganistan mungkin malah meningkatkan ancaman tersebut dengan membuat jaringan Al-Qaeda terpecah dan memicu orang lain menjadi seperti itu. Lebih lanjut, seperti disebutkan sebelumnya, 9 bulan setelah 9/11, intelijen AS tidak tahu banyak tentang sumber serangan, masih hanya “percaya” bahwa gagasan tersebut mungkin tumbuh berkembang di Afganistan, meskipun bukan bagian dari implementasi dan perencanaan.<sup>50</sup> Di bawah norma yang berlaku untuk kelompok elite dan penguasa, hal itu sudah cukup untuk membenarkan pengeboman terhadap orang-orang yang tidak bersalah dan memunculkan pernyataan yang fasih tentang penghormatan para pemimpin kita terhadap prinsip tertinggi moralitas dan hukum internasional.

Indikasinya, “perang melawan teror” fase baru ini akan menyerupai yang sebelumnya, dan banyak kejadian terorisme negara lain yang tidak dipahami secara Orwellian. Meskipun demikian, ada perbedaan penting. Dalam kasus sekarang, perang kembali dinyatakan sebagai tanggapan atas kekejaman teroris yang sebenarnya dan sangat serius, bukan dalih yang dikarang. Namun, institusinya tetap stabil, dan kebijakan yang mereka keluarkan cenderung mengambil bentuk serupa, disesuaikan dengan keadaan baru. Salah satu ciri yang tetap adalah doktrin Churchillian: kelompok elite dan penguasa memiliki hak agar bisa hidup tenang untuk menikmati apa yang telah mereka dapatkan, sering kali dengan kekerasan dan teror. Sisanya dapat diabaikan selama mereka menderita dalam keheningan. Namun, jika



mereka mengganggu kehidupan orang-orang yang menguasai dunia sesuai haknya, “teror dunia” akan menyapa mereka dengan angkara murka yang berterima, kecuali kekuasaan bisa dikekang dari dalam.

Lima bab pertama di bawah ini berkaitan dengan “perang melawan teror” tahap pertama, selama pemerintahan Reagan-Bush (pertama). Kata pengantar dan tiga bab pertama merupakan bagian dari terbitan awal: *Pirates and Emperors* (Claremont, 1986). Bab 1 dikhususkan untuk kerangka konseptual tempat isu ini dan persoalan lain yang terkait dikemas dalam sistem doktrin rezim penguasa. Bab 2 menyajikan contoh—hanya contoh—terorisme Timur Tengah di dunia nyata, serta sejumlah bahasan tentang gaya apologetika yang digunakan untuk memastikan hal itu berlangsung tanpa hambatan. Bab 3 beralih pada peran yang dimainkan Libia dalam sistem doktrin pada periode tersebut. Bab 4 muncul dalam edisi 1987, *Pirates and Emperors* (Black Rose, Montreal); ini transkrip pidato utama di Arab Association of University Graduates Convention, 15 November 1986. Bab 5 (Juli 1989) muncul dalam terbitan yang diedit Alexander George, *Western State Terrorism* (1991).

Adapun Bab 6 beralih ke fase kedua “perang melawan teror”, yang dikumandangkan kembali setelah 9/11. Ulasannya didasarkan pada ceramah dalam konferensi The American Friends Service Committee, Tufts University’s Peace and Justice Studies Program, dan Peace Coalition dengan tema “After September 11: Paths to Peace, Justice and Security”, Tufts University, 8

Desember, 2001. Dan Bab 7—seperti Bab 4—menyoal kebijakan AS di Timur Tengah. Ini pengantar untuk buku Roane Carey, *The New Intifada* (2001).

Beberapa bagian dari Bab 1 muncul di *Utne Reader*, Februari—Maret 1986, *Index on Censorship* (London, Juli 1986), dan *Il Manifesto* (Roma, 30 Januari 1986). Nukilan Bab 2 muncul di *Race & Class* (London, Musim Panas 1986), dan versi lain di Michael Sprinker, editor, *Negations: Spurious Scholarship and the Palestinian Question* (Verso, 1987). Bab ini juga ada di karya yang diedit Edward Said dan Christopher Hitchens, *Blaming the Victims* (Verso, 1988). Sedangkan Bab 3 merupakan versi yang diubah dan diperpanjang dari artikel di *Covert Action Information Bulletin*, Musim Panas 1986. Versi awal artikel ini dimuat di *New Statesman* (London), *ENDpapers* (Nottingham), *El Pais* (Madrid), dan di Italia, Meksiko, Uruguay, dan tempat lain. Beberapa bagian dari Bab 2 dan Bab 3 juga termasuk dalam makalah saya, “International Terrorism: Image and Reality”, yang disampaikan pada konferensi Frankfurt tentang Terorisme Internasional, April 1986, dan diterbitkan dalam *Crime and Social Justice* edisi 27—28, 1987, yang panjang lebar mengulas topik ini.

Bab-bab tersebut telah diedit untuk menyisihkan hal-hal yang tidak relevan lagi, redudansi, dan semacamnya. Sepanjang bahasan, istilah-istilah seperti saat ini, baru-baru ini, dan lainnya mengacu pada waktu publikasi. Saya memang tidak memperbarui catatan untuk menyertakan keterangan yang relevan setelah proses penerbitan.

# 1

## Pengendalian Pikiran: Kasus Timur Tengah

---

**D**ARI perspektif komparatif, Amerika Serikat tergolong tidak biasa, jika bukan satu-satunya, dalam hal minimnya pengekanan terhadap kebebasan berekspresi. Juga tidak biasa dalam hal jangkauan dan efektivitas metode yang digunakan untuk mengendalikan kebebasan berpikir. Kedua fenomena itu saling terkait. Teoretikus demokratik liberal sejak lama mengutarakan bahwa pada masyarakat yang suara rakyatnya didengar, kelompok elite harus memastikan suara tersebut mengatakan hal yang tepat. Semakin sedikit kemampuan negara menggunakan kekerasan dalam membela kepentingan kelompok elite, semakin penting untuk merancang teknik “fabrikasi persetujuan”, dalam kata-kata Walter Lippmann lebih dari 60 tahun silam, atau “rekayasa persetujuan”, dalam ungkapan yang lebih disukai Edward Bernays, salah satu perintis industri

kehumasan Amerika Serikat.

Dalam entri “propaganda” di *Encyclopedia of the Social Sciences* 1933, Harold Lasswell menjelaskan betapa kita tidak boleh menyerah pada “dogmatisme demokratis tentang manusia sebagai hakim terbaik untuk kepentingan mereka sendiri”. Kita harus menemukan cara untuk memastikan mereka mendukung keputusan yang dibuat para pemimpin yang berwawasan ke depan—pelajaran yang telah dipetik jauh sebelumnya oleh elite dominan, bangkitnya industri kehumasan menjadi ilustrasi terbaik untuk hal ini. Bila kepatuhan dijamin oleh kekerasan, penguasa mungkin cenderung mendekati konsepsi “behavioris”<sup>51</sup>: cukup membuat orang-orang bersikap patuh; tidak masalah apa pun isi pikiran mereka. Namun, jika negara tak memiliki sarana pemaksaan yang memadai, penting untuk mengendalikan isi pikiran orang banyak.<sup>52</sup>

Sikap itu lazim bagi kalangan intelektual di seluruh spektrum politik, dan secara teratur dipertahankan saat mereka beralih lintas spektrum sesuai tuntutan keadaan. Salah satu versinya diungkapkan moralis dan analis politik yang disegani, Reinhold Niebuhr, saat menulis pada 1932—dari sudut pandang kiri Kristen—mengingat “kebodohan orang kebanyakan”, adalah tanggung jawab “pengamat ahli” untuk memberi “ilusi yang diperlukan” guna menyediakan keyakinan yang harus ditanamkan di benak mereka yang kurang tercerahkan.<sup>53</sup> Doktrin ini juga dikenal dalam versi Leninis, seperti pada ilmu sosial

Amerika Serikat dan pandangan liberal umumnya. Pertimbangkan pengeboman Libia, pada April 1986.

Kita membaca tanpa terkejut bahwa inilah kesuksesan fungsi kehumasan di Amerika Serikat. Ini “dijalankan dengan baik di Peoria” dan “dampak politik positifnya” akan “memperkuat pengaruh Presiden Reagan dalam berurusan dengan Kongres mengenai isu-isu seperti anggaran militer dan bantuan untuk ‘Contras’<sup>54</sup> Nikaragua”. “Kampanye publik semacam ini merupakan esensi dari keterampilan sosok negarawan,” demikian menurut Dr. Everett Ladd, pakar opini publik, yang menambahkan bahwa seorang presiden “harus terlibat dalam rekayasa persetujuan demokratis,”—Orwellisme yang lazim menginspirasi di bidang kehumasan dan lingkungan akademik untuk merujuk pada metode yang merongrong partisipasi demokratis sejati dalam membentuk kebijakan publik.<sup>55</sup>

Masalah “rekayasa persetujuan demokratis” mencuat ketika kebijakan negara tidak dapat dipertahankan, dan menjadi serius sesuai tingkat kegentingan isu tersebut. Tidak ada keraguan tentang keseriusan persoalan yang muncul di Timur Tengah, terutama konflik Arab-Israel, yang biasanya—dan masuk akal—mungkin dianggap seperti “api dalam sekam” yang dapat memicu perang nuklir karena konflik regional ini melibatkan negara adidaya, seperti nyaris terjadi pada masa lalu. Lebih jauh lagi, kebijakan AS berkontribusi nyata untuk mempertahankan konfrontasi militer dan didasarkan pada asumsi rasis yang tidak dapat ditoleransi jika

dinyatakan secara terbuka. Ada juga perbedaan yang mencolok antara sikap publik, yang umumnya mendukung negara Palestina tampak dalam jajak pendapat, dan kebijakan negara, yang secara terbuka menolak opsi ini<sup>56</sup>, meskipun perbedaannya tipis karena elemen-elemen yang aktif dan artikulatif secara politik mempertahankan langkah yang tepat.

Untuk memastikan hasil ini, perlu dilakukan apa yang oleh sejarawan Amerika disebut “rekayasa sejarah” ketika mengabdikan pada pemerintahan Wilson selama Perang Dunia I, dalam salah satu praktik awal “pembuatan persetujuan” yang terorganisasi. Ada berbagai macam cara untuk mencapai hasil ini yang diinginkan.

Salah satunya, menyusun Newspeak (bahasa fiksi dalam novel 1984, George Orwell) yang tepat, dengan sejumlah istilah penting yang memiliki pengertian teknis, terpisah dari makna umumnya. Perhatikan, misalnya, istilah “proses perdamaian”. Dalam pengertian teknisnya, seperti digunakan di media massa dan dunia akademik di Amerika Serikat, istilah ini mengacu pada proposal perdamaian yang diajukan pemerintah AS. Mereka yang berpikir lurus niscaya berharap Yordania akan bergabung dalam proses perdamaian; yaitu dengan menerima perintah AS. Pertanyaan besarnya, apakah PLO setuju untuk bergabung dalam proses perdamaian, atau diperkenankan mengikuti proses ini?

Judul besar seputar “proses perdamaian” oleh Bernard Gwertzman di *New York Times* berbunyi: “Are the Palestinians Ready to Seek Peace? [Apakah Rakyat

Palestina Siap Mengupayakan Perdamaian?]"<sup>57</sup> Dalam arti normal istilah “damai”, jawabannya tentu saja, “Ya”. Semua orang mencari kedamaian, sesuai ketentuan mereka sendiri; Hitler, misalnya, pasti mencari kedamaian pada 1939, menurut ketentuannya. Namun, dalam sistem pengendalian pikiran, pertanyaan itu berarti sesuatu yang lain: Apakah rakyat Palestina siap menerima persyaratan damai dari AS? Dan, berbagai persyaratan ini dibuat dengan menyangkal hak mereka sebagai bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Namun, keengganan untuk menerimanya akan menunjukkan betapa rakyat Palestina tak mau mengupayakan perdamaian, dalam pengertian teknis.

Camkan bahwa tidak perlu bagi Gwertzman untuk bertanya apakah Amerika Serikat atau Israel “siap untuk mengupayakan perdamaian”. Bagi AS, hal ini benar secara definisi, dan konvensi jurnalisme yang bertanggung jawab mensyaratkan hal yang sama harus berlaku pula bagi negara sekutu yang penurut.

Gwertzman menegaskan lebih lanjut bagaimana PLO selalu menolak “pembicaraan tentang perdamaian yang dinegosiasikan dengan Israel”. Itu keliru, tetapi memang benar di dunia “penuh ilusi” yang dibangun Surat Kabar Resmi, yang, bersama surat kabar lain yang bertanggung jawab, telah menyembunyikan fakta relevan atau memindahkannya ke lubang memori Orwell.

Tentu saja, ada proposal perdamaian Arab, termasuk usulan PLO, tetapi bukan bagian dari “proses perdamaian”. Jadi, dalam tinjauan ulang “Two Decades of

Seeking Peace in the Middle East”, koresponden *Times* di Jerusalem, Thomas Friedman, mengecualikan proposal perdamaian dari dunia Arab (termasuk PLO). Tidak ada usulan Israel dalam daftar tersebut karena memang tidak ada yang diajukan secara serius—sebuah fakta yang tidak dibahas lebih lanjut.<sup>58</sup>

Bagaimana isi “proses perdamaian” resmi dan proposal Arab yang dikecualikan itu? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus mengklarifikasi istilah teknis lain: “penolakan”. Dalam penggunaan Orwellian, istilah ini mengacu secara eksklusif pada posisi orang-orang Arab yang menolak hak penentuan nasib sendiri sebagai bangsa bagi orang Yahudi Israel, atau yang menolak untuk menerima *right to exist*, “hak mengada” bagi Israel, konsep baru yang dengan cerdas dirancang untuk menghalangi orang-orang Palestina dari “proses perdamaian” dengan menunjukkan “ekstremisme” kubu yang menolak mengakui keadilan atas apa yang mereka lihat sebagai perampokan tanah air mereka, dan kubu yang mendesak pandangan tradisional—pandangan yang diadopsi oleh sistem ideologis di Amerika Serikat serta praktik internasional yang berlaku berkaitan dengan setiap negara selain Israel—bahwa walaupun hak negara diakui dalam tatanan internasional, “hak mengada” yang abstrak itu tidak dikenal.

Ada sejumlah elemen di dunia Arab yang disebut dengan istilah “para penolak”: Libia, front minoritas di PLO, dan lainnya. Namun, perlu diperhatikan betapa di Newspeak resmi istilah ini digunakan dalam pengertian



yang sangat rasistis. Toh, menyanggah asumsi semacam itu, kita menemukan dua kelompok yang mengklaim hak penentuan nasib sendiri di bekas wilayah Palestina: penduduk asli dan pemukim Yahudi yang sebagian besar mengambil alih tempat mereka, adakalanya dengan kekerasan. Rupanya, penduduk asli memiliki hak yang sama dengan imigran Yahudi (beberapa mungkin berpendapat bahwa ini tidak tepat, tetapi saya mengesampingkannya). Jika demikian, istilah “penolakan” harus digunakan untuk merujuk pada penolakan hak penentuan nasib sendiri terhadap salah satu bangsa tersebut. Namun, istilah ini tidak dapat digunakan dalam pengertian nonrasistis pada sistem doktrin AS, atau akan segera terlihat bagaimana AS dan Israel memimpin kubu penolakan.

Dengan uraian ini, kita dapat beralih ke pertanyaan berikut: apakah “proses perdamaian” itu?

“Proses perdamaian” resmi secara tegas ditolak, termasuk oleh Amerika Serikat dan kedua kelompok politik utama di Israel. Penolakan mereka sebenarnya sangat ekstrem hingga rakyat Palestina bahkan tidak diizinkan untuk memilih wakilnya sendiri dalam negosiasi mengenai nasib mereka—sama seperti mereka tidak dibolehkan mengikuti pemilihan wali kota atau bentuk demokrasi lainnya di bawah pendudukan militer Israel.

Apakah ada usulan perdamaian dari luar kubu penolak yang dibahas? Dalam sistem doktrin AS, jawabannya tentu saja, “Tidak”. Di dunia nyata, situasinya berbeda. Ketentuan dasar dari proposal ini sudah tidak asing lagi,

mencerminkan konsensus internasional: mencakup sebuah negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza di samping Israel dan prinsip bahwa “penting untuk menjamin keamanan dan kedaulatan semua negara di wilayah ini, termasuk Israel”.

Kalimat di atas dikutip dari Leonid Brezhnev dalam pidato Kongres Partai Komunis Soviet pada Februari 1981, mengekspresikan posisi Soviet yang konsisten. Pidato Brezhnev dikutip di *New York Times* dengan sejumlah bagian penting dihilangkan, diselingi pernyataan Reagan pasca-konferensi di Pravda yang menimbulkan amarah. Pada April 1981, pernyataan Brezhnev dengan suara bulat didukung PLO, tetapi faktanya tidak dilaporkan di *Times*. Doktrin resmi menyatakan bahwa Uni Soviet, seperti biasa, hanya ingin menimbulkan masalah dan menghalangi perdamaian, dan dengan demikian mendukung penolakan serta ekstremisme Arab. Media pun patuh menjalankan peran yang diembannya.

Kita bisa mengutip contoh lain. Pada Oktober 1977, pernyataan bersama Carter-Brezhnev menyerukan “penghentian perang dan pengukuhan hubungan damai yang normal” antara Israel dan tetangganya. Ini disetujui PLO, tetapi dibatalkan Carter setelah reaksi marah Israel dan lobi pejabat pendukungnya. Januari 1976, Yordania, Suriah, dan Mesir sudah mendukung usulan untuk penyelesaian dua negara yang dibahas panjang lebar oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi tersebut memasukkan kata-kata penting dari UN 242, dokumen utama diplomasi yang relevan, menjamin hak

setiap negara bagian di wilayah ini “untuk hidup damai dalam batas-batas yang aman dan diakui.” Proposal tersebut pun diterima PLO; bahkan menurut Presiden Israel Chaim Herzog (kemudian Duta Besar PBB), “disiapkan” oleh PLO. Toh, kendati mendapat dukungan hampir seluruh dunia, proposal itu diveto Amerika Serikat.<sup>59</sup>

Sebagian besar narasi ini telah dihapus dari sejarah, baik dalam dunia jurnalistik maupun akademik. Inisiatif internasional pada 1976 bahkan tidak disebutkan dalam tinjauan yang luar biasa hati-hati oleh Seth Tillman di buku *The United States and the Middle East* (Indiana, 1982). Namun, Steven Spiegel dalam *The Other Arab-Israel Conflict* (Chicago, 1985, hlm. 306)—karya akademik yang sangat dikagumi—menyinggungnya dengan disertai sejumlah catatan menarik. Spiegel menulis bahwa AS “memveto resolusi pro-Palestina” untuk “menunjukkan betapa Amerika Serikat bersedia mendengarkan aspirasi Palestina, tetapi tidak akan menyetujui tuntutan yang mengancam Israel”.

Komitmen terhadap penolakan AS-Israel amat gamblang, dan diterima sebagai kewajiban di Amerika Serikat, sejalan dengan prinsip bahwa tuntutan yang mengancam rakyat Palestina sepenuhnya sah, bahkan patut dipuji: misalnya istilah dan ketentuan “proses perdamaian” resmi. Dalam diskusi publik, berkembang doktrin betapa negara Arab dan PLO tidak akan mengubah pendiriannya untuk mencapai kata sepakat dengan Israel lewat cara apa pun, kecuali Anwar Sadat,

yang menempuh perjalanan ke Jerusalem pada 1977. Fakta-fakta harus dijaga, dari gangguan ringan sekalipun, demi sistem “rekayasa sejarah” yang berfungsi dengan baik.

Reaksi Israel terhadap proposal perdamaian 1976 yang didukung PLO dan “negara-negara konfrontasi” Arab adalah mengebom Lebanon (tanpa dalih “aksi balasan”, kecuali terhadap Dewan Keamanan PBB), menewaskan lebih dari 50 orang, dan mengumumkan bahwa Israel tidak akan melakukan perjanjian apa pun dengan orang Palestina dalam masalah politik apa pun.

Adalah pemerintahan Partai Buruh yang lunak pimpinan Yitzhak Rabin, yang dalam memoarnya mengidentifikasi dua bentuk “ekstremisme”: pemerintahan Begin, dan usulan “ekstremis Palestina (pada dasarnya PLO)”, yaitu, “untuk menciptakan negara Palestina yang berdaulat di Tepi Barat dan Jalur Gaza”. Hanya Partai Buruh yang menyebut penolakan ini menyimpang “ekstremisme”, sudut pandang yang juga dimiliki para pengamat Amerika Serikat.<sup>60</sup>

Kita sudah mencatat sepasang konsep Newspeak lain: “ekstremis” dan “moderat”. Konsep yang terakhir merujuk kepada mereka yang menerima posisi Amerika Serikat, sementara yang pertama kepada mereka yang menolaknya. Maka, posisi Amerika Serikat disebut moderat, seperti koalisi Partai Buruh Israel (umumnya), karena retorika yang cenderung mirip Amerika Serikat. Rabin pun mengikuti praktik yang lazim dalam penggunaan istilah “moderat” dan “ekstremis”.

Demikian pula, dalam tinjauan yang memprihatinkan atas “ekstremisme” dan kemapanannya, koresponden *New York Times* di Israel, Thomas Friedman, memasukkan ke himpunan ini para pengajur penyelesaian nonrasis sesuai dengan konsensus internasional, sementara para pemimpin Barat di kubu para penolak, yang juga memimpin komando dalam operasi teroris, adalah kelompok “moderat”; sesuai definisinya. Friedman menulis, “Para ekstremis selalu jauh lebih baik dalam mengeksploitasi media.” Ia benar sekali. Israel dan AS telah menunjukkan penguasaan seni ini tanpa tandingan, seperti ditunjukkan artikel dan laporan beritanya sendiri.<sup>61</sup> Versi sejarah yang sesuai kebutuhan dan kerangka konseptual laporannya, seperti baru saja diuraikan, menunjukkan segelintir dari sekian banyak contoh keberhasilan ekstremis dalam “mereksploitasi media”—sekarang istilah tersebut digunakan dalam arti harfiah.

Mengadopsi kerangka konseptual ini, yang dirancang untuk menyingkirkan pemahaman akan fakta dan masalah, *Times* mengikuti praktik orang Israel seperti Rabin, yang mencapai status “moderat” berdasarkan kesesuaian umum dengan tuntutan pemerintah AS. Sejalan dengan itu, menjadi wajar bahwa ketika meninjau “Two Decades of Seeking Peace in the Mideast [Dua Dekade Mencari Perdamaian di Timur Tengah]”, Friedman mengabaikan proposal utama yang ditolak AS dan Israel karena tidak sesuai untuk catatan sejarah, sedangkan para pemimpin Israel dipuji editor *Times* karena

“pragmatisme sehat” mereka, dan PLO dikecam karena bergeming di jalan perdamaian.<sup>62</sup>

Selain itu, sebagai bagian pokok dari sistem ideologis ini, media adakalanya sangat kritis terhadap Israel dan AS dan kelewat toleran terhadap ekstremis Arab. Fakta bahwa pernyataan semacam itu dapat diajukan tanpa menimbulkan cemoohan menjadi tanda lain keberhasilan sistem indoktrinasi yang luar biasa.

Kembali menyoal “ekstremis” resmi, pada April—Mei 1984, Yasser Arafat melontarkan serangkaian pernyataan untuk mendesak negosiasi yang mengarah pada sikap saling mengakui. Pers nasional menolak memublikasikan fakta itu; *Times* bahkan mengabaikan berbagai surat yang dikirim kepada mereka, sambil terus mengecam Arafat sebagai “ekstremis” karena menghalangi penyelesaian damai.<sup>63</sup>

Contoh ini dan banyak lagi lainnya menunjukkan adanya usulan dari luar kubu penolak yang mendapat dukungan luas; dengan beberapa variasi, oleh sebagian besar Eropa, Uni Soviet, negara-negara nonblok, negara-negara Arab dan sebagian besar faksi PLO, dan mayoritas opini publik Amerika Serikat (seperti dalam beberapa jajak pendapat). Namun, mereka bukan bagian dari proses perdamaian karena pemerintah AS menentanginya. Contoh-contoh yang dikutip dikecualikan dari tinjauan “Two Decades of Seeking Peace” di *Times*, dan dari karya jurnalis dan literatur ilmiah secara umum.

Ada insiden lain yang tidak memenuhi syarat sebagai bagian dari proses perdamaian. Maka, tinjauan *Times* pun

tidak menyebutkan tawaran Anwar Sadat mengenai perjanjian damai sepenuhnya di perbatasan yang diakui secara internasional—sesuai kebijakan resmi AS saat itu—pada Februari 1971, yang ditolak Israel dengan dukungan AS. Camkan bahwa usulan ini termasuk kategori kubu penolak karena tidak menawarkan apa pun bagi rakyat Palestina. Dalam memoarnya, Henry Kissinger menjelaskan pemikirannya saat itu: “Sampai negara-negara Arab menunjukkan keinginan untuk memisahkan diri dari Soviet, atau Soviet bersiap memisahkan diri dari program Arab terbesar, kita tidak memiliki alasan untuk mengubah kebijakan” dari “keadaan tanpa solusi”.

Uni Soviet adalah ekstremis, dalam pengertian teknis, mendukung apa yang sebenarnya merupakan kebijakan resmi AS (meski tidak berlaku), yang terasing dari “program Arab terbesar”. Kissinger benar saat mengatakan negara Arab seperti Arab Saudi menolak untuk “berpisah dari Soviet”, meskipun ia tidak mengamati, dan tampaknya tidak menyadari, bahwa ini cukup absurd: Arab Saudi bahkan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Uni Soviet dan tidak pernah melakukannya. Disiplin media dan kajian akademik yang mengesankan terungkap lewat fakta bahwa pernyataan mengejutkan ini luput dari perhatian, sama seperti analisis yang bertanggung jawab tidak mungkin menunjukkan ketidaktahuan dan desakan Kissinger soal konfrontasi militer menjadi faktor utama yang memicu perang pada 1973.<sup>64</sup>

Tawaran perdamaian Sadat telah dihapus dari catatan sejarah.<sup>65</sup> Kisah yang beredar umumnya menyebut Sadat preman khas Arab, yang hanya ingin membunuh orang Yahudi, meskipun ia melihat kekeliruannya setelah usaha yang gagal untuk menghancurkan Israel pada 1973 dan, di bawah pengawasan Kissinger dan Carter yang baik hati, menjadi tokoh perdamaian. Jadi, dalam *obituary* dua halaman setelah pembunuhan Sadat, *Times* tidak hanya menyembunyikan fakta sebenarnya, tetapi secara eksplisit menyangkalnya, dan menyatakan bahwa sampai perjalanan ke Jerusalem pada 1977, Sadat tidak mau “menerima keberadaan Israel sebagai negara berdaulat”.<sup>66</sup> Newsweek bahkan menolak untuk menerbitkan keterangan yang mengoreksi kebohongan mengenai masalah ini dari kolumnis George Will, meskipun departemen riset sendiri mengakui fakta-fakta tersebut. Praktik semacam ini sudah lazim.

Istilah “terorisme” dan “aksi balasan” juga memiliki arti khusus dalam sistem doktrinal. “Terorisme” mengacu pada tindakan teroris oleh bajak laut, terutama orang Arab. Sedangkan tindakan teroris oleh kaisar dan sekutunya disebut “aksi balasan” atau mungkin “serangan pendahuluan yang sah untuk mencegah terorisme”, terlepas dari fakta yang ada, sebagaimana akan dibahas dalam bab-bab berikut.

Istilah “sandera”—seperti “terorisme”, “moderat”, “demokratis”, dan istilah diskursus politik lainnya—juga memiliki pengertian teknis Orwellian dalam sistem doktrin penguasa. Menurut pengertian kata-kata tersebut



di kamus, orang-orang Nikaragua kini disandera dalam operasi teroris besar yang dijalankan dari pusat terorisme internasional di Washington dan Miami. Tujuan kampanye terorisme internasional ini untuk mendorong perubahan sikap pemerintah Nikaragua: yang terpenting, berakhirnya program yang mengarahkan sumber daya kepada mayoritas rakyat miskin dan kembali ke kebijakan “moderat” dan “demokratis” yang mendukung kepentingan bisnis AS dan sekutu lokalnya. Alasan yang kuat kini bisa diajukan, betapa inilah alasan utama perang teroris AS terhadap Nikaragua, sebuah kasus yang tidak dibantah, tetapi tertutup untuk diskusi lebih lanjut.<sup>67</sup>

Ini aksi yang sangat sadis dalam terorisme, tidak hanya karena skala dan tujuannya, tetapi juga karena cara kerja yang ditempuh, yang jauh melampaui praktik teroris skala kecil yang memicu kegaduhan di kalangan beradab: Leon Klinghoffer dan Natasha Simpson dibunuh teroris, tetapi tidak terjadi penyiksaan brutal, mutilasi, pemerkosaan, dan praktik standar lainnya dari teroris yang dilatih dan didukung AS dan sekutunya, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam sejumlah data catatan, yang umumnya diabaikan. Kebijakan AS berupaya memastikan serangan teroris berlanjut sampai pemerintah menyerah atau digulingkan, sementara kaki tangan sang kaisar melantunkan kata-kata menenangkan tentang “demokrasi” dan “hak asasi manusia”.

Akan tetapi, dalam penggunaan teknisnya, istilah “terorisme” dan “sandera” dibatasi pada kategori tindakan teroris tertentu: terorisme bajak laut, yang ditujukan

kepada orang-orang yang menganggap terorisme dan penyanderaan skala besar sebagai hak prerogatif mereka. Di Timur Tengah, pengeboman, pembajakan, penyanderaan, serangan ke desa-desa yang tak berdaya, dan sebagainya, tidak termasuk dalam konsep terorisme, sebagaimana ditafsirkan dengan tepat lewat sistem doktrin, ketika dilakukan Washington atau sekutunya, Israel.

Catatan tentang tipu muslihat seputar terorisme, yang akan saya ulas dalam bab berikutnya, sangat penting berkaitan dengan sifat budaya Barat. Poin yang relevan dalam konteks sekarang adalah bahwa sejarah yang tepat dan wacana yang sesuai telah dibuat sehingga terorisme merupakan bagian dari rakyat Palestina, sementara orang Israel melakukan “aksi balas dendam”, atau kadang-kadang “aksi pencegahan” yang sah, adakalanya bereaksi dengan kekerasan yang disesalkan, seperti akan dilakukan setiap negara dalam situasi sulit tersebut. Sistem doktrin dirancang untuk memastikan kesimpulan ini benar secara mendasar, terlepas dari segenap fakta, baik yang tidak dilaporkan maupun diwartakan sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan doktrin, atau—kadang-kadang—dilaporkan secara terbuka, tetapi kemudian digiring ke lubang memori.

Mengingat Israel merupakan negara sekutu yang setia dan sangat berguna, berfungsi sebagai “aset strategis” di Timur Tengah dan bersedia melakukan tugas semacam itu, seperti mendukung pembantaian di Guatemala ketika pemerintah AS dicegah oleh Kongres untuk terlibat lebih

jauh, benar bahwa—terlepas dari fakta yang ada—Israel mendedikasikan diri untuk nilai moral tertinggi dan “kesucian tangan”<sup>68</sup>, sementara rakyat Palestina adalah lambang ekstremisme, terorisme, dan kebiadaban.

Pernyataan bahwa mungkin ada kesamaan tertentu baik dalam hak maupun praktik teroris diabaikan karena kemarahan umum—atau mungkin, jika pernyataan itu bisa didengar—sebagai anti-semitisme terbuka. Penilaian rasional, yang menghadirkan gambaran dan analisis akurat mengenai skala dan tujuan terorisme kaisar dan bajak laut, dikecualikan begitu saja, dan memang tidak dapat dipahami karena begitu jauh dari watak-watak ortodoksi yang berterima.

Dukungan Israel untuk AS sebagai “aset strategis” di Timur Tengah dan di tempat lain membantu menjelaskan tujuan Amerika Serikat, sejak pengambilalihan Kissinger atas pembuatan kebijakan Timur Tengah pada awal 1970-an, untuk mempertahankan konfrontasi militer dan “keadaan tanpa solusi” ala Kissinger.<sup>69</sup> Jika AS mengizinkan penyelesaian damai sesuai konsensus internasional, Israel secara bertahap akan dimasukkan ke wilayah tersebut dan AS bakal kehilangan layanan dari sebuah negara tentara bayaran yang penting, yang kompeten secara militer dan berteknologi maju; sebuah negara paria yang sangat tergantung pada AS untuk kelangsungan ekonomi dan militernya, dan karenanya dapat diandalkan, siap melayani kapan pun diperlukan.

Unsur-unsur yang disebut “lobi Israel” juga turut andil dalam mempertahankan konfrontasi militer, seperti

dilaporkan wartawan Israel, Danny Rubinstein, pada kunjungannya ke Amerika Serikat pada 1983.<sup>70</sup> Dalam pertemuan dengan perwakilan organisasi Yahudi (B'nai Brith, Anti-Defamation League, World Jewish Congress, Hadassah, Rabi dari semua golongan, dll.), Rubinstein mendapati laporannya mengenai situasi saat ini di Israel menimbulkan kebencian yang cukup besar karena ia menekankan fakta bahwa Israel tidak menghadapi bahaya militer besar seperti “kehancuran politik, sosial, dan moral” akibat pengambilalihan wilayah. “Saya tidak tertarik,” ujar seorang pejabat kepadanya; “Saya tidak dapat melakukan apa-apa dengan argumen seperti itu.” Intinya, Rubinstein menemukan banyak lika-liku, betapa,

menurut sebagian besar orang di organisasi Yahudi, penting untuk terus menekankan bahaya eksternal yang dihadapi Israel .... Organisasi Yahudi di Amerika Serikat membutuhkan Israel sebagai korban serangan Arab yang kejam. Dengan cara itu, orang Israel bisa mendapat dukungan, donor, dan uang. Bagaimana bisa seseorang mengumpulkan uang untuk memerangi bahaya demografis? Siapa yang mau memberi satu dolar untuk melawan apa yang saya sebut “bahaya aneksasi”? .... Semua orang tahu jumlah resmi sumbangan yang dikumpulkan United Jewish Appeal di Amerika Serikat, tempat nama Israel digunakan dan sekitar setengah dari jumlah tersebut tidak masuk ke

Israel, tetapi ke lembaga Yahudi di Amerika Serikat. Adakah hal yang lebih menggelikan?

Rubinstein terus mengamati bahwa United Jewish Appeal,

yang dikelola sebagai bisnis yang efektif dan efisien, memiliki logika bahasa yang sama dengan kubu militan agresif di Israel. Di sisi lain, kubu yang berupaya menjalin komunikasi dengan orang Arab, saling berbagi pengakuan dengan rakyat Palestina, kelompok moderat dan cinta damai, semua menentang bisnis pengumpulan sumbangan ini. Mereka tidak hanya mengurangi jumlah uang yang ditransfer ke Israel. Yang lebih penting lagi, mereka memotong dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan komunitas Yahudi.

Para pengamat kegiatan polisi pemikiran kelompok lobi Israel—kelompok yang tampak ingin sekali mendeteksi hasrat terkecil terkait rekonsiliasi dan penyelesaian politik dan menghancurkan ajaran sesat tersebut lewat artikel dan surat penuh kecaman kepada pers, peredaran selebaran berisi hinaan yang dibuat-buat mengenai para penganjur bidah, dan sebagainya—akan tahu pasti apa yang sedang dihadapi Rubinstein.

Ulasan Rubinstein mengingatkan kita pada Orwellisme lain: istilah “pendukung Israel”, yang lazim digunakan untuk merujuk kepada orang-orang yang tidak terganggu

oleh “penghancuran politik, sosial, dan moral” Israel (dan dalam jangka panjang sangat mungkin menjadi penghancuran fisik), dan memang turut berkontribusi bagi hal ini lewat dukungan “yang secara *chauvinis* dan picik” terhadap “sikap keras kepala dan kejam” dari Israel, seperti sering diingatkan para juru damai Israel.<sup>71</sup>

Pandangan serupa turut diutarakan sejarawan militer Israel Kolonel (Purnawirawan) Meir Pail, yang mengecam “pemujaan berlebihan terhadap negara benteng Yahudi” oleh komunitas Yahudi Amerika. Ia memperingatkan bahwa dengan penolakan mereka, mereka “telah mengubah negara Israel menjadi dewa perang yang serupa dengan Mars”, negara yang akan menjadi “senyawa rumit yang terdiri atas struktur negara rasis Afrika Selatan dan struktur sosial yang penuh kekerasan dan teror Irlandia Utara”, “sumbangan murni bagi sejarah ilmu politik abad ke-21: negara Yahudi yang unik, yang akan menjadi penyebab rasa malu bagi setiap orang Yahudi di mana pun berada, tidak hanya pada masa sekarang, tetapi juga pada masa depan”.<sup>72</sup>

Serupa dengan itu, kita dapat mengamati cara menarik istilah “zionisme” diam-diam diteguhkan oleh orang-orang yang mengambil peran sebagai penjaga kemurnian doktrinal. Pandangan saya sendiri, misalnya, secara teratur dikecam sebagai “anti-zionisme militan” oleh orang-orang yang menyadarinya. Saya berulang kali dan dengan jelas menyatakan: sesuai batas-batas yang diakui secara internasional, Israel harus menghormati hak negara mana pun dalam sistem internasional, tidak lebih,

tidak kurang; dan di setiap negara, termasuk Israel, struktur diskriminasi—yang dalam undang-undang dan penerapannya menetapkan status khusus untuk warga negara tertentu (Yahudi, kulit putih, orang Kristen, dll.), memberi mereka hak untuk menolak kehadiran yang lain—harus dibongkar.

Saya tidak akan membahas tentang apa yang seharusnya disebut “zionisme”, tetapi menguraikan apa yang mengemuka dari penyebutan pandangan ini sebagai “anti-zionisme militan”: Zionisme dengan demikian dianggap sebagai doktrin bahwa Israel harus diberi hak melampaui negara lain. Ia harus mempertahankan kendali di wilayah pendudukan, sehingga membatasi bentuk penentuan nasib sendiri yang penting bagi rakyat Palestina, dan harus tetap menjadi negara yang berdasarkan asas diskriminasi terhadap warga non-Yahudi. Menarik untuk dicatat bahwa kubu yang menyatakan diri “pendukung Israel” bersikeras tentang keabsahan resolusi PBB yang menyatakan zionisme bersifat rasis.

Berbagai masalah ini tidak semata abstrak dan teoretis. Masalah diskriminasi sangat parah di Israel, sehingga, misalnya berdasarkan hukum dan praktik administrasi yang kompleks, lebih dari 90% tanah ditempatkan di bawah kendali sebuah organisasi yang ditujukan untuk kepentingan “orang-orang yang memiliki agama, ras, dan asal-usul Yahudi”, sehingga warga non-Yahudi secara efektif dikecualikan.

Komitmen terhadap praktik diskriminatif sangat mendalam sehingga isu tersebut bahkan tidak dapat ditanggulangi di Parlemen, di mana undang-undang baru melarang penyusunan setiap peraturan yang “meniadakan keberadaan negara Israel sebagai negara orang Yahudi”. Jadi, ketentuan ini menyatakan ilegal setiap tantangan parlementer terhadap watak diskriminatif negara dan menjegal komitmen partai politik terkait prinsip demokrasi bahwa setiap negara adalah milik warga negaranya.<sup>73</sup>

Luar biasanya lagi, pers Israel dan sebagian besar kalangan terdidik tampak tidak merasa aneh dengan fakta bahwa undang-undang baru ini digabungkan dengan undang-undang “anti-rasisme” (empat kubu oposisi, sebenarnya, menentang ketentuan ini). Judul utama *Jerusalem Post* berbunyi: “Knesset menolak undang-undang rasis dan anti-Zionis”—tanpa ironi, istilah “Zionis” ditafsirkan seperti dalam undang-undang baru. Pembaca *Jerusalem Post* di AS rupanya juga tidak menemukan hal penting terkait masalah ini, sama seperti mereka tidak menemukan kesulitan dalam mendamaikan karakter antidemokrasi versi zionisme dan antusiasme atas perwujudan nilai-nilai demokrasi.

Yang tak kalah luar biasa adalah penggunaan konsep “anti-semitisme” yang licik, misalnya untuk merujuk kepada mereka yang menunjukkan sikap “anti-imperialisme gila” (termasuk salah satu jenis anti-semitisme) dengan menentang peran Israel di Dunia Ketiga demi melayani hasrat kekuasaan AS—di



Guatemala, misalnya; atau kepada orang-orang Palestina yang tak mengerti bagaimana masalah mereka dapat diatasi dengan “pemukiman kembali dan sejumlah repatriasi”. Jika sisa-sisa penghuni Desa Doueimah, tempat mungkin ratusan orang dibantai tentara Israel dalam operasi pembukaan lahan pada 1948, atau penduduk Jalur Gaza, yang seperti Soweto, keberatan dengan pemukiman kembali dan “repatriasi”, hal tersebut membuktikan bahwa mereka terinspirasi anti-semitisme.<sup>74</sup> Sesuatu yang serupa ini hanya dapat ditemukan dalam catatan sejarah Stalinisme, tetapi contoh yang sebanding dalam wacana akademik AS mengenai aksi Israel tidak sulit ditemukan, dan dilupakan begitu saja oleh AS, meskipun kubu pencinta damai di Israel tetap mengetahui, dan mengecam, berbagai aksi memalukan ini.

Perangkat utama dalam sistem “cuci otak di balik selubung kebebasan”, yang dikembangkan dengan cara paling mengesankan di negara yang mungkin paling bebas, dijalankan dengan mendorong perdebatan mengenai isu-isu kebijakan, tetapi dalam bingkai prasangka yang menggabungkan doktrin dasar kebijakan partai. Semakin kuat perdebatan, semakin efektif prasangka ini ditanamkan, sementara para peserta dan penonton diperdaya rasa kagum dan besar kepala atas keberanian mereka sendiri. Jadi, dalam kasus Perang Vietnam, institusi ideologis mengizinkan perdebatan antara “elang” (kubu agresif) dan “merpati” (juru damai); sebenarnya, perdebatan itu tidak hanya diizinkan, tetapi juga

didorong. Terutama pada 1968, ketika sektor besar bisnis Amerika Serikat telah berbalik melawan perang yang terlalu mahal dan berbahaya bagi kepentingan mereka.

Para elang menganggap, dengan ketegasan dan dedikasi, Amerika Serikat dapat berhasil dalam “mempertahankan Vietnam Selatan melawan agresi Komunis”. Sedangkan, sang merpati membalas dengan mempertanyakan kepatutan usaha mulia ini, atau menyayangkan penggunaan kekerasan yang berlebihan di dalamnya. Atau mereka menyayangkan “kesalahan” dan “kesalahpahaman” yang memperdaya kita dalam “kebenaran dan kebajikan yang melampaui batas” (sejarawan Harvard, John King Fairbank, dekan program studi Asia di AS sekaligus akademisi penganjur perdamaian) dan “upaya keliru untuk berbuat baik” (Anthony Lewis, mungkin tokoh media paling terkemuka). Atau, kadang-kadang, di bagian luar jangkauan sistem doktrin, mereka bertanya apakah Vietnam Utara dan Viet Cong bersalah karena melakukan agresi; mungkin, menurut mereka, tuduhan itu dibesar-besarkan.

Fakta penting tentang perang cukup jelas, yakni bahwa AS tidak membela negara yang “pada dasarnya adalah ciptaan Amerika Serikat” itu.<sup>75</sup> Sebaliknya, AS menyerang negara tersebut, tentu saja sejak 1962, ketika Angkatan Udara AS mulai terlibat dalam pengeboman Vietnam Selatan, dan perang kimia (penggundulan hutan dan perusakan tanaman) dimulai sebagai bagian dari upaya untuk mendorong jutaan orang ke sejumlah kamp tempat

mereka dapat “dilindungi” dari gerilyawan Vietnam Selatan yang mendapat dukungan sukarela (seperti diakui sendiri oleh pemerintah AS), setelah AS merongrong kemungkinan penyelesaian politik dan menyiapkan rezim boneka yang telah membunuh puluhan ribu orang Vietnam Selatan.

Selama perang, serangan utama AS dilancarkan terhadap Vietnam Selatan, dan berhasil, pada akhir 1960-an, menghancurkan perlawanan Vietnam Selatan sambil menyebarkan perang ke wilayah Indochina lainnya. Ketika Uni Soviet menyerang Afganistan, kita melihatnya sebagai bentuk agresi. Namun, ketika AS menyerang Vietnam Selatan, itu adalah upaya “pertahanan”—melawan “agresi internal”, seperti dinyatakan Adlai Stevenson di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1964; atau melawan “serangan dari dalam”, mengutip Presiden Kennedy.

Bahwa AS terlibat dalam serangan terhadap Vietnam Selatan tidak disangkal. Namun, pemahaman tersebut tidak bisa diungkapkan atau bahkan dibayangkan. Orang tidak akan menemukan petunjuk tentang peristiwa semacam itu sebagai “serangan AS terhadap Vietnam Selatan” di media arus utama atau kajian akademik, atau bahkan di sebagian besar publikasi gerakan perdamaian.<sup>76</sup>

Ada sejumlah ilustrasi yang lebih mengejutkan tentang kekuatan sistem pengendalian pemikiran di bawah kebebasan dibanding dengan perdebatan yang terjadi atas agresi Vietnam Utara dan soal apakah AS memiliki hak berdasarkan hukum internasional untuk memerangnya

dalam “pertahanan diri kolektif terhadap serangan bersenjata”. Buku-buku kajian akademik ditulis untuk membela posisi lawan, dan dengan istilah yang sederhana, perdebatan tersebut terus berlanjut di arena publik dengan dipelopori oleh gerakan perdamaian. Capaiannya mengesankan: seluruh perdebatan difokuskan pada pertanyaan apakah orang Vietnam bersalah karena melakukan agresi di Vietnam; tidak ada diskusi apakah agresi AS terhadap Vietnam Selatan memang dibolehkan.

Sebagai orang yang terlibat dalam perdebatan ini, dengan kesadaran penuh akan apa yang terjadi, saya hanya bisa mengungkapkan betapa para penentang kekerasan negara terjebak, terjatuh dalam sistem propaganda yang efektif. Penting bagi para pengkritik perang AS di Vietnam untuk menjadi ahli dalam seluk-beluk urusan Indochina. Namun, sebagian besar tidak relevan, karena masalahnya adalah AS sendiri, sama seperti kita tidak perlu menjadi ahli Afganistan untuk menentang agresi Soviet di sana.

Secara khusus, untuk memasuki arena perdebatan, kita perlu mengikuti istilah-istilah yang dikukuhkan negara dan pendapat elite. Namun, kita mungkin mengerti bahwa dengan melakukan itu, kita turut berperan dalam sistem indoktrinasi lebih lanjut. Alternatifnya adalah menceritakan kebenaran sederhana, yang sama saja dengan berbicara dalam bahasa asing (tidak ada yang mengerti).

Hal serupa terjadi pada perdebatan mengenai Amerika Tengah. Perang teroris AS di El Salvador tidak menjadi

tema diskusi kalangan terhormat; masalah itu tidak ada. Upaya AS untuk “mengekan” Nikaragua boleh diperdebatkan, tetapi dalam batas yang sempit. Kita mungkin saja bertanya apakah bisa diterima menggunakan kekerasan untuk “memotong kanker” (Sekretaris Negara George Shultz) dan mencegah Sandinista menularkan “revolusi tanpa batas” mereka—sungguh sistem propaganda negara yang fantastis, yang diketahui sebagai rekayasa oleh para wartawan dan komentator lain yang mengikuti retorika itu.

Akan tetapi, kita tidak boleh membahas gagasan bahwa “kanker” yang harus dipotong itu berupa “ancaman dari contoh yang bagus”, yang mungkin “menular” ke seluruh wilayah dan sekitarnya—fakta yang kadang-kadang ditolak secara objektif, seperti ketika pejabat pemerintah menjelaskan bahwa tentara sekutu AS telah berhasil “memaksa [Sandinista] mengalihkan sumber daya yang langka untuk perang dan bukan program sosial”.<sup>77</sup>

Dalam 3 bulan pertama pada 1986, ketika perdebatan semakin intensif terkait pemungutan suara Kongres yang akan datang tentang bantuan kepada tentara sekutu AS (sebagaimana digambarkan sendiri oleh pendukungnya yang penuh semangat) untuk menyerang Nikaragua dari pangkalan di Honduras dan Kosta Rika, pers nasional (*New York Times* dan *Washington Post*) memuat 85 opini dari para kolumnis dan kontributor lain mengenai kebijakan AS terhadap Nikaragua.

Semuanya tampak kritis terhadap Sandinista, mulai dari yang sangat kritis (sebagian besar) sampai yang

moderat. Dan, itulah yang disebut “debat publik”. Namun, fakta tak terbantahkan bahwa pemerintah Sandinista telah melakukan reformasi sosial yang sukses pada tahun-tahun awalnya, sebelum perang AS memukul mundur upaya ini, hampir tidak digubris. Dalam 85 kolom, ada dua bagian yang mengacu pada fakta telah terjadi reformasi sosial semacam itu, dan pemahaman bahwa inilah alasan dasar serangan AS—bukan rahasia besar—tidak disinggung sama sekali.

Kubu yang dianggap “pembela” Sandinista dikecam dengan sengit (secara anonim, untuk memastikan mereka tidak punya kesempatan untuk menanggapi, termasuk pada masa mendatang), tetapi tidak satu pun dari penjahat ini diperkenankan untuk mengungkapkan pandangannya. Tidak ada yang merujuk kesimpulan Oxfam bahwa Nikaragua “sangat istimewa” di antara 76 negara berkembang yang pemerintahnya bekerja dengan komitmen kepemimpinan politik “untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan”. Dan, di antara empat negara Amerika Tengah tempat Oxfam bekerja, “hanya Nikaragua yang berusaha keras untuk mengatasi ketidakadilan dalam kepemilikan tanah dan untuk memperluas layanan kesehatan, pendidikan, dan pertanian kepada petani miskin,” meskipun perang Contra (berlangsung sekitar 1981—1988) menghentikan ancaman ini dan menyebabkan Oxfam mengalihkan upayanya dari proyek pembangunan ke bantuan perang. Tidak dapat dibayangkan bahwa pers nasional akan

mengulas fakta betapa upaya AS yang penuh dedikasi untuk menyembuhkan “kanker” ini justru jatuh jauh ke dalam kebiasaan masa silam. Perdebatan dapat dilanjutkan seputar metode yang tepat untuk memerangi pos pertahanan terdepan dari Kerajaan Setan, asalkan tidak melewati batas yang ditetapkan dalam forum nasional.<sup>78</sup>

Dalam kediktatoran atau “demokrasi” yang dijalankan militer, garis partai cukup jelas, terbuka, dan tegas, diumumkan oleh Kementerian Kebenaran (Kementerian Propaganda dalam Newspeak) atau dengan media lain. Dan, harus dipatuhi secara terbuka pula. Ganjaran atas ketidaktaatan dapat berupa penjara dan pengasingan di bawah kondisi yang mengerikan, seperti di Uni Soviet dan negara satelitnya di Eropa Timur, hingga penyiksaan, pemerkosaan, mutilasi dan pembantaian yang mengerikan, seperti khas pada tanah jajahan AS, El Salvador. Dalam masyarakat bebas, ganjaran ini tidak tersedia dan digunakan sarana yang lebih halus. Kebijakan partai tidak tersurat, tetapi tersirat. Mereka yang menolaknya tidak dipenjara atau dibuang ke selokan setelah disiksa dan dimutilasi, tetapi penduduk secara umum terlindungi dari ajaran sesat mereka.

Dalam pemahaman arus utama, bahkan hampir tidak mungkin untuk mencerna kata-kata mereka pada kesempatan langka ketika wacana semacam itu dapat mengemuka. Pada periode abad pertengahan, dianggap perlu untuk menyikapi ajaran sesat secara serius, guna memahami dan melawannya dengan argumen rasional.

Hari ini, sudah cukup dengan menudingnya. Seluruh konsep telah diramu—“kesetaraan moral”, “Marxis,” “radikal”—untuk mengidentifikasi ajaran sesat, dan dengan demikian bisa membuatnya tersingkir tanpa argumen atau komentar lebih lanjut. Doktrin-doktrin yang berbahaya dan hampir tak terungkapkan ini bahkan menjadi “ortodoksi baru”<sup>79</sup> yang harus diperangi (lebih tepatnya, diidentifikasi dan disisihkan dengan mengerikan) oleh minoritas yang bisa dibilang mendominasi total ungkapan publik. Namun, sebagian besar ajaran sesat diabaikan begitu saja, sementara debat memanas karena masalah-masalah kecil di kalangan yang menerima doktrin dengan segenap keyakinan.

Hal serupa berlaku untuk topik sekarang, Timur Tengah. Kita boleh berdebat soal apakah rakyat Palestina harus disertakan mengikuti “proses perdamaian”, tetapi tidak boleh memahami bahwa AS dan Israel memimpin kamp penolakan dan secara konsisten memblokir setiap “proses perdamaian” otentik, sering kali dengan kekerasan mendasar. Berkenaan dengan terorisme, seorang cendekiawan yang kritis memperingatkan betapa kita harus menahan diri dari “penyederhanaan berlebihan” dan harus “memeriksa akar sosial dan ideologis radikalisme Islam dan Timur Tengah saat ini”, yang menimbulkan “masalah sulit, tetapi nyata”; kita harus berusaha memahami penyebab para teroris menempuh jalan kekerasan.<sup>80</sup>

Jadi, perdebatan mengenai terorisme dibatasi dengan jelas: pada satu sisi ekstrem, ada orang-orang yang



melihatnya tak lebih dari persekongkolan Kerajaan Setan dan sekutunya; dan di sisi lain, terdapat pemikir yang lebih berimbang dan menghindari “penyederhanaan berlebihan” serta terus menyelidiki akar teror Arab dan Islam di dalam negeri. Gagasan bahwa mungkin saja ada sumber terorisme lain di Timur Tengah—bahwa sang kaisar dan sekutunya mungkin juga terlibat dalam drama ini—diabaikan; tidak dapat disangkal, tetapi tak terpikirkan. Sungguh capaian yang gemilang.

Sepanjang proses ini, orang-orang moderat—merpati liberal cinta damai—memainkan peran penting dalam memastikan sistem indoktrinasi berfungsi dengan benar, dengan menetapkan batasan gagasan yang patut dipikirkan.

Dalam buku berjudul *Journal*, Henry David Thoreau, yang pada kesempatan lain menjelaskan ia tidak mau membuang waktu dengan membaca koran, menulis:

Tidak perlu undang-undang untuk memeriksa izin surat kabar. Sudah cukup hukum, dan lebih dari cukup, untuk dirinya sendiri. Pada dasarnya, masyarakat bertemu dan menyetujui hal-hal apa saja yang harus disuarakan, menyetujui sebuah platform dan mengucilkan mereka yang menyimpang, dan tidak ada satu dari seribu orang yang berani menyuarakan hal lain.

Pernyataan itu tidak cukup akurat. Filsuf John Dolan menyatakan, “Bukan berarti orang-orang tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan pemikiran di luar yang diizinkan: justru, kapasitas mereka untuk memikirkan hal

semacam itu dirampas.<sup>81)</sup> Inilah poin pentingnya, motif penggerak “rekayasa persetujuan demokratis”.

Di *New York Times*, Walter Reich dari Woodrow Wilson International Center—merujuk pada pembajakan Achille Lauro—menuntut agar standar keadilan yang ketat diterapkan bagi orang-orang yang telah “melakukan pembunuhan teroris”, baik pelaksana maupun perencananya:

Menjatuhkan hukuman ringan—karena seorang teroris meyakini dirinya sebagai pejuang kemerdekaan yang dirampas dan dirugikan—dapat merongrong dasar keadilan dengan menerima argumen teroris bahwa hanya konsep keadilan dan hak mereka, dan penderitaan mereka, yang sah .... Orang-orang Palestina—dan banyak dari kebmpok yang menggunakan terorisme untuk memenuhi tuntutan—harus menghentikan teror dan menemukan cara lain, mau tidak mau melibatkan kompromi, untuk mencapai tujuan mereka. Dan, negara demokrasi Barat harus menolak argumen bahwa alasan tertentu—bahkan yang melibatkan perampasan—dapat “mengurangi” pertanggungjawaban atas terorisme terhadap orang-orang tak bersalah.

Sungguh kalimat mulia, yang bisa saja dianggap serius jika tuntutan untuk memberlakukan hukuman berat

diajukan kepada diri sendiri, kepada sang kaisar dan sekutunya. Jika tidak, kalimat ini tidak jauh beda dengan ungkapan-ungkapan kosong dari Dewan Perdamaian Dunia dan organisasi front Komunis lainnya terkait kekejaman terhadap pejuang Afganistan.

Mark Heller, wakil direktur Jaffee Center for Strategic Studies di Tel Aviv University, menjelaskan, “Terorisme yang disponsori negara adalah perang berskala kecil, dan karena itu korbannya, termasuk Amerika Serikat, berhak melawan dengan segala cara yang dimiliki.” Dan, seharusnya diteruskan bahwa korban lain dari “perang berskala kecil” dan “terorisme yang disponsori negara” juga “berhak untuk melawan segala cara yang mereka miliki”: Salvador, Nikaragua, Palestina, Lebanon, dan banyak korban lain dari sang kaisar dan sekutunya di sebagian besar dunia.<sup>82</sup>

Memang konsekuensi ini hanya berlaku jika kita menerima prinsip moral dasar: kita menerapkan standar yang sama dengan yang diterapkan kepada orang lain (bahkan lebih ketat lagi, jika serius). Namun, prinsip itu, dan konsekuensi yang mengiringinya, hampir tidak dapat dipahami dalam budaya intelektual yang berlaku, dan hampir tidak dapat diungkapkan dalam berbagai surat kabar yang menuntut hukuman keras bagi orang lain atas tindak kejahatannya. Malahan, siapa pun yang mengikuti konsekuensi logis dari ketentuan ini dan mengungkapkannya dengan gamblang, mungkin akan dikenai tuntutan karena menghasut kekerasan teroris

terhadap pemimpin politik Amerika Serikat dan sekutunya.

Pandangan yang paling skeptis di AS sepakat bahwa “dukungan terbuka Kolonel Qaddafi terhadap terorisme adalah kejahatan yang nyata”, dan “tidak ada alasan untuk membiarkan pembunuh melenggang bebas tanpa hukuman jika Anda mengetahui dalangnya [*sic*]. Juga tidak bisa menjadi faktor penghalang bahwa aksi balasan akan menewaskan beberapa warga sipil yang tidak bersalah, atau negara-negara pembunuh tidak akan pernah takut akan ketentuan retribusi” (Anthony Lewis).<sup>83</sup> Prinsip tersebut memberikan hak kepada sejumlah besar orang di seluruh dunia untuk membunuh Presiden Reagan dan megebom Washington bahkan jika “aksi balasan ini akan menewaskan beberapa warga sipil yang tidak bersalah”. Selama kebenaran sederhana semacam itu tidak dapat diungkapkan dan dipahami dengan jernih, dalam kasus yang digambarkan di sini dan banyak yang lainnya, kita menipu diri sendiri jika percaya bahwa kita berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis.

Ada perdebatan sengit di media mengenai apakah tepat mengizinkan para perompak dan pencuri mengungkapkan tuntutan dan pandangannya. *NBC*, misalnya, dikecam karena mewawancarai pria yang dituduh merencanakan pembajakan Achille Lauro—dianggap membantu kepentingan teroris dengan membiarkan mereka menyatakan pendapat tanpa sanggahan, penyimpangan

memalukan bagi keseragaman yang wajib dimiliki dalam masyarakat bebas yang berjalan dengan baik.

Akan tetapi, bolehkah media mengizinkan Ronald Reagan, George Shultz, Menachem Begin, Shimon Peres, dan suara lain dari istana sang kaisar untuk menyatakan pendapat tanpa sanggahan, mendorong “perang berskala kecil” dan “aksi balasan” atau “aksi pendahuluan”? Apakah dengan membiarkan para komandan teroris menyatakan pendapat secara bebas, berarti media berperan sebagai agen terorisme skala besar? Pertanyaan ini tidak bisa diajukan, dan walaupun bisa, hanya akan diabaikan dengan jijik dan mengerikan.

Secara harfiah, hampir tidak ada sensor di Amerika Serikat. Namun, pengendalian pikiran menjelma industri yang berkembang pesat, dan memang merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam masyarakat bebas yang bertumpu pada prinsip keputusan elite serta dukungan atau sikap pasif masyarakat umum. []

## 2

# Terorisme Timur Tengah dan Sistem Ideologis Amerika

(1986)

---

**P**ADA 17 Oktober 1985, di Washington, Presiden Reagan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Shimon Peres, yang menyatakan Israel siap untuk mengambil “langkah besar” di Timur Tengah dan mengulurkan “perdamaian” ke Yordania. “Kunjungan Mr. Peres berlangsung saat hubungan Amerika-Israel sangat harmonis,” ucap David Shipler di *Times*, mengutip seorang pejabat Departemen Luar Negeri yang menyebut hubungan AS dengan Israel “sangat dekat dan erat”. Peres disambut hangat sebagai tokoh perdamaian, dan dipuji komitmen nyatanya untuk “mengupayakan perdamaian alih-alih mengumandangkan perang”, menurut ucapannya sendiri. Presiden mengatakan bahwa ia dan Mr. Peres membahas “momok jahat terorisme, yang telah merenggut begitu banyak korban orang Israel, Amerika,

dan Arab, dan menghadirkan tragedi bagi banyak lainnya,” seraya menegaskan, “Kami sepakat terorisme tidak boleh merintangai usaha untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah.”<sup>84</sup>

Dibutuhkan bakat Jonathan Swift (penulis prosa satire berkebangsaan Irlandia) untuk bisa dengan tepat memahami maksud dua komandan teroris terkemuka di dunia ini, yang memiliki konsep “perdamaian” serupa, dan hendak menyisihkan salah satu kubu yang mengklaim hak penentuan nasib sendiri di bekas wilayah Palestina: populasi pribumi. Lembah Yordan merupakan “bagian tidak terpisahkan dari Negara Israel,” kata Peres saat berkeliling permukiman Israel pada 1985, konsisten dengan pendiriannya yang tak tergoyahkan bahwa, “Masa lalu tidak dapat diubah dan Alkitab adalah sumber utama dalam menentukan nasib tanah kita,” dan bahwa negara Palestina akan “mengancam eksistensi Israel”.<sup>85</sup> Konsepsinya tentang negara Yahudi banyak dipuji di AS karena tidak berlebihan, tidak *mengancam*, dan hanya *melenyapkan* eksistensi rakyat Palestina. Toh, konsekuensi ini dianggap sepele saja, paling hanya jadi noda kecil di dunia yang memang tidak sempurna.

Baik Peres maupun pemimpin Israel lainnya belum beranjak sejengkal pun dari posisi Presiden Chaim Herzog pada 1972 bahwa rakyat Palestina tidak akan pernah “menjadi mitra dengan cara apa pun, di tanah yang telah disucikan bagi umat kita selama ribuan tahun”, meski para penganjur perdamaian lebih memilih untuk mengecualikan daerah Tepi Barat—yang terdiri atas

banyak penduduk Arab—dari negara Yahudi demi menghindari apa yang secara halus mereka rasakan sebagai “masalah demografis”. Semua masih mengikuti pandangan Shlomo Gazit (lihat Bab Pendahuluan) bahwa kebijakan “penghancuran semua inisiatif”, untuk aksi politik, demokrasi, ataupun negosiasi, telah menghasilkan “kisah sukses” dan harus dilanjutkan.

Sikap Israel, dengan dukungan AS, tetap seperti sikap Perdana Menteri (sekarang Menteri Pertahanan) Yitzhak Rabin saat PLO dan negara-negara Arab mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelesaian dua negara damai pada Januari 1976: Israel menolak segala bentuk negosiasi dengan PLO meski organisasi itu mengakui Israel dan menghentikan teroris, dan tidak akan melakukan “negosiasi politik dengan rakyat Palestina”, PLO atau bukan. Baik Peres maupun Reagan bahkan enggan mempertimbangkan proposal PLO—yang diketahui mendapatkan dukungan luar biasa dari rakyat Palestina dan memiliki legitimasi sama seperti dimiliki Organisasi Zionis pada 1947—untuk mengadakan negosiasi yang mengarah pada pengakuan yang saling menguntungkan dalam penyelesaian dua negara sesuai konsensus internasional yang selama bertahun-tahun telah diblokir AS dan Israel.<sup>86</sup>

Realitas politik krusial ini menghadirkan kerangka kerja yang dibutuhkan dalam tiap pembahasan tentang “momok jahat terorisme” yang—dalam istilah rasis wacana Amerika—mengacu pada tindakan teroris oleh orang Arab, bukan oleh orang Yahudi; sama seperti halnya



“perdamaian” berarti upaya penyelesaian yang menghormati hak penentuan nasib sendiri bangsa Yahudi, bukan rakyat Palestina.

Peres datang ke Washington guna membahas soal perdamaian dan terorisme bersama sahabat karibnya setelah mengirim pesawat pengebom untuk menyerang Tunis (ibu kota Tunisia, tempat mereka membunuh 20 warga Tunisia dan 55 warga Palestina, sebagaimana dilaporkan wartawan Israel Amnon Kapeliouk. Sasarannya kawasan yang tak punya kekuatan pertahanan, “resor tempat berlibur dengan belasan rumah, pondok penginapan, dan markas PLO di sekitarnya yang berbaur sedemikian rupa sehingga sulit dibedakan”, bahkan dari dekat. Senjata yang digunakan lebih canggih daripada yang di Beirut, tampaknya berupa “bom pintar” yang menghancurkan target menjadi debu.

Jasad korban di dalam bangunan yang dibom itu lumat hingga tak bisa dikenali lagi. Mereka memperlihatkan sejumlah foto korban kepada saya. “Anda boleh mengambilnya,” kata mereka. Saya meninggalkan foto-foto itu di kantor. Tidak akan ada surat kabar yang mau menerbitkan foto teror semacam itu. Saya diberi tahu bahwa jasad seorang bocah Tunisia yang

menjual roti lapis di dekat markas PLO hancur berkeping-keping. Sang ayah mengenali tubuh anak itu lewat bekas luka di pergelangan kakinya. “Beberapa korban luka dikeluarkan dari balik reruntuhan, tampak sehat dan tidak cedera parah,” ujar pemandu saya. “Setengah jam berselang mereka ambruk dan meninggal. Ternyata organ dalamnya mengalami kerusakan akibat kekuatan ledakan.”<sup>87</sup>

Tunisia telah menampung rakyat Palestina atas permintaan Reagan, setelah mereka diusir dari Beirut dalam invasi yang didukung AS—yang menyebabkan sekitar 20 ribu orang terbunuh dan sebagian besar negara tersebut hancur. “Kalian menggunakan palu untuk menghajar alat,” demikian wartawan militer Israel Ze’ev Schiff diberi tahu oleh “seorang tokoh penting Pentagon, seorang jenderal yang akrab dengan militer Israel (IDF) dan beberapa tentara negara lain di wilayah ini.”

“Kalian menyerang warga sipil secara semena-mena. Kami kaget dengan sikap kalian terhadap warga sipil Lebanon,” demikian ungkapan perasaan tentara dan petugas senior Israel yang terkejut dengan kebiadaban serangan tersebut dan perlakuan terhadap warga sipil dan tahanan<sup>88</sup>—meskipun dukungan di Israel untuk agresi ini

dan tim Begin-Sharon meningkat sesuai dengan kekejaman yang dilakukan, dan mencapai puncaknya setelah teror pengeboman Beirut pada Agustus.<sup>89</sup>

Shimon Peres, tokoh perdamaian sekaligus sosok yang dihormati di kalangan Socialist International, tetap diam hingga ongkos yang harus ditanggung Israel meningkat seiring pembantaian pascaperang Sabra-Shatila; dan kemudian korban berjatuhan akibat perlawanan Lebanon, yang merongrong rencana Israel mengukuhkan “Orde Baru” di Lebanon, dengan Israel menguasai sebagian besar wilayah selatan dan sisanya dikendalikan sekutu Israel, Phalangist, dan sekelompok elite Muslim (lihat Catatan 138 di bawah).

Tidak diragukan lagi, Kapeliouk menyimpulkan, bahwa Arafat menjadi target serangan di Tunis. Di markas PLO yang dikunjunginya, ada foto Arafat berdiri di tengah reruntuhan dengan judul: “Mereka ingin membunuhku alih-alih berunding denganku.”

“PLO ingin berunding,” demikian keterangan yang diterima Kapeliouk, “tetapi Israel menolak segala bentuk perundingan”— fakta sederhana yang secara efektif disembunyikan di AS, atau lebih buruk lagi, dianggap tidak relevan berdasarkan premis yang rasis.

Juga sangat mungkin ada campur tangan AS dalam serangan di Tunis. AS bahkan tidak memperingatkan negara korban—yang notabene sekutu Amerika—saat para pembunuh akan beraksi. Mereka yang percaya tipu daya bahwa Armada Keenam dan sistem pengawasan yang ketat di wilayah tersebut tidak mampu mendeteksi

pesawat Israel saat mengisi bahan bakar dalam perjalanan ke Mediterania harus mendesak penyelidikan Kongres terkait ketidakbecusan militer Amerika, yang tentu menjadikan kita dan sekutu kita sasaran yang mudah diserang musuh.

“Laporan berita kini mengutip sumber-sumber pemerintah yang mengatakan Armada Keenam AS tentu menyadari datangnya serangan, tetapi memutuskan untuk tidak memberitahukan pejabat Tunisia,” demikian *Los Angeles Times* melaporkan. Namun, “pernyataan yang sangat signifikan itu tidak diwartakan di dua koran utama Pantai Timur AS, *The New York Times* dan *The Washington Post*, ataupun koran lainnya, dan tidak dimanfaatkan dalam layanan berita luar negeri Associated Press dan UPI”, ungkap koresponden Timur Tengah untuk *Economist* London, Godfrey Jansen, seraya menambahkan, “persekongkolan pasif AS nyata adanya.”<sup>90</sup>

Salah satu korban pengeboman di Tunis adalah Mahmoud el-Mughrabi. Ia lahir di Jerusalem pada 1960, dan pada usia 16 tahun sudah 12 kali ditahan. Ia juga salah satu informan untuk investigasi *London Sunday Times* soal penyiksaan di Israel (19 Juni 1977) yang “berhasil menyelamatkan diri ke Yordania setelah bertahun-tahun hidup menderita di bawah kondisi pendudukan militer yang kian buruk”, demikian menurut catatan memorial oleh sejumlah teman Yahudi Israel yang dilarang untuk diterbitkan media setempat di Jerusalem Timur oleh sensor militer AS.<sup>91</sup> Fakta semacam ini tentu saja tidak ada artinya di Amerika Serikat, karena laporan cermat

*Sunday Times* dijauhkan dari pers—meskipun dikutip di *New Republic* yang liberal—sejalan dengan pembelaan tegas atas penyiksaan terhadap orang-orang Arab yang tak menimbulkan tanggapan apa pun.<sup>92</sup>

Amerika Serikat membenarkan pengeboman Israel di Tunis sebagai “tanggapan yang sah” terhadap “serangan teroris”. Menteri Luar Negeri Shultz mengonfirmasi pendapat ini dalam sebuah panggilan telepon ke Menteri Luar Negeri Israel, Yitzhak Shamir, memberitahunya betapa Presiden dan yang lainnya “bersimpati atas tindakan Israel”.<sup>93</sup>

Washington mencabut dukungan terbuka ini setelah muncul reaksi global yang berlawanan, tetapi abstain terkait kecaman Dewan Keamanan PBB atas “tindakan agresi bersenjata” yang “terang-terangan melanggar Piagam PBB, hukum internasional, dan norma etika”—sendiri seperti biasa. Iklim intelektual dan kultural AS tecermin lewat fakta bahwa sikap abstain ini dikecam karena dipandang sejalan dengan sikap “pro-PLO” dan “anti-Israel, dan sebagai penolakan untuk menghabisi para teroris—yang dipilih dengan cermat.

Mungkin ada yang berpendapat pengeboman Israel tidak termasuk kategori terorisme internasional, tetapi kejahatan agresi yang jauh lebih serius, seperti dinyatakan Dewan Keamanan PBB. Atau ada yang berpendapat bahwa tidak adil membebani Israel dengan pengertian “terorisme internasional” yang dirancang pihak lain. Menghadapi pandangan tersebut, kita bisa menilik doktrin Israel sendiri sebagaimana dirumuskan Duta Besar

Benjamin Netanyahu dalam Konferensi Internasional tentang Terorisme. Faktor pembeda dalam terorisme, ia menjelaskan, adalah “pembunuhan yang disengaja dan sistematis dan penganiayaan (terhadap warga) untuk menyebarkan rasa takut”.<sup>94</sup> Jelas sekali serangan di Tunis dan kekejaman Israel lainnya selama bertahun-tahun tergolong dalam konsep ini, meskipun kebanyakan tindak terorisme internasional lainnya tidak demikian, termasuk serangan teroris paling parah terhadap warga Israel (Ma’alot, pembantaian Munich, kekejaman di jalur pesisir pada 1978 yang memberi dalih untuk menyerang Lebanon, dan lainnya), atau bahkan pembajakan pesawat terbang atau penyanderaan secara umum, yang menjadi topik konferensi yang ia hadiri.

Serangan terhadap markas PLO diduga sebagai aksi balasan atas pembunuhan tiga warga Israel di Larnaca, Siprus, oleh sejumlah orang yang telah ditangkap dan diadili untuk kejahatannya. “Pakar diplomatik Barat soal PLO” meragukan Arafat sadar akan misi yang direncanakan. “Orang Israel juga telah menarik keterangan awal mereka bahwa Arafat terlibat.”<sup>95</sup> Para pembela terorisme Israel di AS, yang meyakinkan kita bahwa “serangan Israel di Tunisia justru menarget orang-orang yang bertanggung jawab untuk kegiatan teroris”, tak peduli; menyatakan bahwa apa pun yang terjadi, “tanggung jawab moral yang lebih besar atas berbagai kekejaman ini ... ada di tangan Yasser Arafat” karena “dia merupakan Bapak Kekerasan Palestina Kontemporer”.

Dalam keterangan untuk kelompok lobi Israel AIPAC, Jaksa Agung Edwin Meese menyatakan AS akan menahan Arafat karena “bertanggung jawab atas berbagai aksi terorisme internasional”, dan fakta-fakta di luar itu ternyata tidak relevan.<sup>96</sup> Karenanya, setiap tindakan “terhadap PLO”—kategori yang sangat luas, seperti ditunjukkan catatan sejarah—sah-sah saja.

Serangan di Tunis konsisten dengan praktik Israel sejak awal berdiri: pembalasan dilakukan terhadap mereka yang rentan, bukan pelaku kekejaman. Kecaman standar terhadap PLO adalah, “Alih-alih langsung menyerang musuh yang siaga seperti Israel, orang Palestina menyerang sasaran yang lebih lemah, orang Israel di Italia, Austria, dan tempat lain,”<sup>97</sup> ciri lain sifat keji dan pengecut mereka. Praktik Israel serupa, yang dimulai jauh sebelumnya dan dalam skala lebih besar, luput dari perhatian di tengah pujian umum seputar kepahlawanan, efisiensi militer, dan “kesucian tangan” dari sekutu kesayangan AS. Konsep “pembalasan” juga menimbulkan sejumlah pertanyaan, yang akan segera kita bahas.

Di pengujung 1985, pers merilis catatan “tahun terorisme internasional yang mencekam”, termasuk pembunuhan di Larnaca pada 25 September dan pembajakan Achille Lauro serta pembunuhan brutal terhadap turis Amerika yang lumpuh, Leon Klinghoffer, 7 Oktober. Serangan Israel di Tunis pada 1 Oktober tidak disertakan dalam daftar. Pada laporan panjang akhir tahun tentang terorisme, *Times* secara singkat mencatat pemboman Tunis, tetapi sebagai contoh aksi balasan,

bukan terorisme. Mendeskripsikannya sebagai “tindakan putus asa yang tidak banyak berpengaruh terhadap kekerasan Palestina dan menimbulkan protes negara lain”.

Profesor Hukum Harvard Alan Dershowitz, yang mengecam Italia karena terlibat dalam terorisme internasional dengan melepaskan orang “yang diduga mendalangi pembajakan [Achille Lauro]”, menyatakan AS pasti akan mengekstradisi setiap teroris Israel yang telah melakukan kekerasan terhadap warga negara-negara lain”—misalnya, Ariel Sharon, Yitzhak Shamir, atau Menachem Begin. Pernyataan ini muncul pada hari yang sama saat Peres disambut di Washington tak lama usai pengeboman Tunis dan dipuji karena komitmennya terhadap perdamaian, dan dianggap wajar dalam iklim budaya yang berlaku.<sup>98</sup>

Berbagai pernyataan Reagan tentang terorisme diwartakan dan diulas dengan cukup serius di media arus utama, tetapi sesekali kritikus mengomentari kemunafikan mereka yang mengecam terorisme internasional seraya mengirim sekutunya untuk membunuh, memutilasi, menyiksa, dan melakukan penghancuran di Nikaragua dan—tak banyak disinggung, karena tindakan ini dianggap sukses besar—untuk membantai puluhan ribu orang di El Salvador demi mencegah ancaman hadirnya demokrasi sejati di sana. Tak lama setelah perbincangan Reagan-Peres tentang perdamaian dan teror, kelompok yang terdiri atas 120 dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain, kembali dari



penyelidikan di Nikaragua yang didukung American Public Health Association dan Organisasi Kesehatan Dunia, melaporkan pengrusakan klinik dan rumah sakit, pembunuhan tenaga kesehatan, penjarahan apotek perdesaan yang menyebabkan minimnya ketersediaan obat-obat penting dan sukses mengganggu program vaksinasi polio—sebagian kecil dari kampanye kekerasan yang diselenggarakan di pusat terorisme internasional, Washington dan Miami;<sup>99</sup> Wartawan *Times* di Nikaragua kerap menunjukkan semangat yang sama dengan jurnalis *Pravda* di Afganistan dalam menggali atau memeriksa bukti kuat kekejaman Contra, dan seperti banyak yang lainnya, laporan ini tak dimuat dalam Newspaper of Record.

Serangan di Tunis menunjukkan kadar kemunafikan yang tidak selalu mudah dipahami. Misalkan saja Nikaragua melakukan pengeboman di Washington, membidik Reagan, Shultz, dan teroris internasional lainnya, membunuh sekitar 100 ribu orang “secara tidak sengaja”. Niscaya sepenuhnya dibenarkan untuk melakukan aksi balasan, menurut standar orang Amerika, jika memang rasio 25 : 1 dapat diterima, seperti pada kasus Larnaca-Tunis, meski kita bisa menambahkan untuk lebih tepatnya bahwa setidaknya dalam kasus ini para pelaku kejahatan menjadi sasaran serangan, dan tak ada pertanyaan soal orang yang memprakarsai teror, dan barangkali jumlah korban meninggal perlu ditambahkan sesuai sejumlah faktor dengan mempertimbangkan populasi penduduk.

“Teroris, dan mereka yang mendukungnya, harus, dan akan, dihukum,” ucap Presiden Reagan,<sup>100</sup> memberikan dasar moral bagi aksi balasan semacam itu, sejalan dengan sikap para pengecamnya di media arus utama, sebagaimana telah kita saksikan.

Peres telah dikenal sebagai tokoh perdamaian di Lebanon.<sup>101</sup> Setelah ia menjadi Perdana Menteri, program “kontra-terorisme Israel” terhadap warga sipil di wilayah pendudukan di Lebanon meningkat, mencapai puncak kebiadaban lewat Operasi Tinju Besi pada awal 1985, yang memiliki “ciri khas serupa pasukan berani mati di Amerika Latin”, demikian komentar Curtis Wilkie, menguatkan laporan wartawan lain di tempat kejadian. Di Desa Zrariya, misalnya, IDF melancarkan operasi hingga jauh ke utara garis depan.

Setelah beberapa jam menembaki Zrariya dan tiga desa terdekat, IDF mengangkut seluruh penduduk laki-laki, menewaskan 35—40 penduduk desa, sebagian berada di mobil yang digilas tank-tank Israel; penduduk desa lainnya dipukuli atau dibunuh, sebuah peluru tank ditembakkan ke arah pekerja Palang Merah yang telah diperingatkan agar menjauh, dan pasukan Israel secara ajaib selamat tanpa korban jiwa dari apa yang secara resmi digambarkan sebagai perang dengan gerilyawan yang punya senjata berat. Sehari sebelumnya, 12 tentara Israel tewas dalam serangan bom bunuh diri di dekat perbatasan. Namun, Israel membantah serangan di Zrariya sebagai aksi balasan. Bantahan Israel ini ditelan mentah-mentah sebagai fakta oleh pengamat di AS, yang menjelaskan

bahwa “intelijen telah menetapkan kota ini sebagai sarang teroris .... Tidak kurang dari 34 gerilyawan Syi’ah tewas di sana, dan lebih dari 100 orang dibawa pergi untuk diperiksa—dari satu desa kecil” (Eric Breindel), yang menyiratkan luasnya jaringan teror Syi’ah. Tak tahu soal garis kebijakan partai, tentara Israel menuliskan keterangan “Pembalasan Dendam Pasukan Pertahanan Israel” di dinding kota, dalam bahasa Arab, sebagaimana dilaporkan wartawan di tempat kejadian.<sup>102</sup>

Di tempat lain, artileri Israel menembaki rumah sakit dan sekolah dan menangkap “tersangka”, termasuk pasien di ranjang perawatan dan ruang operasi rumah sakit, untuk “diinterogasi” atau dibawa ke kamp konsentrasi Israel, di antara sekian banyak kekejaman lain bahwa seorang diplomat Barat yang sering berkunjung ke daerah itu menyebutnya capaian baru dalam hal “kekejaman yang disengaja dan pembunuhan yang sewenang-wenang.”<sup>103</sup>

Kepala unit penghubung IDF di Lebanon, Jenderal Shlomo Ilya, “mengatakan satu-satunya senjata melawan terorisme adalah terorisme, dan Israel memiliki pilihan selain yang sudah digunakan untuk ‘berbicara dalam bahasa yang dipahami teroris”’.

Konsep ini bukan sesuatu yang baru. Operasi Gestapo dalam pendudukan Eropa juga “dibenarkan demi memerangi ‘terorisme”’, “dan salah satu korban Klaus Barbie—salah satu pejabat Gestapo—ditemukan terbunuh dengan catatan terjepit di dadanya, bertuliskan “Teror melawan Teror”—tampak serupa dengan yang biasa diungkapkan kelompok teroris Israel, dan dengan

judul berita utama *Der Spiegel* tentang teror pengeboman oleh AS di Libia pada April 1986. Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengancam “praktik dan tindakan Israel terhadap warga sipil di Lebanon selatan” diveto Amerika Serikat dengan alasan “menerapkan standar ganda”; “Kami tidak percaya resolusi yang timpang akan mengakhiri penderitaan Lebanon,” Jeane Kirkpatrick menjelaskan.<sup>104</sup>

Operasi teror Israel berlanjut saat pasukannya dipaksa mundur oleh sejumlah perlawanan. Pasukan Israel dan Selatan tentara bayaran South Lebanon Army (SLA) menutup “tahun terorisme internasional yang mencekam” pada 31 Desember 1985 dengan “menyerbu desa Muslim Syi’ah [Kunin] di Lebanon selatan dan mengusir sekitar 2.000 penduduknya,” menghancurkan beberapa rumah dan membakar yang lainnya, dan menangkap 32 pemuda; sementara orang tua, perempuan, dan anak-anak dari desa dikabarkan digiring ke kota di luar “zona keamanan” Israel, tempat terdapat pos komando pasukan PBB.<sup>105</sup>

Laporan ini dihimpun dari Beirut, berdasarkan kesaksian yang dikutip polisi Lebanon, seorang wartawan dari jurnal konservatif Beirut *An Nahar*, dan gerakan Amal Syi’ah. Sedangkan dari Jerusalem, Joel Greenberg mewartakan versi yang berbeda, bukan mengacu pada setiap sumber yang bisa diidentifikasi, melainkan sebagai fakta sederhana: “penduduk desa yang takut akan aksi balasan SLA melarikan diri dari Desa Kunin setelah dua tentara SLA dibunuh di desa tersebut.”<sup>106</sup>

Perbandingan macam ini, yang sudah baku, amat berguna. Propaganda Israel mendapat banyak keuntungan dari kenyataan bahwa media sangat mengandalkan koresponden yang berbasis Israel. Ini menghasilkan dua keuntungan penting: *pertama*, “berita” disajikan ke penonton Amerika melalui mata resmi Israel; *kedua*, pada kesempatan langka ketika koresponden AS melakukan penyelidikan independen, alih-alih hanya mengandalkan kerja sama tuan rumah, sistem propaganda Israel dan kelompok pendukungnya di AS bisa mengeluhkan diabaikannya kejahatan orang Arab, sementara Israel dihukum dengan pemeriksaan yang rinci atas cacat kecil dalam laporan yang amat padat.

Ketidakmampuan mengelola berita dengan cara biasa terkadang menciptakan masalah. Misalnya, selama Perang Lebanon 1982, ketika Israel tidak dapat mengendalikan laporan kesaksian wartawan yang berbasis di Lebanon. Hal ini menimbulkan protes keras atas dugaan rekayasa dan jual-beli isu dalam “perang psikologis skala luas” yang dilancarkan terhadap Israel yang tak berdaya, tanda lain dari anti-Semitisme dalam pandangan dunia; di sini Israel menjadi korban, bukan pelaku penyerangan. Mudah untuk menunjukkan bahwa tuduhan itu keliru, sering kali menggelikan, dan bisa diduga media akan tunduk untuk melihat persoalan dari sudut pandang Israel, bukan perkara mudah bagi para jurnalis bertahan hidup di tengah teror bom Israel.

Kesaksian dari sumber-sumber Israel sering kali jauh lebih keras dari yang dilaporkan di pers AS, dan yang

diberitakan di surat kabar AS sering kali sudah diperhalus dari yang sebenarnya dirasakan jurnalis.<sup>107</sup> Namun, tuduhan itu disikapi dengan sangat serius meski tampak absurd, sedangkan kritik akurat terhadap media untuk kepatuhannya pada perspektif AS-Israel dan penyembunyian sejumlah fakta diabaikan begitu saja. Secara tipikal, kajian “Analisis Liputan Media tentang Perang 1982 di Lebanon” memuat begitu banyak pengaduan terhadap pers yang diduga “anti-Israel” pembelaan media terkait tuduhan ini, tetapi bahkan tidak merujuk pada fakta adanya analisis kritis yang cukup akurat dan ekstensif mengenai kenyataan yang persis sebaliknya.<sup>108</sup> Dalam batas ketat iklim intelektual AS yang sangat ideologis, hanya kritik pertama yang bisa diterima. Ini fenomena yang cukup khas—tampak jelas dalam kaitannya dengan Perang Indochina, perang Amerika Tengah, dll.—dan masih berfungsi sebagai perangkat lain dari pengendalian pikiran.

Operasi Tinju Besi, yang dengan enteng disebut “terorisme” oleh komandan Israel (lihat ucapan Jenderal Ilya, dikutip di atas), memiliki dua tujuan utama. Yang *pertama*, John Kifner menyatakan (dari Lebanon), “untuk membuat populasi melawan gerilyawan dengan meningkatkan risiko akibat sikap mendukung mereka”; singkatnya, untuk menjadikan penduduk sebagai sandera serangan teroris, kecuali mereka menerima ketentuan yang dipaksakan Israel. Tujuan *kedua*, memperburuk konflik internal di Lebanon dan untuk mengganti penduduk secara umum setelah perselisihan

antarkelompok, yang sebagian besar tampaknya akibat hasutan penjajah sejak 1982, dengan cara-cara klasik. “Ada banyak bukti,” ucap koresponden di Lebanon, Jim Muir, “orang Israel menyulut dan mendorong konflik Kristen-Druze” di wilayah Chouf. Di selatan, seorang petugas senior lembaga bantuan internasional mengatakan: “Berbagai trik kotor mereka lakukan untuk menimbulkan masalah, tetapi ternyata tidak berhasil.”

“Perbuatan mereka sangat jahat,” demikian pandangan “yang dimiliki lembaga bantuan internasional secara umum”.

“Saksi mata setempat melaporkan bahwa tentara Israel sering menembaki Kamp Palestina dari daerah Kristen terdekat untuk menghasut rakyat Palestina agar melawan orang Kristen”, dan penduduk di desa Kristen mengatakan patroli Israel memaksa orang Kristen dan orang Islam saling pukul di bawah todongan senjata, di antara sejumlah bentuk lain “pelecehan yang aneh”. Cara ini pada akhirnya membuahkan hasil. Orang Kristen sekutu Israel menyerang umat Muslim di dekat Sidon dengan cara yang niscaya memicu respons lebih keras, memicu lingkaran kekerasan yang kemudian menyebabkan pindahnya puluhan ribu orang Kristen, sebagian besar ke wilayah selatan yang didominasi Israel, sementara puluhan ribu kaum Syi’ah didesak bergerak ke utara lewat Operasi Tinju Besi yang dilancarkan Peres.<sup>109</sup>

Dalih yang berkembang di Amerika Serikat adalah bahwa Israel selalu berencana untuk menarik diri hingga akhirnya teroris Syi’ah secara semena-mena melakukan

kekerasan sesuai kebiasaan orang Arab, dan membuat Israel terpaksa menunda penarikan yang sudah direncanakan. Namun seperti diamati Jim Muir dengan tepat, “Adalah fakta sejarah yang melampaui segala perdebatan bahwa Israel tidak akan menarik diri bukan karena serangan yang dilakukan dan korban yang berjatuhan,” dan tingkat penarikan mundur pasukan itu hanya ditentukan intensitas resistensi yang muncul.<sup>110</sup>

Perintah tinggi Israel menjelaskan korban Operasi Tinju Besi adalah “penduduk desa teroris”; sehingga bisa dimengerti bagaimana 13 warga desa dibantai milisi SLA dalam insiden yang memicu pengamatan lebih lanjut. Yossi Olmert dari Shiloah Institute, Institut Kajian Strategis Israel, menyatakan “para teroris beroperasi dengan dukungan sebagian besar masyarakat setempat.”

Seorang komandan Israel mengeluhkan, “Para teroris ... punya banyak mata di sini, karena mereka tinggal di sini.” Sedangkan koresponden militer dari *Jerusalem Post* menjelaskan masalah yang dihadapi dalam memerangi “tentara bayaran teroris” dan “kelompok fanatik, yang cukup gigih berjuang dan siap mati saat menyerang IDF,” yang harus “menjaga ketertiban dan keamanan” di wilayah pendudukan di Lebanon selatan, meski ada “harga yang harus dibayarkan oleh penduduk”. Ia mengungkapkan “kekagumannya terhadap cara mereka melakukan pekerjaannya.”

Leon Wieseltier menjelaskan perbedaan antara “terorisme Syi’ah” terhadap tentara pendudukan dan terorisme Palestina, yang masing-masing menunjukkan



watak jahat warga Arab: “Palestina punya pembunuh yang memang ingin membunuh, sementara Syi’ah punya pembunuh yang ingin mati”. Mereka melakukan tindakan yang “diilhami oleh kebutuhan akan hadirnya juru selamat dunia, yang tidak cukup sekadar dipenuhi secara politik dan diplomatik”, tidak sesederhana menyingkirkan tentara pendudukan dari tanah air mereka. Sebaliknya, “tentara rahasia” mereka, Amal, telah “dibaiat” untuk “menghancurkan Israel” sejak didirikan pada 1975—narasi yang melampaui dongeng yang dibuat-buat dalam sistem Hasbara Israel.<sup>111</sup>

Konsep terorisme yang sama banyak digunakan pejabat dan pengamat di AS. Demikianlah persewartakan, tanpa ulasan, keprihatinan Menteri Luar Negeri Shultz tentang “terorisme internasional” menjadi “hasratnya” setelah aksi bom bunuh diri terhadap marinir AS di Lebanon pada Oktober 1983—pasukan yang dipandang penduduk, tidak aneh, sebagai kekuatan militer asing yang dikirim untuk memaksakan “Orde Baru” yang dikukuhkan lewat agresi Israel. Barry Rubin mencatat, “Manfaat penting terorisme yang disponsori Suriah di Lebanon adalah memaksa penarikan pasukan Israel dan Marinir AS,” sementara Iran dan Suriah terus mendukung “aksi teroris” oleh “kelompok ekstremis Syi’ah” di Lebanon selatan, seperti serangan terhadap “Tentara Lebanon Selatan yang didukung Israel”. Bagi pendukung teror negara, perlawanan terhadap tentara pendudukan atau tentara bayaran setempat adalah terorisme, yang patut dibalas dengan keras.

Koresponden *Times* Israel, Thomas Friedman, secara rutin menggambarkan serangan di Lebanon selatan terhadap pasukan Israel sebagai “bom teror” atau “terorisme bunuh diri,” yang—dia meyakinkan kita—merupakan produk dari “lemahnya aspek psikologis atau semangat religius”. Ia melaporkan lebih lanjut bahwa penduduk di “zona keamanan” Israel yang melanggar peraturan yang ditetapkan penjajah akan “ditembak di tempat, tanpa basa-basi. Sebagian yang ditembak adalah peninjau yang tak terlibat perang.”

Akan tetapi, ini bukan praktik terorisme negara. Ia juga mencatat Israel “telah berusaha membatasi lalu lintas berita di wilayah ini”: “Tidak ada wartawan yang boleh meliput dampak aksi serangan bunuh diri, dan nyaris tidak ada informasi yang dirilis mengenai hal itu”. Toh, fakta ini tidak menghalanginya untuk mengabarkan dengan penuh keyakinan tentang latar belakang serta kondisi dan gangguan psikologis kubu yang dicap teroris oleh para penjajah.<sup>112</sup>

Saat Reagan dan Peres berjabat tangan saling mengucapkan selamat terkait sikap tegas mereka terhadap “momok jahat terorisme” di hadapan para pengagum setianya, pers melaporkan satu lagi aksi teroris di Lebanon selatan: “Teroris Membunuh 6 Orang, Menghancurkan Stasiun Radio Kristen Milik AS di Lebanon Selatan”, demikian tajuk utama pada hari yang sama.<sup>113</sup> Mengapa teroris Lebanon menghancurkan “*Voice of Hope*”, yang dijalankan misionaris Kristen Amerika? Pertanyaan ini tidak dibahas. Namun, mari kita telisik

lebih lanjut, demi mengklarifikasi konsep terorisme dan aksi balasan.

Salah satu alasannya, stasiun itu “menyuarakan kepentingan Tentara Lebanon Selatan”<sup>114</sup>, pasukan bayaran yang didirikan Israel di Lebanon selatan untuk meneror penduduk di “zona aman”. Lokasi stasiun radion, di dekat Desa Khiam, juga layak diperhatikan. Khiam memiliki sejarah panjang bagi Lebanon dan Israel, kendati asing bagi AS. Ze’ev Schiff menyinggung sejarah ini di tengah operasi militer Tinju Besi yang dijalankan Peres. Ia menuturkan, ketika Israel menyerang Lebanon pada 1982, Desa Khiam “sepi penghuni”, meskipun sekarang terdiri atas 10 ribu jiwa—sementara Kota Nabatiya di Lebanon hanya terdiri atas 5.000 jiwa, dan hari ini 50 ribu. “Mereka dan penduduk lainnya lagi-lagi akan harus meninggalkan rumah mereka jika membiarkan kehadiran kelompok ekstremis di tengah komunitas mereka atau membiarkan Palestina menyerang permukiman Israel,” Schiff menjelaskan.<sup>115</sup> Begitulah nasib mereka jika mempermainkan IDF, yang kemudian menyerang desa-desa Lebanon, membunuh penduduk sipil secara acak dan menghancurkan pertahanan terhadap “terorisme (yang) tidak kunjung lenyap” karena “tentara Israel mengacau setiap hari di Lebanon selatan”<sup>116</sup>.

Bagi orang Lebanon yang mendapat peringatan tersebut, dan setidaknya beberapa kelompok warga Israel yang punya akses informasi lebih baik, Schiff tidak harus menjelaskan penyebab penduduk Nabatiya berkurang menjadi 5.000 dan Khiam dikosongkan pada 1982. Ya,

penduduk Khiam telah diusir, dengan ratusan orang terbunuh, oleh pengeboman teror Israel sejak awal 1970-an, dan segelintir orang yang tinggal di Khiam dibantai selama invasi ke Lebanon pada 1978, di bawah pengawasan brigade elite Golani, oleh milisi Israel, Haddad, yang “Relatif berhasil menciptakan perdamaian di wilayah ini dan mencegah kembalinya teroris PLO,” demikian sang tokoh perdamaian menjelaskan.<sup>117</sup>

Khiam juga merupakan situs “penjara rahasia” yang dikelola “Israel dan sekutu milisi lokalnya di Lebanon selatan ... tempat tahanan dikurung dalam kondisi yang mengerikan dan dipukuli dan disetrum, menurut mantan narapidana dan petugas bantuan internasional di daerah tersebut.” Palang Merah melaporkan bahwa “Israel menjalankan penjara”, dan petugas Palang Merah dilarang masuk oleh IDF.<sup>118</sup> Mengonfirmasi laporan ini, Horowitz menambahkan, Israel telah “belajar dari Ansar”, kamp konsentrasi yang dijalankan IDF. Karena itu, ia mengatur agar tentara bayaran SLA untuk menjalankan bilik penyiksaan Khiam agar bisa menangkis kritik. Laporan ekstensif tentang penyiksaan mantan tahanan ini diabaikan di AS, tetapi tidak di negara lain.

Mengutip bukti ini, Paul Kessler (dari College de France, salah satu pendiri Komite Dokter Prancis untuk Yahudi Soviet) menyatakan sebagian besar tahanan “didakwa sebagai tersangka dalam operasi militer atau merupakan penduduk desa yang ditangkap karena menolak bekerja sama dengan kuasa pendudukan, dan khususnya, karena menolak bergabung dengan ‘milisi

bersenjata Lebanon Selatan' yang dipimpin Israel"; tidak ada yang didakwa atau diadili, meski kemudian ditahan lebih dari 1 tahun. Khiam adalah tempat utama, tetapi bukan satu-satunya. Kessler melaporkan penyiksaan sistematis oleh penjaga SLA, yang mengoperasikan penjara "di bawah arahan petugas Israel".<sup>119</sup>

Dan ada lebih banyak lagi yang bisa dikatakan tentang serangan teroris oleh "kelompok fanatik" di Khiam pada 17 Oktober 1985, yang dianggap sesuai untuk menjadi bagian dari ingatan sejarah di samping tindakan teror lainnya guna keperluan ideologis yang lebih besar.

Nabatiya juga punya cerita lain. Perginya 50 ribu dari 60 ribu penduduk "terutama karena ketakutan akibat penembakan [Israel]" dilaporkan dua koresponden *Jerusalem Post* yang sedang melakukan perjalanan ke Lebanon selatan untuk menggali bukti teror dan kekejaman PLO, dan hanya menemukan sedikit keterangan mengenai ini, meskipun ada banyak bukti teror Israel dan pengaruhnya.<sup>120</sup> Salah satu serangan membabi buta terjadi pada 4 November 1977, ketika Nabatiya "dihujani tembakan artileri berat dari kubu Maronite Lebanon [yang didukung Israel] dan juga dari pasukan Israel di kedua sisi perbatasan—termasuk sebagian dari enam titik pangkalan Israel di Lebanon. Serangan berlanjut keesokan harinya, dengan tiga wanita terbunuh di antara korban lainnya. Pada 6 November, dua roket yang ditembakkan gerilyawan Fatah menewaskan dua orang Israel di Nahariya, mengawali pertempuran dan serangan roket kedua yang menewaskan satu orang Israel.

“Kemudian terjadi serangan udara Israel yang menyebabkan sekitar 70 orang, hampir semuanya warga Lebanon, terbunuh.”<sup>121</sup>

Perselisihan yang diprakarsai Israel ini, yang dapat menimbulkan perang besar, disebut Presiden Mesir Sadat sebagai alasan untuk kesediaannya mengunjungi Jerusalem beberapa hari kemudian.<sup>122</sup>

Berbagai peristiwa ini telah terbenam dalam memori sejarah dalam bentuk yang berbeda, bagaimanapun, tidak hanya di dunia jurnalistik, tetapi juga kajian akademik: “Untuk mengganggu upaya menuju konferensi perdamaian,” Edward Haley menulis (tanpa bukti), “PLO melepaskan roket Katyusha ke Desa Nahariya, Israel utara, pada 6 dan 8 November, menewaskan tiga orang, dan memunculkan “aksi balasan Israel yang tak terelakkan” pada 9 November, dengan lebih dari 100 orang terbunuh dalam serangan “di Tirus dan sekitarnya dan dua kota kecil di selatan”.<sup>123</sup> Sesuai aturan mainnya, dalam sejarah yang disterilkan, rakyat Palestina melakukan terorisme, orang Israel kemudian membalas, dengan lebih keras. Di dunia nyata, kebenaran sering kali agak berbeda, tidak mudah untuk mempelajari terorisme di Timur Tengah.

Penganiayaan Nabatiya jarang dicatat pers Barat, meski ada beberapa pengecualian. Salah satu serangan terjadi pada 2 Desember 1975, ketika angkatan udara Israel mengebom kota tersebut serta menewaskan puluhan warga sipil Lebanon dan Palestina, dengan senjata antipersonel, bom, dan roket.<sup>124</sup> Serangan ini ternyata

diberitakan, tetapi tidak menimbulkan perhatian atau kekhawatiran, mungkin karena ini merupakan “aksi balasan”, yaitu terhadap Dewan Keamanan PBB, yang baru saja menyetujui untuk mengawali pembahasan proposal perdamaian yang didukung Suriah, Yordania, Mesir, dan PLO, sebagaimana dibahas di Bab 1.

Cerita berlanjut dengan sedikit perubahan. Pada awal 1986, sementara mata dunia terfokus pada kengerian akan teroris gila di dunia Arab, pers menyebutkan bahwa meriam tank Israel menghujani tembakan ke desa Sreifa di Lebanon selatan, menghantam 30 rumah. IDF mengklaim mereka diserang dari rumah itu oleh “teroris bersenjata” yang melakukan penyergapan dalam apa yang mereka sebut operasi militer untuk mencari dua tentara Israel yang telah “diculik” di “zona aman” Israel di Lebanon.

Pers Amerika juga pada umumnya tak memuat laporan pasukan penjaga perdamaian PBB bahwa pasukan Israel “benar-benar gila” dalam operasi ini, mengepung seluruh desa, mencegah tentara PBB mengirim air, susu, dan jeruk ke penduduk desa yang “diinterogasi”—penyiksaan brutal terhadap pria dan wanita oleh pasukan Israel, dan tentara bayaran lokal mereka dengan pasukan IDF berdiri di dekatnya. IDF kemudian pergi, membawa banyak penduduk desa termasuk wanita hamil, beberapa dibawa ke Israel dengan melanggar hukum internasional. Mereka juga menghancurkan rumah-rumah dan menjarah dan merusak bangunan lain, sementara Shimon Peres menyatakan upaya pencarian Israel atas tentaranya yang

diculik “mengungkapkan sikap kita terhadap nilai kehidupan dan martabat manusia”.<sup>125</sup>

Sebulan kemudian, pada 24 Maret, radio Lebanon melaporkan bahwa pasukan Israel, baik tentara bayaran IDF atau SLA, menembaki Nabatiya, membunuh 3 warga sipil, dan melukai 22 lainnya, tatkala “tembakkan meriam menghantam pasar di pusat kota saat fajar, tempat banyak orang berkumpul untuk berdagang”. Serangan tersebut diduga sebagai balasan atas serangan terhadap tentara bayaran Israel di Lebanon selatan. Seorang pemimpin Amal Syi’ah menegaskan, “permukiman dan bangunan Israel tidak akan lolos dari serangan perlawanan”. Pada 27 Maret, sebuah roket Katyusha menghantam halaman sekolah di Israel utara, melukai 5 orang, dan menimbulkan serangan Israel di kamp-kamp pengungsi Palestina di dekat Sidon, menewaskan 10 orang dan melukai 22 lainnya, sementara komandan Israel utara menyatakan melalui radio tentara Israel bahwa IDF belum tahu pasti apakah roket tersebut ditembakkan gerilyawan Syi’ah atau Palestina. Pada 7 April, sejumlah pesawat Israel mengebom kamp-kamp yang sama dan desa di sekitarnya, menewaskan 2 orang dan melukai 20 lainnya, dengan mengklaim bahwa teroris berkumpul di sana dan bermaksud untuk membunuh warga Israel.<sup>126</sup>

Dari semua kejadian ini, hanya serangan roket ke Israel utara yang masuk liputan TV dengan disertai kesedihan dan kemarahan umum terhadap “momok jahat terorisme”, meskipun tidak terlalu menggema karena histeria massal kemudian diarahkan pada “invasi”



Nikaragua di Honduras, saat Angkatan Bersenjata Nikaragua menggunakan hak hukum untuk sekuat tenaga mengusir gerombolan teroris yang dikirim AS ke wilayah mereka, dalam sebuah aksi yang berlangsung tepat sebelum pemungutan suara Senat mengenai bantuan untuk Contra; ingat satu-satunya masalah serius yang diperdebatkan di negara teroris adalah apakah tentara pihak ketiga dapat menjalankan tugas yang diberikan oleh tuan mereka.<sup>127</sup>

Sebaliknya, Israel tidak menggunakan hak hukum untuk memburu penjahat saat menembaki dan mengebom sejumlah kota dan tempat pengungsian, juga tidak punya dasar untuk melakukan tindakan terorisme skala besar dan agresi terang-terangan di Lebanon yang termasuk dalam konsep ini. Namun sebagai negara sekutu, Israel mewarisi hak untuk melakukan terorisme, penyiksaan, dan agresi dari sang kaisar. Dan Nikaragua, sebagai musuh, jelas tidak memiliki hak untuk mempertahankan wilayahnya dari terorisme internasional AS. Akibatnya, wajar jika tindakan Israel harus dibiarkan, atau dianggap sebagai pembalasan yang sah; sementara Kongres, di seberang spektrum nan sempit, mencela “Marxis-Leninis Nikaragua” atas aksi mereka yang mengancam perdamaian dan stabilitas regional.

Invasi Israel ke Lebanon pada Juni 1982 juga disterilkan dengan baik. Shimon Peres menulis bahwa operasi “Peace for Galilee” dilancarkan “untuk memastikan bahwa Galilea tidak lagi diterjang roket Katyusha.”

Eric Breindel menjelaskan, “Tentu saja, tujuan utama invasi Israel pada 1982” adalah “untuk melindungi wilayah Galilea ... dari serangan roket Katyusha dan tembakan lainnya dari Lebanon.”

Halaman berita *Times* menginformasikan kepada kita bahwa invasi tersebut dimulai “setelah serangan gerilyawan Organisasi Pembebasan Palestina di permukiman utara Israel”, dan (tanpa kutipan) bahwa para pemimpin Israel “mengatakan ingin mengakhiri serangan roket dan tembakan di perbatasan utara Israel”, yang “sudah bisa dicapai setelah 3 tahun tentara Israel berdiam di Lebanon”.

Henry Kamm pun menambahkan, “Selama hampir 3 tahun, orang-orang Qiryat Shemona tak lagi tidur di tempat perlindungan, dan orang tua tidak khawatir saat anak-anak mereka pergi ke sekolah atau bermain. Roket-roket Katyusha buatan Soviet, yang selama bertahun-tahun menyerang kota ini di dekat perbatasan Lebanon secara acak, tak lagi menghantam sejak Israel menyerang Lebanon pada Juni 1982.”

Dan Thomas Friedman menyatakan, “Jika roket-roket kembali menghujani perbatasan utara Israel setelah semua itu dilakukan di Lebanon, publik Israel akan marah”; “... Saat ini tidak ada roket yang mendarat di Israel utara .... Dan jika serangan berskala besar dimulai lagi di perbatasan utara Israel, kelompok minoritas itu (yang lebih memilih menempatkan tentara di Lebanon) dapat tumbuh menjadi mayoritas lagi.”

“Operasi Perdamaian untuk Galilea—invasi Israel ke Lebanon—awalnya dilakukan” untuk melindungi penduduk sipil dari tembakan Palestina, demikian Friedman melaporkan dalam salah satu dari sekian banyak cerita tentang kerja keras orang-orang Israel yang menderita.

Para politikus juga acap kali mengungkapkan doktrin yang sama. Zbigniew Brzezinski menuliskan, “Meningkatnya kehadiran militer Suriah dan penggunaan Lebanon oleh Organisasi Pembebasan Palestina untuk menyerang Israel telah memicu invasi Israel [1982].” Sedangkan Ronald Reagan, dalam gaya khas kemunafikan moralitas, meminta kita untuk “mengingat bahwa ketika semua [invasi] dimulai, Israel, karena pelanggaran perbatasan utara oleh orang-orang Palestina sendiri, PLO, telah jauh menjangkau Beirut,” tempat “10 ribu orang Palestina [!] telah membawa kehancuran di Beirut”, bukan pembom yang ia dukung.<sup>128</sup>

Cerita ini dan laporan lain yang tak terhitung banyaknya, dengan deskripsi rinci seputar tentang kesengsaraan orang Galilea yang menjadi sasaran pemboman Katyusha, membantu menciptakan gambaran umum mengenai kubu fanatik Palestina yang dipersenjatai Soviet, sebagai komponen utama jaringan teror internasional yang berbasis di Rusia, yang memaksa Israel untuk menyerang dan menghancurkan kamp pengungsi Palestina dan target lainnya, seperti akan dilakukan negara mana pun untuk membela rakyatnya dari serangan teroris yang membabi buta.

Dunia nyata, sekali lagi, agak berbeda. David Shipler mencatat, “Dalam 4 tahun antara invasi Israel sebelumnya ke Lebanon selatan pada 1978 dan invasi pada 6 Juni 1982, sebanyak 29 orang terbunuh di Israel utara akibat segala bentuk serangan dari Lebanon, termasuk pengeboman dan pelanggaran perbatasan oleh teroris.” Namun, 1 tahun sebelum invasi 1982, “suasana perbatasan cukup tenang”.<sup>129</sup>

Laporan ini bisa dibilang luar biasa, setidaknya mendekati setengah kebenaran. Sementara PLO menahan diri dari tindakan melintasi batas wilayah selama 1 tahun sebelum invasi Israel, suasana perbatasan tidak tenang-tenang saja. Sebab, teror Israel berlanjut, menewaskan banyak warga sipil; sekali lagi perbatasan hanya “tenang” dalam istilah rasis wacana AS. Selain itu, baik Shipler maupun rekannya tidak ingat bahwa saat 29 orang terbunuh di Israel utara dari 1978, ribuan orang terbunuh akibat pengeboman Israel di Lebanon, yang jarang dicatat di AS, dan jarang berupa “aksi balas dendam”.

Pengeboman dari 1978 merupakan elemen sentral dari “proses perdamaian” Kamp David, yang—sudah bisa diduga—membebaskan Israel untuk melanjutkan pengambilalihan dan penindasan di wilayah pendudukan seraya menyerang tetangganya di utara, dengan penghalang utama Arab (Mesir) kini tak lagi terlibat dalam konflik dan dengan peningkatan dukungan militer AS. William Quandt mencatat lebih jauh, “Rencana operasional Israel untuk menginvasi Lebanon guna melawan PLO [pada 1981—1982] tampaknya bertepatan

dengan konsolidasi perjanjian damai Mesir-Israel.” Perlu dicatat bahwa arti penting Perjanjian Kamp David, meski hampir tak disinggung di AS pada saat itu dan karena itu, dipahami oleh wartawan Amerika yang kompeten.

Maka dalam sesi wawancara di Israel, David Shipler mengatakan, “Di pihak Israel, tampak bagi saya bahwa perjanjian perdamaian ini mengondisikan situasi untuk peperangan di Lebanon. Karena tak harus lagi berkonfrontasi dengan Mesir, Israel merasa bebas untuk memulai perang di Lebanon, sesuatu yang mungkin tidak berani dilakukan sebelum perjanjian damai tersebut .... Ironis bahwa perang di Lebanon tidak mungkin terjadi tanpa perjanjian damai”; tidak sepenuhnya ironis, melainkan merupakan bagian intrinsik dari prosesnya.<sup>130</sup> Sepengetahuan saya, ia tidak menuliskannya selama 5 tahun menjadi koresponden *Times* di Israel—yang berakhir pada Juni 1984—ataupun setelahnya.

Shipler menambahkan, “Saya pikir tidak akan ada perlawanan yang luar biasa terhadap perang di kalangan warga Israel tanpa perjanjian damai semacam ini.” Berada di Israel saat itu, ia pasti tahu “pertentangan yang luar biasa terhadap perang” adalah propaganda rekayasa *post-hoc* yang dirancang untuk memulihkan citra “Israel yang elok”. Sebenarnya, hanya ada sedikit pertentangan hingga pembantaian pascaperang Sabra-Shatila (ketika pendukung perang di AS juga meninggalkan kapal yang tenggelam, membangun sejarah penipuan tentang “oposisi sebelumnya”, seperti dalam kasus perang

Indochina), dan kemudian peningkatan ongkos pendudukan.<sup>131</sup>

Beralih ke dunia nyata, perlu dipertimbangkan terlebih dulu latar belakang operasi “Damai untuk Galilea”. PLO mengikuti gencatan senjata yang ditetapkan AS pada Juli 1981, meskipun berulang kali Israel berupaya menyulut sejumlah tindakan yang dapat digunakan sebagai dalih untuk menjalankan invasi yang direncanakan, termasuk pemboman akhir April 1982 yang menewaskan 24 orang, tenggelamnya kapal nelayan, dll. Satu-satunya pengecualian adalah balasan ringan pada Mei setelah pemboman Israel, dan respons terhadap serangan bom berat Israel dan serangan darat di Lebanon pada Juni yang menimbulkan banyak korban sipil. Serangan Israel ini dilancarkan dalam “aksi balasan” atas percobaan pembunuhan Duta Besar Israel di London oleh Abu Nidal, musuh bebuyutan PLO, yang bahkan tidak memiliki markas di Lebanon—lagi, kisah familier tentang “aksi balasan”. Usaha pembunuhan ini digunakan sebagai dalih untuk invasi yang telah lama direncanakan.

*New Republic* mengabarkan kepada kita bahwa keberhasilan negosiator PBB Brian Urquhart, “entah bagaimana dipandang sebelah mata, dan terlupakan: negosiasi untuk gencatan senjata PLO di Lebanon selatan pada 1981, misalnya”.<sup>132</sup> Tidak mengherankan jika surat kabar yang patuh pada kebijakan partai lebih memilih untuk “melupakan” fakta tersebut, tetapi penyimpangan memori yang begitu mudah dianggap wajar itu patut diperhatikan.

Peristiwa Juli 1981 mengikuti pola yang sama. Pada 28 Mei, Ze'ev Schiff dan Ehud Ya'ari menuliskan, Perdana Menteri Menachem Begin dan Kepala Staf Rafael Eitan “mengambil langkah lain yang akan membawa negara mereka lebih dekat menuju perang di Lebanon dengan tindakan yang pada dasarnya disengaja untuk tujuan akhir itu”; yaitu, melanggar gencatan senjata dengan pengeboman “pusat PLO” (istilah yang biasa digunakan untuk merujuk pada target Israel, apa pun mereka) di Lebanon selatan. Serangan terus berlanjut dari udara dan laut sampai 3 Juni, Schiff dan Ya'ari menambahkan, sementara “rakyat Palestina menanggapi dengan hati-hati karena khawatir reaksi yang keras hanya akan memancing operasi militer Israel yang lebih besar.” Gencatan senjata kembali dilakukan, dan dirusak lagi oleh Israel pada 10 Juli, dengan pengeboman lainnya. Kali ini Palestina bereaksi dengan serangan roket yang menimbulkan kepanikan di Galilea utara, diikuti serangan bom Israel di Beirut dan sasaran sipil lainnya. Saat gencatan senjata diumumkan pada 24 Juli, sekitar 450 orang Arab—hampir semua warga sipil Lebanon—dan 6 orang Israel terbunuh.<sup>133</sup>

Dari cerita ini, yang diingat hanyalah serangan di Galilea utara, yang diterjang roket Katyusha oleh teroris PLO hingga akhirnya memaksa Israel untuk melakukan aksi balasan dengan invasi Juni 1982 ke Lebanon. Hal ini terkadang dianggap benar, bahkan bagi jurnalis serius yang tidak hanya menyediakan ruang untuk propaganda resmi. Edward Walsh menuliskan, “Serangan roket yang

diulang pada 1981 telah menempatkan [Qiryat Shemona] dalam kepungan”, menggambarkan sikap “orang tua yang putus asa” dan teror yang disebabkan oleh “gempuran artileri dan roket dari basis Palestina di dekatnya” pada 1981 itu tanpa keterangan lebih lanjut tentang apa yang sedang terjadi.

Curtis Wilkie, salah satu jurnalis Amerika yang skeptis dan cekatan di Timur Tengah, menulis bahwa Qiryat Shemona “hangus terbakar akibat pasukan Organisasi Pembebasan Palestina pada 1981; serangan roket Katyusha buatan Soviet begitu gencar sehingga penduduk yang tidak melarikan diri dipaksa menghabiskan 8 hari dan malam berturut-turut di tempat perlindungan”; Sekali lagi, tanpa ulasan lebih lanjut tentang alasan “hangus terbakar” ini atau suasana di Beirut dan daerah permukiman lainnya, tempat ratusan orang terbunuh akibat serangan bom Israel.<sup>134</sup>

Contoh tersebut memberi wawasan lebih jauh tentang konsep “terorisme” dan “aksi balasan”, sebagaimana ditafsirkan dalam sistem ideologis AS, dan dalam asumsi yang—tentu saja—menyingkirkan penderitaan korban utama dengan dalih yang lazim diungkapkan.

Laporan resmi bahwa “serangan roket dan tembakan di perbatasan utara Israel” berakhir berkat operasi “Peace for Galilee” (*NYT*; lihat di atas) keliru dalam dua hal. *Pertama*, suasana di perbatasan itu “tenang” selama 1 tahun sebelum invasi akibat serangan teror dan provokasi Israel; dan serangan roket utama, pada Juli 1981, merupakan respons terhadap teror Israel yang dalam kejadian ini saja



menimbulkan korban hampir 100 kali lebih besar daripada respons PLO. *Kedua*, berbeda dengan periode sebelumnya, serangan roket terhadap Israel dimulai tak lama setelah invasi berakhir, dari awal 1983, dan terus berlanjut. Sekelompok wartawan pembangkang dari Israel menyebutkan, dalam 2 minggu pada September 1985, 14 roket Katyusha ditembakkan ke Galilea. Selanjutnya, “serangan teroris” meningkat 50 persen di Tepi Barat dalam bulan-bulan setelah perang, dan pada akhir 1983 telah meningkat 70 persen sejak perang di Lebanon, menjadi ancaman gawat pada 1985—bukan konsekuensi mengejutkan atas kekejaman dan penghancuran terhadap masyarakat sipil dan sistem politik rakyat Palestina.<sup>135</sup>

Alasan sebenarnya untuk invasi 1982 bukanlah ancaman bagi Galilea utara, sebagaimana diungkap dalam sejarah yang disterilkan, tetapi sebaliknya, seperti dijelaskan dengan masuk akal setelah invasi diluncurkan, oleh pakar terkemuka Israel di Palestina, Profesor Universitas Yahudi, Yehoshua Porath (sosok “moderat” dalam ungkapan Israel, yang mendukung “solusi Yordania” dari Partai Buruh untuk rakyat Palestina). Keputusan untuk menyerang, menurutnya, “mengacu pada fakta bahwa gencatan senjata telah dipatuhi”. Inilah “malapetaka sesungguhnya” bagi pemerintah Israel, karena mengancam kebijakan untuk menghindari penyelesaian politik.

“Pemerintah berharap,” ia melanjutkan, “PLO terdesak, kekurangan dukungan logistik dan basis teritorial, sehingga kembali pada aksi terorisme sebelumnya;

melakukan pengeboman di seluruh dunia, membajak pesawat terbang, dan membunuh banyak orang Israel,” dan dengan demikian, “akan kehilangan sebagian legitimasi politik yang diperolehnya” dan “melemahkan bahaya” perundingan dengan orang-orang Palestina yang representatif, yang akan mengancam kebijakan—dianut kedua kelompok politik utama—untuk menjaga kontrol efektif atas wilayah pendudukan.<sup>136</sup>

Secara masuk akal, pemimpin Israel mengasumsikan bahwa mereka yang membentuk opini publik di Amerika Serikat—satu-satunya negara yang diperhitungkan, kini Israel telah memilih untuk menjadi negara tentara bayaran yang melayani kepentingan tuannya—dapat diandalkan buat menghapus sejarah sebenarnya dan menggambarkan tindakan teroris akibat agresi dan kekejaman Israel sebagai kekerasan semena-mena dianggap sesuai cacat dalam karakter dan budaya Arab, jika bukan cacat rasial. Tanggapan AS tentang terorisme selanjutnya memenuhi harapan ini dengan cukup tepat, propaganda utama yang lihai untuk negara teroris di Jerusalem dan Washington.

Poin mendasar ini dipahami dengan baik di Israel. Perdana Menteri Yitzhak Shamir menyatakan di stasiun televisi Israel bahwa Israel berperang karena ada “ancaman mengerikan ... bukan semata ancaman militer, melainkan juga politis,” mendorong satiris Israel, B. Michael, untuk menulis bahwa “alasan mengada-ada soal ancaman militer atau ancaman bagi Galilea niscaya mati”, begitu kita “menyingkirkan ancaman politik” dengan

menyerang terlebih dulu; sekarang, “Syukurlah, tidak ada yang membicarakannya.”

Kolumnis Aaron Bachar berpendapat, “Mudah untuk memahami iklim kepemimpinan Israel. Arafat dituduh terus bergerak menuju semacam akomodasi politik dengan Israel” dan “di mata pemerintah Israel, ini ancaman terburuk”—termasuk Partai Buruh dan Likud.

Wartawan/sejarawan Benny Morris mengungkapkan, “PLO menahan diri di sepanjang perbatasan utara selama 1 tahun penuh, dalam beberapa kesempatan tak bereaksi terhadap tindakan Israel (dirancang khusus untuk memancing PLO di Utara).”

Bagi perwira senior IDF, ia melanjutkan, “Perang tersebut tak terelakkan karena PLO merupakan ancaman politik bagi Israel dan bagi cengkeraman Israel atas daerah pendudukan” karena “harapan bangsa Palestina di dalam dan luar daerah pendudukan untuk mewujudkan aspirasi nasional bertumpu pada PLO. Seperti setiap komentator waras, Moris heran dengan histeria tentang ancaman militer PLO, dan meramalkan bahwa “orang-orang Syi’ah di Beirut Barat—banyak di antaranya pengungsi akibat pengeboman Israel sebelumnya di Lebanon selatan pada 1970-an—mungkin akan selalu mengingat pengepungan IDF pada Juni—Agustus [1982] untuk waktu yang lama,” dengan dampak jangka panjang bagi “terorisme Syi’ah terhadap sasaran Israel”.<sup>137</sup>

Di sayap kanan, anggota Knesset dari Likud, Ehud Olmert, mengatakan “bahaya yang ditimbulkan PLO bagi Israel tidak terletak pada ekstremisme, tetapi dalam gaya

moderat fiktif yang berhasil ditunjukkan Arafat tanpa pernah lupa tujuan utamanya, yaitu penghancuran Israel” (bisa dibilang benar, seperti pada David Ben-Gurion, yang saat berkuasa tidak pernah melupakan tujuan akhirnya untuk memperluas “batas-batas aspirasi Zionis”, termasuk sebagian besar negara di sekitarnya dan adakalanya mengacu pada “Perbatasan Alkitab” dari Sungai Nil ke Irak, sementara penduduk asli entah bagaimana akan dipindahkan). Mantan Administrator Tepi Barat Profesor Menachem Milson menyatakan, “Adalah suatu kesalahan untuk berpikir bahwa ancaman terhadap Israel yang diwakili PLO pada hakikatnya berupa ancaman militer; sebaliknya, ini bersifat politis dan ideologis.”

Menteri Pertahanan Ariel Sharon menjelaskan sebelum invasi bahwa “ketenangan di Tepi Barat” mengharuskan “penghancuran PLO di Lebanon”. Dan pengikut ultra-kanannya, Kepala Staf Rafael Eitan, berkomentar kemudian bahwa perang tersebut berhasil, karena sangat melemahkan “status politik” PLO dan “perjuangan PLO untuk negara Palestina”, seraya menegakkan kapasitas Israel “untuk menghalangi tujuan tersebut”. Mengomentari pernyataan tersebut, sejarawan militer Israel Uri Milshstein (pendukung “Solusi Jordanian” dari Partai Buruh) menuturkan tujuan invasi dalam konsepsi Sharon-Eitan antara lain: “untuk membentuk Orde Baru<sup>138</sup> di Lebanon dan Timur Tengah”, “untuk memajukan proses Sadatisasi di beberapa negara Arab”, “untuk menjamin aneksasi Yudea dan Samaria [Tepi

Barat] ke negara Israel”, dan “mungkin solusi atas masalah Palestina”.

Anggota Knesset Amnon Rubinstein, yang sangat dipuji di Amerika Serikat karena sikap liberal dan cinta damainya, menulis bahwa meskipun gencatan senjata “kurang-lebih” telah diikuti (artinya: dipatuhi PLO, tetapi tidak oleh Israel), invasi ke Lebanon “dibenarkan” karena potensi ancaman militer (belum jadi ancaman nyata): senjata dan amunisi di Lebanon selatan pada akhirnya akan digunakan untuk menyerang Israel. Pertimbangkan dampak argumen ini dalam konteks lain, bahkan jika kita menganggap serius klaim tentang potensi ancaman militer PLO ke Israel.<sup>139</sup>

Camkan bahwa Rubinstein memperhitungkan doktrin menarik yang diucapkan pemerintahan Reagan untuk membenarkan pengeboman Libia pada April 1986 demi “membela diri melawan serangan masa depan”, yang akan kita bahas di bab berikutnya.

Para pendukung kekejaman Israel di Amerika terkadang mengakui kebenaran yang sama. Tepat sebelum invasi tersebut, editor *New Republic* Martin Peretz menggemakan pandangan Sharon dan Eitan, mendesak agar Israel menyerang PLO hingga mengalami “kekalahan militer abadi” di Lebanon, dan dengan demikian “akan menunjukkan kepada orang-orang Palestina di Tepi Barat bahwa perjuangan mereka untuk sebuah negara merdeka telah mengalami kemunduran telak”, dan “orang-orang Palestina akan berubah menjadi bangsa lain yang hancur, seperti orang Kurdi atau Afganistan”.

Dan tokoh Sosialis Demokrat Michael Walzer, yang melihat solusi untuk orang Arab Palestina—dan Israel juga—adalah dengan pemindahan orang-orang “marginal di negara itu” (pada dasarnya mirip dengan sikap Rabi Kahane yang rasis; lihat Bab 1, Catatan 59), menjelaskan di *New Republic* setelah perang, “Saya pasti senang menyambut kekalahan politik PLO, dan saya percaya operasi militer terbatas yang dibutuhkan untuk menimbulkan kekalahan dapat dipertahankan berdasarkan teori perang yang adil.”<sup>140</sup>

Sangat menarik untuk mengamati kesamaan terkait persoalan ini antara sayap kanan Israel dan liberalis kiri Amerika.

Singkatnya, tujuan perang itu politis, wilayah pendudukan menjadi target utama, “Orde Baru” di Lebanon menjadi target lain. Kisah tentang melindungi perbatasan dari terorisme adalah Agitprop (propaganda politik era Uni Soviet). Jika terorisme Palestina bisa dihidupkan kembali, semakin baik. Dan jika kita tidak bisa menyalahkan Arafat, setidaknya ia bisa diberi stigma sebagai “Bapak Pendiri Kekerasan Palestina Kontemporer” (*New Republic*) sehingga usahanya untuk penyelesaian politik dapat ditanggulangi.

Mengatasi penyelesaian politik tidak cukup dengan penghancuran basis politik PLO, seperti yang telah diharapkan. Jadi, tetap diperlukan kewaspadaan untuk memerangi ancaman tersebut dan membela kebenaran doktrin bahwa AS dan Israel mencari perdamaian, tetapi masyarakat Arab menolaknya. Maka, pada April—Mei

1984, Arafat membuat serangkaian pernyataan di Eropa dan Asia yang menyerukan agar perundingan dengan Israel diarahkan menuju pengakuan bersama. Tawaran tersebut segera ditolak Israel, dan diabaikan AS. Berita UPI tentang proposal Arafat menghiasi halaman depan *San Francisco Examiner*, dan fakta-fakta yang dilaporkan tidak cukup menonjol dalam konteks lokal. Pers nasional langsung menyisihkan cerita tersebut, terlepas dari penyebutan di *Washington Post* beberapa minggu kemudian. *New York Times* bahkan mendiamkan sejumlah surat pembaca yang mengacu pada fakta tersebut, sambil tetap (bersama yang lain) menolak Arafat karena keengganannya mengikuti ketentuan diplomatik. Secara umum, surat kabar yang berpengaruh cenderung menyembunyikan fakta ini—sikap yang sepenuhnya wajar mengingat posisi pemerintah AS dalam masalah ini.<sup>141</sup>

Orang-orang Israel yang berwawasan tentu saja menyadari pendirian Arafat. Mantan kepala intelijen militer, Jenderal (Purnawirawan) Yehoshaphat Harkabi, ahli kajian Arab dan terkenal agresif, mencatat bahwa “PLO menginginkan penyelesaian politik karena tahu bahwa alternatifnya tidak baik dan akan mengakibatkan kehancuran total.”

“Arafat, seperti Hussein dan orang-orang Arab di Tepi Barat, khawatir jika tidak ada penyelesaian, Israel akan mengamuk, dan hancurlah semua tetangganya, termasuk orang-orang Palestina.” Karena itu, “Arafat mengambil posisi yang relatif moderat sehubungan dengan Israel.”<sup>142</sup>

Pengamatan ini menggarisbawahi beberapa hal: 1) ada konteks politik yang penting ketika terorisme harus dipahami, jika kita ingin mengambil sikap serius; 2) yang termasuk terorisme adalah kejahatan orang lain, bukan tindakan kita yang sebanding atau lebih buruk—dalam kasus ini, berarti kejahatan Palestina, bukan Israel atau Amerika; 3) konsep “terorisme” dan “aksi balasan” digunakan sebagai istilah propaganda, bukan deskripsi. Yang krusial, histeria atas tindakan terorisme yang dipilih dengan cermat—yang dilakukan orang Arab, entah Palestina, Syi’ah Lebanon, Libia, Suriah, atau bahkan Iran, yang dapat dianggap sebagai orang Arab untuk tujuan ini sejak 1979—dan dirancang untuk mencapai tujuan politik tertentu. Penyelidikan lebih lanjut memperkuat kesimpulan ini.

Mari kita tinjau lagi aksi balasan. Serangan roket pertama pasca-1981 oleh orang Syi’ah melawan Qiryat Shemona terjadi pada Desember 1985, setelah lebih dari 3 tahun masa pendudukan militer yang luar biasa brutal, yang mencapai puncaknya pada Operasi Tinju Besi di bawah pimpinan Shimon Peres awal 1985. Namun, hanya sesekali dilaporkan kebiadaban penjajah yang gagal menyampaikan sesuatu secara lengkap, karena mengabaikan kenyataan sehari-hari; hal yang sama berlaku untuk laporan kekejaman Israel di wilayah pendudukan, yang gagal menyampaikan gambaran nyata tentang degradasi, penindasan, eksploitasi tenaga kerja murah (termasuk anak-anak), kontrol keras terhadap kehidupan politik dan budaya, dan penurunan



pertumbuhan ekonomi. Gambaran yang lebih tegas diberikan Julie Flint, menguraikan “kisah hidup dan kematian, di sebuah desa Sy’ah di Lebanon selatan”, 1 bulan sebelum serangan roket.

Kfar Roummane adalah “kota pertanian sejahtera yang terdiri atas 8.000 orang” di dekat Nabatiya pada periode ketika Lebanon selatan disergap teror PLO, menurut riwayat resmi (lihat Catatan 120). Setelah apa yang disebut *New York Times* sebagai “pembebasan” dari PLO, daerah ini dikelilingi “dua benteng besar yang dibangun Israel dan tentara Lebanon selatan”, yang terus-menerus mengeluarkan tembakan, “kadang dari fajar sampai senja, kadang-kadang hanya untuk beberapa jam”, dengan banyak korban jiwa, yang menyebabkan 6.000 orang memilih pindah dan menyisakan tiga per empat kawasan tidak dapat dihuni lagi dan menjadi “kota mati”, tempat tidak ada tanda-tanda aktivitas perlawanan, dan kemungkinan itu kecil terjadi di kalangan petani apolitis di hamparan bukit datar.<sup>143</sup>

Apakah penembakan Qiryat Shemona itu termasuk “terorisme yang tidak beralasan” atau “aksi balasan”, bahkan dengan mengesampingkan kekejaman Operasi Tinju Besi Peres-Rabin?

Perlu juga untuk melihat kehidupan para teroris. Salah satunya diwawancarai *Washington Post* dalam lima seri liputan tentang terorisme, dipilih sesuai cara konvensional. Menjalani 18 tahun hukuman di penjara Israel, ia dipilih karena “dalam banyak hal mewakili

teroris yang sekarang dipenjara dari London sampai Kuwait”.

“Dalam hidupnya, sebuah tragedi pribadi (kematian ayahnya dalam ledakan bom di Jerusalem pada 1946) berpadu dengan sistem kepercayaan (Marxisme), membuatnya terjun ke dunia pembunuhan politik berdarah dingin.”

“Bom yang membunuh ayahnya dan lebih dari 90 orang lainnya dipasang oleh kelompok bawah tanah Zionis, Irgun, yang dipimpin Menachem Begin, di markas militer Inggris di tempat yang sekarang menjadi Hotel Raja Daud”—seperti saat itu.<sup>144</sup> Ia “berkenalan dengan Marxisme, katanya, lewat ‘realitas’ kondisi di kamp-kamp Palestina” di wilayah pendudukan Tepi Barat. “Kenyataan” wilayah pendudukan, tidak hanya di kamp, sangat nyata dan pahit dan kejam, berbeda dengan keterangan di halaman editorial pers nasional, tempat kita diberi tahu bahwa pendudukan adalah “model kerja sama masa depan” dan “eksperimen dalam koeksistensi Arab-Israel”.<sup>145</sup> Toh, keterangan tersebut tidak menjelaskan apa pun, tetap muncul sejumlah pertanyaan tentang penggunaan istilah-istilah semacam “aksi balasan”.

Atau pertimbangkan Suleiman Khater, tentara Mesir yang membunuh tujuh turis Israel di pantai Sinai pada 5 Oktober 1985. Pers Mesir mengabarkan ibunya mengatakan bahwa ia “bahagia karena orang-orang Yahudi itu meninggal”, dan seorang dokter di desanya di Baher al-Bakr menggambarkan pembunuhan tersebut sebagai peringatan terhadap “ilusi perdamaian” antara

Mesir dan Israel. Mengapa sampai muncul reaksi demikian? Pengeboman Tunisia beberapa hari sebelumnya mungkin bisa menjadi alasan, tetapi mungkin ada yang lain. Pada 1970, pesawat tempur Israel mengebom Baher al-Bakr, menewaskan 47 anak sekolah, selama “perang atrisi”, saat Israel yang luas mengebom sejumlah wilayah Mesir, membuat 1,5 juta warga sipil dari daerah Terusan Suez mengungsi, dan mengancam terjadinya perang besar ketika MIG yang dikemudikan pilot Soviet, yang membantu mempertahankan wilayah dalam Mesir, ditembak jatuh oleh pesawat Phantom Israel yang baru dimilikinya.<sup>146</sup>

Maka, mungkin ada sesuatu yang luput, ketika koresponden *Times* Israel dengan naif melaporkan bahwa Khater “bertindak karena motif yang bersifat nasionalis dan anti-Israel”<sup>147</sup>—sesuatu yang pasti tidak akan pernah diabaikan jika situasinya dibalik.

David Hirst menilai, “Pusat utama atau basis penting terorisme internasional (dalam pengertian Barat) adalah Lebanon. Daerah ini melahirkan teroris sendiri, atau berfungsi sebagai rumah yang menyenangkan untuk teroris dari luar”, baik itu orang Palestina, yang “hanya tahu soal pengeboman, pembunuhan, pembantaian, dan mutilasi, yang menyebarkan kebencian, ketakutan, dan ketidakamanan”, atau orang Lebanon yang masyarakatnya sudah babak belur akibat agresi Israel yang didukung AS dan dampak lanjutannya; “... sebuah keyakinan yang tertanam dalam benak pemuda masa kini” di kelompok ini: “bahwa di bawah pimpinan Presiden Reagan, yang

telah sangat lama mengarahkan keberpihakan tradisional negaranya pada Israel, AS merupakan penyebab segala kerusakan yang terjadi, yang tak bertanggung lagi, sehingga kini segenap cara boleh ditempuh untuk menghancurkannya. Dorongan untuk melakukan aksi teroris mungkin paling kuat dimiliki orang Palestina, tetapi bisa juga dilakukan orang Lebanon, Arab—atau dalam wujud yang paling spektakuler—Syi'ah.”

Poin penting diungkapkan Yehoshaphat Harkabi: “Tawarkan solusi terhormat bagi orang-orang Palestina untuk menghormati hak mereka atas penentuan nasib sendiri: itulah solusi dari masalah terorisme. Bila rawa lenyap, tidak akan ada lagi nyamuk.”<sup>148</sup>

Terorisme dan agresi skala besar AS-Israel telah turut andil menciptakan situasi yang dideskripsikan Hirst—seperti dapat diduga dan mungkin disadari begitu (lihat di atas)—dan kedua negara teroris tersebut mungkin merasa puas dengan hasilnya, yang memberi mereka pembenaran untuk mempertahankan penolakan dan kekerasan. Selanjutnya, terorisme skala kecil yang telah mereka sulut dapat dimanfaatkan untuk menimbulkan rasa takut dan mobilisasi penduduk, sesuai keperluan untuk tujuan yang lebih umum. Yang diperlukan semata sistem doktrinal yang kompak satu suara saat dibutuhkan dan menyingkirkan pemahaman berbeda terkait inisiatif, pola, sumber, dan motivasi kebijakan AS. Sejauh ini, catatan sejarah menunjukkan, para pembuat kebijakan masih leluasa melaju tanpa hambatan berarti.

Tindakan teroris secara khas digambarkan oleh pelakunya sebagai “aksi balasan” (atau, dalam kasus terorisme AS dan Israel, sebagai “aksi pencegahan”). Dengan demikian, pengeboman Tunisia patut diduga merupakan aksi balasan atas pembunuhan di Larnaca, seperti dicatat dalam banyak kesempatan, meskipun hampir tidak ada dalih bahwa korban pengeboman Tunisia itu punya hubungan dengan kekejaman Larnaca. Yang terakhir ini juga dibenarkan sebagai “aksi balasan”, tanggapan atas pembajakan Israel terhadap kapal yang bepergian dari Siprus ke Lebanon.<sup>149</sup> Klaim pertama diterima di AS sebagai hal yang sah, sementara yang terakhir diabaikan—model perbedaan berdasarkan komitmen ideologis, sesuai norma yang berlaku.

Mengesampingkan justifikasi atas kekerasan teroris dan mematuhi catatan faktual, tidak diragukan lagi Israel telah melakukan operasi pembajakan dan penculikan di laut selama bertahun-tahun, dengan sedikit ulasan dan tidak ada kekhawatiran di AS mengenai kejahatan ini—yang menimbulkan amarah saat dilakukan orang Arab.

Bahkan, tampak dianggap tidak perlu untuk melaporkan fakta bahwa Pengadilan Tinggi Israel pada dasarnya memberi persetujuan pada prosedur ini. Dalam kasus seorang Arab yang mengajukan banding atas pemenjarannya dengan alasan bahwa ia ditangkap di luar wilayah perairan Israel, Pengadilan Tinggi memutuskan, “Legalitas hukuman dan pemenjaraan tidak terpengaruh oleh tempat dan cara membawa tersangka ke wilayah Israel”, dan berpendapat (sekali lagi) pengadilan Israel

dapat menjatuhkan hukuman atas tindakan orang-orang di luar Israel yang dianggap sebagai penjahat. Dalam kasus ini, Pengadilan menyatakan bahwa “alasan keamanan” membuatnya perlu untuk mengamankan si pemohon di penjara.<sup>150</sup>

Beralih ke catatan sejarah, pada 1976, menurut anggota Knesset Jenderal (Purnawirawan) Mattityahu Peled, Angkatan Laut Israel mulai menangkapi kapal milik Muslim Lebanon—menyerahkan mereka ke sekutu Kristen Lebanon, yang lantas membunuhnya—dalam upaya untuk membatalkan langkah menuju konsiliasi yang telah diatur antara PLO dan Israel.

Perdana Menteri Rabin mengakui fakta ini, tetapi mengatakan kapal tersebut ditangkap sebelum ketentuan perdamaian ini, sementara Menteri Pertahanan Shimon Peres menolak berkomentar. Setelah pertukaran tahanan pada November 1983, narasi di halaman depan *Times* menyebutkan dalam paragraf kedelapan belas bahwa 37 tahanan Arab, yang telah ditahan di kamp penjara Ansar yang terkenal, “disergap baru-baru ini oleh Angkatan Laut Israel saat mereka mencoba keluar dari Siprus ke Tripoli”, sebelah utara Beirut, sebuah kabar yang tidak diperhatikan di sana atau di tempat lain.<sup>151</sup> Dengan logika yang sama, pasukan Inggris bisa saja mengirim agen untuk menculik Zionis di Amerika Serikat atau di laut lepas pada 1947, menempatkan mereka di dalam kamp penjara tanpa mendakwa atau menyatakan mereka bersalah karena mendukung terorisme.

Pada Juni 1984, Israel membajak kapal feri yang berlayar di antara Siprus dan Lebanon, 5 mil dari pantai Lebanon, dengan berondongan senapan mesin dan membawanya ke Haifa. Sebanyak 9 orang telah diangkut dan ditahan, 8 orang Lebanon dan 1 Suriah. Kemudian 5 di antaranya dibebaskan setelah diinterogasi dan 4 ditahan, termasuk seorang wanita dan seorang anak sekolah yang kembali dari Inggris untuk berlibur di Beirut; 2 orang dibebaskan 2 minggu kemudian, sementara nasib yang lainnya tidak jelas. Masalah ini dianggap tidak begitu penting sehingga seseorang harus repot-repot menyusuri halaman belakang koran (mencari jarum di tumpukan jerami) sekadar untuk mengetahui nasib para penumpang yang diculik.

*Observers* London mengajukan sebuah “motif politik”: untuk memaksa penumpang menggunakan feri yang beroperasi dari pelabuhan Maronite di Jounieh, bukan Beirut Barat milik umat Muslim atau untuk memberi sinyal kepada masyarakat Lebanon bahwa mereka “tidak berdaya” dan harus sepakat dengan Israel. Lebanon mengecam “tindakan pembajakan” ini, yang oleh Godfrey Jansen digambarkan sebagai “persoalan lain” dalam daftar panjang kejahatan internasional Israel”.

“Untuk mempertahankan fiksi teroris maritim,” ia menambahkan, “Israel kemudian mengebom dan membombardir pulau kecil di dekat Tripoli yang konon merupakan basis operasi laut PLO”, klaim yang menurutnya “tidak masuk akal”. Polisi Lebanon melaporkan 15 orang terbunuh, 20 terluka, dan 20

lainnya hilang, semuanya warga Lebanon, terdiri atas nelayan dan anak-anak pada kamp pramuka Sunni yang merupakan target “pukulan terburuk”.<sup>152</sup>

Dalam laporannya tentang “penangkapan” Israel (lebih tepatnya, pembajakan) terhadap kapal feri tersebut, *Times* menyatakan, sebelum perang 1982, “Angkatan Laut Israel kerap mencegat kapal yang menuju atau meninggalkan pelabuhan Tirus dan Sidon di selatan dan menggeledahnya untuk mencari gerilyawan,”—seperti biasa, menelan mentah-mentah klaim Israel; “Penangkapan” Suriah terhadap kapal-kapal warga Israel dengan dalih serupa mungkin dianggap sedikit berbeda. Demikian pula, pembajakan Israel atas jet sipil Libia pada 4 Februari 1986, dihadapi dengan tenang dan dikritik, jika ada, sebagai kesalahan intelijen.<sup>153</sup> Pada 25 April 1985, beberapa orang Palestina diculik dari kapal sipil yang berlayar antara Lebanon dan Siprus dan dikirim ke tempat rahasia di Israel. Fakta ini menjadi pengetahuan umum (di Israel) setelah seseorang diwawancarai di televisi Israel, yang mengarah pada seruan untuk mendapatkan informasi yang lengkap lewat Pengadilan Tinggi; mungkin saja masih ada korban lain yang tidak diketahui.<sup>154</sup>

Tak satu pun dari kasus ini—yang kebanyakan hanya diketahui lewat ulasan singkat—menyita perhatian atau menimbulkan keprihatinan, sama seperti ketika dilaporkan bahwa “tahanan jaminan” Arab yang dibebaskan dalam pertukaran dengan Suriah sebenarnya merupakan “penduduk Druze di desa-desa di bagian yang



dicaplok Israel dari Dataran Tinggi Golan yang strategis”.<sup>155</sup> Dianggap hak prerogatif Israel untuk melakukan pembajakan kapal dan penculikan, sesuka hati, dan juga pengeboman terhadap apa yang disebut “target teroris”, dengan persetujuan penting Amerika Serikat, apa pun faktanya.

Mari kita tengok sejenak serangan Israel di pulau di luar Tripoli itu, di utara Beirut, tempat nelayan Lebanon dan anak pramuka di perkemahan kamp terbunuh. Peristiwa ini menyita sedikit perhatian, tetapi demikian norma yang berlaku dalam kasus kekejaman teroris Israel, yang membuat peristiwa ini tampak tidak seberapa serius. Untuk serangan Palestina, berlaku ketentuan berbeda. Tidak ada yang diingat dengan lebih ngeri daripada kekejaman di Ma'alot pada 1974, ketika 22 pemuda anggota kelompok paramiliter tewas dalam baku tembak setelah Moshe Dayan menolak—atas keberatan Jenderal Mordechai Gur—untuk mempertimbangkan negosiasi mengenai tuntutan teroris agar membebaskan tahanan Palestina.<sup>156</sup> Seseorang mungkin bertanya alasan pembunuhan anak-anak pramuka menjadi kejahatan yang lebih rendah—malah, bukan kejahatan sama sekali, karena hal itu dilakukan oleh “sebuah negara yang peduli terhadap kehidupan manusia” (*Washington Post*) dengan “tujuan moral yang tinggi” (*Time*) dan mungkin satu-satunya dalam sejarah.<sup>157</sup>

Dua hari sebelum serangan Ma'alot, jet Israel mengebom desa Lebanon El-Kfeir, menewaskan empat warga sipil. Menurut Edward Said, serangan Ma'alot

“didahului oleh serangan bom napalm Israel selama berminggu-minggu di kamp pengungsi Palestina di Lebanon selatan”, dengan lebih dari 200 orang terbunuh. Saat itu, Israel terlibat dalam operasi bumi hangus berskala besar di Lebanon selatan, dengan serangan darat, laut, dan udara dan operasi komando menggunakan peluru, bom, senjata antipersonel, dan napalm, mungkin ribuan orang terbunuh (tampaknya tidak masalah bagi Barat, sehingga tidak ada data jumlah yang akurat) dan ratusan ribu orang terusir ke utara, ke daerah kumuh di sekitar Beirut.<sup>158</sup>

Hanya ada sedikit perhatian dan pemberitaan. Semua ini tidak tercatat dalam sejarah terorisme; juga tidak terjadi, sejauh menyangkut sejarah yang disterilkan, meskipun serangan teroris Palestina yang mematikan pada awal 1970-an (tentu saja) dikecam dengan sengit, dan masih menjadi bukti bahwa orang-orang Palestina tidak dapat menjadi mitra negosiasi atas penentuan nasib mereka. Sedangkan media kerap dikecam karena terlalu mengkritik Israel dan bahkan “pro-PLO”—propaganda dengan capaian yang cukup berhasil.

Kita dapat mencatat penafsiran atas peristiwa-peristiwa yang ditawarkan pemimpin Israel yang dianggap moderat, misalnya Yitzhak Rabin, yang merupakan Duta Besar untuk Washington dan kemudian menjabat Perdana Menteri selama periode kekejaman terburuk di Lebanon, sebelum Kamp David 1978: “Kita tidak dapat mengabaikan nasib penduduk sipil di Lebanon selatan .... Adalah tugas kemanusiaan kita untuk membantu

penduduk daerah tersebut dan mencegahnya disingkirkan para teroris.”<sup>159</sup> Para pengulas memoar Rabin tidak menemukan sesuatu yang salah dalam kata-kata ini, sehingga secara efektif membentuk fondasi dasar sejarah yang melayani kepentingan ideologi tertentu, sekaligus menunjukkan betapa kuatnya rasisme anti-Arab di Barat.

Perlu juga dicatat bahwa Israel tidak sendirian menikmati hak pembajakan dan perampokan. Laporan Tass yang mengancam pembajakan Achille Lauro pada Oktober 1985 menyebut Amerika Serikat munafik karena dua orang yang membajak pesawat Soviet—membunuh seorang pramugari dan melukai anggota awak lainnya—diberi perlindungan di AS, yang menolak melakukan ekstradisi.<sup>160</sup>

Kasusnya tentu tidak banyak diketahui, dan tuduhan soal kemunafikan itu tampak patut adanya. Kasusnya juga tidak unik. Abraham Sofaer, penasihat hukum untuk Departemen Luar Negeri, menilai, “Selama 1950-an, meskipun ada penolakan kuat dari Amerika terhadap pembajakan pesawat terbang, Amerika Serikat dan sekutu Barat-nya menolak permintaan Cekoslowakia, Uni Soviet, Polandia, Yugoslavia, dan rezim komunis lain untuk mengembalikan orang-orang yang membajak pesawat, kereta api, dan kapal yang melarikan diri.” Sofaer mengklaim bahwa AS “mengkaji ulang kebijakannya” pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, “ketika pembajakan pesawat mewabah di mana-mana” dan menimbulkan “ancaman yang terlalu serius dan hebat, terkait keselamatan penumpang yang tidak bersalah.”<sup>161</sup> Dan

kemudian pembajakan mulai diarahkan terhadap AS dan sekutu-sekutunya dan karenanya termasuk kategori terorisme dan bukan perlawanan heroik terhadap penindasan.

Kita mungkin pula menyebutkan pembajakan pesawat terbang pertama di Timur Tengah, yang juga tidak lazim. Ini dilakukan Israel pada Desember 1954, ketika pesawat jet sipil Suriah dikepung pesawat tempur Israel dan dipaksa mendarat di bandara Lydda. Kepala Staf Moshe Dayan bermaksud “mendapatkan sandera agar dapat membebaskan tahanan kami di Damaskus”, Perdana Menteri Moshe Sharett menulis dalam catatan hariannya. Tahanan tersebut adalah tentara Israel yang telah ditangkap dalam misi mata-mata di Suriah; ingat, Dayanlah yang 20 tahun kemudian memerintahkan usaha penyelamatan yang menyebabkan kematian remaja Israel di Ma’a lot, yang disandera untuk membebaskan tahanan Palestina di Israel.

Sharett sendiri menuliskan, “Kami tidak memiliki pembenaran apa pun untuk merebut pesawat itu,” dan ia mengaku “tidak punya alasan untuk meragukan kebenaran penegasan faktual dari Departemen Luar Negeri AS bahwa tindakan kami tanpa preseden dalam sejarah praktik internasional.” Namun, insiden tersebut lesap dari sejarah, sehingga Duta Besar Israel Benjamin Netanyahu, yang sekarang menjadi pengamat terorisme internasional yang sangat dikagumi, dapat tampil di televisi nasional dan menuduh PLO sebagai “penemu” aksi

pembajakan pesawat terbang dan bahkan pembunuhan para diplomat, tanpa mencemaskan adanya bantahan.<sup>162</sup>

Mengenai pembunuhan diplomat, kita mungkin hanya mengingat pembunuhan Mediator PBB Folke Bernadotte pada 1948 oleh kelompok teroris yang dipimpin atasan langsung Netanyahu, Menteri Luar Negeri Yitzhak Shamir —salah satu dari tiga komandan yang memerintahkan pembunuhan tersebut (yang kedua kini sudah mati, seorang pengamat yang dihormati di media Israel selama bertahun-tahun, seperti yang ketiga). Seorang teman dekat David Ben-Gurion secara pribadi mengaku sebagai salah satu pembunuh bayaran, tetapi Ben-Gurion merahasiakannya, dan pemerintah Israel mengatur pelarian diri dari penjara dan dari Israel, bagi mereka yang bertanggung jawab atas peristiwa itu.

Dalam catatan kesaksiannya, sejarawan Zionis Jon Kimche menuliskan, “Tidak ada kecaman luas atau desakan nasional untuk menangkap pelaku” dan “tidak banyak kemarahan moral”.

“Mayoritas menganggap musuh Yahudi lainnya sudah tumbang.” Pembunuhan tersebut “dikutuk, disesalkan, dan disayangkan karena akan mencoreng citra Israel, dan membuat kerja diplomatnya lebih berat; bukan karena pembunuhan itu salah.”<sup>163</sup>

Tentu saja penghormatan terhadap teroris yang ikut ambil bagian dalam perjuangan nasional cukup lazim dilakukan, termasuk di AS. Namun, dalam ingatan selektif yang direka-reka, hanya tindakan musuh yang dianggap “momok jahat terorisme”.

Setelah pembajakan Achille Lauro sebagai aksi balasan atas pengeboman Tunisia, isu pembajakan kapal menjadi perhatian utama Barat. Liputan kantor berita *Reuters* menyimpulkan, “Hanya ada sedikit pembajakan kapal sejak 1961”, memberikan sederet contoh aksi yang dilakukan umat Islam; sementara pembajakan oleh Israel tidak ada dalam daftar.<sup>164</sup>

Pembajakan bukan satu-satunya bentuk terorisme yang lolos dari kategori ini jika dilakukan oleh sekutu AS. Duta Besar PBB Jeane Kirkpatrick menjelaskan peledakan kapal antinuklir Greenpeace, Rainbow Warrior, oleh agen Prancis dengan satu orang tewas bukanlah terorisme: “Saya ingin mengatakan bahwa orang Prancis jelas tidak bermaksud untuk menyerang warga sipil dan peninjau, dan melukai, menyiksa, atau membunuhnya.”—sungguh penjelasan yang menarik bagi para teroris lain. Dalam editorial utamanya, yang berjudul “Mitterrand’s Finest Hour”, *Asian Wall St. Journal* menyatakan, “Kampanye Greenpeace pada dasarnya bersifat kekerasan dan berbahaya .... Bahwa pemerintah Prancis siap menggunakan kekuatan melawan Rainbow Warrior .... Secara langsung menunjukkan bahwa pemerintah memiliki prioritas.” Di *New York Times*, David Housego mengulas sebuah buku tentang peristiwa tersebut, mengkritik Prancis karena “blunder” dan “kesalahan yang fatal”; “Tidak perlu” meledakkan kapal dan Prancis bisa “mencapai tujuan yang sama dengan publisitas yang jauh lebih bagus.”

Tidak ada kesan perlunya menggunakan kalimat yang lebih tegas. Mengingat “kesalahan” ini, Housego menyimpulkan, “sulit untuk membenarkan tanpa memberatkan [Menteri Pertahanan] Hernu dan sulit untuk menyalahkan orang-orang Selandia Baru karena telah memenjarakan perwira Prancis.”<sup>165</sup> Housego membandingkannya dengan Watergate, tetapi melupakan persamaan utamanya: dalam kasus itu juga terjadi keresahan akibat “kesalahan” dan kejahatan kecil, dan puja-puja dari media, sementara Kongres dan media sama-sama mengabaikan kejahatan yang jauh lebih serius dari Pemerintah Nixon dan pendahulunya karena menganggapnya tidak relevan.<sup>166</sup>

Sang kaisar terbebas dari tuduhan terorisme atau kejahatan lainnya, dan sekutunya pun mendapat hak istimewa yang sama. Kesalahan mereka semata dianggap kehilafan.

George Shultz pantas mendapatkan penghargaan atas kemunafikan terkait hal ini. Sambil memberi dorongan “aktif” terhadap terorisme, ia menyebut “berbahaya” klaim bahwa “di satu sisi, teroris merupakan pejuang kebebasan”:

Pejuang kebebasan atau gerakan revolusioner tidak meledakkan bus yang berisi orang-orang yang tidak ikut berperang. Para teroris melakukannya. Pejuang kebebasan tidak membunuh

pengusaha yang tidak bersalah atau menyekap pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah. Para teroris melakukannya .... Pejuang perlawanan di Afganistan tidak menghancurkan desa atau membunuh yang tak berdaya. Contras di Nikaragua tidak meledakkan bus sekolah atau melakukan eksekusi massal terhadap warga sipil.

Nyatanya, komando teroris Shultz di Nikaragua, seperti yang ia tahu, sangat lihai dalam menyerang warga sipil, dengan siksaan, pemerkosaan, mutilasi; catatan teror mereka yang keji didokumentasikan dengan baik, meski diabaikan dan segera terlupakan, bahkan ditolak oleh para pembela (lihat Catatan 99). Para pejuang perlawanan di Afganistan juga melakukan kekejaman brutal semacam itu yang akan membangkitkan kecaman keras di Barat jika yang menjadi pasukan penyerang (yang kemudian disebut “pembebas” dan bertindak dalam upaya “pembelaan diri”) adalah orang Amerika atau Israel. Beberapa bulan sebelumnya, teman-temannya dari kelompok UNITA di Angola mengaku telah menembaki pesawat sipil dengan menewaskan 266 orang dan telah membebaskan 26 sandera yang sudah disekap selama 9 bulan, termasuk 21 misionaris Portugis, Spanyol, dan Amerika Latin; mereka juga telah mengumumkan “kampanye baru teror perkotaan”, Associated Press melaporkan, melakukan



pengeboman di Luanda tempat 30 orang terbunuh dan lebih dari 70 lainnya cedera saat sebuah jip yang penuh dinamit meledak di kota tersebut.

Mereka juga menangkap guru, dokter, dan orang lain dari Eropa; sekitar 140 orang asing menurut laporan pers, termasuk 16 teknisi Inggris yang “disandera”, demikian Jonas Savimbi menyatakan, dan tidak akan “dibebaskan sampai Perdana Menteri Thatcher memberi organisasinya sejumlah pengakuan.” Tindakan semacam itu rutin berlanjut, misalnya, meledakkan sebuah hotel pada April 1986 dengan 17 orang asing terbunuh dan banyak korban luka. Savimbi “adalah salah satu dari sedikit pahlawan sejati zaman kita,” Jeane Kirkpatrick mengumumkan di sebuah konvensi Aksi Politik Konservatif ketika Savimbi “mendapat tepuk tangan meriah setelah bersumpah akan menyerang instalasi minyak Amerika di negaranya,”—sebuah rencana untuk membunuh orang Amerika yang tidak membuat AS menerapkan doktrin “pembelaan diri terhadap serangan pada masa depan”, yang digunakan untuk membenarkan pengeboman “si Anjing Gila” Qaddafi. Sama seperti tidak adanya pengeboman di Johannesburg ketika tentara bayaran Afrika Selatan ditangkap pada Mei 1985 di Angola utara dalam misi untuk menghancurkan fasilitas kilang minyak dan membunuh orang Amerika. Negara teroris harus melakukan penilaian dengan saksama.<sup>167</sup> Savimbi memenuhi syarat sebagai pejuang kebebasan untuk Shultz, Kirkpatrick, dan komandan teroris terkemuka lainnya terutama karena “UNITA adalah kelompok sekutu

di Afrika Selatan yang paling banyak dimanfaatkan untuk mengacaukan negara-negara tetangga.”<sup>168</sup>

Sebagaimana pasukan Kontra Shultz, tugas utama mereka, seperti telah disebutkan sebelumnya, untuk menyandera penduduk sipil di Nikaragua di bawah ancaman teror sadis guna memaksa pemerintah menanggalkan segenap komitmen kebutuhan mayoritas rakyat miskin, dan lebih memilih kebijakan “moderat” dan “demokratis” dalam menangani kebutuhan bisnis AS dan rekan-rekan lokalnya, seperti di negara-negara yang berperilaku lebih baik di bawah ketentuan AS. Namun, dalam iklim budaya ketika komandan teroris dan pembelanya berkembang, pernyataan Shultz dan yang lainnya berlalu begitu saja tanpa membuat kening berkerut.

Menyekap sandera jelas termasuk aksi terorisme. Tidak diragukan lagi bahwa Israel bersalah melakukan tindakan terorisme internasional yang serius saat memindahkan 1.200 tahanan—terutama orang Syi’ah Lebanon—ke Israel dengan melanggar hukum internasional saat menarik mundur pasukan dari Lebanon. Kala itu Israel menjelaskan bahwa mereka akan dibebaskan “dalam jadwal yang akan ditentukan oleh situasi keamanan di Lebanon selatan”—membuatnya cukup jelas bahwa mereka akan ditahan sebagai sandera, sambil menunggu “perilaku baik” dari penduduk setempat, yang diawasi dengan ketat oleh pasukan Israel dan tentara bayaran mereka di “zona aman” di Lebanon selatan dan sekitarnya. Seperti diamati Mary McGrory, dalam

penegasan yang berbeda dari kesesuaian umum, para tahanan tersebut menjadi “sandera di penjara Israel”; “Mereka bukan penjahat; mereka disekap sebagai jaminan atas serangan yang mungkin muncul ketika orang-orang Israel akhirnya keluar dari Lebanon.”

Sebenarnya, tidak ada niat untuk keluar dari Lebanon selatan, tempat Israel mempertahankan “zona keamanannya”. Bahkan, penarikan sebagian pasukan baru dilakukan setelah ada perlawanan di Lebanon. Seratus empat puluh tahanan secara diam-diam dipindahkan ke Israel pada November 1983, yang melanggar kesepakatan dengan Palang Merah untuk membebaskan mereka dalam tindakan pertukaran tahanan, setelah penutupan (ternyata untuk sementara) penjara Ansar, tempat terjadinya kekejaman brutal yang sering digambarkan sebagai “kamp konsentrasi” oleh orang Israel yang bertugas atau berkunjung ke sana, dan ikut muak dengan perilaku biadab para penculik. Para tahanan tersebut bahkan tak boleh dikunjungi Palang Merah sampai Juli 1984. Juru bicara Kementerian Pertahanan Israel Nachman Shai menyatakan bahwa 400 dari 766 orang yang masih berada dalam tahanan pada Juni 1985 ditangkap karena “kegiatan teroris”—yang menunjukkan adanya perlawanan terhadap pendudukan militer Israel—sementara “sisanya ditangkap karena bentuk aktivisme politik atau aksi pengorganisasian yang dirancang untuk memukul mundur pasukan Israel di Lebanon, kata Mr. Shai”.<sup>169</sup>

Israel telah berjanji untuk membebaskan 340 sandera pada 10 Juni, “tetapi membatalkannya pada saat terakhir karena alasan keamanan yang tidak pernah dijelaskan sepenuhnya”.<sup>170</sup> Empat hari kemudian, orang-orang Syi’ah Lebanon—dilaporkan sebagai teman dan keluarga dari orang yang disandera Israel<sup>171</sup>—membajak pesawat TWA 847, menangkap sandera demi membebaskan orang-orang yang ditahan Israel, memicu histeria yang diatur dengan rapi di Amerika Serikat, dengan suara-suara rasis yang nyata dan kecaman terhadap media karena mengizinkan pembajak mengambil kesempatan untuk menjelaskan sikap mereka, sehingga mengganggu disiplin ketat yang tepat dalam masyarakat bebas. Sedangkan, penculik Israel tidak perlu akses khusus ke media AS, yang dengan senang hati menyampaikan pesan untuk kepentingan mereka, sering kali sebagai “berita”.

Media umumnya dikecam karena “mendukung terorisme” dengan memberi teroris ruang untuk menyatakan pendapat; tetapi bukan merujuk pada Ronald Reagan, George Shultz, Elliott Abrams, dan komandan terkemuka atau pendukung terorisme lainnya, yang bebas menyampaikan pesan mereka tanpa sanggahan atau komentar, memberikan kerangka dasar untuk konsep dan asumsi pemberitaan dan opini yang terkait.

Pers mengabaikan dengan menggelikan pernyataan pembajak TWA 847 bahwa mereka ingin membebaskan sandera yang ditahan Israel—yang menurut AS bukan sandera, karena mereka disekap “pihak kita”. Absurditas kepura-puraan Syi’ah tampak jelas. Pengamat terkemuka

Flora Lewis menjelaskan, “sama sekali tidak sesuai dengan sikap kaum Syi’ah militan, yang siap mati syahid dan tampak tak ragu-ragu menghabisi orang lain, untuk demikian mempertimbangkan pengembalian para tahanan”, versi lain dari konsep utama bahwa tatanan yang lebih rendah tidak merasakan sakit.

Mengutip tanpa bukti, editor *Times* mengungkapkan betapa “Israel telah berencana untuk menenangkan orang-orang Syi’ah yang marah minggu lalu [yaitu, beberapa hari sebelum pembajakan TWA], tetapi harus ditunda akibat penculikan beberapa tentara Finlandia di Lebanon”; Dalam berita 90 kata, *Times* telah mencatat tuduhan Finlandia bahwa dalam peristiwa yang sama sekali tidak berkaitan ini, “perwira Israel melihat milisi Lebanon memukuli tentara Finlandia yang diculik saat bertugas untuk PBB di Lebanon, tetapi tidak melakukan apa pun untuk membantu mereka”, sementara mereka “dipukuli dengan batang besi, pipa air, dan senapan oleh anggota Tentara Lebanon Selatan”.

“Ada banyak kejahatan di sini,” *Times* mengecam para pembajak TWA, otoritas Yunani (atas kelalaiannya), dan bahkan Amerika Serikat—karena “telah gagal menghukum Iran dengan melindungi dua pembunuh warga Amerika dalam pembajakan tahun lalu” (lihat Catatan 160). Namun, penyanderaan yang dilakukan Israel tidak termasuk dalam tindak kejahatan ini.<sup>172</sup>

Sejarawan Princeton, ahli Timur Tengah, Bernard Lewis, yang membuktikan betapa reputasi ilmiah bisa tidak relevan dalam hal ini, menegaskan bahwa

“pembajak atau mereka yang mengutusny pasti sudah tahu betul bahwa orang-orang Israel sudah berencana untuk membebaskan orang-orang Syi’ah dan warga Lebanon lainnya, dan bahwa sebuah aksi menantang semacam ini hanya akan menunda, dan bukannya mempercepat, pembebasan mereka”. Lebih jauh, mereka “menantang Amerika, untuk mempermalukan orang Amerika” karena tahu bahwa media yang acuh tak acuh akan “memberi mereka publisitas terbatas dan mungkin bahkan beberapa bentuk dukungan”. Ingat bahwa ini suara seorang ilmuwan yang dihormati dalam surat kabar terpendang—fakta yang sekali lagi memberi wawasan tentang budaya intelektual yang berkuasa.

Editor *New Republic* menyebut permohonan kelompok Syi’ah untuk membebaskan sandera Israel sebagai “sampah sepenuhnya”: “Pembajakan, penculikan, pembunuhan, dan pembantaian adalah cara orang Syi’ah dan faksi lain di Lebanon melakukan bisnis politik mereka,” dan “Semua orang tahu” bahwa tahanan yang dipenjara Israel dijadwalkan untuk dibebaskan—ketika Israel siap, jika hal itu memungkinkan. Presiden Reagan meningkatkan histeria dalam tingkatan yang lain, menjelaskan bahwa “tujuan sebenarnya” dari para teroris adalah “melenyapkan Amerika dari dunia”, tidak kurang-tidak lebih. Norman Podhoretz, seraya mengingatkan bahwa penggunaan kekuatan mungkin akan menyebabkan kematian sandera Amerika, mengecam Reagan karena gagal “mempertaruhkan nyawa [yaitu, nyawa orang lain] untuk membela kehormatan nasional”;

Wali kota New York, Edward Koch, menyerukan pengeboman Lebanon dan Iran, dan yang lainnya tak ketinggalan bergaya ala pahlawan.<sup>173</sup>

Sementara itu, pembaca yang cermat dapat menemukan sesuatu yang terkubur dalam berita tentang krisis penyanderaan ini bahwa 2.000 orang Syi'ah Lebanon, termasuk 700 anak-anak, mengungsi dari rumah mereka di bawah berondongan peluru Tentara Lebanon Selatan yang didukung Israel, dan juga menembaki jip pasukan penjaga perdamaian PBB, sedangkan "Pasukan gabungan Israel dan milisi Kristen menyerbu sebuah desa di Lebanon selatan hari ini dan menangkap 19 orang Syi'ah, demikian dikabarkan juru bicara PBB".<sup>174</sup>

Setelah pembajakan, Israel mulai melepaskan sandera sesuai jadwal yang disusun sendiri, mungkin dipercepat karena pembajakan TWA telah memusatkan perhatian internasional pada operasi penculikan yang jauh lebih signifikan. Ketika 300 orang dibebaskan pada 3 Juli, Associated Press melaporkan kesaksian bahwa mereka disiksa dan kelaparan, sementara Thomas Friedman dari *Times* hanya mendengar keterangan bahwa, "Kami diperlakukan dengan baik oleh orang Israel ...." Reagan menulis sepucuk surat kepada Shimon Peres "mengatakan bahwa krisis penyanderaan di Beirut telah memperkuat hubungan antara negara mereka" ; Tidak ada yang menyoal "krisis sandera" lainnya, yang telah dihapus dari sejarah resmi.<sup>175</sup>

Tindakan Israel tentu bisa disebut penyanderaan, tetapi hal itu tidak berlaku untuk sekutu kaisar yang menguasai

dunia, maka Israel dibebaskan dari tuduhan ini. Namun penting untuk menekankan, berulang-ulang, sifat konsep Orwellian dalam wacana politik kontemporer, ketika istilah-istilah seperti “terorisme” dan “sandera” ditafsirkan sedemikian rupa sehingga tidak memasukkan beberapa contoh paling ekstrem, seperti di Nikaragua atau Lebanon selatan—tempat seluruh penduduk disandera untuk memastikan ketaatan pada tuan asing.

Menjaga fokus ke Timur Tengah, kita harus menyadari bahwa pada tingkat tertentu, masalah ini dipahami dengan baik oleh penyelenggara terorisme internasional. Alasan serangan biadab di Lebanon selatan sampai 1970-an dijelaskan diplomat Israel, Abba Eban, yang dianggap sebagai tokoh perdamaian terkemuka: “Ada kemungkinan rasional, yang pada akhirnya terpenuhi, penduduk terdampak akan memberi tekanan untuk menghentikan permusuhan.” Dalam bahasa yang sederhana: penduduk Lebanon selatan disandera untuk memberi tekanan guna memaksa orang-orang Palestina menerima status yang disematkan kepada mereka oleh pemerintah Partai Buruh yang diwakili Eban, yang telah menyatakan bahwa orang-orang Palestina “tidak memiliki peran untuk terlibat” dalam penyelesaian damai model apa pun.<sup>176</sup> Kepala Staf Mordechai Gur menjelaskan pada 1978 bahwa, “Selama 30 tahun ... kami telah berjuang melawan penduduk yang tinggal di desa dan kota.”

Ia mencatat insiden seperti pengeboman Kota Irbid, Yordania, dan pengusiran puluhan ribu penduduk Lembah Yordan dan satu juta setengah warga sipil dari Terusan



Suez, di antara contoh lainnya, merupakan bagian dari program penyanderaan penduduk sipil dalam upaya mencegah perlawanan terhadap penyelesaian politik diupayakan Israel dengan paksa, dan kemudian melanjutkan untuk mempertahankannya sambil menolak kemungkinan penyelesaian politik lain, misalnya tawaran Sadat atas perjanjian damai penuh tentang perbatasan Mesir-Israel yang diakui secara internasional pada 1971.

“Aksi balasan” Israel yang rutin dilancarkan terhadap penduduk sipil yang tidak berdaya, yang tak ada kaitannya dengan sumber tindakan teroris (mereka sendiri, yang sering kali membalas dendam untuk aksi terorisme Israel sebelumnya, dan seterusnya) juga mencerminkan konsepsi yang sama, dimulai pada awal 1950-an, dari diktum Ben-Gurion bahwa “reaksi tidak akan efisien” kecuali jika tepat dan terfokus: “Jika kita tahu keluarganya—[kita harus] menyerang tanpa ampun, termasuk wanita dan anak-anak.”<sup>177</sup>

Pemahaman Gur tentang perang Israel banyak dianut di kalangan komando militer. Selama Operasi Tinju Besi pada awal 1985, Menteri Pertahanan Yitzhak Rabin memperingatkan bahwa jika perlu, Israel akan melakukan “kebijakan bumi hangus seperti yang terjadi di Lembah Yordan selama perang atrisi” dengan Mesir. “Lebanon adalah sumber teror yang lebih serius dibanding pada 1982,” tambahnya, dengan para teroris Syi’ah kini menghantui Eropa Barat dalam ketakutan (mereka tidak melakukannya sebelum invasi Israel pada 1982, karena alasan yang tidak dapat dijelaskan). Jadi, Israel harus

mempertahankan sebuah zona di selatan tempat “kita dapat melakukan intervensi”. Komandan pasukan terjun payung veteran, Dubik Tamari, yang memberi perintah untuk menduduki kamp Palestina, Ain el-Hilweh, dengan serangan udara dan artileri “untuk menyelamatkan nyawa” pasukan di bawah komandonya (praktik “kesucian tangan” yang termasyhur), membenarkan tindakan tersebut dengan mengatakan “negara Israel telah membunuh warga sipil dari 1947”, “dengan sengaja membunuh warga sipil” sebagai “salah satu dari sekian tujuan lainnya”.<sup>178</sup>

Tamari mencontohkan serangan terhadap Qibya pada 1953, ketika Unit 101 Ariel Sharon membunuh sekitar 70 warga desa Arab di rumah masing-masing, sebagai aksi balasan atas serangan teroris yang sama sekali tak berhubungan dengan mereka; Ben-Gurion menyatakan lewat radio Israel bahwa penduduk desa dibunuh warga sipil Israel yang marah oleh teror Arab, “kebanyakan pengungsi, orang-orang dari negara Arab, dan mereka yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi”, dengan membantah “tuduhan tak masuk akal” bahwa pasukan militer Israel terlibat—sebuah kebohongan yang lebih berani, yang selanjutnya menempatkan pemukiman Israel di bawah ancaman aksi balasan atas pembantaian berdarah dingin ini.

Yang kurang diketahui adalah fakta bahwa 1 bulan sebelum pembantaian Qibya, Moshe Dayan mengirim Unit 101 untuk menggiring 4.000 orang Badui dari suku Azzazma dan Tarbin melintasi perbatasan Mesir—satu

lagi upaya pengusiran yang telah berlangsung dari 1950—tak lama setelah gencatan senjata. Maret 1954, sebelas orang Israel dibunuh dalam penyergapan sebuah bus di Timur Negev oleh anggota suku Azzazma (“teror yang tidak beralasan”), yang menyebabkan serangan Israel di Desa Nahaleen (yang sama sekali tidak terkait dengan aksi sebelumnya), mengakibatkan sembilan warga tewas (“pembalasan”). Agustus 1953, Unit 101 Sharon telah membunuh 20 orang, dua per tiga di antaranya perempuan dan anak-anak, di kamp pengungsi al-Bureig di Jalur Gaza, sebagai “aksi balasan” atas infiltrasi yang terjadi.<sup>179</sup>

Siklus “aksi balasan” (oleh Israel) dan “teror” (oleh rakyat Palestina) dapat ditelusuri kembali selangkah demi selangkah hingga bertahun-tahun sebelumnya, yang niscaya menunjukkan bahwa terminologi tersebut termasuk dalam ranah propaganda, bukan deskripsi faktual.

Di sini juga kita bisa meninjau seberapa efektifnya sejarah telah direkonstruksi dalam bentuk yang lebih berguna. Thomas Friedman, saat mengulas strategi “kontra terorisme Israel”, menuliskan bahwa “periode pertama, dari 1948 sampai 1956, paling tepat digambarkan sebagai era kontra-terorisme—melalui aksi balasan, atau umpan balik negatif”, meskipun “setidaknya satu dari aksi balasan ini menjadi sangat kontroversial, melibatkan korban sipil”—mungkin ini merujuk pada Qibya. Dan catatan akademik tentang terorisme sering kali tidak berbeda.<sup>180</sup>

Operasi Tinju Besi tentara Israel di Lebanon selatan pada awal 1985 juga bertumpu pada logika yang digariskan Eban. Penduduk sipil disandera di bawah ancaman teror untuk memastikan mereka menerima ketentuan politik yang didiktekan Israel di Lebanon selatan dan wilayah-wilayah pendudukan. Peringatan tetap berlaku; penduduk tetap menjadi sandera, tanpa kekhawatiran di negara adikuasa yang membiayai operasi ini dan melarang penyelesaian politik yang sungguh-sungguh.

Sementara terorisme skala besar, termasuk penyanderaan, dibebaskan dari kecaman saat dilakukan oleh pihak yang didukung, sama halnya dengan operasi skala kecil, sebagaimana digambarkan sebelumnya. Untuk menyebutkan beberapa kasus lain, pada November—Desember 1983, Israel “menegaskan tidak akan membiarkan pasukan Arafat mengevakuasi kota [Tripoli, di utara Lebanon, tempat mereka diserang pasukan yang didukung Suriah] selama nasib tahanan Israel belum jelas.” Israel mengebom apa yang disebut “markas gerilya”, menghalangi kapal-kapal Yunani yang akan mengevakuasi loyalis Arafat. Juru bicara Druze melaporkan bahwa sebuah rumah sakit dihantam bom dalam penyerangan “pangkalan Palestina”, di sebelah timur Beirut, sementara di Tripoli, “Kapal kargo yang sudah karam ditembak hingga tenggelam” dan “sebuah kapal kargo meledak terbakar akibat terkena tembakan”.<sup>181</sup>

Di sini juga penduduk, serta kapal asing, disandera untuk memastikan pembebasan tahanan Israel yang

ditangkap dalam aksi agresi Israel di Lebanon. Tidak ada tanggapan di AS tentang kekejaman lebih lanjut ini.

Di Lebanon dan Laut Mediterania, Israel melakukan serangan semena-mena dan melengah begitu saja. Pertengahan Juli 1985, pesawat tempur Israel mengebom dan menembaki kamp-kamp Palestina di dekat Tripoli, menewaskan sedikitnya 20 orang, kebanyakan dari mereka warga sipil, termasuk 6 anak di bawah 12 tahun. “Gumpalan asap dan debu menyelimuti kamp pengungsi Tripoli, rumah bagi lebih dari 25 ribu orang Palestina, selama beberapa jam setelah serangan pukul 02.55 sore itu”, yang dianggap sebagai aksi balasan atas dua serangan bom mobil beberapa hari sebelumnya di “zona keamanan” Israel di Lebanon selatan oleh sebuah kelompok yang bersekutu dengan Suriah. Dua minggu kemudian, kapal perang Israel menyerang kapal kargo Honduras yang berjarak 1 mil dari pelabuhan Sidon—untuk mengirimkan semen, menurut kapten Yunani-nya—membuatnya terbakar dengan 30 granat dan melukai warga sipil dalam pengeboman di pantai saat pasukan milisi menyerang balik.

Pers arus utama bahkan tidak melaporkan bahwa pada hari berikutnya kapal perang Israel menenggelamkan kapal nelayan dan merusak tiga lainnya, sementara seorang anggota parlemen Sidon meminta PBB untuk menghentikan “pembajakan” Israel yang didukung AS. Namun, pers mewartakan apa yang disebut Israel operasi “pembedahan” terhadap “sarang teroris” di dekat Baalbek di lembah Bekaa pada Januari 1984, menewaskan sekitar

100 orang, kebanyakan warga sipil, dengan 400 orang terluka, termasuk 150 anak-anak di sebuah sekolah yang dibom. “Sarang teroris” ini juga termasuk sebuah masjid, hotel, restoran, toko, dan bangunan lainnya di tiga desa Lebanon dan kamp pengungsi Palestina yang diserang, sementara di Beirut dikabarkan pasar ternak dan kawasan industri juga diserang, dengan puluhan rumah hancur.

Di desa yang dibom, seorang wartawan Reuters menyebutkan pengeboman kedua dimulai 10 menit setelah yang pertama, “menambah jumlah orang yang terbunuh atau terluka” karena orang-orang mulai mengurus jenazah dan korban luka akibat reruntuhan bangunan. Ia melihat ada “banyak anak” di rumah sakit, sementara saksi mata melaporkan para ayah dan ibu bergegas ke sekolah untuk mencari anak-anak mereka dengan panik. Pemimpin kelompok Syi’ah Lebanon mencela “barbarisme Israel”, menilai serangan terhadap “warga sipil tak salah, rumah sakit, dan rumah ibadah” sebagai upaya “untuk meneror orang-orang Lebanon”. Namun, insiden tersebut berlalu tanpa komentar lebih lanjut, sama sekali tidak memengaruhi status Israel sebagai “negara yang peduli terhadap kehidupan manusia” (*Washington Post*). Jadi, kita dapat menyimpulkan lagi bahwa korban pengeboman bedah ini dianggap bukan manusia.<sup>182</sup>

Kita bisa, sekali lagi, membayangkan reaksi di Barat, termasuk media “pro-Arab”, jika PLO atau Suriah melakukan “serangan pembedahan” terhadap “markas teroris” di dekat Tel Aviv, menewaskan 100 warga sipil

dan melukai 400 lainnya, termasuk 150 anak di sebuah sekolah yang dibom, bersama dengan korban sipil lainnya.

Adapun versi standar di Amerika Serikat menyatakan kekerasan Israel, mungkin terkadang berlebihan, adalah “aksi balasan” atas kekejaman orang-orang Arab. Dan Israel, seperti Amerika Serikat, mengklaim hak yang lebih luas: hak untuk melakukan serangan teroris guna mencegah tindakan potensial melawannya, seperti dalam pembenaran untuk Perang Lebanon oleh anggota Knesset yang cinta damai, Amnon Rubinstein, dikutip sebelumnya. Pasukan Israel melakukan apa yang mereka sebut “tembakan pencegahan” saat berpatroli di Lebanon, menghujani area sekitar dengan tembakan senjata mesin, yang menyebabkan pasukan penjaga perdamaian Irlandia memblokir jalan sebagai bentuk protes. Secara umum, serangan Israel di Lebanon digambarkan sebagai “tindakan pencegahan, bukan hukuman”. Misalnya, pengeboman dan penumpasan kamp-kamp pengungsi Palestina dan desa sekitarnya oleh 30 jet Israel pada 2 Desember 1975—diduga sebagai balasan atas keputusan Dewan Keamanan PBB untuk membahas proposal perdamaian yang diveto AS, dan karenanya disisihkan dari sejarah.<sup>183</sup> Demikian pula, ketika pasukan udara dan amfibi Israel menyerang Tripoli di Lebanon utara pada Februari 1973, menewaskan 31 orang (terutama warga sipil) menurut pihak berwenang Lebanon, dan menghancurkan sekolah, klinik, dan bangunan lainnya. Israel membenarkan serangan tersebut, menyebutnya

“bertujuan untuk mencegah sejumlah rencana serangan teroris terhadap orang Israel di luar negeri.”<sup>184</sup>

Polanya ajek, dan justifikasi itu dianggap sah-sah saja, sekali lagi mencerminkan status Israel sebagai negara klien yang berguna dan status subhuman korbannya.

Kasus yang disebutkan terakhir itu terjadi pada hari ketika Israel menembak jatuh sebuah pesawat sipil Libia, yang lantas hilang dalam badai pasir, 2 menit sebelum tiba di Kairo, lokasi tujuannya, dengan 110 orang terbunuh. AS secara resmi menyatakan simpati kepada keluarga korban, tetapi juru bicara pers “menolak memberi keterangan kepada wartawan tentang pandangan pemerintah mengenai insiden tersebut”. Israel menyalahkan pilot Prancis tersebut, dan *New York Times* dengan patuh menerima klaim Israel bahwa pilot tersebut tahu bahwa ia telah diperintahkan untuk mendarat, tetapi malah menghindar secara “sangat mencurigakan”—klaim yang juga diajukan Uni Soviet saat menembak jatuh KAL 007102<sup>185</sup>—sehingga tindakan Israel “paling buruk ... dianggap sebagai tindakan keji yang tak seberapa keji dibanding kebiadaban tindakan orang Arab sebelumnya”.

Reaksi resmi Israel disampaikan Perdana Menteri Golda Meir: “Pemerintah Israel mengungkapkan kesedihan mendalam atas hilangnya nyawa manusia dan menyesal bahwa pilot Libia [*sic*] tidak menanggapi peringatan yang diberikan kepadanya sesuai dengan praktik internasional.” Sedangkan Shimon Peres menambahkan, “Israel bertindak sesuai dengan hukum internasional.”



Israel secara keliru mengklaim pilot tersebut tidak berwenang untuk menerbangkan pesawat jet. “Pers dilarang menerbitkan gambar pesawat yang hancur, korban yang mati dan terluka,” demikian Amiram Cohen menguraikan dalam analisis terperinci tentang reaksi Israel (dilakukan setelah kekejaman KAL 007), dan “wartawan tidak diizinkan untuk mengunjungi rumah sakit di Beersheba dan untuk mewawancarai korban yang selamat”. Semua itu merupakan bagian dari upaya “disinformasi”. Reaksi internasional diabaikan pers Israel seiring keterangan lain bahwa “semangat anti-Semitisme berkembang” di Eropa—yang juga selalu disebutkan di AS juga, ketika seseorang berani mengungkap atau mengkritik kejahatan Israel.

Pers Israel bersikeras bahwa “Israel tidak bersalah” dan “kita harus menyalahkan pilot [Prancis]”. Demikianlah hasil “mobilisasi media”, yang mendukung justifikasi tindakan Israel, menurut Cohen. Setelah banyak rekayasa, Israel mengakui telah terjadi “kesalahan penilaian”, bersedia memberi ganti rugi kepada keluarga korban secara *ex gratia* (berdasar kewajiban moral) “demi pertimbangan kemanusiaan” sambil menolak “kesalahan” atau tanggung jawab Israel.<sup>186</sup>

Insiden itu berlalu begitu saja di Amerika Serikat, dengan sedikit kritik terhadap pelaku kejahatan tersebut. Perdana Menteri Golda Meir tiba di AS 4 hari kemudian; ia diusik beberapa pertanyaan memalukan oleh pers dan kembali ke negerinya dengan hadiah pesawat militer baru. Reaksi tersebut sedikit berbeda ketika orang-orang Rusia

menembaki KAL 007 pada September 1983,<sup>187</sup> tetapi sebanding dengan ketika teman-teman Washington di UNITA mengklaim telah menembak jatuh dua pesawat sipil pada saat bersamaan. Tidak sulit membedakan kriteria “terorisme internasional”.

Catatan tentang terorisme Israel dapat dilacak sejak awal pendirian negara—bahkan, jauh sebelumnya—termasuk pembantaian 250 warga sipil dan pengusiran brutal terhadap 70 ribu orang lainnya dari Lydda dan Ramie pada Juli 1948; pembantaian ratusan orang di Desa Doueimah yang tidak berdaya di dekat Hebron pada Oktober 1948 dalam sejumlah “operasi pembukaan lahan”, sementara aparat propaganda internasional mengatakan, seperti yang terjadi sekarang, orang-orang Arab melarikan diri atas imbauan pemimpinya; pembunuhan sekian ratus orang Palestina oleh IDF setelah penaklukan jalur Gaza pada 1956; pembantaian di Qibya, Kafr Kassem, dan serangkaian desa lainnya; pengusiran ribuan orang Badui dari zona demiliterisasi sesaat setelah perang 1948 dan ribuan orang lainnya dari Sinai timur laut pada awal 1970-an—desa mereka dihancurkan untuk membuka wilayah bagi pemukiman Yahudi; dan seterusnya. Para korban, menurut definisi, adalah “pejuang PLO” atau dengan kata lain, teroris.

Dengan demikian, editor Ha’aretz yang terhormat, Gershom Schocken, dapat menulis bahwa Ariel Sharon “mengumumkan diri sejak awal 1950-an sebagai pejuang yang kejam terhadap pejuang Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)”, mengacu pada pembantaian warga sipil

yang ia lakukan di Al-Bureig dan Qibya pada 1953 (jauh sebelum PLO ada). Dan korban di Lebanon dan tempat-tempat lain juga “teroris”—jika tidak, tak mungkin mereka dibunuh oleh aksi sebuah negara yang begitu setia terhadap semangat “kesucian tangan” dan bertumpu pada “hukum yang lebih tinggi”, menurut pers Amerika “pro-Arab”.

Para komandan teroris sangat dihormati. Ketika teroris AS kontemporer mengambil alih kursi kepresidenan pada 1981, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Israel menjadi panglima teroris yang terkenal, sementara posisi tertinggi di Jewish Agency dipegang seorang pria yang telah membunuh puluhan warga sipil yang ditahan di masjid di sebuah kota Lebanon selama operasi pembersihan lahan lainnya pada 1948—ia segera mendapat pengampunan, semua jejak kejahatannya dihapuskan, dan diberi sebuah surat kuasa hukum yang menyatakan “tidak ada noda” yang dapat dikaitkan dengan tindakannya.<sup>188</sup>

Bahkan, terorisme terhadap orang Amerika pun bisa ditoleransi. Serangan teroris Israel terhadap gedung milik AS (juga, tempat-tempat umum) di Mesir pada 1954 untuk memperburuk hubungan AS-Mesir dan membatalkan perundingan damai rahasia yang sedang berlangsung saat itu diabaikan dan hampir tidak diingat. Sama seperti upaya untuk menenggelamkan kapal mata-mata AS, Liberty, di perairan internasional pada 1967 oleh kapal pengebom dan torpedo Israel, yang bahkan menembak sekoci guna memastikan tidak ada yang bisa

melarikan diri, dengan 34 awak tewas dan 171 terluka—dianggap bencana laut AS terburuk pada masa damai abad ini, tetapi diabaikan sebagai “kesalahan”—absurditas yang mencolok transparan—dan hampir tidak diketahui.<sup>189</sup> Demikian pula, penyiksaan terhadap orang Amerika oleh Angkatan Darat Israel di Tepi Barat dan Lebanon selatan yang nyaris tidak tercatat di media, dengan penyangkalan Israel disebarluaskan dan verifikasi oleh Duta Besar AS di Israel diabaikan.<sup>190</sup> Fakta bahwa korbannya adalah orang Arab-Amerika tidak diragukan lagi menjadi faktor pembenaran, sesuai dengan standar operasi teror.

Yang mencolok tentang catatan ini—mencakup terorisme terhadap orang Yahudi sendiri—adalah bahwa berbagai aksi itu sama sekali tidak menodai reputasi Israel di Amerika Serikat dengan standar moral yang tidak ada bandingannya dalam sejarah. Setiap aksi terorisme baru, walaupun mendapat sorotan, akan dengan cepat disisihkan dan dilupakan, atau disebut sebagai penyimpangan sementara, akibat sifat mengerikan musuh yang memaksa Israel untuk menyimpang, sejenak, dari jalan kebenarannya. Sedangkan media kerap dikecam atas “standar ganda” mereka karena mengabaikan kejahatan Arab seraya mendesak Israel memenuhi standar nilai yang tidak mungkin; dan para cendekiawan yang terhormat memberi tahu kita dengan saksama bahwa “banyak tokoh masyarakat di Barat, bahkan sejumlah negara Barat” (tentu saja, tanpa menyebut nama) telah mendorong PLO untuk menghancurkan Israel.<sup>191</sup>

Di seluruh spektrum politik di Amerika Serikat dan di antara kelas terpelajar—dengan keseragaman mencolok dan pengecualian yang amat kecil—berlaku doktrin yang berlaku bahwa terorisme Palestina dan sekutu Arabnya yang didukung Kremlin, komitmen mereka untuk membunuh orang-orang Yahudi dan menghancurkan Israel, dan penolakan mereka untuk mempertimbangkan penyelesaian politik, merupakan akar penyebab konflik Arab-Israel yang tak kunjung usai, dengan Israel menjadi korban yang menderita. Adapun Amerika Serikat dengan teguh dan berani berjuang melawan “momok jahat terorisme”, dari Amerika Tengah sampai Lebanon dan sekitarnya.

Gerakan nasional Yahudi dan negara yang berkembang darinya tidak menghadirkan landasan baru dalam catatan kekejaman teroris mereka, terlepas dari kekebalan yang dinikmati dalam pandangan Barat yang tercerahkan. Bagi orang Amerika, sudah cukup untuk mengingat “bahwa Adolf Hitler memilih untuk memuji Amerika Serikat ... karena ‘mengatasi masalah’ penduduk asli,”<sup>192</sup> seperti halnya sebagian dari mereka yang hidup di bawah ketentuan ala Hitler di Amerika Tengah saat ini, dengan dukungan AS. Namun, pandangan terkini tentang “terorisme” di negara-negara “beradab” penuh kemunafikan, dan hanya akan jadi bahan hinaan di kalangan masyarakat beradab.

# 3

## Libia dalam Demonologi (Rekayasa Sistematis untuk Membuat Sesuatu Menjadi Menakutkan) Amerika Serikat

(1986)

---

**D**ALAM sistem doktrinal Amerika, tak seorang pun dilambangkan sebagai “momok kejam terorisme” seperti Muammar Qaddafi, sang “Anjing Gila” dunia Arab. Dan Libia, di bawah kepemimpinannya, betul-betul menjadi model nyata bagi sebuah negara teroris.

Penggambaran Libia di bawah kepemimpinan Qaddafi sebagai sebuah negara teroris memang pas. Meninjau kembali aksi-aksi besar terorisme yang secara masuk akal dihubungkan dengan Libia, Laporan Amnesti Internasional (AI) mendata pembunuhan-pembunuhan 14 warga negara Libia oleh negara teroris ini, 4 di luar negeri, sepanjang 1985.<sup>193</sup>

Di tengah histeria yang diciptakan untuk meraih tujuan-tujuan lain, berbagai tuduhan dilontarkan, tetapi sebuah dokumen menegaskan pernyataan seorang pejabat senior intelijen Amerika Serikat pada April 1986 bahwa sampai “beberapa minggu yang lalu, (Qaddafi) masih menggunakan orang-orangnya, terutama untuk membunuh pemberontak-pemberontak Libia.”<sup>194</sup> “Beberapa minggu yang lalu,” pejabat intilijen ini melanjutkan, Qaddafi “membuat keputusan tegas untuk menjadikan orang-orang Amerika sebagai target.” Keputusan ini menjadi fakta yang tak diragukan lagi, meskipun belum ada bukti tepercaya yang mendukungnya, menyusul insiden Teluk Sidra saat armada udara dan laut Amerika Serikat menenggelamkan kapal-kapal Libia, yang membuat banyak orang terbunuh.

Selanjutnya, keputusan Libia ini secara keseluruhan menjadi masuk akal, dianggap sah dan dirasa terlalu terlambat, di bawah doktrin-doktrin yang diakui oleh pegawai eksekutif Amerika Serikat dan diamini oleh komentator-komentator yang tepercaya, yang beberapa sudah dikutip, dan lainnya kami tujukan secara langsung.

AI melaporkan bahwa pembunuhan-pembunuhan teroris-teroris Libia dimulai sejak awal 1980, saat Jimmy Carter sedang melancarkan perang teroris di El Salvador, dengan Jose Napoleon Duarte bergabung sebagai pelindung yang memastikan bahwa senjata-senjata akan mengalir ke tangan para pembunuh. Ketika Libia tengah membunuh 14 warganya sendiri, bersama sejumlah orang, rezim El Salvador yang menjadi klien Amerika

Serikat membunuh sekitar 50.000 warga negaranya dengan cara yang digambarkan oleh Uskup Rivera y Damas (yang menggantikan Uskup Besar Romero yang dibunuh) pada Oktober 1980—setelah 7 bulan penuh teror—sebagai “sebuah perang pembasmian dan pemusnahan terhadap sejumlah warga sipil yang tidak berdaya.”<sup>195</sup>

Beberapa minggu kemudian, pasukan-pasukan keamanan yang melakukan tugas-tugas yang diperlukan ini dipuji oleh Duarte, untuk “pengabdian gagah berani yang dilakukan bersama rakyat dalam melawan subversi” sambil mengakui bahwa “massa berpihak kepada para gerilyawan” ketika pembasmian dan pemusnahan mulai dilakukan di bawah aliansi Carter-Duarte. Duarte menyatakan pujian untuk pembunuhan massal tersebut saat dilantik menjadi Presiden Junta sebagai upaya untuk melegitimasi kepresidenannya setelah pembunuhan empat biarawati Amerika, sebuah tindakan yang secara umum dianggap tidak pantas, meskipun ada pembenaran-pembenaran yang diajukan untuk kejahatan tersebut oleh Jeane Kirkpatrick dan Alexander Haig.

Sementara itu, media meyakinkan kita bahwa “Tidak ada pendapat kuat yang menyatakan bahwa sebagian besar dari korban-korban politik yang diperkirakan jumlahnya 10.000 pada 1980 itu merupakan korban pasukan pemerintah atau tentara lain yang berhubungan dengan mereka” (*Washington Post*), meskipun kemudian diakui diam-diam bahwa pejabat-pejabat di dalam pemerintahan Carter menginformasikan kepada media



bahwa “pasukan-pasukan keamanan bertanggung jawab atas 90% kejahatan tersebut,” bukan “kelompok-kelompok sayap kanan yang tak terkontrol” sebagaimana yang telah diberitakan oleh pers selama ini.<sup>196</sup>

Sejak hari-hari pertama operasi teroris Carter-Reagan di El Salvador, peran utama Duarte adalah memastikan bahwa tidak akan ada rintangan terhadap pembantaian itu, sembari menyangkal kejahatan-kejahatan yang terdokumentasi dengan baik atau membenarkan tindakan-tindakan kekejaman tersebut dengan dalih bahwa korban tersebut adalah “kaum Komunis.” Ia memainkan peranan ini untuk memperoleh pujian di Amerika Serikat sebab pembantaian kejam terhadap populasi warga memiliki imbas sebagaimana yang diharapkan, yaitu menghancurkan ancaman demokrasi yang mulai tumbuh pada 1970 dengan meningkatnya kelompok-kelompok swadaya berbasis gereja, perkumpulan petani, serikat buruh, dan “organisasi-organisasi populer” lainnya.

Koresponden konservatif Amerika Tengah dari London *Spectator* mengamati bahwa pasukan-pasukan berani mati itu “betul-betul melakukan tugas mereka. Mereka menyembelih serikat-serikat dagang dan organisasi-organisasi massa” dan menyebabkan orang-orang yang selamat “melarikan diri ke luar negeri, atau bergabung dengan kelompok gerilyawan,” yang pada titik ini, perang Amerika Serikat melawan warga pedesaan semakin meningkat, dengan teror yang semakin meluas dan pembunuhan massal. Maka, wajar ketika para editor *New*

*Republic*, yang mendesak Reagan untuk menggenjatkan pembantaian tanpa memedulikan hak-hak asasi manusia (“ada kepentingan-kepentingan utama Amerika Serikat yang lebih tinggi di sana”) dan “tak peduli seberapa banyak korban yang terbunuh,” memandang gembira pada pencapaian-pencapaian di El Salvador tersebut, yang menjadi “model sesungguhnya untuk mendukung demokrasi di lingkungan kita.” Teror berkelanjutan ini, didokumentasikan oleh Americas Watch, Amnesti Internasional, dan—sesekali—oleh media, merupakan masalah yang diabaikan.<sup>197</sup>

Pembantaian di El Salvador tidak semata terorisme negara berskala besar, tetapi terorisme internasional, mengingat organisasinya, pasokan persenjataannya, pelatihannya, dan partisipasi langsung penguasa separuh dunia. Demikian juga pembunuhan massal terhadap 70.000 warga Guatemala pada tahun-tahun yang sama, ketika persenjataan Amerika Serikat mengalir ke tangan para pembunuh dalam jumlah yang jauh dari yang diperkirakan banyak orang, meskipun perlu memanggil proksi-proksi Amerika Serikat—jenderal-jenderal Neo-Nazi Argentina, Taiwan, dan Israel—untuk melakukan pembantaian dengan lebih efisien. Pemerintah Amerika Serikat juga membangun saluran persenjataan yang melibatkan Belgia dan kolaborator lainnya, di bawah pengarah tidak resmi dari Pentagon dan CIA, sebagai sebuah dukungan. Sementara itu, ketika teror sampai di puncak kebiadabannya, Reagan dan sekutu-sekutunya memuji para pembunuh dan penyiksa itu karena

kemajuan-kemajuan yang mereka lakukan di bidang hak asasi manusia dan “pengabdian sepenuhnya mereka pada demokrasi,” sembari mengabaikan begitu banyaknya dokumentasi kekejaman mereka sebagai sebuah “ocehan ngawur”.<sup>198</sup>

Terorisme internasional Amerika Serikat di El Salvador dipuji sebagai sebuah pencapaian penting karena menjadi peletakan landasan “demokrasi” versi yang paling disukai: kekuasaan kelompok-kelompok yang melayani kebutuhan-kebutuhan Amerika Serikat kini berkurang menjadi ratifikasi rutin keputusan elite sehingga organisasi-organisasi populer yang bisa memberikan landasan untuk demokrasi yang bermakna, telah “disembelih” dan dibinasakan. Pada 1982 dan 1984, Amerika Serikat menyelenggarakan apa yang Edward Herman dan Frank Brodhead sebut sebagai “pemilihan-pemilihan demonstrasi” untuk menjinakkan *front* di dalam negeri, yang diselenggarakan dalam situasi penuh “teror dan keputusan, rumor yang menakutkan dan kenyataan yang mengerikan,” dalam kata-kata para pengamat British Parliamentary Human Rights Group (Kelompok Hak Asasi Manusia Parlemen Inggris), sementara para komentator Amerika Serikat memuji demonstrasi tentang komitmen terhadap demokrasi ini.<sup>199</sup>

Guatemala juga dipandang sebagai sebuah sukses dengan alasan-alasan serupa. Ketika separuh warga negara betul-betul datang berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara setelah dibuat trauma oleh kekerasan yang disokong Amerika Serikat, para komentator terkenal

terlihat sangat senang dengan pertunjukan kecintaan kita akan demokrasi, sama sekali tidak terganggu dengan semakin meningkatnya pembunuhan-pembunuhan oleh pasukan maut dan pengakuan terbuka presiden terpilih bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap akar-akar kekuasaan yang sesungguhnya di dalam militer dan oligarki, dan bahwa pemerintahan sipil ini semata “manajer-manajer kebangkrutan dan kesengsaraan.”<sup>200</sup>

Dua contoh ini mewakili hanya sebagian peran Amerika Serikat dalam terorisme internasional selama 1980-an, dan dokumen mengerikan sudah tersusun sejak bertahun-tahun yang lalu.

“Ciri kekejaman-kekejaman Libia,” menurut dua komentator yang mengamati tinjauan kembali kajian Amnesty Internasional tentang teror negara, “adalah bahwa kekejaman-kekejaman itu jumlahnya cukup terbatas sehingga kasus-kasus individu bisa dihitung satu per satu,” berbeda dengan Argentina, Indonesia, atau negara-negara Amerika Tengah tempat sang kaisar mengacau dunia.<sup>201</sup>

Singkatnya, Libia memang sebuah negara teroris, tetapi di dunia terorisme internasional, Libia hanya berperan sedikit.

Mereka yang percaya bahwa ada kemungkinan untuk menemukan tingkat kekejaman dan pembelaan untuk pembantaian massal dan teror yang tidak akan dijangkau dalam publikasi-publikasi media Barat bisa dibebaskan dari ilusi tersebut dengan mempertimbangkan banyaknya contoh-contoh selama tahun-tahun terburuk teror di

Amerika Tengah,<sup>202</sup> atau dengan melihat jurnal neokonservatif *The National Interest*, tempat mereka bisa membaca, di sebuah kritik terhadap *Washington Post* untuk bersikap lunak kepada Libia, bahwa “Tak ada keraguan lagi kalau, misalnya, pemerintahan Jose Napoleon Duarte di El Salvador atau pemerintahan terbaru Turki melakukan tindakan yang kira-kira mendekati jumlah eksekusi yang dilakukan Qaddafi, media *Post* akan menyajikan dengan sangat terperinci kepada kita, dan memberitakan adanya pertentangan yang cukup besar.”<sup>203</sup>

“Terorisme” tidak hanya didefinisikan untuk pengabdian ideologi, seperti pembahasan sebelumnya, tetapi standar-standar pembuktian juga dikumpulkan untuk mencapai tujuan-tujuan sang Kaisar. Untuk menunjukkan peran Libia sebagai negara teroris, bukti-bukti paling samar sekalipun, atau bahkan tidak sama sekali, cukup sebagai dasar. Judul editorial *New York Times* yang menjustifikasi serangan teroris yang membunuh sekitar 100 orang di Libia (menurut berita-berita media dari tempat kejadian) berbunyi: “To Save the Next Natasha Simpson.” Rujukannya adalah gadis Amerika berumur 11 tahun yang menjadi salah satu korban serangan teroris di bandara Roma dan Wina pada 27 Desember 1985. Korban-korban ini menjadi pembenaran kita untuk mengebom kota-kota di Libia “untuk membuat gentar terorisme yang didukung negara,” kata editor *Time* dengan serius.

Pengeboman hanyalah cacat kecil sehingga ketiadaan bukti tetap bisa menunjukkan bahwa Libia terlibat dalam

aksi-aksi tersebut. Pemerintah Italia dan Austria mengungkapkan bahwa para teroris itu dilatih di daerah Lebanon yang dikuasai oleh Suriah, dan tiba lewat Damaskus, sebuah kesimpulan yang dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Israel, Yitzhak Rabin. Empat bulan kemudian, menanggapi pernyataan Amerika Serikat tentang terlibatnya Libia dalam serangan Wina, Menteri Dalam Negeri Austria menyatakan bahwa “tidak ada bukti sedikit pun untuk menuduh Libia,” lalu kembali mengutip bahwa Suriah menjadi penghubung dan menambahkan bahwa Washington tidak pernah menyajikan bukti yang menyatakan keterlibatan Libia seperti yang telah dijanjikan untuk disampaikan pada pemerintah Austria. Ia juga menambahkan komentar yang tak bisa diungkapkan—di Amerika Serikat—bahwa masalah terorisme yang berbasis Lebanon itu sebagian besar akibat gagalnya penyelesaian masalah Palestina, yang membuat orang-orang putus asa memilih cara kekerasan, akibat yang mungkin diharapkan oleh terorisme Amerika Serikat-Israel, sebagaimana dibahas di Bab 2.<sup>204</sup>

Beberapa bulan kemudian, sembari menandatangani persetujuan dengan Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam “memerangi terorisme,” Menteri Dalam Negeri Italia menyatakan kembali posisi yang dinyatakan Italia “sejak Januari bahwa mereka mencurigai terlibatnya Suriah dalam serangan Roma dan Wina. *Times* memberitakan pernyataannya, tetapi tanpa merasa perlu mengomentari serangan balasan yang patut dilakukan terhadap Libia yang mereka rayakan pada April<sup>205</sup>.

Jika seseorang yang terlibat dalam sebuah aksi teroris mengunjungi Libia, atau diduga pernah memperoleh pelatihan atau dana dari Libia pada masa lalu, itu cukup untuk mengutuk Qaddafi sebagai sang “Anjing Gila” yang harus dilenyapkan. Standar-standar seperti itu bisa menyangkutkan CIA dalam pembunuhan luar biasa terhadap orang-orang Kuba yang diasingkan, di antara banyak hal lainnya. Yang terjadi pada 1985 saja, satu dari orang yang dicurigai sebagai pengebom jet jumbo Air India di dekat Irlandia yang menjadi aksi terorisme paling buruk pada tahun itu, membunuh 329 orang, dilatih di sebuah kamp latihan tentara bayaran di Alabama.

Jaksa Agung Amerika Serikat Edwin Meese, yang mengunjungi India 9 bulan kemudian, membuat sebuah pernyataan, yang nyaris tidak dilaporkan, bahwa Amerika Serikat sedang mengambil langkah-langkah “untuk mencegah para teroris supaya tidak memperoleh pelatihan atau sumber-sumber daya di Amerika Serikat,” merujuk pada kamp-kamp latihan militer milik swasta yang dituduh melatih ekstremis Sikh. Tidak ada bukti yang mendukung pernyataan Meese ini, dan tidak ada investigasi juga, sepengetahuan saya.<sup>206</sup>

Aksi teroris yang memakan paling banyak korban di Timur Tengah adalah sebuah pengeboman mobil di Beirut pada Maret, membunuh 80 orang dan melukai beberapa ratus orang, yang dilakukan oleh sebuah unit intelijen Lebanon, yang dilatih dan didukung oleh CIA, dalam upaya untuk membunuh seorang tokoh pemimpin Syi’ah yang diyakini terlibat dalam “serangan-serangan teroris

terhadap instalasi-instalasi milik Amerika Serikat” di Beirut<sup>207</sup>. Istilah “terorisme” biasanya digunakan oleh tentara-tentara asing dalam merujuk tindakan-tindakan yang melawan mereka oleh warga lokal yang melihat mereka sebagai penjajah yang berusaha untuk memaksakan pendudukan politik penuh kebencian yang didirikan oleh pendudukan asing, dalam hal ini adalah “Orde Baru” Israel. Dengan standar-standar pembuktian seperti yang digunakan dalam kasus Libia, Amerika Serikat sekali lagi menjadi kekuatan teroris utama dunia di 1985, meskipun jika kita tidak memasukkan terorisme besar-besaran yang diatur secara tidak memenuhi syarat dalam sistem doktrinal.

Berlanjut sampai 1986, di antara aksi-aksi teroris paling serius di kawasan Timur Tengah/Mediterrania saat tulisan ini disusun, terlepas dari terorisme Israel yang terus berlangsung di Lebanon selatan, adalah pengeboman Amerika Serikat kepada Libia dan sejumlah pengeboman di Suriah yang—menurut stasiun radio partai Presiden Amin Gemayel, Phalangis—membunuh lebih dari 150 orang pada April, Suriah menuduh agen-agen Israel yang melakukan pengeboman ini, tanpa mengemukakan bukti, tetapi kredibilitasnya tidak kurang dari tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Amerika Serikat terhadap siapa saja yang menjadi penjahat pada saat itu—dan, kebetulan tidak masuk dalam kategori “momok kejam terorisme.”<sup>208</sup>

Amerika Serikat, tentu saja, menolak bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan teroris yang dilatihnya: orang-orang Kuba, Lebanon, para pembunuh massal



seperti Rios Montt di Guatemala, dan sejumlah besar lainnya di Amerika Latin serta tempat lain. Dalam kasus pengeboman Lebanon misalnya, CIA membantah keterlibatannya meskipun penyangkalan ini “diragukan oleh beberapa pejabat Pemerintah dan Kongres yang mengatakan bahwa agensi bekerja sama dengan kelompok tersebut saat terjadinya pengeboman,” sebuah kesimpulan yang ditarik oleh penyelidikan *Washington Post*, yang menyatakan kalau pemerintah membatalkan operasi rahasia setelah peristiwa pengeboman itu, yang dilakukan tanpa otorisasi CIA.<sup>209</sup>

Meskipun kita menerima pernyataan bahwa CIA tidak mengotorisasi pengeboman dan tidak lagi terlibat dengan kelompok teroris yang dilatihnya itu, dalih pemerintah dengan segera tertolak berdasarkan standar-standar yang biasa diterapkan pada musuh-musuh resmi oleh para pembela terorisme Amerika Serikat dan Israel, baik dalam pemerintahan atau media. Mengingat kembali bahwa “tanggung jawab moral yang lebih besar untuk kekejaman-kekejaman ... *semuanya ada* di Yasser Arafat” karena “ia adalah bapak pendiri kekerasan Palestina dulu dan kini.” Dan, dengan begitu Amerika Serikat bisa menangkap Arafat “yang bertanggung jawab terhadap aksi-aksi terorisme internasional” secara umum, entah terlibat atau tidak.<sup>210</sup> Dengan logika yang sama, kita bisa menyimpulkan bahwa “tanggung jawab moral yang lebih besar” dalam kasus-kasus yang sudah disebutkan dan banyak lagi lainnya “*semuanya ada* di Washington,” yang

harus bertanggung jawab apa pun fakta-fakta mengenai keterlibatan langsungnya.

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab Pendahuluan, kampanye Reagan melawan “terorisme internasional” merupakan sebuah pilihan wajar bagi sistem doktrinal untuk menggerakkan agenda dasarnya: perluasan sektor negara di bidang ekonomi, pengalihan sumber-sumber daya dari yang miskin kepada kaum kaya, dan kebijakan luar negeri yang lebih “aktif”. Kebijakan-kebijakan semacam itu mudah dilakukan jika rakyat ketakutan sehingga patuh pada musuh mengerikan yang mengancam untuk menghancurkan kita, meskipun lebih baik dihindari, karena terlalu berbahaya, untuk menghadapi langsung Setan Besar tersebut. Terorisme internasional yang dilakukan proksi-proksi Imperium Setan merupakan kandidat yang paling jelas, dan para ahli PR Pemerintah segera mengerjakan tugas untuk menyusun jaring kebenaran semu dan kebohongan yang pas, mengantisipasi kalau-kalau permainan informasi ini dianggap betulan.

Libia benar-benar tepat untuk kebutuhan ini. Qaddafi begitu mudah dibenci, khususnya dengan latar belakang semakin merajalelanya rasisme anti-Arab di Amerika Serikat dan komitmen kelas-kelas politik serta kelompok terpelajar yang pandai mengungkapkan pendapatnya terhadap penolakan Amerika Serikat-Israel. Qaddafi telah menciptakan sebuah masyarakat yang buruk dan tertindas, dan betul-betul bersalah karena melakukan terorisme, khususnya terhadap rakyat Libia, sebagaimana

yang sudah terlihat. Hukuman mati yang dijatuhkan terhadap orang-orang Libia yang menjadi pemberontak, tindakan-tindakan teror besarnya yang terekam, mungkin bisa dicegah menurut analisis intelijen Amerika Serikat dan Israel, tetapi dengan konsekuensi terbukanya (yang sebenarnya mudah diketahui) kode rahasia Libia yang telah dipecahkan. “Seorang analisis Israel mengungkapkannya dengan lebih jelas: ‘Mengapa membuka sumber-sumber dan metode-metode kita demi sebagian warga Libia?’”<sup>211</sup>

Libia itu lemah dan tidak berdaya sehingga perang berkembang dan, ketika diperlukan, pembunuhan terhadap warga Libia bisa dilakukan dengan mudah tanpa takut akan hukuman. Kemenangan militer yang gemilang di Grenada, merupakan sebuah puncak permusuhan dan keagresifan Pemerintah Carter-Reagan setelah pemerintahan Uskup itu dianggap sebagai ancaman karena mempertimbangkan kebutuhan kaum mayoritas miskin, dilakukan untuk mencapai tujuan serupa. Hal ini dirasakan juga di luar negeri. Wartawan Amerika, Donald Neff, menulis dalam sebuah publikasi Inggris tentang insiden Teluk Sidra pada Maret 1986, mengomentari bahwa, “ini adalah sebuah operasi yang tidak bergaya Rambo dibandingkan dengan pertunjukan perundungan yang dimaksudkan untuk memancing pertarungan. Ini adalah gaya khas Reagan. Selama 5 tahun menjabat, ia sering kali bertindak sok kuasa atas nasib orang-orang kecil. Ia melakukannya lagi kali ini.”

Adalah kenyataan yang menarik bahwa pertunjukan kepengecutan dan keberengsekan ini kelihatannya disambut baik oleh beberapa orang, termasuk di luar negeri juga. Komentator Inggris, Paul Johnson, mengutuk “bau busuk kepengecutan murni di udara,” sebagaimana “para pengecut” meragukan pengeboman Amerika Serikat pada “basis-basis teroris” (yaitu, sasaran-sasaran berupa warga sipil) di Libia. Ia memuji “kekuatan sang Kobi,” yang mempertunjukkan keberaniannya dengan mengirim para pengebom untuk membunuh warga sipil yang tidak berdaya.<sup>212</sup>

Ahli-ahli PR pemerintahan Reagan memahami manfaat musuh Libia dan hanya perlu membuang sedikit waktu dalam menghadapi musuh berbahaya ini. Libia juga dirancang sebagai agen utama dalam “jaringan teroris” yang terinspirasi Soviet, dan pada Juli 1981, rencana CIA untuk menggulingkan dan mungkin membunuh Qaddafi dengan kampanye teror paramiliter di Libia bocor kepada pers.<sup>213</sup>

Kita bisa melihat secara sekilas bahwa dengan standar-standar Amerika Serikat, rencana ini memberikan otorisasi kepada Qaddafi untuk melakukan aksi-aksi teror terhadap sasaran Amerika dalam “pembelaan diri terhadap serangan pada masa depan,” begitulah kata-kata juru bicara Gedung Putih, Larry Speakes, saat menjelaskan membenaran resmi pengeboman di Tripoli dan Benghazi. Benbenaran serupa diulangi lagi di PBB oleh Vernon Walters dan Herbert Okun. Pemerintah bahkan kelewatan dalam menegaskan bahwa sikap ini—yang jika

diadopsi oleh negara kejam lainnya akan memorakporandakan apa yang tersisa dari ketertiban dunia dan hukum internasional—sejalan dengan Piagam PBB. Tidak ada hal ketidakmasukakalan hukum yang bisa menjembatani hal tersebut, tetapi Pemerintah berpendapat bahwa “itu akan diterima dengan baik di Peoria”—atau setidaknya di Cambridge, New York, dan Washington. Di tujuan ekstrem kaum liberal kiri dalam beragam pandangan politik yang diperbolehkan, Reagan disanjung oleh spesialis hukum Anthony Lewis untuk keyakinannya “pada pendapat hukum bahwa kekerasan terhadap para pelaku kejahatan yang melakukan kekerasan berulang kali itu dibenarkan sebagai sebuah tindakan pembelaan diri.”

Alasan Amerika Serikat mencari pembenaran untuk pengeboman Libia “atas dasar perlunya serangan lebih dulu, yang bisa dilihat sebagai bentuk pembelaan diri, (bukannya) sebuah tindakan balasan” dijelaskan oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri, yang mencatat bahwa Piagam PBB secara tegas melarang penggunaan kekerasan kecuali dalam upaya membela diri—lebih tepatnya, membela diri sampai PBB bertindak setelah adanya sebuah permohonan resmi kepada Dewan Keamanan oleh negara yang merasa menjadi korban serangan bersenjata tiba-tiba dan besar-besaran. “Pendapat sah” tersebut dipuji di dalam negeri, tetapi umumnya dicela di luar negeri, tempat hanya beberapa orang yang tidak setuju dengan mantan Duta Besar Kanada di PBB, George Ignatieff—salah seorang anggota

delegasi pertama Kanada ke PBB dan kini menjadi Kanselir Universitas Toronto—yang menolak permohonan hak membela diri yang ditetapkan di piagam PBB sebagai hal yang tidak pantas.<sup>214</sup>

Pada Agustus 1981, pesan anti-Qaddafi “diperkuat dengan menjebak Libia di Teluk Sidra,” sebuah jebakan “yang direncanakan dengan saksama oleh pihak Amerika Serikat” dengan maksud memancing konfrontasi supaya jet-jet Libia bisa ditembak jatuh, sebagaimana yang kemudian terjadi, ungkap Edward Haley dalam kajian anti-Qaddafi tentang hubungan Amerika Serikat dengan Libia. Satu tujuan khusus, menurut pendapat Haley, adalah untuk “memanfaatkan ‘ancaman Libia’ untuk memenangkan dukungan bagi langkah-langkah (pemerintah) yang ingin mengejar ‘konsensus strategis’ Haig terhadap Uni Soviet dan sebagai sebuah unsur dalam kesepakatan-kesepakatan yang diperlukan untuk menciptakan “Tentara Gerak Cepat,” sebuah pasukan intervensi yang sasaran utamanya adalah Timur Tengah.

Pada November, Pemerintah menciptakan sebuah cerita yang cukup menghibur tentang pembunuh bayaran Libia yang berkeliaran di jalan-jalan Washington untuk membunuh Pimpinan Kita, menyebabkan media langsung ramai-ramai mengomentari dengan skeptis, meskipun pada waktu itu skeptisismenya kecil. Ketika ditanya perihal ini, Reagan menyatakan, “Kami punya bukti, dan (Qaddafi) mengetahuinya.”<sup>215</sup> Cerita itu pelan-pelan menghilang begitu tujuan sudah tercapai, dan media bersikap cukup disiplin sehingga tidak memberitakan

tersingkapnya “para pembunuh” dalam daftar resmi Amerika Serikat, yang bocor di Inggris, merupakan anggota-anggota terkemuka Amal Lebanon (yang sangat anti-Libia), termasuk pemimpinnya Nabih Berri dan tokoh-tokoh tua pemimpin komunitas Syi’ah.<sup>216</sup>

Penemuan-penemuan dramatis lainnya termasuk ancaman Libia untuk menyerbu Sudan dengan menyeberangi 600 mil gurun pasir (dengan pasukan-pasukan udara Mesir dan Amerika Serikat yang tak berdaya menghalangi penyerbuan ini) dan sebuah rencana untuk menggulingkan pemerintahan Sudan pada Februari 1983, waktu itu kelompok reaksioner dalam Pemerintah sedang mengerjakannya dengan militansi yang tak cukup —sebuah rencana yang begitu subtil sampai-sampai intelijen Sudan dan Mesir tak tahu apa-apa soal itu, tetapi dengan mudah diketahui oleh para reporter Amerika Serikat yang datang ke Khartoum untuk menyelidikinya. Amerika Serikat menanggapi rencana yang mengagumkan ini dengan memamerkan kekuatan tentaranya, memungkinkan Menteri Luar Negeri Shultz, yang dikecam terlalu berhati lemah, untuk menyerang sikap-sikap heroik di televisi sambil mengumumkan bahwa Qaddafi “kembali ke tempatnya semula” karena Reagan bertindak “cepat dan tegas” terhadap ancaman bagi ketertiban dunia ini, sebagai sebuah pertunjukan “kekuatan kobra” lagi. Peristiwa ini segera dilupakan begitu tujuan-tujuannya sudah berhasil dicapai. Sebagaimana banyak contoh serupa sebelumnya. Media

juga secara umum memainkan peranan yang sudah digariskan untuk mereka, dengan sedikit keberatan.<sup>217</sup>

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu Maret—April 1986 pas dengan pola tersebut. Operasi Teluk Sidra pada Maret merupakan saat yang tepat untuk mengobarkan histeria *jingoist* sebelum pemungutan suara yang penting di Senat perihal bantuan Contra, bersamaan dengan “invasi” Nikaragua yang dibuat-buat kepada Honduras, sebuah operasi PR yang sukses besar sebagaimana ditunjukkan oleh reaksi garang para anggota Kongres dan media secara umum, juga hasil pemungutan suara di Senat (lihat Bab 2). Permainan informasi ini juga mengizinkan Pemerintah untuk menyediakan bantuan militer sebesar US\$20 juta dolar kepada Honduras, yang menurut pernyataan resmi Honduras, mereka tidak memintanya, dan yang sudah pasti “hilang” di kamp-kamp Contra, tetapi metode lain ini memungkinkan kelompok ilegal di Washington mengelak dari pembatasan Kongresional yang lemah terhadap kekejaman mereka.<sup>218</sup>

Provokasi Teluk Sidra juga setidaknya berhasil, memungkinkan pasukan Amerika Serikat untuk menenggelamkan sejumlah kapal Libia, membunuh lebih dari 50 warga Libia, agaknya dengan harapan bahwa hal itu bisa mendorong Qaddafi untuk melakukan tindakan-tindakan teror terhadap orang-orang Amerika, sebagaimana dinyatakan kemudian. Upaya ini disebutkan menyebabkan kekecewaan di Washington terhadap kegagalan Qaddafi dalam memakan umpan tersebut untuk melakukan kekejaman teroris yang bisa digunakan sebagai



dalih untuk fase berikutnya dalam kampanye teroris terhadap Libia.<sup>219</sup>

Sementara pasukan Amerika Serikat berhasil membunuh sejumlah warga Libia, mereka anehnya tidak mampu menyelamatkan seorang pun yang lolos. Tugas itu sebenarnya tidak mustahil dilakukan; 16 orang yang berhasil lolos dari serangan Amerika Serikat diselamatkan oleh perahu dari kapal minyak Spanyol.<sup>220</sup>

Tujuan resmi operasi militer Amerika Serikat adalah untuk menetapkan hak menempati Teluk Sidra. Pengiriman sebuah armada laut hampir tidak perlu atau kurang pas untuk mencapai tujuan ini: sebuah deklarasi pun sudah cukup. Jika langkah-langkah yang lebih lanjut diperlukan untuk beberapa alasan, ada langkah-langkah sesuai hukum yang bisa ditempuh. Jika seseorang memperselisihkan hak-hak kepemilikan dengan tetangganya, ada dua cara menyelesaikannya: *pertama* adalah menyelesaikannya di Pengadilan, *kedua* mengambil pistol dan membunuh tetangga tersebut.

Pilihan pertama jelas bisa dilakukan dalam kasus Teluk Sidra. Karena tidak mendesak, bisa mengambil jalan sesuai hukum untuk memperoleh hak secara wajar. Namun, sebuah negara yang tidak patuh pada hukum dan kejam secara alami akan mencari prioritas-prioritas yang berbeda. Ketika ditanya alasan Amerika Serikat tidak membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional, Brian Hoyle, Direktur Dinas Kebijakan dan Hukum Laut di Departemen Luar Negeri, mengatakan bahwa kasus ini “akan memakan waktu bertahun-tahun. Saya kira kita

tidak bisa membiarkan ini,”<sup>221</sup> sehingga memberikan pembenaran penting bagi armada laut Amerika Serikat untuk beroperasi di Teluk Sidra, jika Amerika Serikat ingin tetap bertahan sebagai sebuah bangsa.

Posisi Amerika Serikat ini meragukan alasan-alasan yang dangkal. Pers terus berbicara tentang “hukum laut,” tetapi Amerika Serikat nyaris tidak memiliki alasan yang jelas untuk menanggapi doktrin ini semata karena Pemerintahan Reagan menolak Undang-Undang Hukum Laut. Selanjutnya, Libia menembaki pesawat-pesawat Amerika Serikat, bukan kapal-kapal Amerika Serikat, dan “hukum udara” sama sekali belum tersusun dengan baik. Negara-negara membuat beragam klaim mengenai hal ini.

Amerika Serikat, misalnya, mengklaim bahwa Zona Identifikasi Pertahanan Udara sejauh 200 mil, yang di dalamnya ia berhak menerapkan “pembelaan diri” terhadap pesawat penerobos yang dianggap sebagai musuh. Tidak diragukan lagi bahwa armada udara Amerika Serikat masuk ke dalam wilayah udara Libia sejauh 200 mil—yang menurut Pentagon hanya 40 mil—dan mereka bersikap penuh permusuhan, menurut standar-standar Amerika Serikat, sehingga Libia berhak untuk menahan mereka. Hal ini dicatat oleh ahli hukum konservatif Alfred Rubin dari Fletcher School di Universitas Tufts, yang mengomentari bahwa “dengan mengirim armada udara, kita sudah melampaui apa yang kita otorisasikan di bawah Hukum Laut” dalam “provokasi yang tidak perlu.”<sup>222</sup> Namun, untuk sebuah negara bandit, hal semacam itu tidak relevan, dan tindakan itu

merupakan sebuah kesuksesan, setidaknya di lingkaran dalam negeri.

Tingkat dan maksud provokasi di Teluk Sidra terlihat jelas dari pernyataan juru bicara Pentagon, Robert Sims, yang “mengungkapkan bahwa kebijakan Amerika Serikat adalah untuk menembak setiap kapal Libia yang memasuki perairan internasional di Teluk Sidra sepanjang armada Amerika Serikat masih beroperasi di wilayah tersebut—tak peduli seberapa jauh kapal itu dari kapal-kapal Amerika Serikat.”

“Dengan ‘niat bermusuhan’ yang diperlihatkan Libia ketika berusaha menembak pesawat-pesawat perang Amerika Serikat,” terang Sims, setiap kapal militer Libia merupakan “ancaman bagi pasukan kita.”<sup>223</sup> Singkatnya, Amerika Serikat terus berusaha mempertahankan hak untuk menembak setiap kapal Libia yang mendekati armada lautnya di lepas pantai Libia dengan dalih “pembelaan diri”, tetapi Libia tidak memiliki hak untuk membela diri di wilayah udara yang luasnya sebanding dengan wilayah lautnya, bahkan sedikit dari apa yang dinyatakan oleh Amerika Serikat itu sendiri.

Cerita ini masih berlanjut. Wartawan Inggris, David Blundy, mewawancarai para insinyur Inggris di Tripoli yang tengah memperbaiki sistem radar buatan Rusia di sana. Seseorang yang mengatakan bahwa ia memantau peristiwa itu melalui layar-layar radar (yang, berlawanan dengan pernyataan Pentagon, tidak dapat berfungsi), melaporkan bahwa ia “melihat pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat menyeberangi tak hanya 12 mil ke dalam

wilayah teritorial air Libia, tetapi juga terbang ke atas daratan Libia.”

“Saya melihat pesawat-pesawat itu terbang kira-kira 8 mil ke dalam wilayah udara Libia,” katanya. “Saya kira, Libia tidak punya pilihan lain kecuali menembaknya. Menurut pendapat saya. Mereka enggan melakukan hal tersebut.” Insinyur itu menambahkan, “pesawat-pesawat tempur Amerika mendekati dengan menggunakan rute lalu lintas pesawat sipil biasa dan mengikuti jalur pesawat Libia, sehingga sinyal radar akan menutupi mereka di layar radar Libia.”<sup>224</sup>

Tak ada sedikit pun informasi ini yang muncul di media Amerika Serikat, sepengetahuan saya, terlepas dari laporan informatif dari Alexander Cockburn, yang memainkan peran biasa sebagai penangkal personal terhadap ketundukan dan distorsi media. Artikel Blundy tidak hilang secara misterius dari pers Amerika Serikat. Artikel itu dikutip oleh Joseph Lelyveld dari *Times*, dengan beberapa penghilangan di bagian-bagian yang penting.<sup>225</sup>

Satu konsekuensi—yang mungkin ditunggu-tunggu—dari operasi Teluk Sidra adalah munculnya aksi-aksi terorisme Libia sebagai aksi pembalasan. Aksi-aksi ini berimbas pada munculnya keadaan teror di Amerika Serikat, dan kalau beruntung, juga di Eropa, menyiapkan tahapan untuk ledakan berikutnya. Pengeboman diskotek “La Belle” di Berlin Barat pada 5 April, yang membunuh seorang tentara kulit hitam Amerika dan seorang Turki,<sup>226</sup> dengan segera dituduhkan kepada Libia, kemudian digunakan sebagai dalih untuk pengeboman di Tripoli dan

Benghazi pada 14 April, yang menewaskan banyak warga Libia, kelihatannya sebagian besar adalah penduduk sipil (sekitar 100 orang, menurut pers Barat; 60 orang menurut laporan resmi Libia).

Pengeboman ini terjadi persis 1 hari sebelum DPR melakukan pemungutan suara terkait bantuan Contra. Kalau-kalau lupa, para penulis pidato Reagan menegaskan. Ketika berpidato di Konferensi Bisnis Amerika pada 15 April, Reagan berkata: “Dan saya akan mengingatkan DPR yang akan melakukan pemungutan suara minggu ini bahwa gembong teroris telah mengirim US\$400 juta dan segudang senjata juga penasihat militer ke Nikaragua, untuk membawa perang di sana ke Amerika Serikat. Ia membual kalau ia membantu orang-orang Nikaragua karena mereka memerangi Amerika dengan alasannya sendiri.”<sup>227</sup>

Pemikiran bahwa sang “Anjing Gila” sedang membawa perang di daerahnya ke Amerika Serikat, dengan menyediakan persenjataan bagi sebuah negara yang sedang diperangi Amerika Serikat, dengan proksi terorisnya itu sangat bagus, yang berlalu tanpa komentar berarti. Namun, operasi PR, untuk kali pertamanya, tidak berhasil dalam memaksa Kongres, meskipun pengeboman terhadap Libia mengobarkan semangat *chauvinist*, sebagai sebuah konsekuensi yang mungkin bisa dilekatkan pada rasisme anti-Arab dan ketiadaan reaksi waras terhadap episode-episode histeria buatan terhadap kejahatan-kejahatan Qaddafi, baik yang sungguhan ataupun yang berupa tuduhan.

Serangan 14 April merupakan pengeboman pertama dalam sejarah yang muncul dalam waktu-waktu utama di televisi (*prime time*). Serangan-serangan bom direncanakan dengan hati-hati sehingga betul-betul meledak pada pukul 7 malam Waktu Standar Timur (EST—Eastern Standard Time).<sup>228</sup> Dan, pada saat itu, ketiga saluran televisi nasional sedang menyiarkan program berita utama, ketika para petugas televisi yang gelisah berusaha mendapatkan berita lebih dahulu dan segera mengalihkan siaran ke Tripoli untuk memberitakan peristiwa tersebut secara langsung. Dan, ini sama sekali bukan prestasi logistik yang murah untuk perjalanan udara selama 7 jam dari London. Segera setelah serangan bom berhenti, Gedung Putih mengutus Larry Speakes untuk berpidato di sebuah konferensi pers, yang diikuti oleh petinggi lainnya, memastikan dominasi penuh atas sistem informasi pada masa-masa yang sangat penting ini.

Orang-orang mungkin berpendapat bahwa pemerintah bertaruh dengan operasi PR yang cukup mencolok ini, karena para wartawan mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup jelas. Namun, Gedung Putih kelihatannya percaya diri bahwa tak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan keyakinannya pada kedisiplinan media terbukti benar.

Terlepas dari masalah waktu dan perhatian yang lebih, pertanyaan-pertanyaan lain bisa jadi dilontarkan. Untuk menyebut salah satunya, Speakes menyatakan bahwa Amerika Serikat mengetahui bahwa pada 4 April, “Biro Rakyat” Libia di Berlin Timur telah menginformasikan

kepada Tripoli bahwa sebuah serangan akan terjadi di Berlin keesokan harinya, dan bahwa mereka mengabarkan Tripoli bahwa pengeboman diskotik “La Belle” sudah terjadi, sebagaimana yang telah direncanakan. Jadi, Amerika Serikat tahu bahwa pada 4—5 April—dengan pasti, kata Gedung Putih—bahwa Libia secara langsung bertanggung jawab atas pengeboman tersebut.

Seseorang mungkin akan bertanya, mengapa laporan-laporan investigasi Amerika Serikat dan Jerman Barat dari 5 April sampai terjadinya serangan terus saja menyebutkan tentang kecurigaan-kecurigaan terhadap keterlibatan Libia? Sebenarnya, setiap wartawan yang mendengarkan keterangan pemerintah memiliki—kecuali kalau kita menganggap ketidakcakapan yang mencengangkan menjadi bagian dari ruang-ruang berita—sebuah laporan *Associated Press* dari Berlin yang masuk melalui telegram pada pukul 6.28 malam EST, setengah jam sebelum pengeboman, menyatakan bahwa “komando militer Sekutu (di Berlin Barat) tidak melaporkan perkembangan-perkembangan dalam investigasi tentang pengeboman diskotek tersebut” dan bahwa “pejabat-pejabat Amerika Serikat dan Jerman Barat telah mengatakan bahwa Libia—*mungkin* melalui kedutaannya di Berlin Timur yang dikuasai Komunis—*dicurigai* terlibat dalam pengeboman diskotek La Belle” (penekanan huruf miring dari saya).<sup>229</sup> Barangkali akan ada yang bertanya, bagaimana mungkin hanya beberapa menit sebelum serangan, Amerika Serikat dan Jerman Barat hanya memiliki kecurigaan-kecurigaan terhadap keterlibatan

Libia—sebagaimana pada periode sebelumnya—sementara pada 4—5 April, 10 hari sebelumnya, mereka mengetahui hal ini secara pasti? Namun, waktu itu tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, dan fakta-fakta yang relevan pun secara umum disembunyikan.

Pada malam 14 April Reagan menyatakan bahwa “kami punya bukti langsung, yang akurat, tak terbantahkan,” seperti “Kami punya buktinya, dan (Qaddafi) tahu itu” dalam kasus pembunuh Libia di jalan-jalan Washington. Tanpa perlu menyebutkan keterlibatan Sandinista dalam perdagangan narkoba, pengumuman mereka tentang “revolusi tanpa perbatasan,” dukungan Helmut Kohl dan Bettino Craxi pada serangan atas Libia (yang dibantah oleh para pejabat di Jerman dan Italia dengan “sangat terkejut”)<sup>230</sup> dan sejumlah kebohongan lainnya, yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah melampaui standar-standar kebohongan, dan terus “melakukan berbagai kejahatan, kebohongan, dan kecurangan”—dalam kata-kata pemimpin yang hanya sebatas gelar saja, merujuk pada musuh resminya—untuk mencapai tujuan-tujuannya. Mereka sangat percaya diri bahwa terbukanya kebenaran dalam berita-berita kecil, yang dimuat jauh setelah peristiwa terjadi, tidak akan menghalangi arus kebohongan yang mengarahkan perdebatan dan meninggalkan kesan-kesan yang pantas seperti yang sudah terjadi.

Di luar batas negara Amerika Serikat, kepatuhan tidak bertahan. Di Jerman, seminggu setelah Washington



menyatakan bahwa Libia bertanggung jawab untuk pengeboman diskotek 10 hari sebelumnya (4—5 April), *Der Spiegel* (21 April) memberitakan bahwa penyadapan telepon itu sebenarnya tidak ada, bahwa intelijen Jerman Barat hanya sekadar curiga dengan keterlibatan Libia, sekaligus mencurigai “kelompok-kelompok pedagang narkoba yang saling bersaing” di antara kemungkinan-kemungkinan lainnya (termasuk kelompok Klan atau Neo-Nazi, yang dicurigai. Diskotek itu sendiri sering dikunjungi oleh GI kulit hitam dan para imigran Dunia Ketiga). Perang Washington adalah “alat politik”, *Der Spiegel* melanjutkan, “sepanjang musuhnya itu sekecil Grenada dan Libia—dan seideal si berengsek Qaddafi”. Tidak ada seorang pun pemimpin Eropa yang perlu membayangkan bahwa perhatian atau kepentingan Eropa akan dipertimbangkan jika Amerika Serikat memutuskan untuk meningkatkan kekerasan internasional, bahkan sampai ke tingkat Perang Dunia final, tambah editor Rudolf Augstein.<sup>231</sup>

Dalam sebuah wawancara pada 28 April dengan seorang wartawan jurnal Tentara Amerika Serikat, *Stars and Stripes*, Manfred Ganschow, kepala intelijen dalam negeri (Berlin Staatschutz) dan ketua tim investigasi beranggotakan 100-an orang yang menyelidiki pengeboman itu menyatakan, “Saya tidak punya bukti bahwa Libia terlibat dalam pengeboman sebagaimana saya juga tidak punya bukti ketika kamu menelepon pertama kalinya 2 hari setelah peristiwa itu. Sama sekali tidak ada bukti apa-apa.” Ia membenarkan bahwa ini adalah “kasus yang sangat

politis” dan menyiratkan keraguan besar tentang apa yang dikatakan dan akan dikatakan oleh “para politisi” mengenai hal tersebut.<sup>232</sup>

Media Amerika Serikat menyembunyikan keraguan-keraguan yang diungkapkan oleh media dan tim penyelidik Jerman, tetapi pembaca yang cermat akan bisa menemukannya dalam berita-berita tentang penyelidikan yang terus berlangsung, ketika orang-orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan Suriah dan yang lainnya sedang diperiksa. Dan, Washington menyatakan bahwa “pengetahuan pasti” pada 4—5 April memenuhi syarat sebagai informasi yang “dilaporkan” dan “diduga”.<sup>233</sup> Keraguan ini, kualifikasi-kualifikasi ini, dan pengutipan tidak langsung atas bukti yang meruntuhkan pernyataan-pernyataan pemerintah—semuanya merupakan alat yang digunakan oleh media untuk mengisyaratkan bahwa mereka sadar betul bahwa tidak ada bukti jelas yang bisa mereka paparkan terhadap kasus yang mereka dukung dengan penuh semangat.

Dalam *New York Review of Books*, Shaul Bakhash menegaskan bahwa Hindawi bersaudara dari Yordania “bertanggung jawab atas pengeboman diskotek di Berlin Barat” dan bahwa “kini ada bukti meyakinkan” bahwa mereka “direkrut oleh Suriah (bukan oleh Libia, sebagaimana yang dipikirkan orang berdasarkan beberapa pernyataan resmi pemerintah pada waktu itu).”<sup>234</sup> Terlepas dari fakta bahwa ia terus berbicara melampaui bukti yang ada, pernyataan tersebut membuat banyak orang

penasaran. Bukan karena “beberapa pernyataan resmi” sehingga “orang mungkin berpikir” bahwa Libia terlibat.

*Semua* pernyataan resmi, yang ditampilkan dengan penuh keyakinan dan tanpa kualifikasi serta diulang-ulang oleh media sampai kasusnya mulai terkuak, secara pasti menegaskan bahwa Libia harus bertanggung jawab dan juga menjadi dalih pembenaran untuk pengeboman serta pembunuhan warga Libia dengan alasan tersebut. Selanjutnya, bukan dukungan media atau pernyataan ini yang menarik kesimpulan jelas: jika pemerintah Reagan berbohong mengenai bukti “langsung”, yang “akurat” dan “tidak terbantahkan”, pengeboman tersebut berarti terorisme negara saja (bukannya terorisme negara dengan dalih tertentu)—yang ditutupi oleh media yang loyal, yang menghindari pertanyaan-pertanyaan yang jelas saat mereka menunjukkan dukungan penuh semangat terhadap serangan itu sambil mengajukan dalih-dalih absurd (misalnya, cerita para editor *Times* mengenai [Natasha Simpson berikutnya])” untuk membenarkan keterlibatan mereka dalam terorisme.

Operasi PR ini jelas sebuah kesuksesan, setidaknya dalam jangka pendek, di dalam negeri. Operasi ini “berjalan dengan baik di Peoria,” seperti yang diberitakan pers, karenanya menjadi sebuah contoh berhasilnya “rekayasa persetujuan demokratis” yang akan “memperkuat tangan Presiden Reagan dalam berurusan dengan Kongres mengenai isu-isu seperti anggaran militer dan bantuan untuk Contra di Nikaragua.”<sup>235</sup>

Bagi banyak negara, Amerika Serikat menjadi negara yang cukup ditakuti. Semua gara-gara “pemimpin koboi aneh” yang sangat mengesankan Paul Johnson dan lainnya dalam melakukan tindakan-tindakan “gila” dengan mengorganisasikan “gerombolan pembunuh” untuk menyerang Nikaragua dan bermain bom secara gila-gilaan di tempat-tempat lain, menurut sebuah tulisan di jurnal terkenal Kanada, secara umum dikendalikan dan cenderung pro-Amerika Serikat.<sup>236</sup> Pemerintah Reagan memainkan ketakutan-ketakutan tersebut, memanfaatkan strategi “orang gila”-nya Nixon.

Pada konferensi Tokyo tentang negara-negara maju pada Mei, pemerintah mengedarkan sebuah tulisan yang menyatakan alasan Eropa mendukung perang yang dilakukan Amerika Serikat, yaitu “perlu melakukan sesuatu agar orang-orang gila Amerika tidak main hakim sendiri.” Ancaman ini berhasil mendorong timbulnya pernyataan menentang terorisme yang hanya menyebut nama Libia.<sup>237</sup> Ancaman terang-terangan ini diabaikan oleh para komentator yang bersuka ria dengan keberhasilan pengeboman atas Libia, yang akhirnya membuat orang-orang “pengecut” Eropa mengambil langkah yang diperlukan untuk membalas ancaman Libia terhadap peradaban Barat.

Reaksi terhadap pengeboman Libia sangat berbeda di dalam dan luar negeri. Dua belas anggota Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC—European Economic Community) mengimbau Amerika Serikat untuk menghindari “semakin meningkatnya ketegangan militer di kawasan

dengan segala bahaya yang melekat di sana.” Beberapa jam kemudian, pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat beraksi, saat Menteri Luar Negeri Jerman Barat, Hans-Dietrich Genscher sedang dalam perjalanan ke Washington untuk menjelaskan posisi MEE. Juru bicaranya menyatakan bahwa “Kami ingin melakukan apa pun yang kami bisa untuk menghindari meningkatnya ketegangan militer.”

Pengeboman ini membangkitkan protes besar-besaran di hampir seluruh Eropa, termasuk demonstrasi-demonstrasi berskala besar, dan menimbulkan kecaman editorial di seluruh dunia. Koran besar Spanyol *El Pais* mengecam serangan ini, dengan menyatakan bahwa “Tindakan militer Amerika Serikat bukan hanya sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional dan ancaman mengerikan bagi perdamaian di Mediterania, tetapi juga sebuah penghinaan terhadap sekutu-sekutu Eropa-nya, yang tidak menemukan alasan-alasan untuk menerapkan sanksi ekonomi terhadap Libia, dalam sebuah pertemuan pada Senin, meskipun sebelumnya ada tekanan untuk menerapkan sanksi.”

Media *South China Morning Post* di Hong Kong menulis bahwa “Tindakan Presiden Reagan untuk mengatasi sang ‘Anjing Gila Timur Tengah’ mungkin terbukti lebih berbahaya dibanding penyakitnya,” dan tindakannya “bisa jadi mendorong berkobarnya bahaya yang jauh lebih luas” di kawasan tersebut. Di kota Meksiko, *El Universal* menulis bahwa Amerika Serikat “tidak berhak untuk menobatkan dirinya sebagai pembela kebebasan dunia,” mendorong

penyelesaian dengan cara-cara hukum lewat PBB. Dan, masih banyak lagi reaksi serupa.

Sebaliknya, pers Amerika Serikat malah sangat gembira. *New York Times* menulis bahwa “bahkan warga paling cermat hanya bisa menyetujui dan menyambut gembira serangan-serangan Amerika terhadap Libia.” Mereka menggambarkan bahwa ini adalah putusan dan hukuman yang adil: “Amerika Serikat telah menghukum (Qaddafi) dengan sangat hati-hati, proporsional—dan adil.” Bukti bahwa Libia bertanggung jawab atas pengeboman diskotek itu “kini sudah terungkap jelas kepada publik,” setidaknya bagi kepuasan para editor, meskipun mereka tidak memutuskan untuk memublikasikannya.

“Lalu, datanglah juri itu, pemerintah-pemerintah Eropa yang dikirim utusan oleh Amerika Serikat untuk menyampaikan bukti dan sama-sama mendorong tindakan terhadap pemimpin Libia.” Ternyata tidak relevan bahwa juri sulit diyakinkan dan mengajukan sebuah “penilaian” yang mengatakan bahwa sang eksekutor harus menahan diri dari segala tindakan—begitu juga untuk tidak mengomentari secara editorial mengenai fakta, yang diakui secara diam-diam, bahwa bukti tersebut sangat kurang.

Sebagian besar pemerintah juga mengecam tindakan ini, meskipun tidak semua. Inggris dan Kanada tampak mendukung, meskipun respons masyarakat sangat berbeda, dan ada juga dukungan dari Prancis terhadap antusiasme pendukung Reagan. Perusahaan Penyiaran

Afrika Selatan menyebut serangan ini “menekankan komitmen pemimpin dunia Barat yang mengambil tindakan positif untuk melawan terorisme.” Amerika Serikat dibenarkan dalam serangan terhadap Qaddafi, “yang namanya merupakan sinonim terorisme internasional.” Di Israel, Perdana Menteri Shimon Peres menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat jelas benar “karena merupakan tindakan membela diri”.

“Jika pemerintah Libia mengeluarkan perintah untuk membunuh tentara-tentara Amerika di Beirut dengan tangan dingin, pada tengah malam, kau pikir Amerika Serikat harus bagaimana? Menyanyi *haleluya*? Atau mengambil tindakan untuk membela diri?” Gagasan bahwa Amerika Serikat sedang bertindak untuk “membela diri” terhadap serangan atas pasukannya di Beirut 2,5 tahun sebelumnya merupakan sebuah inovasi yang menarik, bahkan sekalipun kita mengesampingkan situasi-situasi yang mendorong tindakan sebelumnya.<sup>238</sup>

Di Amerika Serikat, Senator Mark Hatfield, salah satu tokoh politik di negara ini yang pantas menyandang gelar terhormat “konservatif”, mengutuk pengeboman Amerika Serikat ini “di sebuah rapat Senat yang sepi,” dan di sebuah surat yang ditujukan kepada *Times*. Para pemimpin golongan agama Kristen mengecam pengeboman, tetapi para pemimpin Yahudi umumnya memuji, di antaranya Rabi Alexander Schindler, presiden Serikat Kongregasi Yahudi Amerika, yang “mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat ‘telah merespons dengan tepat dan dahsyat’ pada ‘terorisme gila’” Qaddafi.

Profesor Hubungan Internasional Harvard, Joseph Nye, mengatakan bahwa Reagan memang harus merespons “senapan-berasap dalam peristiwa Berlin. Apa lagi yang akan anda lakukan terhadap terorisme yang didukung negara?” Seperti terorisme yang didukung Amerika Serikat di Amerika Tengah dan Lebanon Selatan, misalnya, tempat “senapan-berasap” menjadi bukti yang sangat jelas. Eugene Rostow mendukung pengeboman ini sebagai hal yang “tidak bisa dielakkan dan sudah agak terlambat”, sebagai bagian dari “pertahanan yang lebih aktif terhadap proses perluasan Soviet”.

“Penggulingan paksa rezim Qaddafi,” jelasnya, “sepenuhnya dibenarkan di bawah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku,” karena Qaddafi “telah melanggar aturan-aturan ini secara terang-terangan dan terus-menerus.”

“Maka, setiap negara yang pernah diserang oleh Libia berhak, baik secara sendirian maupun bersama negara lain, untuk menggunakan kekuatan apa saja yang dirasa perlu untuk mengakhiri perilaku Libia yang tidak sesuai hukum. Libia berada di posisi pembajak barbar dari sisi hukum.”<sup>239</sup> Ia mendesak NATO untuk “mengeluarkan sebuah deklarasi tentang tanggung jawab negara-negara untuk tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan dari wilayah mereka.”<sup>240</sup>

Secara *fortiori*, NATO seharusnya mengecam sang Kaisar, tidak hanya si pembajak, dan negara-negara dari Indochina sampai Amerika Tengah ke Timur Tengah, di antaranya, harus mengorganisasikan penggunaan



kekuatan apa saja yang diperlukan guna menyerang Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara teroris lainnya, yang mengikuti doktrin Rostow.

Bagi wartawan ABC, Charles Glass, yang memberitakan pengeboman dan akibatnya dari tempatnya langsung, peristiwa ini dilambangkan dengan sebuah surat bertuliskan tangan dari seorang gadis berusia 7 tahun, yang ditemukan di reruntuhan rumahnya, sebuah keluarga berpendidikan Amerika yang Glass kunjungi. Surat itu berbunyi:

Dear Mr. Reagan

Mengapa Anda membunuh saudara perempuanku satu-satunya, Rafa, dan teman saya, Racha, yang usianya baru 9 tahun, dan boneka bayi saya, Strawberry? Apakah benar kalau Anda ingin membunuh kami semua karena ayah saya adalah orang Palestina, dan Anda ingin membunuh Qaddafi karena ia ingin membantu kami pulang ke rumah dan negeri ayah saya?

Nama saya adalah Kinda.

Sebuah faks salinan aslinya dikirim ke media di Amerika Serikat sebagai sebuah surat untuk editor, tetapi tidak dianggap tepat untuk dimuat. Surat itu akhirnya diterbitkan oleh Alexander Cockburn, dengan ditujukan kepada Presiden dan Ibu Negara Reagan karena mereka “senang membaca surat-surat dari anak-anak kecil, dan mereka mungkin berkenan menyampaikan surat ini di kegiatan berikutnya yang dirasa tepat.”<sup>241</sup>

Orang lain mungkin melihat masalah ini secara berbeda. Michael Walzer sangat tidak setuju dengan orang-orang Eropa yang mengkritik pengeboman Libia sebagai kasus “terorisme negara”. Pengeboman itu bukan (terorisme negara), jelasnya, “karena sasarannya adalah sasaran-sasaran militer tertentu, dan para pilot mengambil risiko dalam upayanya menembak sasaran-sasaran tersebut,” sebagaimana yang ia ketahui dari pengarahannya rahasia Pentagon. Jika pengeboman malam hari terhadap sebuah kota terjadi dengan menyerang daerah-daerah pemukiman berpenduduk padat di Tripoli, membunuh Rafa dan Racha, serta banyak warga sipil lainnya, itu adalah hal yang tidak bisa dihindari atau dicegah.<sup>242</sup> Mungkin hanya inilah yang bisa kita harapkan dari seorang moralis terhormat dan teoris perang yang adil, yang meyakinkan kita bahwa invasi Israel terhadap Lebanon bisa dibenarkan berdasarkan konsep ini, bahwa operasi militer Israel di Lebanon selatan merupakan “sebuah contoh yang baik perihal perang yang seimbang,” dan bahwa jika warga sipil “terkena dampak” selama pengeboman Israel di Beirut, “tanggung jawab tersebut ada pada PLO.”<sup>243</sup>

Keterlibatan media dalam aksi terorisme negara ini tidak berakhir dengan sikap patriot yang ditunjukkan pada saat aksi pengeboman sebagai sebuah lanjutan cerita yang wajar sebagai akibat dari cerita-cerita yang dibuat pemerintah. Media juga perlu menunjukkan bahwa pengeboman ini merupakan keberhasilan dalam mematahkan terorisme Libia, yang dibuktikan dengan

tidak adanya aksi teroris yang dikaitkan dengan Qaddafi setelah peristiwa pengeboman itu. Untuk mendukung pernyataan ini, penting untuk menyembunyikan fakta bahwa tidak ada kaitan yang masuk akal sebelum pengeboman terlepas dari apa yang sudah disebutkan sebelumnya, yang jelas-jelas tidak relevan. Dan, tak ada masalah-masalah yang mengganggu tugas media terkait hal tersebut.

Para editor *Washington Post* memuji pengeboman Libia dengan alasan bahwa “Tidak ada lagi aksi-aksi terorisme terbaru yang berhubungan dengan” Kolonel Qaddafi, yang kini diturunkan dalam “kebijakan yang lemah”. Yang lebih penting adalah dampaknya terhadap sekutu-sekutu Barat, yang kebanyakan “membutuhkan keterkejutan” dari “contoh-contoh ketegasan, ketepatan intelijen yang tak terbantahkan, isolasi Libia, dan tak kurang pentingnya, jatuhnya pariwisata” tanpa menyebutkan ancaman bahwa “orang-orang gila Amerika” mengamuk entah di mana, sebuah ancaman yang ditekankan oleh berita tertulis dari kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada sekian mil dari garis pantai Soviet di Laut Hitam pada waktu yang sama.<sup>244</sup>

Ingat, bahwa para editor masih merasa mungkin untuk merujuk pada “ketepatan intelijen yang tak terbantahkan,” ketika jurnal tersebut punya banyak alasan untuk mempertanyakan, dan kemudian memutuskan untuk menolak, sebagaimana yang sudah disebutkan. David Ignatius menulis bahwa pengeboman tersebut “berhasil dengan baik terhadap Libia-nya

Moammar Qaddafi,” menyelesaikan “perubahan-perubahan mengejutkan—dan sangat menguntungkan—di Libia, Timur Tengah, dan Eropa.” Ini membuktikan bahwa Qaddafi “lemah, terkucil, dan mudah diserang”.

“Begitu mudah diserang, sehingga pesawat-pesawat tempur Amerika bisa beroperasi dengan bebas sendiri di wilayah udara yang dijaga ketat.” Sebuah kemenangan yang sangat gemilang, dan sebuah penemuan mengejutkan tentang kekuatan Libia. Untuk menunjukkan “psikologi yang memungkinkan Qaddafi mengintimidasi negara-negara di dunia”, Ignatius tidak menyebutkan tindakan-tindakan terorisme—karena tidak ada contoh yang bisa dipercaya—tetapi hanya mengungkapkan bahwa walaupun “orang-orang Libia kembali melakukan tindak terorisme, skalanya tidak akan sebesar yang sudah terjadi pada awal tahun ini,” ketika “intelijen Amerika Serikat mengetahui bahwa Libia memerintahkan ‘Biro Rakyat’-nya untuk menggencarkan serangan teroris di sekitar seluruh kota”.

Sebagai seorang wartawan yang sangat kompeten, Ignatius tahu kalau pernyataan-pernyataan pemerintah tentang apa yang “diketahui” intelijen itu tidak bermakna. Pemaparannya tentang “keberhasilan” operasi mengenai gagalnya rencana-rencana yang sudah disusun merupakan caranya mengatakan bahwa konsekuensi-konsekuensi peristiwa tersebut tidak bisa ditemukan.<sup>245</sup>

Hampir mirip dengan hal itu, George Moffett mencatat bahwa serangan-serangan teroris Libia “sudah berhenti”—yaitu, mereka telah mengurangi aksinya dari

hampir nol sampai hampir nol—ini merupakan “perkembangan-perkembangan positif” yang “kelihatannya muncul untuk mempertahankan kebijakan Pemerintahan Reagan dalam hal pembalasan militer”. Koleganya, John Hughes, mengamati bahwa “sejak hukuman berupa serangan udara terhadap Libia ... tidak ada lagi serangan-serangan teroris yang cukup besar terhadap warga Amerika yang didalangi oleh Kolonel Muammar Qaddafi”, sebagaimana memang tidak pernah ada sebelumnya, sepanjang yang diketahui.<sup>246</sup>

Pesan untuk para teroris negara di Washington ini jelas: Kami akan mengikuti apa yang Anda perintahkan ketika Anda menciptakan dokumen berisi terorisme musuh yang Anda sebut telah mengintimidasi dunia, ketika Anda melakukan aksi teror yang cukup besar untuk menghukum kekejaman yang telah Anda ciptakan, dan ketika Anda mengumumkan bahwa sebagai hasil heroisme Anda, teroris jahat menjadi takluk. Kebenaran-kebenaran sederhana tidak akan pernah menghalangi kami menjadi pelayan Anda yang patuh.

Untuk diketahui, “telah terjadi kira-kira 18 insiden teroris anti-Amerika di Eropa Barat dan Timur Tengah dalam waktu 3 bulan sejak pengeboman di Libia. Bandingkan dengan yang terjadi selama 3,5 bulan sebelumnya, hanya terjadi 15 kali insiden” sementara “di seluruh dunia, tingkat terorisme anti-Amerika kelihatannya sedikit berbeda dibandingkan tahun lalu”, menurut pengamatan *Economist* (sembari memuji aksi keberanian Reagan). Dan, ahli terorisme terkemuka dari

Rand Corporation menyebutkan bahwa serangan-serangan teroris setelah pengeboman Libia berlangsung sama seperti sebelumnya.<sup>247</sup>

Melengkapi catatan ini, pada 3 Juli, FBI mengeluarkan laporan sejumlah 41 halaman yang mengulas peristiwa-peristiwa teroris di Amerika Serikat pada 1985. Jumlahnya ada 7 peristiwa, dengan 2 orang terbunuh. Pada 1984, ada 13 aksi teroris. Angkanya terus menurun setiap tahun sejak 1982, ketika tercatat 51 peristiwa teroris.<sup>248</sup>

Laporan FBI ini mendapat beberapa ulasan. *Toronto Globe & Mail* memuat berita *Associated Press* dengan judul: “Ekstremis Yahudi disalahkan atas 2 kasus kematian.” Paragraf pembukanya berbunyi: “Ekstremis Yahudi melakukan 4 dari 7 tindakan teroris yang menewaskan 2 orang di Amerika Serikat pada 1985, menurut laporan FBI kemarin.” Laporan itu memberikan rincian-rincian mengenai “insiden-insiden yang dikaitkan dengan ekstremis Yahudi” yang “menewaskan 2 orang dan melukai 9 orang, menurut laporan tersebut”, bersama dengan insiden-insiden lainnya.

*New York Times* tidak memuat satu pun berita mengenai laporan FBI itu, meskipun ada rujukan di paragraf 11 di sebuah kolom beberapa minggu kemudian yang berbunyi, “Menurut laporan tahunan FBI mengenai terorisme, 4 dari 7 kasus terorisme dalam negeri pada 1985 dipercaya melibatkan ‘kelompok teroris Yahudi.’ Tidak ada dakwaan yang dihasilkan dari penyelidikan-penyelidikan ini. Koran nasional kedua, *Washington Post* memuat laporan FBI

dengan judul “Terorisme dalam Negeri Menurun Tahun Lalu, Menurut Laporan FBI”. Tercatat bahwa “kedua korban meninggal dan 9 korban luka-luka, dihubungkan dengan 4 aksi teroris yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi” (dari 7 yang dilaporkan). Hal ini diulangi lagi dalam sebuah cerita tentang penyelidikan FBI atas pembunuhan Alex Odeh, yang mencatat bahwa “kelompok-kelompok ekstremis Yahudi dicurigai sebagai pelakunya”.<sup>249</sup>

Tiga kalimat tersebut merupakan isi pers nasional tentang kesimpulan laporan FBI mengenai sumber-sumber terorisme dalam negeri pada 1985. Saya perhatikan tidak ada editorial atau komentar-komentar lainnya yang menyatakan soal pengeboman Amerika Serikat di Tel Aviv atau Jerusalem untuk melenyapkan “kanker” dan menjinakkan sang “Anjing Gila” yang telah membawa “momok kejam terorisme” ke negara kita. Orang bisa jadi bertanya, mengapa tidak? Nyatanya, Israel membantah bertanggung jawab terhadap aksi-aksi teror “ekstremis Yahudi”. Ia juga mengecam aksi-aksi teroris tersebut, seperti yang dilakukan Anggota Knesset Rabi Kahane, yang merupakan mantan rekan Perserikatan Pertahanan Yahudi yang dicurigai FBI sebagai pelaku aksi teror tersebut. Dengan sedikit alasan yang sama, Washington juga menyangkal bertanggung jawab atas tindakan-tindakan teroris yang dilakukan oleh mereka yang dilatih dan didukungnya.

Akan tetapi, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, dalih-dalih ini sama sekali tidak berarti menurut standar-

standar yang diterapkan kepada Muammar Qaddafi dan Yasser Arafat, yang juga mengancam tindakan-tindakan teroris dan menyangkal bertanggung jawab terhadap tindakan teror tersebut. Mengingat kembali doktrin bahwa “tanggung jawab moral yang lebih besar untuk kekejaman-kekejaman ... *semuanya* ada pada Yasser Arafat” karena “ia sejak dulu sampai sekarang adalah Bapak Pendiri Kekerasan Palestina kontemporer”. Oleh karena itu, Amerika Serikat akan menangkap Arafat karena “bertanggung jawab terhadap aksi-aksi terorisme internasional”, meskipun entah betul-betul terlibat atau tidak.<sup>250</sup> Dengan logika yang sama, “tanggung jawab moral yang lebih besar” untuk aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh ekstremis Zionis *semuanya ada pada* Israel.

Media hampir selalu menyembunyikan kecaman Arafat terhadap tindakan-tindakan teroris Palestina. Contohnya satu kasus penting, pada 3 Juni 1982, kelompok teroris yang dikepalai oleh Abu Nidal, yang sedang berperang melawan PLO dan telah divonis mati oleh mereka beberapa tahun sebelumnya, berusaha membunuh Duta Besar Israel, Shlomo Argov di London. Peristiwa ini menyebabkan Israel menginvasi Lebanon, sebuah “aksi balasan” yang dianggap sah oleh pemerintah Amerika Serikat, media, dan pendapat orang-orang terpelajar secara umum. *Washington Post* mengomentari bahwa upaya pembunuhan Argov merupakan sebuah hal yang “memalukan” bagi PLO, yang “menegaskan bahwa mereka mewakili semua orang Palestina, tetapi ... cenderung bersikap pilih-pilih dalam mengakui tanggung jawab



terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan warga Palestina”.<sup>251</sup>

Jika sebuah aksi teroris dilakukan oleh kelompok Palestina yang berperang dengan PLO merupakan hal yang “memalukan” bagi PLO atas dasar alasan-alasan ini, tindakan-tindakan teroris yang dilakukan oleh ekstremis Zionis di Amerika Serikat—yang menewaskan 2 orang dan melukai 9 orang—juga merupakan hal yang “memalukan” bagi Israel, yang secara hukum merupakan “Negara orang-orang Yahudi,” termasuk mereka yang tersebar (diaspora)/bukan warga negaranya, yang seperenam di antaranya adalah non-Yahudi. Maka, sesuai logika pemerintah Amerika Serikat, para komentator ternama, dan media secara umum, Amerika Serikat jelas berhak—jika bukan wajib—untuk mengebom Tel Aviv “sebagai sebuah tindakan pembelaan diri terhadap kemungkinan serangan-serangan pada masa yang akan datang”.

Seseorang bisa jadi membayangkan reaksi terhadap tindakan-tindakan teroris di Amerika Serikat, termasuk kematian-kematian yang menjadi akibatnya, dilakukan oleh orang-orang Arab-Amerika yang berhubungan dengan unsur-unsur ekstremis PLO atau yang dicurigai menjadi bagian dari kelompok teroris yang didirikan oleh salah seorang pejabat pemerintah Libia.

Pengeboman Amerika Serikat terhadap Libia tidak ada hubungannya dengan “terorisme”, bahkan dalam pengertian sinis Barat atas kata ini. Kenyataannya, sudah jelas bahwa operasi Teluk Sidra dan pengeboman kota-

kota Libia hanya akan memicu terorisme balasan, sebagai alasan utama sasaran-sasaran Eropa memohon kepada Amerika Serikat untuk menahan diri dari melakukan tindakan semacam itu.

Ini bukanlah kali pertamanya aksi kekerasan dilakukan untuk memancing terorisme balasan. Invasi Israel yang didukung Amerika Serikat terhadap Lebanon pada 1982 merupakan contoh lainnya, sebagaimana dibahas dalam Bab 2. Serangan terhadap Libia cepat atau lambat akan menyulut tindakan-tindakan teroris, yang akan dimanfaatkan untuk memobilisasi opini dalam dan luar negeri yang mendukung rencana-rencana Amerika Serikat baik di dalam maupun luar negeri. Jika warga Amerika bereaksi dengan histeria, termasuk takut bepergian ke Eropa tempat para wisatawan akan jauh lebih aman dibanding berada di kota mana pun di Amerika, ini juga menjadi sebuah keuntungan penuh untuk alasan-alasan serupa.

Alasan sebenarnya bagi serangan Amerika Serikat terhadap Libia sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindakan membela diri terhadap “serangan teroris” atas pasukan Amerika Serikat di Beirut pada Oktober 1983, sebagaimana dinyatakan oleh Shimon Peres. Tindakan-tindakan lain yang dikaitkan pada Libia, entah tepat atau tidak, atau “tindakan membela diri terhadap serangan pada masa akan datang” sesuai dengan doktrin yang dinyatakan oleh Pemerintah Reagan disambut gembira di dalam negeri. Terorisme Libia adalah gangguan kecil bagi Amerika Serikat, tetapi Qaddafi telah menghalangi

rencana-rencana Amerika Serikat di Afrika Utara, Timur Tengah, dan tempat lainnya. Qaddafi mendukung Polisario dan kelompok-kelompok anti-Amerika Serikat di Sudan, bersekutu dengan Maroko (yang bertentangan dengan harapan-harapan Amerika Serikat), melakukan intervensi di Chad (mengikuti pengiriman pasukan Luar Negeri Prancis, para penasihat dan pesawat tempur, tetapi intervensi Prancis dipuji karena pasukan Prancis dianggap membantu “menjaga Afrika Barat tetap aman untuk pengusaha minyak Prancis, Amerika, dan pengusaha minyak luar negeri lainnya” dan melakukan tugas yang serupa di tempat lain),<sup>252</sup> dan secara umum mengintervensi upaya-upaya Amerika Serikat dalam membentuk sebuah “konsensus strategis” di kawasan tersebut dan memaksakan keinginannya di tempat lain. Semua itu adalah kejahatan-kejahatan nyata, yang harusnya diberi hukuman.

Lebih lagi, serangan terhadap Libia memiliki tujuan, dan dampak, untuk menyiapkan opini di dalam dan luar negeri bagi tindakan-tindakan kekerasan Amerika Serikat yang lebih lanjut. Tanggapan-tanggapan spontan terhadap hal itu bisa jadi negatif, tetapi begitu terserap, tingkat harapannya akan semakin meningkat dan pegawai pelaksana Amerika Serikat bisa melancarkan eskalasi yang lebih jauh jika diperlukan.

Sinisme terhadap kampanye propaganda tentang “terorisme internasional” telah terkuak bagi masyarakat dengan opini yang bertentangan dengan opini pemerintah Amerika Serikat, tetapi kampanye itu sendiri memiliki

prestasi luar biasa. Dan, kemungkinan-kemungkinan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang tetap mengesankan, berkat reaksi sektor-sektor media yang loyal dan tidak melakukan kritik apa-apa terhadapnya. Dukungan kelas-kelas terpelajar terhadap terorisme internasional berkontribusi terhadap penderitaan dan kebrutalan masif, dan dalam masa yang lebih lama, membawa serta bahaya-bahaya konfrontasi negara adidaya dan akhirnya perang nuklir. Namun, pertimbangan-pertimbangan itu dianggap remeh jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk menjamin bahwa tidak ada ancaman terhadap “stabilitas” dan “keteraturan”, dan tantangan terhadap hak-hak istimewa dan kekuasaan.

Dalam hal ini, tidak ada yang akan membuat heran pelajar sejarah mana pun yang jujur.

# 4

## Peran Amerika Serikat di Timur Tengah

(15 November 1986)

---

**A**KAN lebih tepat bagi saya untuk memulai ini dengan menampilkan surat kepercayaan diplomatik untuk berbicara kepada Anda mengenai topik ini. Dan, karena tidak adil menuliskan versi saya sendiri, izinkan saya membacakan sebuah surat rekomendasi untuk saya yang dikirim ke sebuah jurnal kecil di Inggris, *Index on Censorship*. Di sana saya menulis sebuah tulisan pendek mengenai beberapa aspek topik tersebut.<sup>253</sup>

Dear Dan:

Maafkan aku karena menulis utukmu lagi dalam kapasitasmu sebagai seorang Direktur dan Anggota Dewan Redaksi *Index on Censorship*, tetapi aku tak bisa menahannya. Di sebuah terbitan terbaru yang

kumiliki, edisi Juli/Agustus 1986, muncul sebuah artikel yang sangat menarik, dimulai pada halaman 2 dan berlanjut ke halaman berikutnya. Artikel ini adalah sebuah serangan kepada Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat, dan pers Amerika Serikat oleh Noam Chomsky.

Kau mungkin mengenal Chomsky: ia adalah seorang pembela fanatik PLO yang menciptakan standar-standar baru untuk kebohongan intelektual dan keinginan membalas dendam pribadi dalam tulisan-tulisannya tentang Timur Tengah. Tak ada seorang pun yang tersisa di Amerika Serikat—yang tertarik dengan politik—yang menganggap serius pandangan Chomsky setelah melihat riwayatnya yang mencengangkan. Oleh karena itu, aku merasa, memberikannya tiga halaman penuh untuk menyerang salah satu pers paling bebas di dunia ini tidak bisa dipahami. Memberikannya begitu banyak ruang jelas-jelas terlalu mulia untuk upaya-upaya buruknya. Mungkinkah editor-editormu tidak tahu siapa itu Chomsky dan tidak mengenal tulisan-tulisannya? Atau bisa jadi mereka kenal, tetapi tetap memberikan panggung ini untuknya? Kalau iya, mengapa demikian?

Tertanda “Elliott”, yaitu Elliott Abrams, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Bidang Inter-Amerika, 29 Juli 1986, di sebuah stasioner resmi Departemen Luar Negeri, sehingga saya rasa bisa dihitung sebagai dokumen publik (beberapa kata-kata pribadi dihilangkan).

Saya mengutip surat ini karena dua alasan. Pertama, karena secara alami saya menghargainya, sebagaimana untuk alasan-alasan yang sama saya menghargai upaya-upaya para penasihat Soviet di Dunia Ketiga untuk melarang buku-buku saya (seperti yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun di Uni Soviet)<sup>254</sup> dan penolakan mereka terhadap satu-satunya aplikasi visa saya ke Eropa Timur. Reaksi-reaksi para komisaris kadang menunjukkan bahwa hal itu mungkin adalah yang paling tepat dilakukan. Namun, di balik semuanya, surat itu berhubungan erat dengan topik kita.

Surat itu memberikan pengetahuan yang nyata (dan khas) dalam mentalitas pemerintahan Reagan dan juga pengaruh Israel—saya harus menyebutkan bahwa surat Abrams hanya salah satu bagian dari serangan mengesankan yang dilontarkan terhadap jurnal yang berani memublikasikan hal-hal tentang Amerika Serikat dan Israel yang dianggap tidak pantas oleh para penjaga kebenaran.<sup>255</sup> Itu adalah fenomena yang kebanyakan kalian sudah tahu, sebuah fakta yang dengan alasan-alasan jelas juga berhubungan dengan topik kita.

Izinkan saya mengesampingkan betapa kurang rasa ironis ini. Ini adalah jurnal yang mengabdikan pada *penyensoran*, kini diserang karena mengizinkan munculnya

sebuah tulisan singkat tentang fakta dan analisis yang tidak sesuai dengan selera para komisaris. Apa yang ditunjukkan surat tersebut adalah sebuah unsur totalitarian mendalam yang ada pada mentalitas tokoh-tokoh terkemuka dalam pemerintahan Reagan: bahkan di pembuka yang paling singkat pun tidak boleh ada pemikiran yang tidak bisa diterima. Saya tidak mengatakan bahwa ini di luar spektrum politik Amerika Serikat. Sayangnya tidak. Namun, pada praktik, gaya, dan komitmen-komitmennya, pemerintahan Reagan sangat mewakili posisi ekstrem di dalam spektrum ini, jingoisme reaksioner yang esktrrem—merupakan penyelewengan istilah “konservatif”—ditandai dengan kebohongan yang disengaja, ketidaktaatan hukum, perluasan kekuasaan negara dan kekerasan, penyerangan-penyerangan terhadap kebebasan personal dan kebebasan sipil, pembangunan yang mengerikan dan penting untuk masa depan politik dan masyarakat Amerika Serikat, sehingga bagi Timur Tengah dan dunia, memberikan kekuasaan berskala besar bagi Amerika Serikat.

Ciri-ciri pemerintahan Reagan tersebut bukannya tidak diketahui, dan secara wajar membangkitkan perhatian di antara para konservatif murni di sini—yang ada sedikit di pemerintahan atau di media—dan di luar negeri. Tiga tahun lalu, David Watt, Direktur Lembaga Kerajaan Urusan Internasional di London, menulis di *Foreign Affairs*, mengomentari:



Celah di antara persepsi Amerika Serikat sekarang ini terhadap dunia dan persepsi dunia terhadap Amerika Serikat ... dengan pengecualian Israel, Afrika Selatan, Presiden Marcos dari Filipina, dan beberapa pemerintah sayap kanan di Amerika Tengah dan Selatan, (sebagian besar negara di dunia percaya) bahwa pemerintahan Reagan bertindak sangat berlebihan terhadap ancaman Soviet, sehingga mengubah ekonomi Amerika Serikat (dan juga dunia), mempercepat perlombaan persenjataan, membelokkan penilaiannya tentang peristiwa-peristiwa di Dunia Ketiga, dan menghina hubungan internasional dengan retorika yang terburu-buru.

Ia menambahkan bahwa “menurut pengalaman saya, hampir mustahil menyampaikan bahkan kepada orang-orang Amerika Serikat yang paling berpengalaman sekalipun, kini betapa berurat berakar dan tersebar luasnya pandangan kritis” yang juga merupakan sebuah fakta penting. Seolah untuk mengonfirmasi penilaian ini, dalam artikel tentang kondisi internasional terkini, editor *Foreign Affairs*, William Bundy menulis bahwa mempertimbangkan “tingkat ancaman dari Uni Soviet ... pandangan luas pemerintahan Reagan kelihatannya bagi pengamat ini, lebih dekat pada kenyataan dibanding posisi-posisi yang dinyatakan sempit pada negara-negara besar lainnya.”<sup>256</sup>

Watt sebenarnya melebih-lebihkan “celah” tersebut. Para elite Eropa tidak begitu terlepas dari histeria Reagan sebagaimana yang ia nyatakan, dan “pengecualian-pengecualiannya” melampaui apa yang sudah ia sebutkan, termasuk di dalamnya adalah Prancis secara khusus, tempat banyak intelektual Paris mengadopsi fanatisme Reagan seperti kecenderungan terbaru mereka. Selanjutnya, sebagaimana yang diungkapkan komentar Bundy, apa yang digambarkan Watt mewakili pendapat elite Amerika Serikat dengan lebih baik dari pemerintahan Reagan. Bundy menulis tujuan yang hampir bertentangan dengan spektrum para elite. Watt menggambarkan versi yang lebih ekstrem dari reaksi para elite secara umum terhadap masalah-masalah yang diakibatkan oleh Perang Vietnam, termasuk kerugian yang menimpa ekonomi Amerika Serikat dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh industri-industri lawan, dan gangguan ketertiban baik di Dunia Ketiga dan di negara masing-masing, merupakan faktor-faktor yang membutuhkan tindakan keras negara sehingga seruan tentang ancaman Rusia, terus terjadi dalam situasi-situasi semacam itu. Namun, maksud penting Watt memang cukup akurat.

Sejak saat itu, isolasi terhadap Amerika Serikat terus meningkat, contohnya sebagaimana ditunjukkan dalam *voting* terhadap sejumlah besar isu di PBB. Hanya dalam beberapa minggu terakhir, Majelis Umum PBB melakukan *voting* dengan dukungan 124 banding 1 untuk kepentingan zona perdamaian Atlantik Selatan dan 94 banding 3 yang

meminta Amerika Serikat untuk mematuhi ketentuan Mahkamah Internasional perihal gencatan senjata Amerika Serikat terhadap Nikaragua. Di kasus tersebut, Amerika Serikat bersama dua negara kliennya, El Salvador (yang “merdeka” seperti merdekanya Polandia dari Uni Soviet) dan Israel, yang telah memilih untuk menjadi tentara bayaran untuk Amerika Serikat. Isolasi Amerika Serikat terhadap *voting* Timur Tengah sangat terkenal, tetapi fenomenanya lebih umum. Pada 1980—1985 saja, Amerika Serikat mengambil 27 hak veto di Dewan Keamanan PBB, dibandingkan dengan 15 hak veto sepanjang sejarah PBB (semuanya terjadi sejak 1966) dan 4 hak veto untuk Uni Soviet pada 1980-an.<sup>257</sup>

Tanggapannya cukup menarik. Pada masa-masa awal PBB, ketika masih betul-betul berada di bawah kontrol Amerika Serikat dan bisa digunakan untuk tujuan-tujuan Perang Dingin, sikap umum terhadap organisasi PBB sangat baik dan ada banyak perdebatan sungguhan mengenai apa yang menyebabkan Uni Soviet, yang kemudian hampir terisolasi, menjadi begitu negatif. Mungkin ini merupakan akibat dari sebuah doktrin yang disebut “*diaperology*”—sebuah teori yang menyatakan bahwa kita bisa memastikan apa pilihan politik orang-orang hanya dengan melihat negara dan komunitas yang membesarkannya—yang semakin menguatkan “negativisme”. Bersamaan dengan menurunnya dominasi global Amerika Serikat dari puncak masa setelah perang yang fenomenal, sikap terhadap PBB menjadi lebih kritis dan kini sikap permusuhannya menjadi semakin ekstrem.

Kita tidak lagi membaca uraian-uraian tentang negativisme Rusia, tetapi lebih pada fakta-fakta yang sama mencengangkan bahwa dunia ini telah salah langkah, sebagaimana yang dijelaskan secara saksama oleh wartawan *New York Times* di PBB, Richard Bernstein.<sup>258</sup>

Jajak pendapat di Eropa juga menunjukkan hasil-hasil serupa. Sebuah jajak pendapat USIA<sup>259</sup> yang bersifat rahasia menunjukkan bahwa di luar Prancis, pendapat Eropa percaya bahwa Mikhail Gorbachev mengontrol persenjataan lebih banyak daripada Reagan, dengan angka 4 banding 1 di Inggris dan 7 banding 1 di Jerman.<sup>260</sup>

Isolasi internasional ini hanya mendapat sedikit perhatian dari pemerintahan Reagan. Mereka sudah mempertunjukkan sebuah pemahaman licik tentang manjurinya penggunaan kekerasan dan penindasan. Sebagaimana para pendahulu mereka dan contoh-contoh lain yang tersebar di dunia, mereka paham betul bahwa kemenangan-kemenangan biasa atas musuh-musuh yang lemah dan tidak berdaya bisa dimanipulasi untuk membangkitkan sentimen jingoisme dan semangat yang meluas di dalam negeri, jika warga bisa betul-betul ditakuti dengan ancaman-ancaman mengerikan terhadap keberlangsungan hidupnya. Di antara contoh-contoh yang sudah pernah terjadi adalah peringatan-peringatan Hitler tentang pengepungan Jerman oleh negara-negara musuh yang bertekad untuk menghancurkannya, seperti Ceko, “dengan belati tertuju tepat ke jantung Jerman,” sikap agresif dan teror Ceko serta Polandia, dan—di atas semuanya—ancaman konspirasi internasional Yahudi.

Para pendukung pemerintahan Reagan paham betul apa yang disebut H.L. Mencken sebagai “tujuan menyeluruh politik praktis”:

“Yaitu untuk membuat masyarakat waspada (sehingga akan beramai-ramai dituntun menuju keselamatan) melalui ancaman serangkaian momok menakutkan, yang kesemuanya hanya karangan saja.” Bagi yang lainnya, hegemoni budaya Amerika Serikat ini sangat hebat sehingga doktrin-doktrin yang dibuat untuk tujuan dalam negeri akan diadopsi atau dianggap serius, betapa pun menggelikannya. Dan, jika tidak, ancaman terhadap meningkatnya kekerasan jika musuh-musuh Amerika Serikat terbukti tidak mau menyerah, dan harga yang harus mereka korbankan untuk itu, semuanya terus dipercaya dan dimanfaatkan dengan sangat efektif.

Kampanye propaganda tentang terorisme internasional merupakan satu contoh digunakannya teknik-teknik tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Para pembuat kebijakan di pemerintah Reagan tahu bahwa para kelompok liberal di kongres dan media bisa dengan mudah ditakut-takuti dengan tuduhan bahwa mereka terlalu lemah dan kurang militan menghadapi ancaman apa pun yang mungkin menjadi momok mengerikan saat itu, sehingga mereka akan berbaris dengan patuh dalam “perang salib melawan terorisme.” Mereka juga paham bahwa sumber-sumber daya kekerasan yang berlimpah dalam komando mereka dianggap remeh oleh dunia. Kenyataannya, mereka begitu sering memanfaatkan perhatian-perhatian dunia terhadap kekerasan yang

mereka lakukan, seperti dalam konferensi Tokyo setelah pengeboman Libia, ketika pendukung Reagan mengumpulkan para elite Barat dengan memperingatkan mereka bahwa kecuali mereka mendukungnya, entah apa yang akan dilakukan “orang-orang Amerika yang marah” kemudian.<sup>261</sup>

Sikap menghina kongres ini juga kerap dilakukan. Misalnya, bulan lalu, dalam rancangan undang-undang otorisasi militer, kedua dewan kongres menuntut pejabat eksekutif untuk mematuhi hasil perundingan SALT II, demi keamanan nasional. Beberapa minggu kemudian, pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan melewati batasan-batasan SALT II. Juru bicara pemerintah menjelaskan bahwa “kongres sedang berada di luar dan konferensi di Islandia sudah berlalu. (Gorbachev) tidak diharapkan di sini. Jadi apa yang menahan kita?”<sup>262</sup> Istilahnya, “polisi sedang melihat ke arah lain, jadi kenapa tidak kita rampok saja tokonya?” Kenyataannya, kongres tidak sedang ada di luar, dan pemerintah tahu betul, dan memang terbukti tidak sulit bagi gerombolan jalanan untuk tidak mengindahkan lawan yang secara umum terlihat lemah.

Sikap terhadap publik terlihat sebagaimana yang disebutkan oleh salah seorang pejabat Reagan sebagai “operasi perang psikologis” yang dirancang untuk membuat agenda debat atas Nikaragua—sebuah kampanye untuk mengaburkan kebenaran yang disebut “Operasi Kebenaran.” Goebbels dan Stalin pasti terhibur.<sup>263</sup> Upaya mengaburkan kebenaran sudah menjadi

keahlian pemerintah sejak masa-masa awal, sekalipun media dan kongres selalu terlihat kaget ketika ada yang terbongkar, seperti kampanye serupa yang berhubungan dengan Libia pada 1986 (lihat Bab 3). Dalam hal ini, pertunjukan kekejaman yang mengejutkan mengharuskan sedikit pelalaian atau amnesia. Awal Agustus 1981, *Newsweek* memberitakan “program pemerintah untuk mengaburkan kebenaran yang dirancang untuk memermalukan Qaddafi dan pemerintahannya” bersama dengan bermacam-macam tindakan terorisme Amerika Serikat terhadap Libia untuk “menunjukkan bahwa Qaddafi ditentang oleh kekuatan politis pribumi”. Kampanye-kampanye pengaburan kebenaran yang sangat banyak itu cukup berhasil berkat kerja sama media, pertarungan persenjataan, dan banyak hal lainnya.<sup>264</sup>

Kami mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai terkuaknya program canggih untuk menghindari pembatasan-pembatasan kongresional dalam bantuan militer untuk tentara proksi teroris yang menyerang Nikaragua—atau “gerakan perlawanan”, sebagaimana yang diistilahkan oleh pemerintah dan media-media loyal, sebuah “perlawanan” yang diorganisasi oleh Penegak Separuh Dunia untuk menyerang Nikaragua dengan dalih-dalih yang dibuat di luar perbatasannya (istilah “tentara proksi”, sebaliknya, digunakan di dokumen-dokumen internal Gedung Putih, dan terorismenya tidak disembunyikan dalam laporan-laporan rahasia).

Salah satu contoh perencanaan yang disusun hati-hati di balik operasi-operasi teroris, ingatlah keputusan pemerintahan Reagan untuk menjual AWAC atau pesawat peringatan dini (yang mungkin tidak begitu berguna) kepada Arab Saudi pada 1981. Ini adalah langkah politik yang tidak terlalu disukai, dan tidak jelas juga penyebab pada waktu itu pemerintah sangat bertekad untuk melakukan hal tersebut. Beberapa dugaan tentang alasan-alasan pemerintah mulai bermunculan sejak saat itu. Para perencana di pemerintah Reagan sudah jelas mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin mereka hadapi dalam mendanai tentara proksinya. Ketika kongres merespons tekanan publik, yang kemudian meminta pemerintah untuk membatasi perang teroris atas Nikaragua, pemerintah meminta Arab Saudi untuk membayar utangnya dan mendanai pengiriman persenjataan untuk Contra. Dan, ternyata persenjataan itu adalah persenjataan Soviet yang disita oleh Israel selama masa agresi yang didukung Reagan di Lebanon.<sup>265</sup>

Itu semua adalah akal bulus teroris-teroris internasional, dengan visi global, yang canggih. Kini, setelah mereka akhirnya melampaui titik ketika mereka bisa dengan mudah ditekan, tersingkapnya kebenaran akan mendatangkan dalih bahwa para pembuat kebijakan Reagan adalah pegawai-pegawai buruk yang tidak cakap. Tanggapan tetap para elite terhadap kegagalan rencanarencana negara adalah untuk memusatkan perhatian pada tuduhan ketidakcakapan pribadi, sehingga bisa mengalihkan ancaman bahwa publik bisa tahu sifat dasar



sistemis kebijakan, yang menjadi dukungan umum dalam lingkaran-lingkaran elite (di samping dukungan taktis) dan akar-akar institusional atas komitmen-komitmen tersebut. Namun, tak seorang pun boleh diperdaya untuk memercayai bahwa mereka sedang menyaksikan operasi-operasi orang bodoh dan tidak cakap. Pencapaian-pencapaian mereka dalam mengelola terorisme internasional yang efisien sangat mengesankan, dari Timur Tengah sampai Amerika Tengah, dan di luar itu.

Fakta penting lainnya juga harus diingat: skandal-skandal terkini merupakan bukti besar gerakan-gerakan massa sejak 1960-an, yang memaksa negara untuk menempuh operasi gelap untuk menyembunyikan terorisme dan kekerasannya, operasi-operasi yang begitu rumit sehingga tidak lagi bisa mereka sembunyikan dari mata publik. Jika saja publik bersikap masa bodoh dan diam, sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, Reagan bisa jadi menyaingi praktik-praktik John F. Kennedy ketika ia begitu saja mengirim Armada Udara Amerika Serikat untuk melakukan pengeboman berskala besar dan memulai misi-misi penggundulan dan perusakan panen di Vietnam selatan dari 1961—1962. Atau, Lyndon Johnson ketika ia meningkatkan agresi terhadap Vietnam Selatan melalui darat dan udara, memperluasnya sampai ke utara juga, dan mengirim 23.000 tentara Angkatan Laut ke Republik Dominika untuk mencegah ancaman terhadap demokrasi di sana, yang semuanya terjadi pada awal 1965, dengan sedikit protes pada masa itu.

Operasi-operasi gelap berisiko terbongkar dan berisiko meruntuhkan sikap retorik pemerintah (misalnya, “memerangi terorisme”). Ini bisa mencegah panglima-panglima teroris, untuk setidaknya dalam jangka waktu tertentu. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa bahkan di masyarakat yang terdepolitisasi secara umum seperti di Amerika Serikat, tanpa partai-partai politik atau media besar di luar konsensus elite berbasis bisnis yang picik, tindakan masyarakat yang tidak bisa dibalang remeh mungkin terjadi dan bisa memengaruhi kebijakan, meskipun secara tidak langsung, sejak dan selama tahun-tahun Perang Vietnam. Fakta-fakta penting ini perlu diingat untuk menghubungkan dengan yang terjadi di Timur Tengah.

Satu unsur jaringan teror internasional yang dikelola oleh Amerika Serikat adalah Liga Dunia Anti-Komunis, yang terdiri atas kelompok Nazi, anti-Semit, para pembunuh dalam kelompok pasukan maut, dan beberapa pembunuh serta penjahat-penjahat paling buruk di seluruh dunia, yang dimobilisasi oleh pemerintah Reagan dalam jaringan efektif para pembunuh dan penyiksa yang menjangkau seluruh dunia. Bulan lalu, Liga itu menarik perhatian publik dalam kasus Hasenfus di Nikaragua. *New York Times*, seperti biasanya, memberitakan propaganda pemerintah sebagai sebuah fakta, menyatakan bahwa Liga tersebut telah menyingkirkan unsur-unsur jahatnya ketika Jenderal Singlaub mengambil alih pada 1980-an.

Liga Dunia Anti-Komunis ini baru saja menyelesaikan konferensi tahunannya di Eropa (tidak diberitakan di

media, sejauh pengetahuan saya). Para pemimpin-pemimpin Nazi yang hadir, diberi tepuk tangan meriah ketika pemimpin mereka—para pembunuh dari masa Hitler—dipanggil ke podium untuk menyapa audiens. Pemimpin-pemimpin pasukan maut Amerika Latin, diduga dikeluarkan pada 1984, muncul lagi sekali pada konferensi-konferensi di 1984—1985 yang didanai oleh afiliasi Amerika Serikat—sebuah organisasi “pendidikan” bebas pajak. Liga ini terus memasukkan kelompok Nazi, rasis dari berbagai golongan dan para pembunuh dari seluruh dunia.

Liga ini tidak hanya didukung oleh Amerika Serikat dan beberapa negara-negara kliennya—khususnya Taiwan dan Korea Selatan—tetapi juga oleh Suriah dan negara-negara Arab, menurut laporan. Dan, cara-cara bekerjanya disembunyikan oleh lobi Israel. Dalam pengantar buku terbaru mereka tentang Liga ini, Scott Anderson dan John Anderson mengomentari bahwa Liga Anti-Penistaan (ADL—Anti-Defamation League) atas B’nai Brith, seorang anggota terkemuka lobi Israel di dalam negeri, menolak memberi mereka informasi tentang sekumpulan orang-orang anti-Semit, yang kini mengabdikan pada tujuan jaringan teror internasional Reagan yang mereka dukung secara umum.<sup>266</sup>

Semua ini, dan lebih banyak lagi, menunjukkan sebuah pemahaman canggih tentang cara melakukan terorisme internasional, dari beberapa contoh historis.

Riwayat buruk Liga Dunia Anti-Komunisme harusnya mengingatkan kita bahwa ketika kekejaman kelompok

pendukung Reagan dianggap tidak umum, setidaknya kekejaman itu tidak khusus di sejarah Amerika Serikat. Segera setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat beralih tugas untuk menekan perlawanan antifasis di hampir seluruh dunia, kadang demi kepentingan kelompok fasis dan kaki tangannya. Salah satu unsur program global ini adalah rekrutmen gangster Nazi seperti Klaus Barbie, “Penjagal Lyon”, yang bertanggung jawab atas kekejaman-kekejaman menghebohkan di Prancis dan didaulat sebagai orang yang memata-matai Prancis untuk intelijen Amerika Serikat. Contoh yang jauh lebih penting misalnya Reinhard Gehlen, yang bertanggung jawab atas operasi-operasi intelijen Hitler di Eropa Timur dan tak lama kemudian ditugaskan untuk mengerjakan tugas-tugas sama di bawah CIA, di intelijen Jerman Barat. Organisasinya bertanggung jawab terhadap dukungan Amerika Serikat atas tindakan-tindakan militer terhadap Uni Soviet dan Eropa Timur, bersama dengan tentara-tentara yang telah didukung Hitler.

Operasi-operasi ini dijalankan oleh kantor George Kennan di Departemen Luar Negeri, menurut John Loftus, yang menyelidiki masalah-masalah ini untuk Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Kemudian, ketika banyak orang-orang berguna ini tak lagi bisa dilindungi di Eropa, pemerintah Amerika Serikat membawa mereka ke sini atau Amerika Latin dengan bantuan dari Vatikan dan pendeta-pendeta yang rasis. Mereka terus mengabdikan pada kepentingan-kepentingan pemerintah Amerika Serikat, melatih para penyiksa

dengan metode-metode yang ditemukan oleh Gestapo, membantu mendirikan negara-negara dengan Keamanan Nasional Neo-Nazi di Amerika Latin dan membuat aparat pasukan maut Amerika Tengah dalam kerangka pasukan keamanan yang dilatih Amerika Serikat, dan sebagainya.<sup>267</sup>

Hal yang sama terjadi saat kita melihat secara langsung kasus Timur Tengah. Melihat hubungan Amerika Serikat dengan Iran, sekarang ini di berita, tetapi dengan konteks historis yang sebagian besar dihilangkan, biasanya merupakan hal-hal yang menjadi pelajaran-pelajaran yang tidak begitu menyenangkan. Pemerintahan Reagan berpendapat bahwa pengiriman-pengiriman persenjataan ke Iran yang dilaporkan baru-baru ini melalui Israel adalah bagian dari upaya untuk membangun kontak dengan unsur-unsur “moderat” di Iran. Pernyataan ini rasanya benar—secara istilah—jika kita masuk dalam domain *Newspeak* yang lazim, yang mana istilah “moderat” digunakan untuk merujuk pada unsur-unsur yang umumnya patuh pada perintah-perintah dan permintaan-permintaan Amerika Serikat. Istilah ini merupakan penyeimbang bagi istilah “radikal”, yang digunakan untuk merujuk kepada mereka yang tidak mengikuti perintah dengan tepat. Ingat, bahwa terminologi ini tidak ada hubungannya dengan komitmen terhadap kekerasan dan teror kelompok-kelompok tersebut, atau bahkan tujuan-tujuan sosial dan politik mereka, terlepas dari ciri-ciri penting definisi istilah itu. Oleh karena itu, pembunuhan massal yang dilakukan oleh Suharto di Indonesia dianggap “moderat”, tetapi kelompok swabantu petani yang

dikelola oleh Gereja di El Salvador disebut “radikal”, sehingga harus dibasmi oleh teror dengan gaya Pol Pot, yang dipimpin oleh pasukan bayaran Amerika Serikat.

Di Iran, Amerika Serikat mengembalikan para kaum “moderat” ke dalam kekuasaan dengan sebuah kudeta CIA yang digambarkan oleh *New York Times* (6 Agustus 1954) sebagai sebuah “pelajaran” untuk “negara-negara belum berkembang dengan sumber daya yang kaya,” sebuah “pelajaran dengan harga yang harus dibayar oleh seseorang yang gelap mata dengan nasionalisme fanatis” dan berusaha untuk mengambil kendali atas sumber-sumber daya mereka, sehingga menjadi “radikal”. Iran terus menjadi “moderat” sampai jatuhnya Shah pada 1979 sembari mengumpulkan rekam jejak hak asasi manusia terburuk di dunia, sebagaimana yang didokumentasikan dengan teratur oleh kelompok-kelompok Amnesty Internasional dan kelompok hak asasi manusia lainnya, tanpa memengaruhi sang Shah sebagai seorang “moderat” atau tepuk tangan pujian untuknya dari para elite Amerika Serikat. Sang Shah ini didukung oleh pemerintahan Carter sampai akhir masa pemerintahan berdarahnya. Amerika Serikat lalu mencari kemungkinan sebuah kudeta militer, tetapi tidak berhasil. Sejak saat itu, aliran persenjataan ke Iran diurus, sebagian melalui Israel, yang punya hubungan-hubungan sangat dekat dengan Shah dan militernya.

Perhatikan bahwa hal yang hampir sama terjadi juga dalam kasus Somoza di Nikaragua, yang jatuh hampir pada masa yang sama. Pemerintahan Carter juga

mendukungnya sampai akhir, dengan Israel yang menyediakan persenjataan, tentu saja dengan dukungan Amerika Serikat secara diam-diam, sementara ia membunuh puluhan ribu orang dengan kegeraman yang dahsyat. Carter mencoba menjatuhkan kekuasaan Garda Nasional ketika Somoza tidak lagi bisa dipertahankan. Segera setelah itu, sisa-sisa Garda Nasional dibuat lagi di Honduras dan Kosta Rika dengan bantuan proksi-proksi Amerika Serikat seperti Argentina (karena berada di bawah jenderal-jenderal Neo-Nazi, sehingga disebut sebagai negara klien “moderat” yang berguna), dan diambil alih secara langsung oleh Amerika Serikat dan dikelola sebagai sebuah tentara proksi teroris yang membaktikan diri untuk mencegah ancaman reformasi sosial di Nikaragua.

Sementara itu, para elite Amerika Serikat mengalami sebuah perubahan. Mereka menjadi sangat perhatian, untuk kali pertamanya, dengan hak-hak asasi manusia dan “demokrasi” di Nikaragua dan Iran, sebuah kebangkitan moral tiba-tiba yang gagal mendapatkan penghargaan yang pantas.<sup>268</sup>

Kembali ke Iran, menurut Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Moshe Arens, pada Oktober 1982, persediaan persenjataan Israel untuk Iran setelah jatuhnya Shah dibawa “dengan koordinasi pemerintah Amerika Serikat ... di tingkat-tingkat yang hampir masuk ke dalam tingkat tertinggi.” Tujuannya “adalah untuk melihat jika kita tidak bisa menemukan wilayah-wilayah kontak dengan militer Iran, untuk menjatuhkan rezim

Khomeini”, atau setidaknya “untuk membuat kontak dengan beberapa petinggi militer yang mungkin suatu hari akan memiliki kekuasaan di Iran”. Yaakov Nimrodi, pejabat intelijen dan pedagang senjata Israel yang menyamar sebagai atase militer di Iran selama masa kekuasaan Shah, menggambarkan rencana ini di siaran BBC pada 1982. Duta Besar *de facto* Israel atas Iran, Uri Lubrani, dari partai buruh, menambahkan rincian lebih jauh, di program yang sama:

Saya sangat yakin kalau Teheran bisa diambil alih dengan pasukan yang cukup kecil, penuh tekad, bengis, dan kejam. Maksud saya, orang yang akan memimpin pasukan itu harus diarahkan secara emosional pada kemungkinan-kemungkinan bahwa mereka harus membunuh puluhan ribu orang.

Ini menunjukkan betapa “moderat”-nya mereka, secara teknis. Ide-ide serupa juga dinyatakan oleh David Kimche, kepala Kantor Luar Negeri Israel dan mantan wakil direktur Mossad. Kimche dan Nimrodi kini dikenal media sebagai orang-orang di antara mereka yang memprakarsai program bantuan militer Amerika Serikat ke Iran melalui Israel yang berhubungan dengan sandera-sandera Amerika Serikat dan “pencarian kelompok moderat” pada pertengahan 1980-an. Namun, pandangan-pandangan orang-orang Israel mengenai program-program tersebut yang—jauh sebelum ada sandera—diberangus. Pada saat yang sama—awal 1982—rencana-rencana itu didukung



secara umum, dengan beragam tingkat skeptisisme yang mungkin terjadi, oleh Richard Helms (mantan direktur CIA dan mantan Duta Besar untuk Iran), Robert Komer (kandidat terdepan untuk persidangan-persidangan kejahatan perang pada akhir 1960-an dan pejabat tinggi Pentagon di bawah pemerintahan Carter, salah seorang perancang Pasukan Gerak Cepat yang, menurutnya, bisa digunakan untuk mendukung kelompok-kelompok “moderat” setelah kudeta militer), dan lainnya.<sup>269</sup> Semua ini juga kini diberangus.

Fakta-fakta serupa juga diberitakan akhir-akhir ini, meskipun diabaikan, sebelum skandal-skandal itu akhirnya meledak, misalnya, oleh juru bicara senior Kementerian Luar Negeri Israel Avi Pazner, yang mengonfirmasi di sebuah wawancara bahwa pada 1982, Israel telah mengirim persediaan-persediaan senjata ke Iran dengan persetujuan Amerika Serikat, termasuk di dalamnya suku cadang untuk pesawat-pesawat jet tempur buatan Amerika Serikat.<sup>270</sup>

Arus senjata ke Iran melalui Israel (dan mungkin jalur-jalur lainnya) kelihatannya terus sampai ke tingkat yang cukup untuk terus berhubungan dengan unsur-unsur yang tepat di dalam militer Iran, meskipun Amerika Serikat menolak mengirim persenjataan cukup yang memungkinkan Iran menang dalam perang Iran-Irak, yang tentu saja akan menjadi bencana bagi kebijakan Amerika Serikat dalam mendukung Saddam Hussein. Sehingga, Amerika Serikat menghalangi transaksi besar

senjata antara Iran dan Israel pada akhir April, dengan menangkapi mantan jenderal Israel, di antara lainnya.<sup>271</sup>

Tak ada satu pun dari semua fakta ini ditemukan pada akhir 1986, sebagaimana yang diindikasikan oleh rujukan-rujukan sebelumnya. Pada 1982, berita halaman depan dari editor *New York Times*, Leslie Gelb, memberitakan bahwa separuh persenjataan ke Iran “dikirim atau diatur oleh Israel”—tentu saja dengan sepengetahuan Amerika Serikat dan setidaknya dengan otorisasi diam-diam”—dan sisanya dibeli dari pedagang-pedagang senjata lepas, beberapa di antaranya mungkin berhubungan dengan intelijen Israel”, sementara CIA sedang melaksanakan aksi diam-diam melawan rezim Khomeini dari basisnya di Turki timur.<sup>272</sup> Pengungkapan-pengungkapan Aren ini diberitakan secara mencolok di *Boston Globe* selama beberapa hari berturut-turut, di antara kasus-kasus lainnya. Pada beberapa bulan terakhir, sebelum “skandal-skandal” terbuka, informasi tambahan muncul. Sehingga, pada Mei, Patrick Seale memberitakan bahwa “pedagang-pedagang senjata Israel dan Eropa sibuk dengan perbekalan perang untuk Iran” saat Israel menyalurkannya dengan “jalur persenjataan memutar yang biasa”.

“Misalnya, sebuah kapal kini ada di laut, membawa lebih dari 25.000 ton meriam, amunisi, senapan, suku cadang pesawat tempur, dan beberapa perbekalan perang lainnya dari Israel” diperintahkan untuk memprosesnya langsung ke Iran, bukannya lewat Zaire.<sup>273</sup> Susah rasanya

memercayai pertunjukan mencengangkan saat ini dalam hal tersebut.

Ingat lagi kesamaan antara kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran dan Nikaragua. Di sana juga, susah memercayai pertunjukan mencengangkan mengenai fakta bahwa pemerintahan Reagan telah berhubungan secara aktif dalam mengatur dukungan militer bagi tentara-tentara proksinya, mengelak dari undang-undang kongresional, tanpa menyebut persidangan Mahkamah Internasional, ketidaksejajaran dengan negara teroris, dan hukum-hukum yang kembali ke Undang-Undang Netralitas abad delapan belas.

Kita bisa mempelajari lebih lanjut mengenai kasus-kasus ini dengan mengikuti sejarah-sejarah baru-baru ini. Pertama-tama, ingat bahwa pola penjualan senjata ke Iran adalah sesuatu yang klasik, sebuah fakta penting yang dimungkiri dalam penjelasan terbaru. Misalnya, hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia menjadi penuh permusuhan 30 tahun yang lalu, ketika CIA mensponsori sebuah pemberontakan militer yang gagal di Indonesia pada 1958.

Selama masa permusuhan itu, Amerika Serikat terus menyediakan persenjataan untuk rezim Sukarno. Pada akhir 1965, Jenderal Suharto yang pro-Amerika, melakukan kudeta militer, yang akhirnya menyebabkan pembantaian sekian ratus ribu orang, yang kebanyakan adalah petani-petani tanpa lahan, dan pemusnahan satu-satunya organisasi politik berbasis massa di Indonesia, Partai Komunis Indonesia. Indonesia lalu dikembalikan ke

Dunia Bebas, bebas untuk dirampok dan dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan Jepang, yang hanya dirintangi oleh nafsu merampok para jenderal yang berkuasa, yang menjalankan sebuah kediktatoran korup dan bengis.

Perkembangan-perkembangan ini disambut hangat di Barat, dan dianggap sebagai upaya pemulihan nama baik atas agresi Amerika Serikat melawan Vietnam Selatan (yang disebut “pertahanan diri terhadap Vietnam Selatan” dalam sistem propaganda), yang memberikan sebuah “tameng” yang mendukung para jenderal untuk melakukan pembersihan yang perlu atas masyarakat mereka. Dalam testimoni Senat setelah pembantaian, Menteri Pertahanan McNamara diminta untuk menjelaskan penyediaan persenjataan ke Indonesia selama masa permusuhan hebat antara dua negara. Ia ditanya apakah penyediaan persenjataan ini telah “membayar dividennya” dan menjawab sudah—termasuk di dalamnya 700.000 mayat saat itu menurut teman-teman Indonesia.

Laporan kongresional memastikan bahwa pelatihan dan mempertahankan komunikasi dengan para pejabat militer telah membayar “dividen yang sangat besar” dalam menggulingkan Sukarno. Hampir mirip dengan sumber dari Pentagon yang menyatakan bahwa, “Pengaruh militer Amerika Serikat terhadap pemimpin-pemimpin militer lokal secara luas dianggap sebagai sebuah unsur dalam kudeta yang menggulingkan Presiden berhaluan kiri Brasil, Presiden Joao Goulart pada 1964,”<sup>274</sup>

menerapkan Negara dengan Keamanan Nasional lengkap dengan penyiksaan, penindasaan, dan keuntungan-keuntungan untuk investor luar negeri, juga disambut dengan gembira oleh orang-orang Kennedy yang liberal. Cerita ini kembali diulang di Cile beberapa tahun kemudian. Selama rezim Salvador Allende, Amerika Serikat terus mengirim persediaan senjata sambil berusaha keras menggulingkan rezim, dan dihadiahi dengan kudeta Augusto Pinochet, yang lagi-lagi disambut hangat di Amerika Serikat.

Operasi-operasi Iran juga sesuai dengan pola rencana kebijakan, yang memang bisa dipahami dan masuk akal. Seseorang bisa dengan mudah memahami penyebab itu semua didukung terang-terangan oleh Richard Helms dan yang lainnya pada 1982.

Hubungan Amerika Serikat-Iran di bawah pemerintahan Shah juga harus diingat lagi, dalam kaitannya dengan hal ini. Iran ditugasi peran sentral dalam mengontrol Timur Tengah di bawah doktrin Nixon, yang didasarkan pengakuan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki kapasitas untuk memaksakan keinginannya di mana saja sehingga harus bergantung pada “polisi di daerah tersebut” (istilah yang digunakan oleh Menteri Pertahanan Melvin Laird), yaitu proksi-proksi lokal yang akan melaksanakan “kewajiban regional”-nya dalam “keseluruhan kerangka perintah” yang diatur oleh Amerika Serikat, menurut kalimat Henry Kissinger saat itu. Persekutuan tiga negara (yang dilakukan secara diam-diam) disusun dengan

menghubungkan Iran, Arab Saudi, dan Israel di bawah pengawasan Amerika Serikat, yang melakukan upaya “membela” dominasi Amerika Serikat terhadap cadangan energi besar di dunia dan menjaga cadangan energi itu dari musuh-musuh utama, masyarakat pribumi, yang mungkin terinfeksi ide-ide “radikal” bahwa mereka juga harus mendapatkan bagian dalam mengontrol sumber-sumber daya di tanah mereka. Ini, kebetulan, hanya satu contoh pola di seluruh dunia.<sup>275</sup>

Dalam konteks inilah “hubungan khusus” dengan Israel berkembang. Pada 1958, Dewan Keamanan Nasional mencatat bahwa sebuah “akibat wajar yang logis” terhadap penentangan kepada orang-orang berkebangsaan Arab yang radikal (dalam istilah teknisnya) “adalah mendukung Israel sebagai satu-satunya kekuasaan pro-Barat yang kuat di Kawasan Timur”. Menurut biografer David Ben-Gurion, Michael Bar-Zohar, saat itu Israel menandatangani sebuah “pakta batas luar,” yang “berjangka panjang,” dengan Iran, Turki, dan Etiopia, didukung oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Foster Dulles.

Sepanjang 1960-an, intelijen Amerika Serikat memperlakukan Israel sebagai sebuah pagar untuk tekanan-tekanan “kaum nasionalis radikal” terhadap Arab Saudi. Dan, konsepsi Israel sebagai sebuah “aset strategis” dilembagakan dalam kebijakan Amerika Serikat setelah kemenangan Israel yang didukung Amerika Serikat pada 1967, khususnya setelah Israel mengambil langkah untuk mengemblok dukungan Suriah atas pembunuhan massal

warga Palestina di Yordania pada 1970 ketika Amerika Serikat tidak mampu mengintervensi secara langsung karena alasan-alasan domestik. Jatuhnya Shah di Iran semakin memperluas peran Israel sebagai “aset strategis” yang mengabdikan dengan cara menjalankan kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Sementara itu, Israel menyediakan layanan tambahan yang terus meningkat untuk Amerika Serikat di Afrika Selatan, Asia, dan Amerika Latin.<sup>276</sup>

Sekitar 1970, sebuah perpecahan berkembang di antara para elite Amerika Serikat atas kebijakan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan kontroversi antara Menteri Luar Negeri William Rogers, yang melanjutkan rencana untuk penyelesaian politis konflik Arab-Israel bersama dengan konsensus internasional pada waktu itu, dan Henry Kissinger, yang berpendapat bahwa kita harus membuat “jalan buntu,” alasannya untuk mendukung penolakan Israel atas tawaran Anwar Sadat pada Februari 1971 mengenai penyelesaian damai total bersama dengan kebijakan resmi Amerika Serikat. Pandangan-pandangan Kissinger menang. Sejak saat itu, para penentangannya—penentang keras terhadap penyelesaian politis murni—telah mendominasi kebijakan Amerika Serikat yang memilih menyaksikan “aset strategis” Israel memainkan peranannya dalam kontrol Amerika Serikat terhadap kawasan-kawasan dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Ini menjelaskan komitmen Amerika Serikat yang terus-menerus menggeblok penyelesaian politis, yang

mungkin akan menyatukan Israel ke dalam wilayah tersebut.<sup>277</sup>

Secara konsisten, Amerika Serikat terus mencoba untuk mempertahankan konfrontasi militer dan memastikan bahwa Israel tetap menjadi “aset strategis”. Dalam konsepsi ini, Israel harus sangat dimiliterkan, maju secara teknologi. Sebuah negara paria dengan sedikit rintangan dalam kemandirian ekonomi terlepas dari produksi teknologi tinggi (kadang dalam koordinasi dengan Amerika Serikat), bergantung pada Amerika Serikat dan menjadi semakin tergantung, untuk melayani kebutuhan-kebutuhan Amerika Serikat sebagai “polisi lokal” dan negara dengan tentara bayaran yang bekerja untuk tujuan-tujuan Amerika Serikat di mana pun, misalnya dalam mendukung pembunuhan besar-besaran di Guatemala ketika faktor-faktor dalam negeri mencegah Washington berpartisipasi penuh.<sup>278</sup>

Bagaimana dengan hubungan-hubungan Amerika Serikat dengan dunia Arab? *Pertama*, Amerika Serikat akan melakukan sesuatu untuk memastikan bahwa ia mengontrol sumber-sumber energi utama di jazirah Arab: ini adalah prinsip utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat, sebagaimana yang sudah dilakukan sepanjang masa setelah Perang Dunia II. Pemerintah Amerika Serikat lalu akan mendukung “kaum nasionalis moderat”, seperti pemimpin elite di Arab Saudi, yang terkenal dengan “kemoderatannya”. Arab Saudi juga diminta untuk mendukung terorisme internasional, seperti yang sudah disebutkan. *Dan*, akan ada sedikit keterkejutan saat



terkuak kalau Arab Saudi terlibat secara mendalam atas penyediaan persenjataan untuk Iran bersama dengan sekutu Israel secara diam-diam serta dalam kegiatan-kegiatan teroris Amerika Serikat di Amerika Tengah, dan mungkin juga tempat lain: Afrika Selatan, misalnya.

Pada waktu yang sama, Amerika Serikat akan menolak “para nasionalis radikal” dengan konsisten yang merintang jalan menuju tujuan-tujuan Amerika Serikat. Libia adalah salah satu contoh lain. Ketika Amerika Serikat tampaknya telah mendukung upaya Qaddafi dalam meningkatkan harga minyak pada awal 1970-an “untuk memperkuat posisi kelompok ‘moderat’ seperti Iran, Kuwait, dan Arab Saudi”,<sup>279</sup> Libia telah lama menjadi rintangan bagi tujuan-tujuan Amerika Serikat, dan didaulat sebagai sasaran utama sejak hari-hari pertama pemerintahan Reagan di bawah dalih “perang melawan terorisme internasional”.<sup>280</sup>

Dalam hubungan ini, kita harus ingat bahwa pemerintahan Reagan menghadapi masalah yang sedikit serius, sejak awal. Berlawanan dengan banyak anggapan-anggapan orang, kebijakan-kebijakan utamanya secara umum tidak populer. Populasi penduduk, seperti sebelumnya, terus mendukung pengeluaran sosial dibanding pengeluaran politik dan menolak program yang memperluas kekuasaan negara dan perubahan negara, lebih dari sebelumnya, ke dalam negara sejahtera bagi kaum kaya—yang merupakan fungsi utama sistem Pentagon, penyedia subsidi yang dipaksakan untuk masyarakat atas industri berteknologi tinggi di dalam

sistem subsidi publik, dan keuntungan swasta yang disebut “perusahaan bebas”.

Publik juga secara umum menolak “aktivis” kebijakan luar negeri tentang subversi, intervensi, terorisme internasional, dan agresi yang berasal dari “doktrin Reagan”. Ada langkah-langkah klasik untuk mengatasi masalah penolakan publik ini terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah: bangkitkan ketakutan, sesuai ucapan H.L. Mencken, seperti yang sudah dikutip sebelumnya. Sehingga, kita harus melakukan konfrontasi dengan Kekaisaran Iblis yang bertekad menghancurkan kita, “konspirasi monolitik dan kejam” yang dilakukan untuk merintangi kebajikan global kita dan menghancurkan kita, dalam kalimat John F. Kennedy dalam sejarah Amerika Serikat.

Akan tetapi, sebuah masalah muncul: konfrontasi dengan Kekaisaran Iblis terlalu berbahaya. Konfrontasi itu akan merugikan kita, sehingga tidak bisa dilakukan. Solusi untuk dilema tersebut adalah menciptakan “proksi-proksi” Kekaisaran Iblis, yang bisa diserang tanpa kenal hukum, karena mereka lemah dan tak berdaya. Libia sangat tepat untuk peran tersebut, khususnya melawan rasisme anti-Arab yang merajalela di Amerika Serikat. Dan, dalam konteks umum “kampanye melawan terorisme internasional”—yang mengganggu era modern ketika panglima teroris di Washington harus membela kita, berdasarkan berbagai “Operasi Kebenaran” yang dilakukan oleh institusi-institusi ideologis. Sangatlah mudah untuk membunuh banyak warga Libia tanpa

merugikan diri kita sendiri—malah banyak pujian di dalam negeri, termasuk opini kaum liberal yang tercerahkan—sebagaimana kita membela diri kita sendiri terhadap “momok kejam terorisme”.

Dua tahun ke depan bisa jadi berbahaya. Para pendukung Reagan ingin meninggalkan jejak permanen dalam politik Amerika, apa pun hasil pemilu berikutnya. Mereka ingin membuktikan bahwa kekerasan membayar lunas semuanya. Mereka ingin mengatasi “rintangan-rintangan terhadap penggunaan pasukan militer” (Norman Podhoretz). Sistem propaganda telah membangun sebuah rangkaian iblis: Sandinista, “kanker” yang harus dihancurkan (George Shultz); Qaddafi, “Anjing Gila Timur Tengah”; Arafat “Bapak Terorisme Modern”; Castro, yang mengancam akan mengambil alih Separuh Dunia Barat dalam pengabdianya terhadap Uni Soviet; dan sebagainya.

Jika mereka bisa dihancurkan dengan kekerasan, akibat-akibat jangka panjang kebudayaan Amerika akan sangat besar. Tidak akan ada lagi “para pengecut” yang membuat perjanjian dan bernegosiasi, tidak ada urusan dengan penyelesaian politik, hukum internasional, dan omong kosong serupa. Malahan, sistem politik akan didominasi oleh orang-orang yang kekurangan “rintangan”, yang mengeluarkan mereka dengan mengirim pasukan militer kliennya dan pasukan-pasukan berisi orang-orang jahat untuk menyiksa orang-orang yang tidak bisa melawan balik—yang disebut “konservatisme” dalam Newspeak kontemporer.

# 5

## Terorisme Internasional: Bayangan dan Kenyataan

(1989)

---

**A**DA dua pendekatan dalam kajian terorisme. Pertama, bisa dengan mengadopsi *pendekatan literal* dengan mengambil topik secara serius, atau *pendekatan propaganda* dengan menerangkan konsep terorisme sebagai sebuah senjata untuk dieksploitasi dalam melayani beberapa sistem kekuasaan. Masing-masing telah jelas cara kerjanya.

Dalam pendekatan literal, kita mulai dengan menentukan apa yang mendasari terorisme. Kita kemudian mencari contoh-contoh fenomena—dengan berkonsentrasi pada contoh-contoh utama, jika kita serius—dan berusaha menentukan penyebab-penyebab dan penyelesaiannya.

Pendekatan proparaganda berbeda. Kita mulai dengan sebuah tesis bahwa terorisme adalah tanggung jawab

beberapa musuh yang kita tentukan secara resmi. Lalu, kita menyebut tindakan-tindakan teroris sebagai “teroris” kalau-kalau tindakan itu bisa kita hubungkan dengan sumber-sumber yang diperlukan (entah masuk akal atau tidak); atau, tindakan itu kita abaikan, sembunyikan, atau kita istilahkan sebagai “pembalasan” atau “pertahanan diri”.

Tidak mengherankan jika pendekatan propaganda diadopsi secara umum oleh pemerintah, dan juga oleh negara-negara totalitarian. Fakta yang lebih menarik adalah hal yang sama juga terjadi dalam media dan pengetahuan teror di demokrasi-demokrasi industrial Barat, sebagaimana yang sudah didokumentasikan dalam rincian-rincian yang sangat panjang.<sup>281</sup>

“Kita harus mengakui,” ungkap Michael Stohl, “bahwa dengan konvensi—dan harus ditekankan *hanya* dengan konvensi—kekuasaan besar serta ancaman penggunaan kekerasan umumnya digambarkan sebagai diplomasi koersif dan bukan sebuah bentuk terorisme,” meskipun umumnya melibatkan “ancaman dan kadang penggunaan kekerasan untuk apa yang digambarkan sebagai tujuan-tujuan teroris kalau bukan untuk kekuasaan-kekuasaan besar yang mengejar taktik sama.”<sup>282</sup> Hanya satu syarat yang harus ditambahkan: istilah “kekuasaan-kekuasaan besar” dibatasi hanya untuk negara-negara tertentu. Dalam konvensi Barat yang didiskusikan di sini, Uni Soviet tidak termasuk ke dalamnya, sehingga bisa dituduh dan dihukum meski hanya dengan bukti yang sangat kecil, praktik bayangan Soviet.

Terorisme menjadi sebuah isu publik terkemuka pada 1980-an. Pemerintahan Reagan mulai bekerja dengan mengumumkan dedikasi mereka untuk membersihkan apa yang disebut presiden sebagai “momok kejam terorisme”, sebuah wabah yang disebarkan oleh “lawan-lawan yang bejat moralnya dari peradaban itu sendiri” dalam “kembalinya barbarisme pada abad modern” (Menteri Luar Negeri, George Shultz). Kampanye tersebut fokus pada bentuk paling jahat dari sebuah wabah: terorisme internasional yang dipimpin langsung oleh negara.

Tesis inti ini dihubungkan dengan tanggung jawab sebuah “jaringan teror” berbasis Soviet “di seluruh dunia yang ditujukan untuk mendestabilisasi masyarakat demokrasi Barat”, menurut Claire Sterling, yang bukunya berjudul *The Terror Network* memperoleh pujian tinggi, menjadi Kitab Suci Pemerintahan, dan dokumen dasar disiplin baru ilmu terorologi. Buku tersebut diambil untuk memberikan “bukti cukup” bahwa terorisme terjadi “hampir secara eksklusif di masyarakat-masyarakat yang demokratis atau relatif demokratis” (Walter Laqueur), memberikan sedikit keraguan mengenai asal-usul wabah. Buku itu dengan segera terbongkar sebagai sebuah sistem propaganda yang tak bernilai, tetapi tesisnya tetap utuh, mendominasi pemberitaan, komentar, dan pengetahuan arus utama.

Perhatian terhadap terorisme internasional mencapai puncaknya pada pertengahan 1980-an. Terorisme Timur Tengah/Mediterrania dipilih sebagai berita utama oleh

para editor pada 1985 di jajak pendapat *Associated Press*, dan 1 tahun kemudian industri terorisme di Eropa runtuh begitu orang-orang Amerika Serikat menjauh karena takut kalau teroris-teroris Arab memenuhi kota-kota Eropa. Wabah ini kemudian menurun, monsternya dijinakkan oleh “kekuatan koboi”, menurut versi yang diakui.

Sementara pendekatan literal, kita pertama-tama mendefinisikan konsep terorisme, lalu menyelidiki penerapannya, membiarkan kepingan-kepingan itu jatuh di tempat seharusnya. Mari kita lihat arah bagian ini akan membawa kita.

### Konsep Terorisme

Konsep-konsep diskursus politik merupakan contoh-contoh yang susah dijelaskan, tetapi ada kesepakatan umum mengenai hal yang mendasari terorisme. Sebagai awalan, kita bisa melihat Kode resmi Amerika Serikat: “tindak terorisme’ berarti sebuah tindakan yang:

(A) melibatkan sebuah tindak kekerasan atau tindakan berbahaya terhadap nyawa manusia yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang kejahatan di Amerika Serikat atau negara mana pun, atau masuk kategori pelanggaran kriminal jika dilakukan di dalam yurisdiksi Amerika

Serikat atau negara mana pun; dan (B) dimaksudkan untuk (i) mengintimidasi atau memaksa warga sipil; (ii) memengaruhi kebijakan pemerintah melalui intimidasi atau paksaan; atau (iii) memengaruhi jalannya pemerintahan dengan pembunuhan atau penculikan.”<sup>283</sup>

Konsep ini tidak dibatasi dengan tepat. Pertama, batasan antara terorisme internasional dan agresi tidak selalu jelas. Dalam hal ini, kita memilih memercayai Amerika Serikat dan klien-kliennya, terlepas dari segala keraguan: jika mereka menolak tuduhan agresi dalam hal tindakan kekerasan internasional, kita akan menganggap itu lebih kurang kejahatan terorisme. Ada juga ketidaksepakatan dalam perbedaan antara terorisme dan pembalasan atau perlawanan yang sah.

Sumber-sumber Amerika Serikat juga memberikan definisi-definisi singkat “terorisme”. Dalam panduan melawan terorisme tentara Amerika Serikat, terorisme didefinisikan sebagai “penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang telah diperhitungkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat politis, agamis, atau ideologi. Ini dilakukan melalui intimidasi, pemaksaan, atau penanaman ketakutan”. Lebih sederhana lagi, karakteristik dalam kajian komisi Pentagon yang dicatat oleh ahli terorologi, Robert Kupperman, yang merujuk



pada ancaman atau penggunaan pasukan “untuk mencapai tujuan-tujuan politik tanpa tanggung jawab penuh terhadap sumber daya-sumber dayanya”.<sup>284</sup>

Sementara itu, Kuppermen tidak mendiskusikan terorisme; tetapi mendiskusikan konflik berintensitas rendah (*low intensity conflict*—LIC), sebuah doktrin sentral pemerintahan Reagan. Ingat, bahwa sepanjang penggambarannya mengindikasikan dan praktiknya menegaskan, LIC—seperti pendahulunya, “perlawanan terhadap pemberontakan”—hampir lebih dari sebuah eufemisme untuk terorisme internasional yang dilakukan langsung oleh negara, yaitu bergantung pada kekerasan yang tidak mencapai tingkat kejahatan perang agresi.

Intinya ditemukan dalam disiplin ilmiah, meski dengan doktrin biasa yang berlaku. Seorang ahli terkemuka Israel, Profesor Yonah Alexander, mengamati bahwa “terorisme yang didukung negara merupakan bentuk konflik berintensitas rendah yang dilakukan negara saat mereka merasa lebih sesuai terlibat dalam ‘perang’ tanpa harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya”.<sup>285</sup> Alexander membatasi perhatiannya pada konspirasi Kremlin untuk mendestabilisasi Barat dengan “kelompok-kelompok pengganti”, yang menawarkan contoh-contoh seperti “sebuah program pelatihan ekstensif untuk PLO ... ditujukan untuk Nikaragua.” Dalam konsepsi ini, “PLO, yang menjaga hubungan khusus dengan Moskow,” melayani tuan Soviet-nya dengan membuka “pelatihan khusus” terorisme yang diperoleh di Uni Soviet ke Nikaragua, oleh karena itu bisa dilakukan konflik berskala

rendah (LIC) melawan Amerika Serikat dan kepentingan-kepentingannya. Ia juga menyarankan cara ketika “ketulusan Blok Timur harus diuji”. Misalnya, “Menunjukkan tekad untuk menghentikan kampanye propaganda yang menghubungkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dengan terorisme.”

Sebagaimana yang digambarkan contoh-contoh tersebut, dibutuhkan sebuah imajinasi subur untuk menyulap sebuah pikiran yang sangat asing untuk mengganggu ketenangan persaudaraan, selama kemurnian doktrinal terjaga.

### Terorisme dan Budaya Politik

Ada banyak negara teroris di dunia, tetapi Amerika Serikat sangat berbeda karena *secara resmi* menjalankan terorisme internasional dan dalam sebuah skala yang membuat lawannya malu. Jadi, Iran tentunya adalah sebuah negara teroris, sebagaimana yang dinyatakan oleh pemerintah-pemerintah dan media Barat. Kontribusi utama Iran yang paling terkenal dalam terorisme internasional diketahui selama penyelidikan-penyelidikan Iran-Contra: yaitu, keterlibatan Iran yang mungkin kurang hati-hati dalam perang proksi Amerika Serikat melawan Nikaragua. Fakta ini tidak bisa diterima, sehingga tidak begitu menarik perhatian, meskipun hubungan Iran dalam terorisme internasional yang dilakukan Amerika Serikat terbuka saat ada pengaduan berapi-api mengenai terorisme Iran.

Penyelidikan-penyelidikan yang sama memperlihatkan bahwa di bawah Doktrin Reagan, Amerika Serikat telah membuka jalan-jalan baru dalam terorisme internasional. Beberapa negara menggunakan teroris dan penjahat-penjahat individual untuk melakukan aksi-aksi kekerasan di luar negeri. Namun, pada masa Reagan, Amerika Serikat bertindak lebih jauh lagi, tidak hanya menciptakan sebuah jaringan teroris internasional semi-swasta, tetapi juga sebuah kesatuan tempur dan tentara bayaran di *negara-negara* kliennya—Argentina (di bawah para Jenderal), Taiwan, Korea Selatan, Israel, Arab Saudi, dan lainnya—untuk mendanai dan mengimplementasikan operasi-operasi terorisnya. Kemajuan dalam terorisme internasional ini terbuka selama masa penderitaan maksimal atas wabah itu, tetapi tidak masuk dalam diskusi atau debat apa pun.

Komitmen Amerika Serikat terhadap terorisme internasional sampai ke hal-hal yang sangat rinci. Jadi, pasukan proksi yang menyerang Nikaragua dipimpin oleh pemimpin-pemimpin CIA dan Pentagon untuk menyerang “sasaran-sasaran lemah,” yaitu sasaran-sasaran warga sipil yang tidak terlindungi dan menghindari “bentrokan langsung” dengan tentara. Departemen Luar Negeri secara khusus memberikan otorisasi terhadap serangan-serangan atas organisasi-organisasi pertanian—sama persis dengan apa yang kita cela dengan penuh kengerian ketika agennya adalah Abu Nidal.

Media-media penentang perang menyatakan persetujuan mendalam atas pendirian ini. Editor *New*

*Republic*, Michael Kinsley, di sebuah komentar arus utama ekstrem liberal, berpendapat bahwa kita harusnya tidak terlalu cepat menolak pembenaran-pembenaran Departemen Luar Negeri atas serangan-serangan teroris di organisasi-organisasi pertanian: sebuah “kebijakan yang bijaksana” harus “lolos uji coba analisis biaya-manfaat”, sebuah analisis mengenai “jumlah darah dan penderitaan yang akan ditumpahkan, dan kemungkinan bahwa demokrasi akan muncul kemudian”. Dapat dipahami bahwa para elite Amerika Serikat memiliki hak untuk membuat analisis dan berusaha mencapai proyek itu jika lolos uji cobanya.<sup>286</sup>

Ketika sebuah pesawat bermuatan perbekalan *Contra* ditembak jatuh pada Oktober 1986 dengan seorang tentara bayaran Amerika di dalamnya, mustahil untuk menyembunyikan bukti penerbangan-penerbangan perbekalan CIA yang ilegal ke pasukan-pasukan proksi. Pemeriksaan-pemeriksaan *Iran-Contra* terjadi, memusatkan perhatian besar pada topik-topik tersebut. Beberapa hari setelah pemeriksaan berakhir, presiden-presiden Amerika Tengah menandatangani persetujuan damai *Esquipulas II*. Amerika Serikat dengan segera berusaha menumbangkannya. Persetujuan itu mengidentifikasi satu unsur sebagai “sebuah elemen yang sangat diperlukan untuk mencapai kestabilan dan perdamaian kekal di sebuah kawasan,” yaitu, penghentian segala bentuk bantuan “untuk pasukan-pasukan liar atau gerakan-gerakan pemberontak” sebagai bagian

pemerintahan-pemerintahan “regional atau ekstraregional”.

Sebagai balasan, Amerika Serikat segera meningkatkan serangan-serangan terhadap sasaran-sasaran lemah di Nikaragua. Kongres dan media dengan saksama mengalihkan perhatian dari kenaikan drastis pesawat-pesawat pembawa persediaan CIA selama beberapa kali sehari, sembari bekerja sama dengan program Gedung Putih untuk menghancurkan persetujuan-persetujuan yang tidak diinginkan, sebuah tujuan yang akhirnya berhasil dicapai pada Januari 1988, meskipun langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk menumbangkan persetujuan lanjutan presiden-presiden Amerika Tengah pada Februari 1989.<sup>287</sup>

Begitu jumlah pesawat-pesawat persediaan dan pengawasan untuk pasukan-pasukan proksi meningkat, begitu juga kekerasan dan teror, sebagaimana yang diharapkan. Ini juga berlalu tanpa ada perhatian besar, meskipun rujukan berkala bisa ditemukan. *Los Angeles Times* memberitakan pada Oktober 1987 bahwa “para analis militer Barat mengatakan bahwa belakangan ini Contra telah menyembunyikan berton-ton senjata terjun payung sembari mencoba menghindari pertempuran besar .... Sementara itu, mereka memperbanyak serangan-serangan atas sasaran-sasaran pemerintah yang mudah seperti organisasi tani La Patriota ... tempat beberapa anggota milisi, perempuan-perempuan tua, dan cucu-cucu lelakinya mati dalam penembakan dini hari.”

Untuk memilih secara acak dari banyak kasus yang dianggap tidak perlu diperhatikan, pada 21 November, 150 kelompok Contra menyerang dua desa di provinsi selatan Rio San Juan dengan mortir 88 mm dan granat berpeluncur roket, menewaskan 6 anak-anak dan 6 orang dewasa, serta melukai 30 orang lainnya. Bahkan kelompok-kelompok agama yang cinta damai—yang menolak mengangkat senjata—juga dihancurkan oleh pasukan teroris Amerika Serikat. Di El Salvador juga, pasukan militer yang dipersenjatai dan dilatih oleh Amerika Serikat menyerang organisasi-organisasi masyarakat, membunuh, memperkosa, dan menculik anggotanya, di antara kejahatan-kejahatan teroris lainnya.<sup>288</sup>

Keputusan Mahkamah Internasional pada Juni 1986 yang mengutuk Amerika Serikat atas “penggunaan pasukan yang melanggar hukum” dan perang ekonomi ilegal ditolak sebagai keputusan yang tidak relevan oleh sebuah “forum permusuhan” (*New York Times*). Ada perhatian kecil saat Amerika Serikat memveto keputusan Dewan Keamanan PBB mengesahkan kekuasaan dan meminta semua negara untuk meninjau hukum internasional, dan menyatakan melawan keputusan Majelis Umum PBB untuk pengaruh yang sama (dengan Israel dan El Salvador pada 1986; dengan Israel saja pada 1987). Amerika Serikat juga mengabaikan keputusan Mahkamah Internasional bahwa semua bantuan kepada Contra adalah bantuan militer, bukan bantuan kemanusiaan, tetapi terus saja disebut sebagai “bantuan

kemanusiaan” di media. Prinsip utama, tampaknya, adalah bahwa Amerika Serikat adalah negara teroris yang tidak taat hukum dan *ini benar dan adil*, tak peduli apa yang dipikirkan dunia, tak peduli apa yang dinyatakan institusi-institusi internasional.

Akibat wajarnya adalah adanya doktrin bahwa tiada satu pun negara yang memiliki hak untuk membela dirinya dari serangan Amerika Serikat. Persetujuan diam-diam dalam doktrin luar biasa ini terbuka saat agitasi dan propaganda pemerintahan Reagan menyebarkan cerita-cerita secara periodik tentang rencana-rencana Nikaragua untuk memperoleh pesawat jet pencegat. Ada beberapa kritik media karena menelan berita bohong ini dengan sangat tidak kritis, tetapi fakta yang jauh lebih penting malah dilupakan: persetujuan umum bahwa sikap seperti itu menjadi bagian dari kasus Nikaragua, secara keseluruhan tidak bisa diterima.

Ketika cerita itu dibuat untuk mengalihkan perhatian dari pemilihan umum Nikaragua pada 1984, Senator Paul Tsongas dari Massachusetts, dengan dukungan orang-orang antiperang terkemuka, memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan mengebom Nikaragua, jika Nikaragua mendapatkan pesawat jet tempur kuno MIG 1950, karena “pesawat itu juga bisa digunakan untuk melawan Amerika Serikat”, sehingga menjadi ancaman bagi keamanannya<sup>289</sup>. Sebaliknya, dari misil nuklir Amerika Serikat yang berada dalam status siaga mengelilingi Rusia tidak disebut sebagai ancaman karena misil nuklir itu murni untuk tujuan-tujuan pertahanan.

Dapat dipahami bahwa pesawat jet pencegat bisa membuat Nikaragua melindungi teritorinya dari penerbangan-penerbangan perbekalan CIA yang membuat pasukan-pasukan proksi Amerika Serikat tetap berada di medan pertempuran dan pesawat-pesawat pengawas yang memberi mereka informasi terbaru mengenai penempatan tentara-tentara Nikaragua, sehingga pasukan proksi Amerika Serikat bisa dengan aman menyerang sasaran-sasaran lemah di Nikaragua. Dapat dipahami, tetapi jarang dibicarakan.<sup>290</sup> Dan, tampaknya tak ada satu pun media arus utama yang menyiarkan rahasia umum bahwa Nikaragua akan menerima pesawat-pesawat Prancis dengan gembira, bukannya MIG, jika Amerika Serikat tidak menekan sekutu-sekutunya untuk menghalangi bantuan militer sehingga kita mungkin lebih menakuti “Sandinista yang didukung Soviet.”

Isu yang sama muncul pada Agustus 1988, ketika para antiperang di kongres secara mencolok mendukung Amandemen Byrd dalam “Bantuan untuk Kelompok Perlawanan Nikaragua.” Tiga hari sebelumnya, Contra menyerang kapal penumpang *Mission of Peace*, menewaskan 2 orang dan melukai 27 orang, semuanya warga sipil, termasuk pendeta Pembaptis dari New Jersey yang memimpin delegasi agama Amerika Serikat. Insiden ini tidak dibicarakan dalam debat senat mengenai Amandemen Byrd. Malahan, para anggota kongres antiperang memperingatkan bahwa jika tentara Nikaragua melakukan “serangan militer yang tak beralasan” atau “tindakan permusuhan lainnya” melawan



pelaku kejahatan-kejahatan teror, lalu kongres akan merespons dengan giat dan adil, dengan memulai lagi bantuan militer resmi untuk mereka. Ulasan media dan komentar lainnya tidak menemukan keanehan atau hal yang penting diperhatikan dalam sikap tersebut.

Pesan yang ingin disampaikan jelas: tidak ada siapa pun yang memiliki hak membela diri dengan melawan serangan teroris Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah sebuah negara teroris *dengan hak*. Ini adalah doktrin yang tak bisa dibantah, begitu kuat ditanamkan sehingga dalam diskursus tanggung jawab bahkan tidak bisa didiskusikan, hanya diisyaratkan, seperti doktrin bahwa serangan Amerika Serikat terhadap Vietnam Selatan merupakan “pertahanan terhadap Vietnam Selatan” melawan “agresi internal”, yang mungkin tidak bijaksana, tetapi dipercayai para antiperang.

Oleh karena itu, organisasi teroris tentara proksi memiliki tugas sah, yaitu menaklukkan para warga yang suka melawan. Di golongan kanan, Jeane Kirkpatrick menjelaskan bahwa “intervensi dengan kekerasan dalam masalah negara lain” tidak hanya “tidak berguna”, tetapi juga “tidak bermoral”—semata-mata melanggar hukum, sebuah kejahatan yang menyebabkan orang-orang digantung di Nuremberg dan Tokyo dengan pernyataan-pernyataan yang berbunyi bahwa ini bukanlah “keadilan pemenang” karena, sebagaimana Hakim Robert Jackson nyatakan: “Jika tindakan-tindakan tertentu dan pelanggaran-pelanggaran terhadap pakta-pakta perjanjian adalah kejahatan, itu adalah kejahatan, tidak peduli

pelakunya Amerika Serikat atau Jerman. Kita tidak dipersiapkan untuk memaksakan peraturan tentang laku kejahatan terhadap mereka yang tidak ingin terlibat melawan kita.”<sup>291</sup>

Melawan pemikiran-pemikiran seperti itu, Irving Kristol menjelaskan bahwa “Penjelasan dari hukum internasional kurang bisa dipercaya.” Benar, “sebuah kekuasaan besar seharusnya tidak mengintervensi begitu saja di masalah-masalah dalam negeri di sebuah negara yang lebih kecil,” tetapi prinsip ini teratasi jika “kekuasaan besar yang lain sebelumnya telah melanggar aturan ini.” Karena, hal itu “di luar perdebatan” bahwa “Uni Soviet telah mengintervensi Nikaragua sebelumnya” dengan memberikan persenjataan dan teknisi “baik di bidang militer maupun sipil,” maka Amerika Serikat memiliki hak untuk mengirimkan tentara proksinya untuk menyerang Nikaragua. Dengan argumen yang sama, Uni Soviet memiliki hak sempurna untuk menyerang Turki atau Denmark—yang jauh merupakan ancaman keamanan dibandingkan Nikaragua bagi Amerika Serikat—tetapi karena hal itu “di luar perdebatan”, Amerika Serikat tetap memberikan bantuan dan bahkan melakukan hal-hal yang melampaui itu, jika Uni Soviet mencoba mengambil hak agresi yang disetujui itu mengikuti logika Kristol.

Kristol mungkin saja akan membalas argumen ini juga dengan menyebutkan sebuah perbedaan penting yang ia tarik entah dari mana dalam hubungannya dengan hak intervensi dengan kekerasan oleh Amerika Serikat: “negara-negara kecil, seperti juga orang-orang kecil, bisa

mengalami delusi merasa penting dengan tiba-tiba,” jelasnya. Dan, jika benar, delusi-delusi itu pasti dipandu keluar dari pikiran mereka melalui paksaan: “Sejatinya, hari-hari ‘diplomasi kapal perang’ tidak pernah berakhir .... Kapal-kapal perang sama pentingnya bagi keteraturan internasional sebagaimana mobil-mobil polisi bagi keteraturan dalam negeri.” Kelihatannya seperti itu, bahwa Amerika Serikat berhak menggunakan kekerasan terhadap Nikaragua, sebuah negara remeh, meskipun Uni Soviet tidak memiliki hak yang sama dalam kasus Turki atau Denmark.<sup>292</sup>

Dukungan luar biasa untuk terorisme internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat seharusnya tidak dikaburkan oleh para elite oposisi pada perang Kontra. Pada 1986, jajak pendapat menunjukkan bahwa 80% “para pemimpin” menolak bantuan untuk Contra, dan ada perdebatan sengit di kongres serta media mengenai program tersebut.

Akan tetapi, penting mengetahui topik-topik perdebatan itu. Di kelompok yang secara ekstrem tidak setuju, Tom Wicker dari *New York Times* mengamati bahwa “Kebijakan Presiden Reagan dalam mendukung (Contra) merupakan kegagalan yang jelas”, jika kita harus “diam-diam menyetujui beberapa rencana regional yang dirundingkan yang akan dijalankan oleh tetangga-tetangga Nikaragua”—jika mereka bisa menggunakan waktu untuk menghindari pembantaian terhadap penduduk mereka sendiri. Satu unsur bisa dibuat dengan kredibel dari negara-negara teror yang tidak

meniadakannya dari peran menjalankan rencana-rencana regional dalam kelompok Sandinista, melawan serangan yang tidak bisa dibandingkan.

Sambil menyatakan pemikiran yang sama, para editor *Washington Post* memandang Contra sebagai “alat yang tidak sempurna”, sehingga langkah-langkah lain harus dicari untuk “mengembalikan Nikaragua ke mode Amerika Tengah” dan mengadakan “kepimpinan yang masuk akal dalam standar regional”, standar negara-negara teror Washington. Senat *Majority Whip* Alan Cranston, sosok antiperang terkemuka, mengakui bahwa “upaya Contra sayangnya tidak cukup untuk mencapai ... demokrasi di Nikaragua” (tujuan Amerika Serikat berdasarkan kesanggupan doktrinal, apa pun kenyataannya), sehingga Amerika Serikat harus menemukan cara-cara lain untuk “mengisolasi” pemerintahan “yang sangat patut dicela” di Managua dan “meninggalkannya untuk membusuk karena ulahnya sendiri”. Tidak ada kritik seperti itu yang bisa digunakan untuk klien-klien kejam Washington.

Singkatnya, ada sedikit penyimpangan dari istilah-istilah dasar “kebijakan yang masuk akal” Michael Kinsley. Pertanyaan-pertanyaannya berhubungan dengan keberhasilan, bukan prinsip-prinsipnya. Negara kita sendiri punya hak untuk menggunakan kekerasan yang dianggap pantas.<sup>293</sup>

Alasan untuk upaya terorisme internasional dalam kasus Nikaragua telah dijelaskan. Petinggi-petinggi pemerintahan mengamati bahwa tujuan serangan adalah “memaksa (kelompok Sandinista) untuk mengalihkan

sumber-sumber daya langka untuk perang dan jauh dari program-program sosial.” Ini adalah tujuan dasar program CIA pada 1981 yang didukung oleh pemerintah. Sebagaimana diuraikan oleh mantan analis CIA, David MacMichael, dalam testimoninya di depan Mahkamah Internasional, program ini memiliki tujuan: menggunakan tentara proksi untuk “memancing serangan-serangan lintas batas pasukan Nikaragua dan kemudian bisa dijadikan untuk mempertunjukkan sifat agresif Nikaragua”, untuk menekan pemerintah Nikaragua supaya “mengawasi dengan keras kebebasan-kebebasan sipil di dalam Nikaragua sendiri, menangkapi lawan politik, mempertunjukkan sifat totalitarian yang diduga melekat kuat dan meningkatkan perselisihan di dalam negara”, dan untuk meruntuhkan ekonomi yang hancur. Mendiskusikan strategi untuk mempertahankan pasukan teroris di Nikaragua setelah operasi pengiriman persediaan CIA secara teoretis dibatalkan oleh kongres pada Februari 1988 (dan pasukan-pasukan proksi melarikan diri), pegawai Departemen Pertahanan menjelaskan:

Dua ribu orang itu bisa tetap memberikan tekanan pada pemerintah Nikaragua, memaksa mereka menggunakan sumber-sumber ekonominya untuk militer, dan mencegah mereka menyelesaikan masalah-masalah ekonominya—dan itu adalah sebuah nilai tambah .... Apa saja dilakukan untuk menekan rezim

Sandinista, meminta perhatian bahwa negara ini kurang demokrasi, dan mencegah Sandinista menyelesaikan masalah-masalah ekonominya adalah sebuah nilai tambah.

Viron Vaky, Asisten Menteri Luar Negeri urusan Inter-Amerika di pemerintahan Carter, mengamati bahwa argumen utama untuk serangan teroris adalah “perang yang lebih panjang akan melemahkan rezim, memancing penindasan yang lebih radikal, dan memenangkan dukungan yang cukup dari penduduk Nikaragua yang tidak puas, yang cepat atau lambat rezim ini akan digulingkan oleh revolusi massa, penghancuran diri dengan cara-cara kudeta internal atau pemisahan kepemimpinan, atau menyerah saja pada upaya penyelamatan yang bisa dilakukan”. Sebagai seorang penentang perang, Vaky menganggap konsep itu “cacat”, tetapi tidak salah.<sup>294</sup>

Pasukan-pasukan teroris paham betul instruksi mereka, sebagaimana yang kita pelajari dari seorang prajurit yang sangat penting, yang meninggalkan pasukannya pada 1980-an, kepala intelijen pasukan Contra (FDN), Horacio Arce, yang nama samarannya adalah “Mercenario”; pembicaraan tentang “demokrat” dan “pejuang kebebasan” adalah untuk konsumsi dalam negeri. Para prajurit yang meninggalkan Sandinista dieksploitasi besar-besaran oleh Gedung Putih dan media, dan Contra secara umum menerima ulasan yang luas. Namun, para *prajurit yang meninggalkan* Contra adalah masalah yang lain,

khususnya jika mereka memiliki cerita-cerita yang tidak disukai. Arce begitu diabaikan di Amerika Serikat ketika meninggalkan Contra pada akhir 1988.

Pada wawancara-wawancaranya di Meksiko sebelum kembali ke Managua untuk menerima amnesti, Arce menggambarkan pelatihan ilegalnya di sebuah pangkalan armada udara di bagian selatan Amerika Serikat, dikenal dengan nama agen-agen CIA yang memberikan dukungan untuk Contra di balik bantuan kemanusiaan di Kedutaan Honduras Tegucigalpa, menguraikan cara tentara Honduras memberikan intelijen dan dukungan untuk kegiatan-kegiatan militer Contra, dan mendiskusikan korupsi besar pasukan proksi dan penjualan persenjataan ke bazar senjata Honduras, tempat mereka mendekati gerilyawan-gerilyawan Salvador. Intelijen Amerika Serikat dalam “sasaran-sasaran nonmiliter” cukup berguna, jelasnya, karena: “kami menyerang begitu banyak sekolah, pusat kesehatan, dan yang sejenisnya. Kami telah berusaha untuk melakukannya supaya pemerintah Nikaragua tidak bisa memberikan layanan sosial untuk para petani, tidak bisa membangun proyeknya ... itulah idenya.” Keefektifan pelatihan Amerika Serikat terkonfirmasi betul oleh catatan rekam jejaknya.<sup>295</sup>

Perang Contra dengan mudah memenuhi syarat sebagai “terorisme yang didukung negara,” sebagaimana pengakuan mantan direktur CIA Stansfield Turner di depan kongres pada April 1985. Namun, mungkin seseorang akan berpendapat bahwa hal itu harus diistilahkan agresi yang sama sekali palsu. Ini mungkin

maksud dari keputusan Mahkamah Internasional pada 1986. Namun, mari kita terus memberikan Amerika Serikat kepercayaan, betapa pun meragukannya, dan dengan demikian bisa menentukan bahwa tindakan-tindakannya terhadap Nikaragua masuk ke dalam kategori terorisme internasional.

### Terorisme Internasional pada 1980-an

Selama 1980-an, tempat utama terorisme internasional adalah Amerika Tengah. Di Nikaragua, pasukan-pasukan proksi Amerika Serikat meninggalkan jejak pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, mutilasi, penculikan, penghancuran, tetapi menghadapi gangguan karena warga sipil memiliki pasukan untuk membela mereka. Tidak ada masalah-masalah yang bisa dibandingkan muncul di negara-negara klien Amerika Serikat, tempat pasukan teroris utama yang menyerang warga sipil *adalah* tentara dan pasukan keamanan negara lain. Di El Salvador, puluhan ribu warga dibantai pada situasi yang digambarkan oleh Uskup Agung pada Oktober 1980—segera setelah operasi semakin gencar—sebagai “sebuah perang pembasmian dan pemusnahan terhadap warga sipil yang tidak berdaya”.

Perang di negara teror ini berupaya “menghancurkan organisasi-organisasi massa yang berjuang membela hak-hak asasi manusia mereka yang sangat dasar”, sebagaimana Uskup Agung Oscar Romero peringatkan sesaat sebelum pembunuhan terhadapnya ketika memohon dengan sia-sia kepada Presiden Carter untuk



tidak mengirimkan bantuan kepada pasukan-pasukan bersenjata yang “hanya tahu cara menindas warga dan membela kepentingan-kepentingan oligarki Salvador”.

Tujuan-tujuan ini tercapai selama masa pemerintahan Reagan, yang meningkatkan kebuasan serangan terhadap warga sipil. Ketika kelihatannya Amerika Serikat mungkin akan ditarik ke dalam sebuah invasi yang akan berbahaya bagi kepentingan-kepentingannya sendiri, ada beberapa perhatian dan protes di lingkaran-lingkaran elite, tetapi berkurang saat teror negara ini berhasil, dengan banyak organisasi-organisasi massa yang dibinasakan dan “disembelih”. Setelah pemilihan-pemilihan umum di bawah kondisi kekerasan dan penindasan yang menjamin kemenangan bagi unsur-unsur yang memiliki hak istimewa, yang diterima Amerika Serikat, isu ini melewati ambang batas parlemen.

Ada perhatian kecil setelah meningkatnya teror negara setelah persetujuan-persetujuan Esquipulas II; atau laporan Mahkamah Internasional yang berjudul *El Salvador: “Death Squads”—A Government Strategy* (Oktober 1988), yang melaporkan “kenaikan mengkhawatirkan” dalam pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan-pasukan maut resmi sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mengintimidasi lawan potensial dengan “membunuh dan memutilasi korban dengan cara yang paling mengerikan”, meninggalkan korban-korban itu “termutilasi, tersembelih, terpotong-potong, tercekik, atau tanda-tanda yang menunjukkan penyiksaan ... atau pemerkosaan”, Karena tujuan strategi pemerintah adalah

untuk “mengintimidasi warga sipil”, (yaitu terorisme, sebagaimana didefinisikan secara resmi dalam Kode Amerika Serikat), tidaklah cukup dengan hanya membunuh saja. Justru, tubuh-tubuh korban harus dibiarkan tepotong-potong di tepi jalan, dan para perempuan harus ditemukan tergantung di pohon-pohon dengan rambut dan wajahnya dicat merah serta payudaranya dipotong, sementara para elite dalam negeri pura-pura tidak melihat hal-hal ini sembari terus mendanai, melatih, dan mendukung para pembunuh dan penyiksa.

Pada tahun-tahun yang sama, sebuah pembantaian dengan skala yang jauh lebih besar terjadi di Guatemala, juga didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara kliennya. Di sini juga, teror meningkat setelah persetujuan damai Esquipulas II untuk menjaga dari langkah-langkah menuju demokrasi, reformasi sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang ada di dalam persetujuan. Seperti di El Salvador, perkembangan-perkembangan ini diabaikan; tugas yang dilekatkan adalah untuk memusatkan perhatian kepada Nikaragua dan mengeskpresikan kekejaman besar ketika Nikaragua mendekati penyalahgunaan yang lebih sedikit dibandingkan yang umumnya terjadi di negara-negara klien Amerika Serikat. Karena tujuannya adalah untuk mengembalikan Nikaragua ke “mode Amerika tengah” dan memastikan bahwa hal itu memenuhi “standar-standar regional” yang dipenuhi oleh El Salvador dan Guatemala, teror di negara-negara klien tidaklah menjadi

perhatian nyata, kecuali menjadi begitu kelihatan membahayakan aliran bantuan bagi para pembunuh.<sup>296</sup>

Ingat bawa semua terorisme *internasional* ini, didukung atau dikelola secara langsung di Washington dengan bantuan jaringan internasional negara-negara upahannya.

Segera setelah pemilihan-pemilihan umum 1984 yang dipuji-puji telah membawa demokrasi ke El Salvador, organisasi hak asasi manusia berbasis Gereja *Socorro Juridico*, yang beroperasi di bawah perlindungan Keuskupan Agung San Salvador, menggambarkan akibat-akibat teror yang terus berlanjut, yang masih dilakukan oleh “anggota-anggota yang sama dari pasukan bersenjata yang menikmati persetujuan resmi dan cukup mendapatkan pelatihan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan kolektif”, dalam hal-hal berikut:

Masyarakat Salvador yang dipengaruhi oleh teror dan kepanikan, sebuah akibat dari pelanggaran terus-menerus terhadap hak-hak asasi manusia, menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: intimidasi kolektif dan ketakutan yang merata, di satu sisi, dan di sisi lain penerimaan terhadap teror karena penggunaan cara-cara kekerasan yang sering setiap hari. Umumnya, masyarakat menerima seringnya muncul tubuh-tubuh penuh siksaan, karena hak-hak dasar, hak hidup,

betuk-betul menjadi nilai yang dikesampingkan masyarakat.<sup>297</sup>

Komentar yang sama berlaku bagi masyarakat yang mengawasi operasi-operasi ini, atau yang semata mengalihkan mata darinya.

### Sebelum Wabah Resmi

Terorisme internasional, tentu saja, bukan sebuah temuan dari dekade 1980-an. Dua dekade sebelumnya, korban-korban utamanya adalah Kuba dan Lebanon.

Terorisme anti-Kuba dipimpin oleh sebuah Kelompok Khusus rahasia yang dibentuk pada November 1961 di bawah kode nama “Mongoose,” melibatkan 400 orang Amerika Serikat, 2.000 orang Kuba, angkatan laut swasta dengan kapal-kapal cepat dan anggaran tahunan sebesar 50 juta dolar, dijalankan oleh pangkalan CIA Miami yang berfungsi dalam melanggar Undang-Undang Netralitas, dan barangkali, hukum yang melarang operasi-operasi CIA di Amerika Serikat.<sup>298</sup> Operasi-operasi ini termasuk pengeboman hotel dan instalasi industri, penenggelaman kapal-kapal nelayan, meracuni hasil panen dan peternakan, kontaminasi ekspor gula, dan sebagainya. Tidak semua tindakan-tindakan ini secara khusus diotorisasi oleh CIA, tetapi tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang membebaskan dari musuh-musuh resmi.

Beberapa operasi teroris tersebut terjadi saat krisis misil Kuba pada Oktober—November 1962. Minggu-

minggu sebelumnya, Garthoff melaporkan, sebuah kelompok teroris Kuba beroperasi dari Florida dengan otorisasi pemerintah Amerika Serikat melakukan “sebuah serangan pemberondongan peluru di sebuah hotel Kuba tepi pantai di dekat Havana, tempat para teknisi militer Soviet berkumpul, menewaskan sejumlah warga Rusia dan Kuba.” Dan, segera setelahnya, menyerang kapal-kapal kargo Inggris dan Kuba, serta menyerang Kuba di antara aksi-aksi lainnya yang semakin banyak pada awal Oktober. Pada masa tegang karena krisis misil, pada 8 November, sebuah tim teroris dikirim dari Amerika Serikat, mengebom sebuah fasilitas industri Kuba setelah operasi-operasi *Mongoose* secara resmi dihentikan. Fidel Castro menyatakan bahwa 400 pekerja terbunuh dalam operasi ini, berpedoman pada “foto-foto yang diambil dari pesawat-pesawat pengintai”. Aksi teroris ini, yang mungkin dirancang untuk perang nuklir global, membangkitkan sedikit komentar ketika terbuka ke publik. Upaya-upaya pembunuhan terhadap Castro dan teror lainnya terus terjadi setelah krisis berakhir, dan semakin meningkat pada masa Nixon, yaitu pada 1969.<sup>299</sup>

Operasi-operasi serupa terus berlanjut setelah masa Nixon. Pada 1976, misalnya, dua kapal nelayan Kuba diserang pada April oleh kapal-kapal dari Miami, pusat utama terorisme anti-Kuba di seluruh dunia. Beberapa minggu kemudian, kedutaan Kuba di Portugis dibom dengan dua korban tewas. Pada Juli, misi Kuba ke PBB dibom dan ada beberapa pengeboman yang diarahkan pada sasaran-sasaran warga Kuba di Karibia dan Kolombia,

bersama dengan pengeboman terencana di pertemuan pro-Kuba di Akademi Musik New York. Pada Agustus, dua pegawai kedutaan Kuba di Argentina diculik dan kantor-kantor perusahaan penerbangan di Panama dibom. Kedutaan Kuba di Venezuela dibakar pada Oktober dan kedutaan Kuba di Madrid dibom pada November.

Pada Oktober, pengasingan Kuba yang dilatih CIA mengebom pesawat sipil Kuba, menewaskan 74 orang, termasuk tim anggar Kuba yang memperoleh medali emas internasional. Satu dari agen operasi teroris ini, veteran Teluk Babi, Luis Posada Carriles, muncul dari penjara Venezuela saat ia ditangkap karena kasus pengeboman; ia menemukan jalan ke El Salvador, tempat ia bekerja di pangkalan udara militer Ilopango dan membantu mengelola operasi-operasi teroris Amerika Serikat di Nikaragua. CIA terlibat dalam 89 operasi-operasi teroris di Amerika Serikat dan area Karibia pada 1969—1979 sampai ke kelompok-kelompok buangan Kuba, dan yang paling utama, OMEGA 7, yang diidentifikasi oleh FBI sebagai kelompok teroris paling berbahaya yang beroperasi di Amerika Serikat selama 1970-an.<sup>300</sup>

Kuba banyak dibahas di kajian-kajian ilmiah terorisme internasional. Karya standar Walter Laqueur (lihat Catatan 281) berisi banyak sindiran mengenai kemungkinan sokongan Kuba terhadap terorisme, meskipun dengan bukti yang sedikit. Tidak ada satu kata pun, mengenai operasi teroris *atas* Kuba. Ia menulis bahwa dalam “dekade terakhir ... rezim yang lebih menindas tidak hanya bebas dari teror, rezim itu telah membantu

melancarkannya melawan masyarakat-masyarakat yang lebih permisif.” Maksudnya, Amerika Serikat —“masyarakat yang permisif”—adalah satu korban terorisme internasional, sementara Kuba—“rezim penindas”—adalah salah satu agen terorisme. Untuk membuat kesimpulan ini, penting sekali untuk menyembunyikan fakta bahwa Amerika Serikat telah melancarkan serangan-serangan besar teroris yang tidak bisa dibantah terhadap Kuba dan bebas dari teror itu sendiri. Dan, jika ada sebuah kasus yang harus diciptakan untuk melawan Kuba, Walter Laqueur kelihatannya telah gagal menunjukkannya.

Contoh kedua dari masa kekuasaan sebelum Reagan, di selatan Lebanon dari awal 1970-an, warga disandera dengan “harapan rasional, yang akhirnya dipenuhi, bahwa warga yang dipengaruhi akan menggunakan tekanan untuk gencatan permusuhan” dan penerimaan rencana-rencana Israel untuk kawasan tersebut (Abba Eban, mengomentari pernyataan Perdana Menteri Menachem Begin tentang kekejaman-kekejaman di Lebanon yang dilakukan di bawah pemerintahan Partai Buruh dengan gaya “rezim-rezim yang bahkan PM Begin maupun saya tidak berani untuk menyebut namanya”, Eban mengamati, mengakui keakuratan pernyataan tersebut).<sup>301</sup> Ingat bahwa pembenaran ini diungkapkan oleh seorang tokoh antiperang yang terhormat dari Partai Buruh, menempatkan tindakan-tindakan tersebut di bawah judul terorisme internasional (jika bukan agresi).

Ribuan orang terbunuh dan ratusan terusir dari tempat tinggalnya karena serangan-serangan tersebut. Hanya sedikit yang diketahui karena tidak ada kepentingan dalam masalah itu. Serangan-serangan PLO atas Israel pada tahun-tahun yang sama, kejam tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil, mendapat kemarahan besar dan liputan luas. Wartawan ABC Charles Glass, lalu wartawan Lebanon menemukan “editorial kecil mengenai ketertarikan Amerika Serikat terhadap kondisi warga Lebanon Selatan. Serangan-serangan Israel dan penembakan terhadap desa-desa mereka, pengungsian bertahap dari selatan Lebanon ke perkampungan melarat yang semakin luas di daerah pinggiran Beirut tidak bisa dibandingkan dengan cerita-cerita seram ‘teroris’ yang mengancam Israel, membajak pesawat, dan menyerang kantor-kantor kedutaan.”

Reaksinya kurang lebih sama, ia menambahkan, ketika pasukan maut Israel beroperasi di Lebanon setelah invasi Israel pada 1982. Kita bisa membacanya di *London Times*, tetapi para editor Amerika Serikat tidak tertarik. Jika media memberitakan operasi-operasi “pasukan maut berseragam biasa Shin Beth (polisi rahasia) yang membunuh para tersangka di desa-desa dan kamp-kamp Lebanon Selatan ... mengacau penduduk Muslim Syi’ah dan membantu kehadiran tentara Angkatan Laut tidak bisa dipertahankan”, mungkin akan ada apresiasi terhadap buruknya keadaan tersebarnya tentara Angkatan Laut Amerika Serikat di Lebanon. Mereka kelihatannya tidak tahu alasan mereka terpisah dari “calon perwira berkulit



hitam: hampir semuanya mengatakan, yang sayangnya tidak pernah terekam kamera, bahwa mereka dikirim untuk melindungi kaum kaya melawan kaum miskin.”

“Satu-satunya warga Lebanon yang mereka identifikasi sebagai kaum miskin adalah pengungsi Syi’ah yang hidup di sekeliling pangkalan mereka di bandara Beirut. Betapa menyedihkan bahwa mungkin satu dari orang-orang papa Syi’ah ini ... yang membunuh 241 orang mereka pada 23 Oktober 1983.” Jika masalah-masalah ini dilaporkan, ada kemungkinan untuk mencegah atau setidaknya memahami, pengeboman yang mengakibatkan tentara Angkatan Laut terbunuh, korban-korban kebijakan yang “pers tidak mampu jelaskan kepada publik dan pegawai-pegawai bagian informasi mereka sendiri tidak mampu menjelaskan pada tentara Angkatan Laut sendiri.”<sup>302</sup>

Pada 1976, Suriah memasuki Lebanon dengan persetujuan Amerika Serikat dan membantu mengimplementasikan pembantaian lebih jauh, pembantaian terbesar di kamp pengungsian Palestina di Tel Al-Zateer, tempat ribuan orang dibunuh oleh pasukan Kristen yang didukung Suriah dengan persenjataan dari Israel.<sup>303</sup>

Tanpa melanjutkan lebih jauh, jelas sudah bahwa wabah terorisisme internasional yang dipimpin oleh negara sangat merajalela sebelum diubah ke dalam isu utama oleh “diplomasi publik” pemerintahan Reagan.

**Kanon: Terorisisme Kecil-kecilan**

Terorisme besar-besaran yang diulas di sini telah ditiadakan dari diskusi “momok kejam terorisme”. Mari kita beralih ke aksi teror berskala lebih kecil yang tergolong kanon.

Di sini juga, rekam jeaknya dimulai sebelum 1980-an, meskipun daftar rujukannya sangat selektif untuk bisa berguna. Menyebut beberapa contoh yang tidak ditemukan di sumber standar Walter Laqueur, saat ia merujuk penggunaan bom surat dan “sebuah bom buku yang primitif” yang digunakan oleh penjahat yang diakui, sama sekali tidak disebutkan mengenai bom buku canggih yang digunakan intelijen Israel untuk membunuh Jenderal Mustapha Hafez di Gaza pada 1956, saat ia bertanggung jawab menjaga kelompok Fedayeen Palestina untuk tidak menginfiltrasi atau menyerang sasaran-sasaran Israel.<sup>304</sup>

Tinjauan kembali Laqueur mengenai penggunaan bom surat tidak memasukkan testimoni Ya’akov Eliav, yang mengatakan bahwa ia menjadi orang pertama yang menggunakan bom surat saat ia mengabdikan sebagai pemimpin kelompok teroris, yang dikepalai oleh Perdana Menteri Israel saat ini, Yitzhak Shamir (Lehi<sup>305</sup>, “kelompok Stern”). Bekerja dari Paris pada 1946, ia mengatur 70 bom serupa yang dikirim melalui amplop resmi pemerintah Inggris untuk semua anggota kabinet Inggris, pemimpin-pemimpin oposisi Tory, dan beberapa pemimpin militer. Pada Juni 1947, ia dan rekannya ditangkap oleh polisi Belgia saat berupaya mengirimkan bom-bom surat tersebut, dan semuanya ditahan.<sup>306</sup>

Catatan standar mengenai pembajakan dan pengeboman pesawat juga menghindari beberapa topik penting, di antaranya, penolakan Amerika Serikat terhadap permintaan negara-negara komunis pada 1950-an untuk mengembalikan “orang-orang yang membajak pesawat, kereta, dan kapal yang melarikan diri” (penasihat hukum Departemen Luar Negeri, Abraham Sofaer, yang mencatat bahwa kebijakan ini “diperiksa kembali” dari akhir 1960-an—ketika Amerika Serikat dan sekutunya menjadi sasaran).

Pembajakan pesawat pertama di Timur Tengah juga tidak termasuk dalam kanon: pembajakan Israel terhadap pesawat jet sipil Suriah pada 1954, dengan maksud “menyandera supaya tahanan-tahanan kita di Damaskus dibebaskan”, yang ditangkap dalam misi mata-mata di Suriah (Perdana Menteri Moshe Sharett). Yang juga tidak termasuk kanon adalah penembakan pesawat sipil Mesir oleh pasukan udara Israel pada Oktober 1956, yang menewaskan 16 orang termasuk di dalamnya empat wartawan, dalam sebuah upaya pembunuhan yang gagal terhadap Marsekal Abdul Hakim Amar, keduanya pada Presiden Nasser, saat kedua negara tidak sedang berada dalam perang.

Ini adalah operasi yang direncanakan sebelumnya, sehingga tidak seperti saat Israel menembak pesawat sipil Libia yang menewaskan 110 orang, yang hilang di badai pasir setelah terbang 2 menit dari Kairo, menuju arah tujuannya. Aksi Februari 1973 ini terjadi saat pasukan udara dan laut Israel sedang menyerang Tripoli di

Lebanon Utara, menewaskan 31 orang (sebagian besar warga sipil) dan menghancurkan sekolah-sekolah, klinik-klinik, dan bangunan lain di sebuah serangan udara yang dibenarkan sebagai tindakan serangan lebih dulu sebelum diserang kemudian.<sup>307</sup>

Masalah-masalah tersebut dianggap tidak penting, bahkan jika diperhatikan. Namun, reaksi terhadap terorisme Arab sangat berbeda.

Beralih pada 1980-an, anggaplah 1985, ketika perhatian media mencapai puncaknya. Aksi teroris tunggal yang besar pada tahun itu adalah pengeboman pesawat Air India, yang menewaskan 329 orang. Para teroris dilaporkan telah memperoleh pelatihan di kamp paramiliter di Alabama, yang dikelola oleh Frank Camper, tempat para tentara bayaran dilatih untuk melakukan tindak terorisme di Amerika Tengah dan tempat lainnya. Menurut mantan para tentara bayaran, Camper memiliki hubungan dekat dengan intelijen Amerika Serikat dan secara pribadi terlibat dalam pengeboman Air India, yang menurut dugaan merupakan operasi “sengatan” yang lepas kendali. Dalam sebuah kunjungan ke India, Jaksa Agung Edwin Meese mengakui secara tidak langsung bahwa operasi-operasi teroris tersebut berasal dari sebuah kamp pelatihan teroris di Amerika Serikat.<sup>308</sup> Hubungan teroris dengan Libia, seberapa pun kecilnya cukup untuk menunjukkan bahwa Qaddafi adalah sang “Anjing Gila” yang harus dimusnahkan.

Di Timur Tengah, pusat utama terorisme internasional menurut kanon, aksi teroris tunggal yang paling buruk

pada 1985 adalah pengeboman mobil di Beirut pada 8 Maret yang menewaskan 80 orang dan melukai 256 orang. “Sekitar 250 gadis dan perempuan dengan cadar hitam, yang berkumpul dalam ibadah Jumat di Masjid Imam Rida, ikut terkena ledakan.” Nora Boustany melaporkan 3 tahun kemudian. “Sekurangnya 40 dari mereka terbunuh, dan lebih banyak sisanya terluka.” Pengeboman itu juga “membakar bayi-bayi di tempat tidur mereka”, “membunuh pengantin perempuan yang sedang membeli gaun pengantin”, serta “melemparkan tiga anak kecil saat mereka sedang berjalan ke rumah dari masjid” sebagaimana pengeboman itu menghancurkan jalan utama yang padat penduduk” di bagian pinggir kota Beirut Barat. Sasarannya adalah pemimpin Syi’ah Sheikh Fadlallah, yang dituduh terlibat dalam terorisme, tetapi ia berhasil melarikan diri. Serangan ini dirancang oleh CIA dan klien-klien Saudi-nya dengan bantuan intelijen Lebanon dan ahli dari Inggris, dan secara khusus diotorisasi oleh direktur CIA William Casey, menurut catatan Bob Woodward di dalam bukunya tentang Casey dan CIA.<sup>309</sup>

Bahkan di bawah konvensi-konvensi yang dipilihnya, tampaknya Amerika Serikat memenangkan medali untuk aksi-aksi terorisme internasional pada tahun puncak wabah resmi. Negara klien Amerika Serikat dan Israel mengikuti di belakangnya. Operasi-operasi Tangan Besi di Lebanon tidak sama seperti aksi-aksi terorisme internasional yang berlarut-larut di Timur Tengah, dan pengeboman Tunis (dengan dukungan diam-diam dari

Amerika Serikat) memenangkan medali kedua untuk aksi teroris tunggal, kecuali kita menganggap ini sebagai kasus agresi yang sebenarnya, sebagaimana dinyatakan oleh Dewan Keamanan PBB.<sup>310</sup>

Pada 1986, aksi teroris tunggal yang besar adalah pengeboman Amerika Serikat atas Libia—kita anggap lagi, bahwa kita tidak memasukkan serangan ini ke dalam kategori agresi.<sup>311</sup> Pada 1986 juga, Amerika Serikat kelihatannya menempati urutan terdepan dalam kompetisi medali terorisme internasional, bahkan terlepas dari terorisme besar-besaran yang disponsornya di Amerika Tengah, yang pada tahun itu, kongres menanggapi panggilan Mahkamah Internasional untuk mengakhiri “penggunaan kekerasan yang melanggar hukum” dengan pengambilan suara sebesar 100 juta dolar bantuan militer terhadap pasukan-pasukan proksi Amerika Serikat yang digambarkan dengan semangat oleh pemerintah sebagai deklarasi perang sebenarnya.

## Teror dan Perlawanan

Mari kita beralih pada perdebatan-perdebatan tentang lingkup terorisme, yang sejauh ini dihindari.

Pikirkan batas antara terorisme dan perlawanan yang sesuai hukum. Kadang, kelompok-kelompok nasionalis disiapkan untuk menggambarkan aksinya sebagai terorisme, dan beberapa pemimpin politik terhormat menolak mengutuk aksi-aksi terorisme dengan alasan-alasan nasional. Contoh yang relevan dengan diskusi terbaru adalah gerakan pra-negara Zionis. Israel adalah

sumber “industri teroris” pada 1980-an (yang kemudian dipindahkan ke Amerika Serikat untuk perkembangan yang lebih jauh), sebagai sebuah senjata ideologis melawan warga Palestina.<sup>312</sup> PLO adalah kutukan di Amerika Serikat. Sebuah undang-undang khusus kongres, Undang-Undang Anti-Terrorisme 1987, “melarang warga negara Amerika Serikat menerima bantuan, pendanaan, atau ‘apa pun yang berharga kecuali materi informasi’ dari PLO,” yang tidak diizinkan membangun kantor atau fasilitas lainnya untuk memperluas kepentingan-kepentingannya.<sup>313</sup> Kekerasan warga Palestina telah menerima kecaman dari seluruh dunia.

Gerakan pra-negara Zionis melakukan teror secara luas, membunuh banyak warga sipil, kebanyakan warga Arab, juga membunuh diplomat Inggris Lord Moyne dan mediator PBB, Folke Bernadotte (yang pembunuhnya dilindungi setelah negara itu berdiri). Pada 1943, Perdana Menteri Yitzhak Shamir menulis sebuah artikel yang berjudul “Teror” untuk jurnal organisasi teroris yang dikepalainya (Lehi). Lewat artikel itu ia mengusulkan untuk “menghilangkan semua ‘fobia’ dan ocehan terhadap teror dengan argumen-argumen yang sederhana dan jelas”.

“Baik moralitas Yahudi maupun tradisi Yahudi, keduanya tidak bisa digunakan untuk menolak teror sebagai cara perang,” tulisnya, dan “Kita sangat jauh dari keragu-raguan moral ketika berhubungan dengan perjuangan nasional.”

“Pertama dan paling utama, teror bagi kita adalah bagian dari perang politik yang sesuai dengan kondisi-kondisi saat ini, dan tugasnya sangat penting: menunjukkan dalam bahasa yang paling jelas, supaya didengar sampai seluruh dunia termasuk oleh saudara seiman kita yang malang di luar gerbang negara ini, bahwa perang kita melawan penjajah.”

Sebagaimana yang telah diamati secara luas di Israel, penjajahan Inggris tidak begitu menindas jika dibandingkan dengan penguasaan Israel di kawasan-kawasan yang dijajahnya dan menghadapi perlawanan yang jauh lebih keras.

Isaiah Berlin mengingat kembali bahwa Chaim Weizmann, presiden pertama Israel dan salah seorang tokoh yang sangat dipuja-puja dalam gerakan nasional, “tidak berpikir bahwa ini adalah hal yang secara moral layak untuk mencela, baik aksi (terorisme Yahudi) maupun pelaku lainnya di depan publik ... ia tidak mengusulkan untuk berbicara melawan aksi-aksi teror. Pelaku kejahatan, menurutnya, muncul dari pikiran-pikiran tersiksa yang membawanya ke dalam keputusan, dan membuatnya siap menyerahkan hidupnya untuk melindungi saudara-saudaranya dari hal yang ia dan mereka sama-sama percayai sebagai sebuah pengkhianatan dan penghancuran yang disiapkan bagi mereka oleh kantor-kantor luar negeri dalam kekuasaan Barat.”<sup>314</sup>

Arsip-arsip kelompok perlawanan Zionis arus utama, Haganah, berisi nama-nama 40 Yahudi yang dibunuh oleh



Irgun dan Lehi Menachem Begin. Pembunuhan Yitzhak Shamir terhadap rekan Lehi merupakan insiden yang sangat terkenal. Dalam sejarah resmi Irgun, sambil mengingat kembali dengan penuh kebanggaan aksi-aksi teror terhadap warga sipil Arab, juga mengutip pembunuhan anggota Yahudi, yang ditakutkan akan memberikan informasi kepada polisi jika ditangkap. Kolaborator-kolaborator yang dicurigai menjadi tersangka merupakan sasaran khusus, sejak awal.

Sejarah resmi Haganah, di bawah “kegiatan-kegiatan khusus,” menggambarkan pembunuhan Yahudi ortodoks Belanda, Jacob de Haan, oleh pembunuh bayaran Haganah pada 1924 karena ia sedang mencoba “membangun sebuah front persatuan Yishuv lama (komunitas Yahudi), dengan Komite Tinggi Arab melawan Yishuv baru, dan perusahaan Zionis.” Pada tahun-tahun berikutnya Pasukan Khusus Haganah melakukan “tindakan menghukum” kepada para informan Yahudi. Penjara Haganah di Haifa pada 1940-an berisi bilik penyiksaan untuk menginterogasi orang-orang Yahudi yang dituduh berkolaborasi dengan Inggris.

Dalam sebuah wawancara pada 1988, Dov Tsisis menggambarkan tugasnya sebagai petugas penegak Haganah, yaitu “mengikuti perintah, seperti Nazi”, untuk memusnahkan orang-orang Yahudi yang mengganggu perjuangan nasional, “khususnya para informan”. Ia juga menolak tuduhan bahwa pengeboman yang menelan banyak korban di Hotel King David itu dilakukan oleh Irgun semata, yang mengenalkan dirinya sebagai wakil

khusus pemimpin Haganah, Yitzhak Sadeh, yang memberikan otorisasi. Ia kemudian direkomendasikan oleh Moshe Dayan untuk menggantikannya sebagai pemimpin sebuah unit elite.<sup>315</sup>

Para penentang Anti-Nazi juga menggambarkan pembunuhan para kolaborator. Israel Shahak, salah seorang libertarian sipil Israel terkemuka, dan orang yang selamat dari kampung Yahudi di Warsawa serta Bergen-Belsen, mengingat kembali bahwa “sebelum revolusi kampung Yahudi di Warsawa ... kelompok Yahudi bawah tanah, dengan pembenaran total, membunuh setiap kolaborator Yahudi yang bisa mereka temukan.” Ia mengingat kembali kenangan masa kecilnya pada Februari 1943, “ketika saya menari dan menyanyi bersama anak-anak lainnya di sekeliling jenazah (kolaborator Yahudi yang dibunuh), dengan darah masih mengalir dari tubuhnya, dan sebaliknya, sampai sekarang saya tidak menyesali hal itu.”

Mengutip memoir Yitzhak (Antek) Zuckerman, pemimpin pemberontakan Kampung Yahudi Warsawa, Leah Enbal menulis bahwa “Sembilan bulan sebelum pecahnya pemberontakan Kampung Yahudi di Warsawa, kelompok Yahudi bawah tanah mulai melakukan pembasmian sistematis terhadap para kolaborator dari Judenrat (Dewan Yahudi) dan polisi Yahudi,” kadang dengan “pembunuhan kolektif”.

“Akan mustahil bagi kita melawan Jerman tanpa terlebih dahulu menyelesaikan masalah pengkhianatan internal,” kenang Zuckerman. Pembunuhan para

kolaborator itu dianggap sebagai pembalasan dendam yang sah oleh orang biasa. Kolaborator Jerman, kadang “anggota-anggota Gestapo”, harus “dihancurkan sampai habis”, termasuk mereka “yang kegiatan-kegiatannya berlawanan dengan kepentingan-kepentingan Yahudi”. Itu merupakan “kegagalan historis” karena “terlalu lama menunda” dalam membunuh kolaborator-kolaborator Yahudi, Zuckerman menambahkan: “Hari ini, misalnya, saya yakin bahwa di mana pun ada pengkhianatan internal, perang harus dimulai dengan membasmi pengkhianatan internal. (Keterlambatan penanganan ini) adalah kegagalan besar bagi kita, aib kita.”<sup>316</sup>

Komentar-komentar ini muncul selama gelombang kritik yang sangat besar atas warga Palestina karena membunuh para kolaborator dengan polisi rahasia Israel selama Intifada.

Sementara pengakuan blakblakan terorisme Shamir yang beragam bisa ditemukan, pola yang lebih normal untuk aksi-aksi yang dilakukan terhadap rezim-rezim penindas dan tentara-tentara penjajah dianggap sebagai perlawanan oleh pelaku kejahatan dan dianggap terorisme oleh penguasa, meskipun tidak berbau kekerasan. Hal yang dianggap sebagai perlawanan oleh demokrasi Barat dalam menjajah Eropa dan Afganistan, adalah cap teror yang dilekatkan kepada Nazi dan Uni Soviet—padahal sebenarnya, teror diilhami dari luar, sehingga disebut terorisme internasional. Amerika Serikat mengambil posisi yang sama terhadap warga Vietnam Selatan yang bertahan atas serangan Amerika Serikat.

Dengan alasan-alasan serupa, rezim Apartheid di Afrika Selatan tentu mengambil pengecualian terhadap konvensi internasional tentang terorisme: secara khusus, pada resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk terorisme internasional dan meminta semua negara untuk beraksi memerangi wabah tersebut. Alasannya adalah bahwa Majelis Umum:

*Mempertimbangkan* bahwa tidak ada dalam resolusi saat ini yang bisa merugikan hak menentukan nasib sendiri, kebebasan, dan kemerdekaan, sebagaimana berasal dari Piagam PBB, atas orang-orang yang dicabut haknya secara paksa ... khususnya orang-orang di bawah rezim penjajah dan rezim rasis serta pendudukan luar negeri atau bentuk lain dominasi kolonial, juga ... hak orang-orang tersebut untuk berjuang sampai akhir dan mencari serta menerima dukungan (sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya).<sup>317</sup>

Sementara ketetapan ini didukung hampir oleh seluruh dunia, Afrika Selatan tidak sepenuhnya sendiri dalam menentang ini. Resolusi ini menang 153 angka atas 2 (Honduras sendiri memilih abstain). Menjelaskan pernyataan-pernyataan negatifnya, Amerika Serikat dan Israel merujuk pada paragraf yang dikutip itu, dipahami dengan merujuk pada perlawanan sekutu Afrika Selatannya oleh Kongres Nasional Afrika (satu dari “kelompok-

kelompok teroris yang lebih kejam” di dunia, menurut Washington secara resmi), dan merujuk pada pendudukan militer Israel di Tepi Barat dan Gaza, yang memasuki dekade ketiga.<sup>318</sup> Penolakan Washington untuk mendukung resolusi terkuat PBB mengutuk “kembalinya barbarisme pada abad modern” di puncak perhatian dan alasan di baliknya tidak mendapat komentar apa-apa.

Isu ini kembali hangat pada akhir 1988 dalam hubungannya dengan konflik Israel-Palestina. Pada November, Dewan Nasional Palestina (Palestine National Council/PNC) menyatakan kemerdekaan negara Palestina berdampingan dengan Israel, mendukung resolusi terorisme PBB dan resolusi yang relevan lainnya. Yasser Arafat mengulangi hal yang sama pada minggu-minggu berikutnya di Eropa, termasuk sesi khusus dalam rapat Majelis Umum PBB di Jenewa ketika ia dilarang masuk ke New York, karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum PBB, dengan alasan-alasan bahwa kehadirannya akan memberikan ancaman yang tidak diinginkan bagi keamanan Amerika Serikat. Pernyataan ulang PNC dan Arafat atas resolusi terorisme PBB dicela di Amerika Serikat dengan alasan bahwa kepemimpinan Palestina telah gagal memenuhi syarat-syarat Washington mengenai perilaku yang baik, termasuk di dalamnya “penolakan terhadap terorisme dalam bentuk apa pun” tanpa pembatasan.

Para editor *New York Times* mengejek dukungan PNC terhadap konvensi internasional tentang terorisme sebagai “pembendung si tua Arafat”. Anthony Lewis, yang

ada di batas luar perbedaan pendapat yang wajar mengenai masalah-masalah ini, menulis bahwa Arafat sedang melangkah maju, tetapi tidak cukup: “Amerika Serikat menyatakan bahwa PLO harus dengan jelas meninggalkan semua terorisme sebelum bisa mengambil bagian dalam negosiasi”, dan syarat ini belum terpenuhi. Reaksi umum sebagian besar ada di dalam batas-batas ini.

Alasannya sebenarnya jelas. PLO gagal bergabung dengan Amerika Serikat, Israel dan Apartheid Afrika Selatan dalam spektrum opini dunia, sehingga baik pujian maupun cemoohan (dari kelompok garis keras), atau dukungan untuk kemajuan yang terbatas, tetapi belum cukup (dari pendapat lainnya).

Ketika Amerika Serikat terisolasi secara diplomatik pada Desember 1988, Washington mengambil langkah mundur, berpura-pura bahwa Arafat telah menyerah pada permintaan-permintaan Amerika Serikat, meskipun posisinya belum berubah secara substantif—selama bertahun-tahun, sebenarnya. Dengan resminya Arafat menyerah terhadap permintaan-permintaan Amerika Serikat, sesuai dengan syarat yang diajukan oleh Amerika Serikat sendiri, ia bisa diganjar dengan diskusi bersama Duta Besar Amerika Serikat di Tunis. Sebagaimana ditekankan oleh Menteri Pertahanan Israel, Yitzhak Rabin, diskusi Amerika Serikat-PLO dirancang untuk membelokkan tekanan diplomatik untuk masalah tempat tinggal dan memberi Israel waktu 1 tahun atau lebih untuk menekan pemberontak Palestina (Intifada) dengan

“kekejaman militer dan tekanan ekonomi” sehingga “mereka akan hancur”.<sup>319</sup>

Isu terorisme versus perlawanan muncul seketika dalam diskusi-diskusi Amerika Serikat-PLO. Protokol pertemuan pertama bocor dan dimuat di *Jerusalem Post*, yang menunjukkan kebahagiaannya karena “wakil Amerika Serikat mengadopsi sikap-sikap Israel”, dengan menyatakan dua syarat penting yang harus diterima PLO: PLO harus menghentikan Intifada dan membuang ide tentang konferensi internasional. Untuk masalah Intifada, Amerika Serikat menyatakan sikapnya sebagai berikut:

Tak diragukan lagi bahwa perjuangan-perjuangan internal yang sedang kita saksikan di kawasan terjajah ini bertujuan untuk meruntuhkan keamanan dan kestabilan negara Israel dan kami kemudian meminta dihentikannya semua kekacauan tersebut, *yang kita pandang sebagai aksi-aksi teroris terhadap Israel*. Ini benar karena kami tahu kamu yang memimpinya, dari luar kawasan, kekacauan-kekacauan itu kadang sangat kejam.<sup>320</sup>

Begitu “terorisme” ini dihentikan dan kondisi penindasan sebelumnya diperbaiki, Amerika Serikat dan Israel bisa menyelesaikan masalah-masalah sesuai kepuasan mereka. Perlawanan penduduk yang ditindas

terhadap pendudukan militer yang brutal adalah “teror” menurut pandangan penjajah dan bos besarnya.

Isu yang sama muncul selama operasi-operasi tentara Israel di Lebanon Selatan. Ini juga dipandu oleh logika yang disebutkan oleh Abba Eban, yang sudah dikutip sebelumnya. Warga sipil dijadikan sandera di bawah ancaman teror untuk memastikan bahwa mereka menerima ketetapan-ketetapan politik yang didikte oleh Israel untuk Lebanon Selatan dan kawasan-kawasan yang didudukinya. Ancaman ini bisa dilaksanakan dengan kekejaman ekstrem.<sup>321</sup> Namun, tentu saja itu tidak dihitung sebagai aksi teror, mengingat siapa pelaku dan pendukungnya. Dan, tidak juga menerima cacian atau kutukan. Aksi-aksi tersebut merupakan tindak pertahanan diri yang sah, menurut definisi mereka.

Mengadopsi konsep yang sama, masuk akal untuk menyatakan, tanpa komentar, bahwa perhatian Menteri Luar Negeri Schultz terhadap terorisme internasional menjadi “kegemarannya” setelah bom bunuh diri Angkatan Laut Amerika Serikat pada Oktober 1983. Tidak perlu memanggil saksi-saksi dari Nikaragua, Angola, Lebanon, kawasan-kawasan terjajah, dan yang lainnya, untuk memberikan kesaksian atas “kegemaran” Schultz, atau ketika memuji “kejahatan mendalam terorisme” dan “perang suci pribadi” terhadapnya dalam menjelaskan penolakannya untuk menerima Arafat berbicara di PBB.<sup>322</sup>

Tanpa keraguan lagi, Suriah juga memperhatikan warga Lebanon yang menolak putusnya sebagai “teroris,” tetapi pernyataan seperti itu akan memancing ejekan dan



kejijikan. Reaksi ini berubah-ubah sesuai berubahnya pelaku.

## Teror dan Pembalasan

Konsep pembalasan merupakan alat yang sangat berguna dalam perang ideologis. Melalui lingkaran interaksi yang kejam, setiap sisi umumnya akan menampakkan aksi-aksinya sebagai pembalasan terhadap terorisme lawannya. Di Timur Tengah, konflik Israel-Arab memberikan banyak contoh. Israel, sebagai sebuah negara klien, konvensi-konvensinya diadopsi praktik-praktik Amerika Serikat.

Untuk menggambarkannya, ingat pembajakan Achille Lauro dan pembunuhan Leon Klinghoffer pada 1985, yang tak diragukan lagi merupakan aksi teroris yang keji. Namun, pelaku pembajakannya menganggap bahwa aksinya bukanlah teror, melainkan pembalasan untuk pengeboman Israel terhadap Tunisia seminggu sebelumnya, dengan dukungan Amerika Serikat, entah “aksi agresi bersenjata” (seperti yang diputuskan Dewan Keamanan PBB) atau hanya terorisme internasional yang kejam (memercayai Amerika Serikat dan kliennya, betapa pun meragukannya).

Akan tetapi, bagi pelaku, pengeboman Tunisia bukanlah sebuah teror ataupun agresi, melainkan pembalasan sah untuk pembunuhan berdarah dingin terhadap tiga warga Israel di Larnaca, Siprus (meski tidak ada tersangka yang berhubungan dengan Tunisia atau korban-korban di sana). Pelaku pembunuhan Larnaca, sebaliknya, menganggap aksinya bukan terorisme, tetapi

sebagai balasan atas terorisme Israel dalam perairan internasional selama bertahun-tahun. Fakta-fakta ini tidak dikonteskan dan bahkan sesekali diberitakan, tetapi fakta-fakta tersebut bukan merupakan “terorisme” berdasarkan definisi, sehingga kejahatan-kejahatan Larnaca tidak bisa dibalas, sebagaimana yang sudah dinyatakan. Operasi-operasi Israel sedikit didiskusikan dan tidak masuk dalam kanon.<sup>323</sup>

Ada banyak kasus-kasus serupa. Konsep terorisme dan serangan balasan adalah instrumen yang lemah, bisa diadaptasi kapan saja tergantung kebutuhan.

### Dari Literalisme ke Kebutuhan Doktrinal

Tinjauan kembali terorisme internasional yang dilakukan negara ini memiliki kekurangan serius: tinjauan ini melekat pada literalisme yang naif sehingga tidak relevan dengan debat kontemporer mengenai wabah abad modern.

Tinjauan ini, juga sangat jauh dari komprehensif. Hampir-hampir tidak menggores permukaannya, bahkan untuk kasus Amerika Tengah dan Timur Tengah, serta terorisme internasional yang tidak terbatas di kawasan-kawasan tersebut. Namun, tinjauan ini cukup membangkitkan beberapa pertanyaan. Salah satunya: bagaimana mungkin cendekiawan dan media mempertahankan tesis bahwa wabah terorisme abad modern ini bisa dilacak sampai ke “jaringan teror seluruh dunia” berbasis Soviet “yang bertujuan untuk mendestabilisasi masyarakat demokrasi Barat”?

Bagaimana mungkin mengidentifikasi Iran, Libia, PLO, Kuba, dan musuh-musuh resmi lainnya sebagai pelaku terorisme internasional terkemuka?

Jawabannya, seperti yang sudah kita lihat, sangat sederhana. Kita harus mengabaikan pendekatan literal dan mengakui bahwa aksi-aksi terorisme di dalam kanon ini hanya terjadi jika dilakukan oleh musuh-musuh resmi. Namun, ketika Amerika Serikat dan klien-kliennya menjadi agen kekejaman-kekejaman teroris, rekam kejahatannya kalau tidak hilang dari catatan yang diubah menjadi aksi pembalasan dan pertahanan diri dalam pengabdianya terhadap demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Kini, semuanya menjadi jelas.

Akhirnya, beralih pada kemungkinan perbaikan-perbaikan atas wabah teroris ini, standar literatur menawarkan beberapa usulan. Walter Laqueur mengungkapkan bahwa “cara paling jelas untuk membalas” terorisme internasional “adalah, tentu saja, membayar kembali sponsor terorisme dengan uang mereka sendiri,” meskipun tanggapan sah seperti itu sulit dipahami masyarakat Barat, yang gagal memahami bahwa yang lainnya tidak berbagi “standar demokrasi, kebebasan, dan kemanusiaan” yang sama. Sebelum mereka yang menderita literalisme yang tidak ada obatnya ini menarik kesimpulan-kesimpulan yang salah, harus ditekankan bahwa tanggapan yang sah tidak termasuk pengeboman di Washington dan Tel Aviv, dengan memberikan konsep terorisme yang sudah mereka ciptakan.

*New York Times* memanggil ahli terorisme untuk mengajukan pemikirannya mengenai cara melawan wabah terorisme. Nasihatnya, berdasarkan pengalaman panjang, sangat terus terang: “Para teroris, dan khususnya pemimpinnya, harus dimusnahkan.” Ia memberikan tiga contoh aksi perlawanan terhadap teroris yang sukses: pengeboman Amerika Serikat atas Libia, pengeboman Israel atas Tunisia, dan invasi Israel terhadap Lebanon. Ia merekomendasikan hal yang kurang lebih sama “jika dunia yang beradab menang”. Para editor *Times* memberikan judul artikelnya: “Sudah Lewat Masa untuk Menghancurkan Monster Teroris”, dan mereka menekankan kata-kata: “hentikan pembantaian terhadap orang-orang tak berdosa”. Mereka mengidentifikasi penulisnya sebagai “Menteri Perdagangan dan Industri Israel”.<sup>324</sup>

Nama penulisnya adalah Ariel Sharon. Karier terorisnya, sudah dimulai sejak awal 1950-an, termasuk pembantaian 69 warga desa di Qibya dan 20 warga di kamp pengungsi al-Bureig pada 1953; operasi-operasi teroris di Gaza dan Sinai Timur Laut pada awal 1970-an termasuk pengusiran sekitar 10.000 petani ke gurun, sementara rumah mereka digilas bulldoser dan tanah pertanian mereka dihancurkan untuk membuat pemukiman Yahudi; invasi Lebanon yang dilakukan dalam upaya—yang kini diakui secara luas—untuk mengatasi ancaman diplomasi PLO; pembantaian-pembantaian berikutnya di Sabra dan Shatila; dan yang lainnya.

Beberapa mungkin merasa bahwa pilihan Sharon untuk memberikan “dunia beradab” pelajaran-pelajaran tentang cara “menghentikan pembantaian orang-orang tak berdosa” mungkin sedikit aneh, jahat, bahkan munafik. Namun, itu tidak begitu jelas. Pilihan itu tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ditunjukkan dalam tindakan, dan dalam budaya intelektual yang diungkapkan dalam kata-kata, atau diam.

Mendukung kesimpulan ini, kita bisa mengamati bahwa perbaikan bagi terorisme internasional—setidaknya, komponen inti di dalamnya—berada dalam genggamannya kita, dan sangat sederhana: berhentilah berpartisipasi di dalamnya. Namun, tidak ada aksi yang diambil untuk tujuan ini, bahkan masalahnya sangat jarang didiskusikan. Malahan, orang menemukan pujian-pujian untuk niat-niat baik dan tujuan-tujuan mulia kita. “Standar-standar demokrasi, kebebasan, dan kemanusiaan” yang kita tinggikan kadang cacat dalam pelaksanaannya. Fakta-fakta dasar tidak bisa dirasakan dan pikiran-pikiran yang jelas tidak bisa dipikirkan. Kebenaran-kebenaran sederhana, ketika diungkapkan menimbulkan ketidakpercayaan, ketakutan, dan kejahatan—ketika kebenaran itu disuarakan.

Di iklim moral dan intelektual seperti ini, mungkin pantas bagi koran terbesar di dunia untuk memilih Ariel Sharon sebagai guru kita dalam kejahatan-kejahatan terorisme dan cara melawannya.

# 6

## Dunia Setelah 11 September

(2001)

---

**S**AYA yakin saya bukan satu-satunya yang telah diingatkan beberapa bulan lalu oleh kata-kata bijak dari salah satu figur Amerika Serikat paling mengesankan abad ke-20, seorang pecinta damai radikal, A.J. Muste. Saat Amerika Serikat memasuki kancah Perang Dunia II, 60 tahun yang lalu, ia memprediksi dengan ketepatan yang patut diperhitungkan bahwa garis batas dunia akan muncul setelah kemenangan Amerika Serikat, dan tak lama kemudian, ia mengamati bahwa “masalah setelah perang adalah dengan sang pemenang. Ia pikir ia baru saja membuktikan bahwa perang dan kekerasan terbayar. Siapa yang kini akan memberinya pelajaran?”

Begitu banyak orang di seluruh dunia yang dipaksa belajar makna pahit kata-kata tersebut. Kekuasaan digunakan dengan bijak dan baik untuk menghancurkan kejahatan hanya ada di dongeng, cerita anak, dan jurnal

pendapat orang-orang terpelajar. Dunia yang sebenarnya memberi pelajaran yang sangat berbeda, dan hanya butuh ketidaktahuan yang disengaja supaya gagal menerima pelajaran-pelajaran itu.

Sayangnya, semua itu menjadi tema-tema utama dalam sejarah. Dalam kajian pembentukan negara-negara Eropa, Charles Tilly menyebutkan dengan cukup tepat bahwa lebih dari seratus tahun terakhir, “perang telah menjadi kegiatan yang paling dominan di negara-negara Eropa”, untuk sebuah alasan yang sangat disayangkan: “Fakta utama yang begitu tragis ini sederhana: *koersi atau pemaksaan* berhasil. Mereka yang memasukkan pasukan-pasukan penting ke dalam sekutunya memperoleh kepatuhan, dan dari kepatuhan itu ada banyak keuntungan uang, barang, rasa hormat, akses kesenangan yang tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang kurang berkuasa.”<sup>325</sup> Semua itu sangat dekat dengan kebenaran mutlak sejarah, yang telah dipelajari sebagian besar orang di dunia dengan cara yang sangat tidak mengenakkan. Rasa hormat umumnya termasuk sambutan hangat kelas-kelas terpelajar. Banyaknya alat kekerasan untuk menghancurkan musuh-musuh tak berdaya dengan tak kenal hukum cenderung memenangkan kekaguman khusus, dan juga supaya wajar, sebuah demonstrasi kebaikan; harus juga dekat dengan universal historis-budaya.

Seiring dengan kemenangan mudah atas musuh-musuh tak berdaya adalah kebiasaan memilih kekerasan dibanding cara-cara damai. Lainnya adalah mendahulukan bertindak

tanpa otoritas. Penjelmaan tuhan yang datang ke dunia sebagai “manusia sempurna” dengan misi membinasakan kejahatan dari dunia tidak membutuhkan otorisasi yang lebih tinggi. Apa yang benar dari kisah epik Indian sejak ratusan tahun lalu ditiru hari ini. Pilihan untuk menggunakan kekerasan, dan penolakan otorisasi, telah menjadi unsur-unsur dari kekuasaan besar dan tak bisa dilawan sejak puluhan tahun lalu, serta menghancurkan musuh-musuh yang lebih lemah ini sejalan dengan rekomendasi-rekomendasi kebijakan. Ketika pemerintahan Bush kali pertama bekerja, pemerintah tersebut menjalankan sebuah Tinjauan Kebijakan Keamanan Nasional yang berhubungan dengan “ancaman-ancaman Dunia Ketiga”.

Bagian-bagian tinjauan itu bocor ke media selama masa Perang Teluk. Tinjauan tersebut menyimpulkan bahwa “Jika Amerika Serikat menghadapi musuh-musuh yang jauh lebih lemah”—yang tentu saja, paling baik memilih untuk berperang—“tantangan kita tidak semata menyerang mereka, tetapi menyerang mereka dengan jelas dan cepat.” Hasil lainnya bisa “memalukan” dan “mengobral dukungan politik”.<sup>326</sup> Dengan hancurnya pencegah satu-satunya beberapa bulan kemudian, tak aneh lagi kalau kesimpulan-kesimpulan yang kemudian muncul menjadi lebih mantap. Itu semua, saya pikir, adalah beberapa pertimbangan bagi kita ketika merenungkan dunia setelah 11 September.

Apa pun penilaian mengenai kejadian-kejadian beberapa minggu terakhir, jika kita ingin mencapai



penilaian yang masuk akal mengenai apa yang ada di depan, kita harus hati-hati mengikuti beberapa faktor penting. Di antaranya:

1. premis-premis yang mendasari keputusan-keputusan kebijakan
2. akar-akar dalam institusi dan doktrin yang stabil di sejarah yang paling baru, sampai pada keterlibatan para pembuat keputusan yang sama
3. cara-cara menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan-tindakan khusus.

Saya ingin mengungkapkan beberapa hal mengenai setiap topik tersebut.

Milenium baru dengan cepat menghasilkan dua kejahatan baru yang mengerikan, yang ditambahkan ke dalam catatan suram yang terus berlangsung. Yang *pertama* adalah serangan teroris 11 September. Yang *kedua*, tanggapan terhadap serangan tersebut, yang tentu saja memakan korban nyawa-nyawa orang tak berdosa lebih banyak lagi, yaitu warga negara Afganistan, korban sebenarnya dari orang-orang yang dicurigai menjadi pelaku kejahatan 11 September. Saya akan menganggap bahwa pelaku itu adalah Osama bin Laden dan jaringan Al-Qaeda-nya. Sebenarnya, sudah ada tersangka utama sejak awal, meskipun hanya ada sedikit bukti tepercaya yang ada dibanding yang seharusnya dalam penyelidikan-penyelidikan intensif yang dilakukan oleh intelijensi kekuasaan-kekuasaan besar.<sup>327</sup> Jaringan-jaringan “perlawanan tanpa pemimpin” ini, seperti sebutan

mereka, bukanlah sebuah masalah yang mudah diselesaikan.

Sialnya, kedua kasus kejahatan itu dianggap benar dan adil, bahkan terpuji, dalam kerangka doktrinal pelaku. Dan, faktanya dibenarkan hampir sama. Bin Laden menyatakan bahwa kekerasan itu dibenarkan dalam sebuah tindakan pembelaan diri melawan orang kafir yang menyerbu dan menjajah tanah-tanah kaum Muslim, serta melawan pemerintah-pemerintah kejam dan korup yang mereka dukung di sana—kata-kata senada tersebar di kawasan tersebut bahkan di antara mereka yang tak menyukai dan takut kepadanya. Bush dan Blair juga menyatakan, dalam kata-kata yang hampir sama, bahwa kekerasan dibenarkan untuk mengusir kejahatan dari tanah kami. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya sama. Ketika Bin Laden mengatakan “tanah kami”, ia merujuk pada tanah-tanah kaum Muslim: Arab Saudi, Mesir, Ceko, Bosnia, Kashmir, dan lainnya. Kaum Islamis radikal yang dimobilisasi dan dipelihara oleh CIA dan rekan-rekannya selama 1980-an memusuhi Rusia, tetapi menghentikan operasi-operasi terornya di Rusia dari markas Afganistan setelah Rusia menarik diri. Ketika Bush dan Blair mengatakan “tanah kami”, mereka, sebaliknya, merujuk pada seisi dunia. Perbedaan ini mencerminkan kekuasaan yang mereka miliki. Bahwa keduanya sama-sama berbicara tanpa malu ingin membinasakan kejahatan jika melihat rekam jejak mereka—yang tentu saja akan membuat kita tercengang, kecuali kalau kita melupakan jejak sejarah bahkan yang paling baru sekalipun.

Fakta lain yang menunjukkan kesuraman adalah bahwa, di kedua kasus, para pelaku bersikeras menegaskan kejahatan dalam tindakan-tindakan mereka. Dalam kasus Bin Laden, tidak perlu lagi ada diskusi, sementara Amerika Serikat menolak kerangka hukum yang ada di Piagam PBB. Telah ada banyak perdebatan dalam deklarasi Dewan Keamanan PBB atau Pasal 51 dalam Piagam PBB, yang dianggap ambigu dan memberikan otorisasi untuk upaya penggunaan kekerasan. Hal itu, menurut saya, tidak relevan.

Untuk menyelesaikan perdebatan itu sebenarnya sederhana, kalau saja ada keinginan untuk menyelesaikannya. Hampir tidak ada keraguan bahwa Washington bisa memperoleh otorisasi Dewan Keamanan yang sepenuhnya tidak ambigu, bahkan jika bukan untuk alasan-alasan menarik. Rusia sangat ingin bergabung dengan “koalisi melawan teror” untuk mendapatkan dukungan Amerika Serikat demi kejahatan teroris masifnya sendiri. Tiongkok berharap bisa diterima di koalisi tersebut juga untuk alasan yang sama, dan sebenarnya, negara-negara di seluruh dunia menyadari bahwa mereka bisa ikut mendukung kekuatan adidaya global untuk kekerasan dan penindasan yang juga mereka lakukan sendiri, sebuah pelajaran untuk tidak kehilangan manajer-manajer global. Dukungan Inggris bersifat refleksi, Prancis tidak akan keberatan. Singkatnya, tidak akan ada hak veto.

Akan tetapi, Washington lebih memilih untuk menolak otorisasi Dewan Keamanan dan tetap bersikeras pada hak

uniknya untuk bertindak sepihak dalam melanggar hukum internasional dan kewajiban-kewajiban dalam pakta perjanjian, sebuah hak yang dinyatakan oleh pemerintahan Clinton dan pendahulu-pendahulunya dengan kata-kata yang jelas dan tegas—peringatan-peringatan yang kita dan lainnya bisa pilih untuk diabaikan, tetapi membahayakan bagi kita. Dengan cara yang sama, Washington terpaksa menolak tawaran-tawaran sementara untuk mempertimbangkan ekstradisi Bin Laden beserta rekan-rekannya. Seberapa nyata kemungkinan-kemungkinan itu tidak kita ketahui, karena penolakan yang selayaknya juga mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Hal ini bertahan pada prinsip-prinsip terkemuka negarawan, yang disebut “menyusun kredibilitas” dalam sebuah retorika diplomasi dan ilmu pengetahuan. Dan, semua itu bisa dipahami. Jika seorang Don Mafia berencana untuk menarik uang keamanan, dia pertama-tama tidak meminta surat dari pengadilan, meskipun jika ia bisa mendapatkan surat itu. Hal yang sama terjadi dalam masalah-masalah internasional. Negara-negara harus paham posisi mereka, dan harus mengakui bahwa yang terkuat tidak butuh otoritas yang lebih tinggi lagi.

Thucydides berkata bahwa “negara-negara yang lebih besar melakukan apa yang ingin mereka lakukan, sementara negara-negara kecil menerima apa yang harus mereka terima.” Dunia ini telah begitu berubah setelah beberapa ribu tahun, tetapi beberapa hal tetap saja tidak berubah.

Kekejaman-kekejaman 11 September dianggap sebagai peristiwa sejarah, yang memang betul, tetapi sayangnya tidak tepat mengingat skalanya. Dalam skala korban sipilnya, kejahatan ini tidak biasa dalam sejarah kekerasan yang mendekati perang. Untuk menyebut hanya satu contoh saja, yang dalam konteksnya cukup kecil untuk sekadar ditulis dalam catatan kaki, seorang wartawan Panama, yang mengutuk kejahatan 11 September, mengamati bahwa bagi warga Panama, “masa-masa mengerikan” itu bukannya tidak akrab dengan mereka, mengingat pengeboman Amerika Serikat atas *barrio* Chorrillo selama operasi penggulingan diktator yang dikenal dengan “Operasi *Just Cause*” dengan ribuan korban—ini adalah kejahatan-kejahatan kita, Amerika Serikat, sehingga tidak ada penghitungan yang serius.<sup>328</sup>

Kekejaman-kekejaman 11 September merupakan peristiwa sejarah karena sasaran-sasarannya. Bagi Amerika Serikat, ini adalah kali pertamanya sejak Inggris membakar habis Washington pada 1814, ketika wilayah nasionalnya betul-betul berada dalam serangan serius, bahkan sangat mengancam. Tidak perlu meninjau kembali tindakan yang sudah dilakukan pada yang lainnya sejak 2 abad lalu. Bagi Eropa, nasib sial ini jauh lebih dramatis. Sambil menaklukkan sebagian besar isi dunia, meninggalkan jejak teror dan pengrusakan, orang-orang Eropa tetap aman dari serangan yang dilakukan oleh korban-korbannya, dengan pengecualian-pengecualian yang sangat sedikit dan terbatas. Tak mengherankan jika kemudian Eropa dan bagian-bagiannya terkejut atas

kejahatan 11 September, sebuah pelanggaran dramatis terhadap norma-norma atas sikap yang dapat diterima selama ratusan tahun.

Tidak mengejutkan ketika mereka tetap berpuas hati, mungkin sedikit menyesal, terhadap penderitaan-penderitaan yang lebih mengerikan kemudian. Korban-korbannya, bagaimanapun, adalah warga negara Afganistan yang miskin dan sengsara—“suku-suku yang tidak beradab,” menurut Winston Churchill dengan jijik, ketika ia memerintahkan penggunaan gas beracun untuk “menyebarkan teror” di antara mereka, 80 tahun yang lalu, mengumumkan “mudah tersinggungnya” orang-orang bodoh berhati lembut yang gagal memahami bahwa senjata kimia hanyalah “penerapan ilmu pengetahuan modern dalam perang modern” dan harus digunakan “untuk mempercepat pemusnahan ketidakteraturan yang berlaku di daerah perbatasan.”<sup>329</sup>

Pendapat-pendapat serupa kini terdengar lagi. Para editor *New Republic*, yang beberapa waktu lalu meminta bantuan militer lebih untuk “Para fasis bergaya-Latin ... tak peduli seberapa banyak yang dibunuh” karena “ada prioritas-prioritas Amerika Serikat yang lebih tinggi dibandingkan dengan hak asasi manusia orang-orang Salvador”, kini menjelaskan bahwa “Operasi Kebebasan Abadi bukanlah intervensi kemanusiaan.” Dari pengamatan yang tepat, mereka menyimpulkan bahwa “Jika kita meninggalkan sebuah negara dalam sebuah kekacauan yang tidak lagi menjadi sebuah basis operasi yang melawan kita, kita harus mencapai tujuan-tujuan

yang diperlukan,” dan harus “melepaskan obsesi dalam membangun negara” untuk mencoba memperbaiki yang telah kita lakukan pada Afganistan selama 20 tahun, yang bukan menjadi perhatian kita.<sup>330</sup>

Sementara ada yang bersedia untuk tenggelam sampai ke tingkat itu, tetaplah benar bahwa kekejaman-kekejaman yang dilakukan terhadap warga Afganistan membawa sedikit stigma moral, untuk satu alasan, karena praktik semacam itu sudah sangat akrab di sepanjang sejarah bahkan ketika tidak ada dalih selain keserakahan dan dominasi. Dan, balas jasa tidak mengenal batas. Karena, ada begitu banyak contoh historis, tanpa perlu menyebut otoritas dari teks-teks suci yang diajarkan kepada kita untuk kita puja-puja.

Aspek-aspek lain dari penerimaan yang memuaskan atas kekejaman-kekejaman digambarkan oleh Alexis de Tocqueville dalam laporannya mengenai kejahatan-kejahatan besar pemusnahan etnis di benua ini, pengusiran terhadap orang-orang Cherokee. Ia sangat tertarik mengetahui bahwa Amerika tidak hanya mampu “memusnahkan ras Indian” setelah “mencabut hak-haknya”, tetapi juga melakukannya “dengan gembira, tenang, sesuai hukum, penuh kemanusiaan, tanpa menumpahkan darah, dan tanpa melanggar satu pun prinsip moral di mata dunia.” Oleh karena itulah, “sangat tidak mungkin menghancurkan orang dengan tetap lebih menghormati hukum kenamusiaan,” ungkapnya dengan heran.<sup>331</sup>

Itu adalah gambaran yang cukup jelas tentang peristiwa yang telah berlangsung di depan mata kita. Misalnya, di kamp pengungsian Maslakh di dekat Herat, tempat ratusan ribu orang diberitakan kelaparan, lusinan orang sekarat setiap hari karena kedinginan dan kelaparan. Mereka hidup di ambang kematian, bahkan sebelum ada peristiwa pengeboman, yang merampas mereka dari bantuan yang sangat mereka butuhkan. Kamp itu terus menjadi “kamp yang dilupakan” saat kami bertemu lagi, 3 bulan setelah 11 September. Wartawan veteran Christina Lamb melaporkan bahwa tempat itu lebih “mengerikan” dari apa pun yang ada dalam ingatannya, setelah “menyaksikan kematian dan kesengsaraan di kamp-kamp pengungsian di beberapa tempat di Asia dan Afrika.” Sebulan kemudian, jumlah korban meninggal yang dilaporkan telah meningkat dua kali lipat sampai angka 100 korban per hari dan petugas penyalur bantuan memperingatkan bahwa kamp tersebut “berada di tepi jurang bencana kemanusiaan seperti Etiopia” ketika jumlah para pengungsi di kamp tersebut terus meningkat, diperkirakan tiga perempat dari populasi tersebut sejak September.<sup>332</sup>

Penghancuran hidup ini tidak terdengar dan kebanyakan tidak terlihat, dan dengan mudah orang memilih untuk tetap melupakannya. Pandangan yang lebih menyebalkan adalah penyangkalan ini—atau lebih buruk lagi bahkan ejekan—terhadap upaya-upaya untuk membawa tragedi-tragedi ini supaya bisa dilihat banyak orang sehingga tekanan-tekanan terhadap mereka bisa



mengurangi rasa sakit mereka. Toleransi atas “kekejaman yang begitu jelas” yang disebut Lamb ini semata mencerminkan fakta bahwa beginilah kekuasaan besar berhubungan dengan yang lemah dan tak berdaya, sama sekali tidak terpuji.

Kita tidak berhak untuk memiliki bayangan-bayangan tentang premis-premis rencana perang di Afganistan dan para komentator yang mengikutinya. Itu semua didasarkan oleh sebuah dugaan yang tidak bisa dibandingkan lagi bahwa ancaman pengeboman, lalu pelaksanaan pengeboman, akan meningkatkan angka risiko kematian warga Afganistan karena kelaparan, penyakit, dan tidak adanya perlindungan. Pers memberitakan dengan begitu lemah lembut bahwa angka-angka tersebut mungkin meningkat sampai 50%, kira-kira mencapai 7,5 juta orang: tambahan untuk 2,5 juta orang.<sup>333</sup> Tidak ada komentar yang datang dari laporan bahwa Washington telah meminta (dari Pakistan) pemusnahan rombongan truk yang membawa persediaan makanan dan lainnya untuk warga sipil Afganistan,”<sup>334</sup> jutaan dari mereka sudah di ambang kelaparan.

Permohonan untuk menghentikan pengeboman sehingga pengiriman makanan dan bantuan lainnya bisa lebih mudah ditolak tanpa komentar apa-apa, bahkan kebanyakan tanpa laporan apa pun. Semua ini datang dari petinggi-petinggi PBB, agensi yang membawa bantuan, dan lainnya yang memang ada di posisi mengetahui informasi tersebut. Para ahli Afganistan setuju memberikan peringatan bahwa penarikan sukarelawan

dan pengurangan penyediaan makanan akan mengakibatkan “jutaan warga Afganistan ... berisiko mati kelaparan”. Akhir September, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB telah memperingatkan bahwa lebih dari 7 juta orang akan mengalami kelaparan jika aksi militer yang mengancam dilakukan, dan setelah pengeboman dimulai, mereka juga menyatakan bahwa ancaman “kehancuran kemanusiaan” sangat “mengerikan”, dan bahwa pengeboman telah merusak tanaman yang menyediakan 80% persediaan bahan pangan, sehingga akibatnya pada tahun depan bisa lebih mengerikan lagi.<sup>335</sup>

Kita tidak tahu yang akan terjadi kemudian. Namun, kami cukup tahu dugaan-dugaan tentang dasar rencana-rencana itu dilakukan, dan dikomentari. Sederhananya, dugaan-dugaan inilah yang menginformasikan kepada kita tentang bentuk dunia yang ada di depan sana, apa pun hasil dari kasus sekarang ini. Fakta-fakta dasar biasanya telah dilaporkan, termasuk di dalamnya fakta bahwa sedikit sekali yang telah dilakukan untuk mengupayakan datangnya bantuan makanan dan bantuan lainnya, demi mereka yang sekarat di kamp-kamp pengungsian dan pemukiman pinggiran. Padahal, persediaan makanan dan bantuan lainnya ada serta tersedia, dan faktor utama yang menghambat pengiriman bantuan itu adalah kurangnya perhatian dan kemauan.

Terlebih lagi, akibat-akibat jangka panjang tetap tidak diketahui, jika sejarah menjadi panduan. Laporan kini sangat sedikit, dan konsekuensi-konsekuensinya tidak akan diselidiki besok. Melaporkan “kerusakan tambahan”

dengan kesalahan pengeboman merupakan hal yang bisa diterima, biaya perang yang tidak bisa dihindari. Namun, tidak dengan kerusakan secara sadar kepada warga Afganistan yang akan mati dalam diam, tanpa terlihat—bukan karena disengaja, melainkan karena itu bukan masalah bagi mereka, tingkat kebejatan moral yang lebih dalam. Jika kita menginjak seekor semut saat kita sedang berjalan, kita tidak sengaja membunuhnya. Orang tidak serta-merta mati karena kelaparan. Mereka bisa bertahan dengan memakan akar-akar dan rumput, dan jika anak-anak kurang gizi meninggal karena penyakit, siapa yang akan mencari penyebab-penyebab di balik semua itu? Pada masa depan, topik ini ada di luar agenda berdasarkan atas prinsip-prinsip penting: kita harus mencurahkan energi besar pada laporan yang sangat teliti atas kejahatan-kejahatan musuh-musuh resmi kita. Termasuk di dalamnya tidak hanya tentang siapa yang dibunuh, tetapi juga mereka yang mati akibat kebijakan-kebijakan yang dibuat. Dan, kita harus mengambil ketelitian cermat untuk menghindari hal tersebut mengenai kejahatan kita sendiri, mengadopsi prinsip-prinsip yang sangat mengesankan dari Alexis de Tocqueville. Ada ratusan halaman mengenai dokumentasi terperinci tentang penerapan prinsip-prinsip tersebut. Itu semua akan memberikan ucapan selamat datang yang mengejutkan jika kasus terbaru itu menjadi lebih berbeda.

Dan, kita harus mengingat bahwa kita tidak sedang mengamati semua ini dari Mars, atau menggambarkan kejahatan-kejahatan Atilla sang Hun. Ada begitu banyak

hal yang bisa kita lakukan sekarang, jika kita mau memilih.

Untuk mengetahui hal yang menunggu kita di depan dari cara pandang berbeda, mari bertanya apakah ada alternatif untuk mengambil jalan kekerasan yang menghancurkan dari kejauhan, sebuah cara yang mungkin secara alami datang pada mereka yang memiliki kekuatan sangat besar dalam komandonya, tanpa pencegah dari luar, dan kepercayaan diri atas kepatuhan mereka yang menjadi corong opini?

Ada banyak alternatif yang disarankan. Oleh Vatikan, misalnya, yang meminta untuk menggantungkan nasibnya pada ukuran-ukuran yang tepat untuk kejahatan tersebut, seberapa pun besarnya: jika seseorang merampok rumah saya, dan saya rasa saya tahu siapa yang melakukannya, saya tidak berhak mengejanya sambil membawa senapan, tetapi berhak membunuh orang-orang secara acak di kompleks tempat tinggalnya.

Atau, oleh sejarawan militer terkenal, Michael Howard, yang mengirimkan “serangan tajam” dalam pengeboman atas Afganistan pada 30 Oktober, tidak bisa disebut sukses atau gagal, tetapi perencanaannya: apa yang dibutuhkan adalah “operasi-operasi panjang dengan kekuatan pasukan polisi dan intelijen”, yakni “sebuah operasi polisi yang dilakukan di bawah perlindungan PBB atas nama komunitas internasional secara keseluruhan, melawan sebuah konspirasi kejahatan, yang anggotanya harus diburu dan dibawa ke hadapan Mahkamah Internasional.”<sup>336</sup>

Tentu saja ada contoh-contoh yang pernah terjadi sebelumnya, termasuk di dalamnya tindakan-tindakan terorisme internasional yang jauh lebih ekstrem dibanding tindakan teror 11 September: yaitu perang teroris Amerika Serikat melawan Nikaragua, mengambil satu contoh yang tidak kontroversial—tidak kontroversial menurut penilaian otoritas-otoritas tertinggi internasional, Mahkamah Internasional, dan Dewan Keamanan PBB. Upaya-upaya Nikaragua untuk melakukan langkah-langkah hukum gagal, di dunia yang dikuasai oleh kekerasan; tetapi tak seorang pun akan merintangi Amerika Serikat jika memilih mengikuti langkah hukum.

Bisakah tujuan-tujuan untuk menahan dan menghukum pelaku dicapai tanpa kekerasan? Mungkin saja. Kita tidak tahu apakah tawaran-tawaran Taliban untuk mendiskusikan penyerahan tawanan itu serius, karena mereka sudah dihilangkan untuk alasan-alasan yang sudah disebutkan. Hal sama tentang tujuan perang yang ditambahkan sebagai renungan segera setelah pengeboman dimulai: menggulingkan rezim Taliban.<sup>337</sup> Tak diragukan lagi ini akan menjadi prioritas yang tinggi bagi kebanyakan warga Afganistan, dan hal yang sama juga terjadi kepada banyak orang lain di seluruh dunia yang sengsara di bawah rezim-rezim bengis dan penindasan yang sangat buruk. Pertanyaan-pertanyaan mengenai taktik dan kemampuan, apakah ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencapai tujuan-tujuan terakhir itu?

Jelasnya, penyelidikan harus dimulai dengan orang-orang Afganistan: apa sikap dan pendapat mereka? Untuk menentukan pandangan-pandangan mereka jelas merupakan hal yang sulit, tentu saja, tetapi tidak mustahil secara keseluruhan. Ada banyak cara masuk akal yang bisa dilakukan.

Kita bisa mulai dengan berkumpulnya 1.000 pemimpin Afganistan di Peshawar pada akhir Oktober, beberapa dari mereka adalah orang buangan atau pengasingan, beberapa melakukan perjalanan melewati perbatasan sampai Afganistan, semuanya bertekad untuk menggulingkan rezim Taliban. Itu “memperlihatkan persatuan di antara tetua-tetua suku, cendekiawan-cendekiawan muslim, politisi-politisi, dan mantan pemimpin-pemimpin gerilyawan yang sangat jarang terjadi,” menurut laporan *New York Times*. Mereka bersepakat “mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan serangan-serangan udara”, memohon media internasional untuk menuliskan permintaan mereka agar mengakhiri “pengeboman terhadap orang-orang tak berdosa”, dan “meminta Amerika Serikat untuk mengakhiri pengeboman di Afganistan”. Mereka mendesak agar langkah-langkah lain dilakukan untuk menggulingkan rezim Taliban yang dibenci, sebuah tujuan yang mereka percaya bisa dicapai tanpa pembantaian dan perusakan.<sup>338</sup>

Pesan serupa disampaikan oleh pemimpin oposisi Afganistan, Abdul Haq, yang sangat dihormati di Washington. Tepat sebelum ia memasuki Afganistan, yang kelihatannya tanpa dukungan Amerika Serikat, dan

akhirnya ditangkap serta dibunuh, ia mengecam pengeboman dan mengkritik Amerika Serikat karena menolak mendukung upaya-upayanya dan yang lainnya “untuk menciptakan sebuah revolusi di dalam Taliban”. Pengeboman itu merupakan “sebuah kemunduran besar untuk upaya-upaya tersebut,” ucapnya. Ia melaporkan kontak-kontak dengan pemimpin tingkat dua Taliban, dan para tetua suku yang merupakan mantan Mujahiddin, dan mendiskusikan agar upaya-upaya itu bisa dilakukan, serta menghubungi Washington untuk membantu mereka dengan pendanaan dan dukungan lainnya, selain merusaknya dengan bom.

Menurut Abdul Haq, Amerika Serikat sedang berusaha menunjukkan kekuatannya, mencetak kemenangan dan menakuti setiap orang di dunia. Mereka tidak peduli dengan penderitaan warga Afganistan atau jumlah orang yang akan kita korbakan. Dan, kita tak suka ini. Karena warga Afganistan dibuat sengsara seperti ini sebagai balasan untuk orang-orang Arab fanatik, padahal kita semua tahu, siapa yang membawa orang-orang Arab fanatik ini masuk ke Afganistan pada 1980-an, mempersenjatai mereka dan memberi mereka sebuah pangkalan. Amerika Serikat dan CIA-lah yang membawa mereka. Dan, orang-orang Amerika Serikat yang melakukan semua itu memperoleh medali serta karier yang bagus, sementara warga Afganistan menderita selama bertahun-tahun karena orang-orang Arab serta sekutu-sekutu mereka. Kini, ketika Amerika Serikat diserang, bukannya menghukum orang-orang Amerika

Serikat yang melakukan hal ini, mereka malah menghukum orang-orang Afganistan.<sup>339</sup> Apa pun itu, saya pikir kata-katanya ada benarnya. Kita juga bisa melihat di mana-mana mengenai pendapat-pendapat warga Afganistan. Ada perhatian terhadap nasib perempuan di Afganistan. Bahkan, hal ini sampai ke Ibu Negara. Mungkin ini akan diikuti dengan perhatian terhadap keadaan buruk perempuan di tempat lain di Asia Tengah dan Selatan suatu hari nanti, yang sayangnya, tidak begitu berbeda dengan banyak tempat seperti hidup di bawah rezim Taliban, termasuk demokrasi-demokrasi paling dinamis sekalipun.

Ada banyak sumber ahli dan tepercaya mengenai hal ini, jika kita mau mencari. Dan, sebuah permulaan radikal semacam itu dari praktik masa lalu setidaknya akan memberikan kredibilitas terhadap kebiadaban yang dikagumi atas praktik-praktik yang dilakukan Taliban sejak mengabdikan pada tujuan-tujuan propaganda Amerika Serikat. Tentu saja, tidak akan ada orang waras yang menyarankan intervensi militer luar negeri oleh Amerika Serikat atau negara-negara lain untuk meralat hal tersebut dan kejahatan-kejahatan buruk lainnya di negara-negara yang merupakan sekutu dan klien Amerika Serikat. Masalah-masalah ini sangat mengerikan, tetapi harus diselesaikan dari dalam, dengan bantuan dari luar jika bersifat membangun dan jujur, bukan semata munafik dan egois.

Akan tetapi, sejak perlakuan kejam terhadap perempuan-perempuan di Afganistan memperoleh



perhatian, kelihatannya sikap-sikap perempuan Afganistan terhadap pilihan-pilihan kebijakan juga harusnya menjadi perhatian utama. Pasti akan ada beragam pendapat dan tidak mudah diselidiki. Namun, tentu saja hal itu bukannya mustahil untuk menentukan apakah para ibu di Maslakh memuji pengeboman atau justru setuju dengan mereka yang mengungsi dari rumahnya ke kamp-kamp pengungsian yang menyedihkan di bawah ancaman bom, serta mengekspresikan harapan pahit bahwa “bahkan orang-orang Amerika Serikat yang paling kejam sekalipun harusnya memiliki rasa kasihan kepada negara kita yang sudah hancur ini” sekaligus menahan diri dari pengeboman yang mengancam, yang sudah menyebabkan kematian dan bencana.<sup>340</sup>

Dan, perempuan-perempuan Afganistan memang tidak punya suara di mana-mana. Ada sebuah organisasi perempuan-perempuan pemberani yang begitu terdepan dalam berjuang membela hak-hak asasi perempuan selama 25 tahun, yaitu RAWA atau Revolutionary Association of the Woman of Afghanistan (Asosiasi Revolusioner Perempuan Afganistan), yang melakukan pekerjaan-pekerjaan mengagumkan. Pemimpinnya dibunuh oleh orang Afganistan yang berkolaborasi dengan orang-orang Rusia pada 1987, tetapi mereka terus melanjutkan pekerjaan mereka di Afganistan dengan risiko kematian dan diasingkan. Mereka cukup vokal bersuara. Seminggu setelah pengeboman dimulai, misalnya, mereka mengeluarkan pernyataan publik yang bisa menjadi halaman depan semua surat kabar yang menaruh

perhatian nyata terhadap perempuan Afganistan, bukan sekadar untuk kepatutan semata.

Pernyataan RAWA pada 11 Oktober berjudul: “Taliban harus digulingkan oleh revolusi negara Afganistan” dan lanjutannya sebagai berikut:

Lagi, karena pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang fundamentalis yang menjadi pembunuh, orang-orang kita terperangkap di mulut monster berupa perang dan kehancuran yang mengerikan. Amerika Serikat, dengan membentuk koalisi internasional melawan Osama dan kolaborator Taliban-nya, dan dalam pembalasan terhadap serangan teroris 11 September, telah melancarkan agresi dahsyat terhadap negara kita .... (Apa) yang telah kita saksikan selama 7 hari terakhir ini tidak diragukan lagi akan menumpahkan darah begitu banyak perempuan, laki-laki, anak-anak, serta orang tua dan muda negara kita.

Pernyataan tersebut mendesak “pemusnahan wabah Taliban dan Al-Qaeda” dengan “revolusi total” dari orang-orang Afganistan sendiri yang “bisa mencegah terulangnya bencana yang telah menimpa negara kita ....”

Di sebuah deklarasi lain pada 25 November, di sebuah demonstrasi organisasi-organisasi perempuan di Islamabad pada Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, RAWA mengutuk Aliansi

Utara yang didukung Amerika Serikat/Rusia untuk “catatan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang seburuk Taliban” dan meminta PBB untuk “membantu Afganistan, bukan Aliansi Utara,” peringatan-peringatan yang dinyatakan kembali di konferensi nasional Asosiasi Perempuan Demokratik seluruh India pada hari yang sama.<sup>341</sup>

Mungkin warga Afganistan yang telah berjuang untuk kebebasan dan hak-hak asasi perempuan selama bertahun-tahun tidak paham betul mengenai negaranya, dan harus menyerahkan tanggung jawab masa depan negaranya kepada orang asing, yang bahkan tidak bisa meletakkan negaranya di sebuah peta dunia beberapa bulan yang lalu, bersama dengan mereka yang telah membantu menghancurkan negara itu pada masa lalu. Mungkin, tetapi itu belum jelas.

Situasi ini mengingatkan kita pada perang Irak, ketika oposisi Irak dihalangi dari media dan jurnal-jurnal pendapat, terlepas dari jurnal-jurnal yang tak sepakat di antaranya. Mereka menentang keras kampanye pengeboman Amerika Serikat terhadap Irak dan menuduh Amerika Serikat yang memilih diktator militer untuk menggulingkan Saddam melalui revolusi internal—sebagaimana yang diakui secara publik, ketika Bush, Sr. kembali berkolaborasi dengan mantan teman dan sekutunya Saddam Hussein dalam melakukan kejahatan-kejahatan besar, saat Saddam dengan brutal menyerang revolusi Syi'ah di selatan yang mungkin bisa menggulingkan diktator pembunuh itu di bawah mata

militer Amerika Serikat, yang memiliki kontrol penuh terhadap kawasan tersebut, sementara Washington menolak memberi akses bagi jenderal-jenderal Irak yang memberontak untuk merebut persenjataan.

Pemerintahan Bush mengonfirmasi bahwa tidak ada kesepakatan dengan pemimpin-pemimpin oposisi Irak: “Kami rasa pertemuan politik dengan mereka ... tidak tepat bagi kebijakan kita saat ini,” juru bicara Departemen Luar Negeri, Richard Boucher mengumumkan pada 14 Maret 1991, ketika Saddam sedang membunuh pemberontak-pemberontak selatan.<sup>342</sup> Itu menjadi kebijakan pemerintah yang telah lama berlaku. Hal yang sama mengenai pilihan kekerasan atas upaya diplomatik yang mungkin bisa dilakukan. Kebijakan-kebijakan yang terus berlangsung pada tahun-tahun berikutnya, sampai sekarang, dan cukup wajar untuk alasan-alasan yang sudah disebutkan oleh Abdul Haq.

Cara lain yang masuk akal untuk menilai prospek masa depan adalah dengan meninjau kembali tindakan-tindakan yang dilakukan para pemimpin saat ini ketika mereka melancarkan perang pertama terhadap terorisme 20 tahun lalu: ada begitu banyak bukti tentang pencapaian mereka di Amerika Tengah, Afrika Selatan, Timur Tengah, dan Asia Selatan, semuanya disertai retorika dan nafsu agung yang sama, yang kita dengar hari ini.

Seharusnya tidak perlu ada tinjauan kembali terhadap catatan memalukan itu. Namun, hal itu membawa pelajaran-pelajaran penting tentang gambaran masa

depan, dan juga fakta bahwa topik ini diabaikan dengan saksama oleh orang-orang yang memuji tindakan-tindakan saat ini dan pada masa depan, meskipun—atau mungkin karena—catatan itu sangat relevan.

Pada akhir dekade 1980-an yang mengerikan, penangkis dari luar terhadap kekerasan sudah tidak ada. Bagi korban-korbannya, hancurnya tirani Soviet merupakan kemenangan dan kebebasan luar biasa, meskipun kemenangan itu dinodai oleh kengerian-kengerian baru. Bagi yang lainnya, konsekuensi-konsekuensinya lebih rumit. Katakter dasar masa setelah Perang Dingin mulai terbuka dengan cepat: semua hampir sama, dengan dalih dan taktik yang diperbaharui.

Beberapa minggu setelah runtuhnya Tembok Berlin, Amerika Serikat menginvasi Panama, membunuh ratusan atau bahkan ribuan orang, melakukan veto terhadap dua putusan Dewan Keamanan PBB, dan menculik seorang penjahat yang dipenjara di Amerika Serikat untuk kejahatan-kejahatan yang ia lakukan saat masih berada di bawah CIA sebelum akhirnya melakukan hanya satu kejahatan yang penting: ketidakpatuhan.

Pola peristiwa-peristiwa itu cukup familier, tetapi ada sedikit perbedaan. Salah satunya ditunjukkan oleh Elliott Abrams yang mengaku bersalah untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan ketika ia masih menjadi pegawai Departemen Luar Negeri pada masa pemerintahan Reagan, dan kini ditunjuk sebagai ahli HAM di Dewan Keamanan Nasional. Ketika invasi dimulai, ia mengomentari bahwa untuk kali pertamanya setelah

bertahun-tahun, Amerika Serikat bisa melakukan serangan dengan tidak memedulikan reaksi-reaksi Rusia. Juga ada dalih-dalih baru: intervensi ini merupakan perlindungan atau pertahanan terhadap pengedar narkoba Hispanik, bukan terhadap orang-orang Rusia yang memobilisasi di Managua, yang berjarak 2 hari perjalanan dari Harlingen, Texas.

Beberapa bulan kemudian, pemerintah Bush menunjukkan rancangan pendanaan Pentagon yang baru, sebuah peristiwa yang cukup penting karena ini adalah kali pertamanya mereka tidak bergantung pada dalih bahwa orang-orang Rusia akan datang menyerang.<sup>343</sup> Pemerintah memohon pendanaan yang sangat besar untuk militer, seperti sebelumnya, dan sebagian untuk alasan-alasan yang sama. Sehingga, penting untuk mendukung “pangkalan industri pertahanan” (atau industri teknologi tinggi), dan untuk tetap mempertahankan pasukan-pasukan intervensi yang ditujukan khususnya untuk Timur Tengah karena “nasib dunia bebas dalam penyediaan energi berasal dari kawasan yang sangat penting ini.”

Akan tetapi, ada sebuah perubahan: di kawasan yang sangat penting ini “ancaman-ancaman terhadap kepentingan-kepentingan kita” yang membutuhkan pertempuran militer secara langsung “tidak bisa diletakkan di pintu Kremlin,” tidak seperti propaganda bertahun-tahun sebelumnya. Ancaman-ancaman juga tidak bisa diletakkan di pintu Saddam: Jagal Baghdad ini masih seorang teman dan sekutu yang berguna, belum

juga melakukan kejahatan berupa ketidakpatuhan. Sebaliknya, ancamannya adalah nasionalisme pribumi, seperti yang sudah-sudah.

Masalah-masalah membawa ancaman-ancaman yang lebih besar juga. Bukan Rusia, melainkan “tiruan teknologi yang terus berkembang” dari kekuatan dunia ketiga yang membuat kita harus mempertahankan dominansi militer secara penuh di seluruh dunia, meskipun tanpa “latar belakang persaingan adidaya”. Konfrontasi Perang Dingin selalu menjadi latar belakang tentunya, tetapi lebih merupakan sebuah dalih saja, bukan alasan. Seperti seruan Rusia kepada Amerika Serikat untuk menjustifikasi kejahatan-kejahatan mereka dalam daerah kekuasaan sendiri. Musuh sebenarnya adalah nasionalisme independen (yang disebut “radikal”) di Selatan, yang kini diakui diam-diam, setelah dalih-dalih tradisional kehilangan fungsinya. Catatan dokumenter dan sejarah memberikan banyak sekali bukti untuk mendukung kesimpulan tersebut.

Konsekuensi lain dari hancurnya rekan junior dalam mengontrol dunia adalah pemusnahan ruang bagi nonblok, dan ukuran kemerdekaan terbatas sesuai yang mereka bolehkan. Satu indikasinya adalah pengurangan drastis bantuan luar negeri, terutama di Amerika Serikat, yang mana kategori-kategorinya hampir hilang, bahkan ketika kita menghitung komponen yang paling besar, yang ditujukan ke sebuah negara kaya untuk alasan-alasan strategis, dan ke Mesir karena berkolaborasi di bisnis yang sama. Merosotnya pilihan-pilihan ini diketahui

sepenuhnya. Presiden Mahathir Mohammad dari Malaysia bersuara untuk banyak orang ketika mengatakan bahwa:

Secara paradoks, kehancuran paling besar bagi kita, yang telah selalu menjadi anti-komunis, adalah kalahnya komunisme. Akhir Perang Dingin telah mencabut satu-satunya pengaruh yang kita miliki—pilihan untuk menyeberang. Kini, kita tidak bisa bergantung kepada siapa pun.<sup>344</sup>

Bukan betul-betul sebuah paradoks, melainkan jalan wajar sejarah dunia yang sebenarnya.

Ketakutan-ketakutan serupa diekspresikan secara luas. Perang Teluk sangat dikecam di seluruh Amerika Selatan sebagai sebuah pertunjukan yang tak perlu tentang kekerasan, yang mengelakkan dari pilihan-pilihan diplomatik. Sejak saat itu, ada bukti yang bisa dipertimbangkan untuk interpretasi semacam itu. Banyak yang merasakan apa yang dilukiskan Abdul Haq hari ini: Amerika Serikat “sedang berusaha menunjukkan kekuatannya, mencetak kemenangan dan menakuti setiap orang di dunia,” membentuk “kredibilitas”. Diambilnya jalan untuk menggunakan pasukan militer yang sangat besar didesain untuk menunjukkan bahwa “Apa yang Kita Katakan Terjadi”, dalam kata-kata penuh kebanggaan yang diucapkan George Bush, ketika bom dan misil menghujani Irak.

Mereka yang tidak menangkap pesan tersebut



seharusnya tidak masalah ketika Bush kembali mendukung kekerasan dan kekejaman Saddam untuk memastikan “stabilitas”, sebuah kata kode untuk pengabdian terhadap kepentingan-kepentingan Amerika Serikat. Situasi umum di Amerika Selatan ditangkap oleh Kardinal Paulo Evarista Arns dari Sao Paulo: Di negara-negara Arab, ungkapnya, “kaum kaya berpihak bersama pemerintah Amerika Serikat, sementara *jutaan* orang miskin mengutuk agresi militer ini.” Di seluruh Dunia Ketiga, ia menambahkan, “ada kebencian dan ketakutan: kapan mereka akan memutuskan untuk menginvasi kita,” dan dengan dalih apa?<sup>345</sup>

Reaksi umum terhadap pengeboman di Serbia juga serupa. Dan lagi, ada bukti nyata bahwa pilihan-pilihan perdamaian mungkin bisa dikejar, untuk menghindarkan kesengsaraan lebih. Dalam kasus ini, ada pernyataan resmi dan berulang bahwa motifnya adalah untuk membangun “kredibilitas” dan memastikan “stabilitas”. Susah menerima dengan serius pernyataan bahwa tujuan tambahan adalah untuk menghindari pembersihan etnis dan kekejaman-kekejaman yang mengikuti mundurnya monitor-monitor (atas keberatan-keberatan warga Serbia yang tidak dilaporkan) dan pengeboman yang dilakukan segera setelahnya—sebuah konsekuensi “yang mudah ditebak”, sebagaimana diberitahukan pemimpin jenderal kepada pers begitu pengeboman dimulai, kemudian menyatakan lagi bahwa ia tidak tahu tujuan-tujuan perang yang seperti itu.

Catatan dokumen yang sangat banyak dari Departemen Luar Negeri, OSCE, pemerintah Inggris, dan sumber-sumber lain dari Barat, semakin memperkuat kesimpulan-kesimpulan tersebut. Mungkin inilah sebabnya catatan-catatan yang jelas ini diabaikan secara konsisten dalam literatur luas topik ini. Bahkan bagi negara-negara klien yang paling loyal sekalipun, pengeboman ini dikutuk sebagai kembalinya diplomasi tradisional kapal meriam “yang ditutupi oleh kebenaran-kebenaran moralistis” dalam gaya tradisional (analisis militer Israel yang dihormati, Amos Gilboa, sama sekali bukan suara yang terasing).<sup>346</sup>

Orang-orang Amerika dengan hati-hati terlindungi dari pendapat dunia dan diskusi kritis mengenai hal tersebut, tetapi kita tidak perlu mengikuti pembatasan-pembatasan tersebut.

Kita juga tidak melakukan apa-apa bagi diri kita sendiri dengan mengabaikan dokumen-dokumen publik yang menjelaskan secara masuk akal cara berpikir para perencana itu. Mereka memahami betul bahwa dunia ini memiliki tiga kutub dalam istilah ekonomi—dengan kekuatan ekonomi yang susah dibandingkan di Amerika Utara, Eropa, dan Asia—tetapi secara radikal semua ini satu kutub dalam kapasitasnya mengambil jalan kekerasan dan penghancuran. Dan, seharusnya tidak membuat kita terkejut saat menemukan bahwa fakta-fakta ini secara khusus masuk ke dalam perencanaan.

Bahkan, sebelum 11 September, Amerika Serikat telah mengeluarkan lebih banyak uang untuk “pertahanan” dari

15 negara<sup>347</sup>—yang seperti biasa, berarti “penyerangan”. Dan, ini berada jauh di depan dalam teknologi militer yang canggih. Anggaran militer meningkat tajam setelah 11 September, saat pemerintah mengeksploitasi ketakutan dan kemarahan warga untuk menggempur melalui langkah-langkah besar yang mereka tahu akan membangkitkan oposisi tanpa seruan atas “patriotisme”—yang tentu saja boleh diabaikan oleh mereka yang berkuasa, karena yang lainnya harus pasif dan pasrah.

Termasuk di dalamnya adalah langkah-langkah untuk memperkuat otoritas negara yang berkuasa tempat “konservatisme” sangat dijalankan, di antara mereka, meningkatnya pengeluaran militer untuk memperluas perbedaan antara Amerika Serikat dan yang lainnya di dunia. Di dalamnya adalah rencana-rencana untuk melanjutkan “perlombaan senjata” sampai ke luar angkasa—sebuah “perlombaan” dengan hanya satu kompetitor saja—melanggar Perjanjian Luar Angkasa 1967 dan kewajiban-kewajiban internasional lainnya. Pertahanan Rudal Balistik (BMD—Ballistic Missile Defence) hanya sebuah komponen kecil, dan bahkan ini dipahami sebagai senjata penyerang: “bukan semata sebuah *tameng*, tetapi *alat* yang bisa digunakan untuk menyerang,” jelas perusahaan riset RAND, menggemakan bukan hanya pikiran-pikiran, melainkan juga kata-kata pemerintah Tiongkok, yang secara masuk akal, menganggapnya sebagai senjata yang diarahkan untuk melawan mereka. Analisis strategis menggambarkan program itu sebagai

sebuah langkah untuk membangun “hegemoni” global Amerika Serikat, yang merupakan kebutuhan dunia, jelas mereka, menirukan pendahulu-pendahulu mereka sebelumnya.

Program-program yang jauh lebih luas mengenai militerisasi luar angkasa dijelaskan dalam dokumen-dokumen publik tingkat tinggi sebagai langkah wajar berikutnya dalam memperluas kekuasaan negara. Angkatan darat dan laut diciptakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan komersial dan investasi, menurut Komando Luar Angkasa Clinton, dan batas selanjutnya adalah luar angkasa, untuk mengejar tujuan-tujuan yang sama. Namun, kali ini akan berbeda. Angkatan Laut Inggris bisa diserang oleh Jerman, yang akibatnya tidak perlu kita diskusikan. Kendati demikian, Amerika Serikat akan menjadi sangat kuat serta berkuasa sehingga tidak akan ada pasukan yang melawannya, begitulah yang mereka nyatakan.

Dominansi besar ini penting untuk alasan-alasan teknis yang sudah diketahui bersama. Bahkan, BMD membutuhkan penghapusan senjata-senjata antisatelit sebagai lawan potensial. Amerika Serikat lalu harus mencapai “dominansi penuh”, memastikan bahwa teknologi antisatelit itu tidak akan pernah ada. Tangan besi diperlukan untuk alasan-alasan lain. Perancang-perancang militer Amerika Serikat berbagi penilaian dengan komunitas intelijen dan para ahli dari luar bahwa apa yang secara menyesatkan disebut sebagai “globalisasi” akan mengarah pada pembagian besar antara “yang

punya” dan “yang tidak punya”—berlawanan dengan doktrin, tetapi sejalan dengan kenyataan. Dan, penting untuk mengontrol elemen-elemen yang susah dikendalikan: dengan membangkitkan ketakutan, atau dengan penggunaan mesin pembunuh yang sangat merusak, yang diluncurkan dari luar angkasa, mungkin bertenaga nuklir dan pemicu dengan sistem kontrol otomatis, sehingga meningkatkan kemiripan dengan hal yang disebut sebagai “kecelakaan normal”: kesalahan-kesalahan yang tidak bisa ditebak karena semua sistem yang rumit adalah subjek.

Program-program ini secara signifikan meningkatkan bahaya kerusakan yang tidak bisa dikontrol. Ini juga cukup masuk akal dalam kerangka institusi dan ideologi besar, yang mendudukkan hegemoni di atas kelangsungan hidup. Terlebih, ada banyak contoh sepanjang sejarah Perang Dingin dan masa sebelumnya. Perbedaannya sekarang adalah hal yang dipertaruhkan jauh lebih besar. Jadi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keberlangsungan hidup spesies manusia berada dalam bahaya.

Menurut saya, beberapa prospek realistik itu mungkin terjadi jika kecenderungan sekarang ini terus berlangsung, meskipun tidak ada alasan bagi semua itu untuk terjadi. Berita baiknya adalah bahwa sistem kekuasaan pemerintah sangat rapuh, dan mereka tahu itu. Ada upaya besar untuk memanfaatkan kesempatan sekarang untuk menerapkan program-program keras dan kurang maju dan untuk menetralkan gerakan-gerakan massa yang

telah terbentuk di seluruh dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada alasan untuk menyerah pada upaya-upaya tersebut dan ada banyak alasan untuk tidak menyerah. Ada banyak pilihan yang tersedia. Yang dibutuhkan, selalu, adalah keinginan dan pengabdian untuk mencapainya.

# 7

## Amerika Serikat/Israel-Palestina

(Mei 2001)

---

**F**ASE konflik terbaru Israel-Palestina dimulai pada 29 September 2000, pada hari beribadah umat Muslim, yaitu Jumat, ketika Perdana Menteri Ehud Barak mengirimkan polisi dan militer yang mengintimidasi dan dalam jumlah besar ke wilayah Al-Aqsa. Seperti yang bisa ditebak, hal itu menyebabkan bentrokan saat ribuan orang keluar dari masjid, menewaskan beberapa warga Palestina dan melukai 200 orang.<sup>348</sup> Apa pun maksud Barak, hampir tidak ada langkah yang lebih efektif lagi untuk menciptakan sebuah panggung lanjutan yang mengejutkan, khususnya setelah kunjungan Ariel Sharon dan rombongan militernya ke wilayah Al-Aqsa 1 hari sebelumnya, yang mungkin lewat begitu saja tanpa konsekuensi serius.

Peristiwa-peristiwa pembuka ini mendasari pola kemudian. “Selama hari-hari penting ini, tidak ada bukti

tembakan dari warga Palestina,” menurut temuan penyelidikan penting PBB.<sup>349</sup> Beberapa bulan berikutnya, sepanjang para penyelidik bisa menentukan, “IDF (Tentara Israel), beroperasi di balik kubu pertahanan dengan persenjataan yang lebih unggul, tidak mengalami korban serius sebagai akibat dari demonstrasi-demonstrasi warga Palestina, dan lebih jauh lagi, tentara-tentara mereka terlihat tidak berada dalam bahaya yang mengancam nyawa selama berlangsungnya peristiwa tersebut,” ketika mereka membunuh ratusan warga Palestina dan memaksakan sebuah rezim yang jauh lebih kejam daripada sebelumnya, menundukkan populasi penduduk dengan rangkaian hukuman dan penghinaan yang kejam, yang menjadi tanda pendudukan mereka selama bertahun-tahun.<sup>350</sup> Laporan PBB menemukan bahwa:

Sebagian besar korban-korban Israel diakibatkan oleh insiden di jalan-jalan pemukiman dan di titik pengecekan yang terisolasi ... sebagai sebuah konsekuensi pemukiman, dan gangguan-gangguan yang secara tidak langsung merupakan akibat dari sana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban harus diambil atas kekerasan para pendatang terhadap warga negara Palestina di wilayah perbatasan pemukiman, dan atas keterlibatan IDF dalam kekerasan tersebut.



Tindakan-tindakan terbaru, bersama dengan yang lebih dulu, telah ditinjau ulang secara terperinci dan dicela oleh organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia internasional. Seperti laporan penyelidikan PBB, kajian-kajian ini nyata-nyata diabaikan di Amerika Serikat.

Laporan-laporan organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia menerima perhatian besar ketika berguna secara doktrinal, bukan sebaliknya. Mengutip hanya ilustrasi yang paling baru saat saya menulis, pada April 2001, Human Rights Watch menerbitkan sebuah kajian mendetail yang secara khusus diabdikan untuk merekam kejahatan-kejahatan Israel di distrik Hebron, yang memiliki pola sama selama bertahun-tahun, tempat puluhan ribu warga Palestina telah dipenjara selama berbulan-bulan, sementara sekian ratus penghuni tetap di sana bebas menyiksa dan memermalukan warga Palestina, serta menghancurkan milik mereka di bawah perlindungan militer. Kajian ini dilaporkan dengan segera melalui layanan kawat. Hal ini disebutkan kali pertamanya (dan mungkin satu-satunya) di Amerika Serikat dalam paragraf di sebuah artikel *Washington Post* 5 hari kemudian.<sup>351</sup>

Pola peristiwa-peristiwa itu menegaskan sebuah fakta yang sangat penting sekali. Sangat menyesatkan sekali menggunakan frasa “Konflik Israel-Palestina”, seperti yang saya lakukan di awal: frasa yang seharusnya digunakan adalah Konflik “Amerika Serikat/Israel-Palestina.” Untuk alasan-alasan serupa, menyesatkan juga —dan secara khusus tidak tepat di Amerika Serikat—

untuk mengutuk “kejahatan-kejahatan Israel”, sebab praktik serupa juga tidak tepat dalam kasus kejahatan-kejahatan yang didukung Rusia di Eropa Timur, kejahatan-kejahatan di Amerika Tengah yang didukung Amerika Serikat (di sanalah praktiknya berasal) dan sekian banyak contoh lainnya.

Kesimpulan-kesimpulan ini digambarkan secara grafis dengan peristiwa-peristiwa pada hari-hari awal Intifada Al-Aqsa. Pada 30 September, IDF membunuh seorang anak berusia 12 tahun, Muhammad Al-Dirra, sebagai tanggapan terhadap lemparan batu (yang mana Dirra tidak terlibat) di dekat pemukiman kecil Israel di Netzarim, yang menjadi sebuah alasan pangkalan militer utama dan sistem jalan yang memotong Jalur Gaza menjadi dua, satu dari sekian banyak pembatas yang memisahkan Kota Gaza dari selatan (dan Mesir).

“Tentara IDF di balik *bunker* yang sangat terlindungi, berkali-kali menembaki ambulans-ambulans Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina yang berusaha mengevakuasi” anak-anak lelaki yang terluka parah dan korban-korban lainnya, menurut laporan Human Rights Watch. “Penembakan dari pos terdepan IDF terus berlangsung selama setidaknya 45 menit, meskipun selama waktu itu, tidak ada tembakan balasan dari pendemo Palestina atau polisi.” Ambulans-ambulans itu terus berusaha dengan sia-sia untuk “mengevakuasi sebagian besar warga Palestina yang terluka karena tembakan beruntun IDF dari balik bunker dan mungkin dari menara penembak jitu di pemukiman Netzarim.”

Tanggul tanah dibangun untuk “melindungi orang-orang dari tembakan penembak jitu dari pemukiman Netzarim.” Mahkamah Internasional menemukan bahwa IDF “rupanya bahkan menysasar orang-orang yang membantu menyelamatkan korban-korban yang terluka”, melaporkan bahwa pengemudi ambulans Bulan Sabit Merah Palestina “meninggal setelah pasukan Israel menembaknya tepat di dada” saat ia berusaha mengevakuasi para korban.<sup>352</sup>

Semuanya ini berkat dukungan langsung, pembiaran, dan pengabaian dari Amerika Serikat.

Keesokan harinya, pada 1 Oktober, “Pasukan khusus Israel menembaki dari posisi atap yang sangat terlindungi” menewaskan dua warga Palestina, tanpa menghadapi ancaman apa pun. Pada hari yang sama, Israel menaikkan tingkat kekerasan ketika “sebuah helikopter penembak milik IDF menembak membabi buta dan berulang-ulang di wilayah yang sangat dekat dengan rumah sakit lapangan (Bulan Sabit Merah Palestina) di Netzarim, mengacaukan operasi-operasi di sana,” sekurangnya 400 meter dari tempat terjadinya penembakan. Dan, di batas Mesir-Gaza, helikopter menembakkan misil yang menewaskan dua warga Palestina serta melukai puluhan orang. Keesokan harinya, pada 2 Oktober, helikopter-helikopter menembakkan misil ke bangunan-bangunan dan mobil-mobil di kawasan Netzarim menewaskan 10 warga Palestina dan melukai 35 orang.<sup>353</sup>

Helikopter-helikopter IDF adalah helikopter milik Amerika Serikat yang dipiloti oleh Israel. Kiriman

persediaan dari Amerika Serikat penting karena “sangat tidak praktis untuk membuat helikopter atau sistem persenjataan utama sejenis ini di Israel,” menurut laporan Menteri Pertahanan.<sup>354</sup>

Pada 3 Oktober, wartawan pembela dari koran paling prestisius di Israel memberitakan penandatanganan kesepakatan dengan pemerintahan Clinton untuk “pembayaran besar-besaran helikopter-helikopter militer oleh Angkatan Udara Israel dalam jangka 10 tahun”, bersama dengan suku cadang untuk helikopter-helikopter penyerang Apache yang kesepakatannya telah ditandatangani pada pertengahan September. Juga, pada pertengahan September, pers Israel memberitakan, Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan latihan bersama dengan IDF di Negev yang bertujuan untuk merebut kembali kawasan-kawasan yang telah dilimpahkan ke pemerintah Palestina. Angkatan Laut Amerika Serikat memberikan pelatihan dengan persenjataan karena IDF masih kekurangan, dan dalam “teknik-teknik bertempur Amerika”.<sup>355</sup>

Pada 4 Oktober, jurnal militer terkemuka di dunia memberitakan bahwa Washington telah menyetujui permintaan atas helikopter-helikopter Apache bersama dengan perlengkapan penyerangan yang lebih canggih. Pada hari yang sama, pers Amerika Serikat memberitakan bahwa helikopter-helikopter Apache menyerang kompleks apartemen dengan roket di Netzarim. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan para wartawan Eropa, pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa “Penjualan

persenjataan Amerika Serikat tidak disertai syarat bahwa senjata-senjata itu tidak bisa digunakan terhadap warga sipil. Kita tidak bisa menghakimi pemimpin Israel yang memerintahkan helikopter tempur itu.”

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih P.J. Crowley menambahkan bahwa “Kita tidak berada dalam posisi untuk memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh masing-masing dari kedua kubu itu,” meminta kedua kubu untuk saling mengendalikan diri. Beberapa minggu kemudian, pemimpin lokal Palestina, Hussein Abayat, terbunuh oleh sebuah misil yang diluncurkan dari helikopter Apache (bersama dengan dua perempuan yang sedang berdiri di dekat Hussein Abayat), ketika kampanye pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin lokal dimulai.<sup>356</sup>

Kesibukan helikopter-helikopter militer baru ke Israel di bawah kondisi tersebut dan dengan otorisasi penggunaan yang seperti itu benar-benar patut dijadikan berita. Namun, tidak ada berita atau komentar editorial sama sekali. Satu-satunya yang menyebutkan hal tersebut di Amerika Serikat adalah sebuah opini di Raleigh, Carolina Utara.<sup>357</sup> Penghukuman Amnesti Internasional atas penjualan helikopter-helikopter Amerika Serikat juga berlalu begitu saja. Penjualan itu terus terjadi pada bulan-bulan berikutnya, termasuk pengiriman pada Februari 2001, sebuah kesepakatan senilai 5 miliar dolar untuk helikopter-helikopter Boeing Longbow Apache, yang paling canggih di gudang persenjataan Amerika Serikat,

dicatat secara garis besar dalam berita bisnis Amerika Serikat.

Dengan gaya serupa, sebuah berita utama (17 Mei) memberitakan keengganan Presiden Bush untuk lebih “terlibat langsung” di konflik Israel-Palestina, dan ketidakmampuan pemerintahannya dalam mendukung laporan komite Mitchell dengan meminta Israel untuk membekuan pemukiman karena Perdana Menteri Sharon “secara filosofis menentang pengajuan itu.” Pada hari yang sama, dalam “Sekilas Info Dunia” beberapa baris laporan menyebutkan bahwa Korps Insinyur Tentara Amerika Serikat mulai membangun pangkalan militer Israel senilai 266 juta dolar (dibayar oleh Amerika Serikat) di Negev, sebuah simbol “komitmen terus-menerus Amerika Serikat terhadap keamanan Israel,” menurut pernyataan Duta Besar Martin Indyk.<sup>358</sup>

Yang diberitakan dengan baik, justru, adalah peringatan-peringatan keras Amerika Serikat terhadap Palestina untuk mengakhiri teror, karena “kami tidak memberikan hadiah pada kekerasan” (Duta Besar Indyk);<sup>359</sup> dan beberapa pernyataan resmi lainnya yang menyisahkan kekerasan serta mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap program pembunuhan Israel. Namun, sikap-sikap asli Washington terbuka sendiri dengan aksi-aksi yang dilakukannya. Ulasan tersebut berbicara untuk dirinya sendiri.

Tidak semua hal ini tidak biasa. Mempertimbangkan Israel-Palestina secara khusus, pola ini telah menjadi rutinitas selama lebih dari 30 tahun, semenjak Amerika

Serikat memisahkan dirinya sendiri dari konsensus internasional atas konflik tersebut. Meskipun fakta-fakta yang paling penting tidak ada di pemberitaan arus utama, dan kadang diabaikan, atau salah digambarkan bahkan di kajian-kajian akademis, fakta-fakta itu tidak kontroversial. Fakta-fakta tersebut justru memberikan latar belakang yang sangat diperlukan untuk pemahaman serius mengenai yang sedang terjadi sekarang.

Hubungan Amerika Serikat-Israel meningkat drastis setelah kemenangan militer Israel pada 1967. Latar belakangnya, berkenaan dengan kawasan ini, adalah tentang sumber-sumber energi yang tidak ada bandingannya. Muncul dari Perang Dunia II sebagai sebuah kekuatan global yang sangat dominan, Amerika Serikat melakukan rencana yang hati-hati dan canggih untuk mengelola sistem dunia dalam kepentingan-kepentingannya. Termasuk di dalamnya adalah kontrol efektif terhadap minyak di suatu kawasan, sebelumnya berbagi dengan Prancis dan Inggris. Prancis dikeluarkan, dan Inggris secara bertahap ditolak dari status “rekan junior”, dengan kata-kata penuh penyesalan pegawai Luar Negeri Inggris. Meskipun tidak ada pembicaraan tentang Rusia, dan tak ada keraguan kalau kemungkinan perang global merupakan unsur utama dalam rencana strategis, masalah paling dekat adalah ancaman nasionalisme kemerdekaan—sebuah fakta yang kini diakui, bahkan dalam dokumen-dokumen resmi.<sup>360</sup>

Intinya, Amerika Serikat mengambil alih kerangka kontrol Timur Tengah yang dibangun Inggris setelah

Perang Dunia I. Negara-negara dalam kawasan ini dipimpin oleh apa yang disebut Inggris sebagai “Kedok Arab”, lemah dan lunak. “Penyerapan” Inggris terhadap koloni-koloni “ditutupi dengan rekaan-rekaan hukum sebagai daerah perlindungan, lingkungan pengaruh, negara penyangga, dan lainnya,” sebuah langkah yang harganya lebih efektif dibandingkan penguasaan secara langsung. Ketika dibutuhkan, kekuatan Inggris akan siap. Amerika Serikat memodifikasi sistem dengan membentuk tingkat kedua “polisi lokal dalam patroli”, sebagaimana sebutan pemerintahan Nixon: polisi lokal yang memastikan keteraturan, terutama non-Arab, dengan polisi pusat di Washington dan pasukan cadangan Amerika Serikat-Inggris.

Sepanjang periode ini, Turki telah dijadikan pangkalan bagi kekuatan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Iran adalah yang lainnya, setelah upaya pemerintah nasionalis konservatif untuk mendapatkan kontrol atas sumber daya-sumber daya Iran digagalkan oleh kudeta militer Inggris-Amerika Serikat pada 1953. Pada 1948, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat terkesan dengan kecakapan militer Israel, menggambarkan negara baru itu sebagai kekuatan militer utama di kawasan tersebut setelah Turki. Israel bisa menawarkan cara-cara Amerika Serikat untuk “memperoleh keuntungan strategis di Timur Tengah yang akan menutup kerugian dari akibat-akibat kemunduran kekuasaan Inggris di wilayah tersebut,” menurut kesimpulan Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat.



Pada 1958, CIA menyarankan bahwa “akibat wajar yang logis” dari penentangan nasionalisme Arab “adalah untuk mendukung Israel sebagai satu-satunya kekuatan pro-Barat yang bisa diandalkan di Timur Tengah”. Pertimbangan ini diimplementasikan setelah 1967, ketika Israel menunjukkan pengabdian yang bernilai bagi Amerika Serikat dengan menghancurkan Gamal Abdul Nasser, simbol nasionalisme Arab, yang ditakuti dan dibenci sebagai “virus” yang mungkin bisa “menulari yang lainnya”, atau “apel busuk” yang mungkin bisa “merusak seluruh isi barel”, dalam istilah konvensional para perancang, dibentuk kembali untuk tujuan publik sebagai “teori domino”.

Awal 1970-an, sebuah aliansi tiga pihak “polisi-polisi lokal” yang dilakukan secara diam-diam diwujudkan di bawah perlindungan Amerika Serikat: Iran, Arab Saudi, Israel (Turki dianggap pasti ikut, sementara Pakistan menjadi sekutu untuk saat itu). Dengan cadangan minyak paling besar, Arab Saudi menjadi komponen utama fasad tersebut. Jika ada pelanggaran terhadap kepatuhan, pasti ada hukuman keras. Rencana-rencananya dijelaskan secara publik oleh ahli intelijen Amerika Serikat, dan juga oleh tokoh-tokoh politik, khususnya Henry Jackson, ahli Timur Tengah dan minyak terkemuka di Senat. Ia menyatakan terima kasih pada “kekuatan dan orientasi Barat” Israel dan Iran, karena keduanya merupakan “teman Amerika Serikat yang sangat bisa diandalkan”, bersama dengan Arab Saudi, “telah mengabdikan untuk mencegah dan menahan mereka yang bertanggung jawab

dan unsur-unsur radikal di negara-negara Arab tertentu ... yang, jika mereka bebas melakukan hal itu, akan memberikan ancaman mengerikan bagi sumber-sumber penting minyak kita di Teluk Persia” (secara khusus berarti aliran keuntungan dan penopang kontrol terhadap dunia, Amerika Serikat tidak bergantung pada minyak Timur Tengah untuk pemakaiannya sendiri).

Dominansi Amerika Serikat atas kawasan Teluk sudah mengalami ancaman pada 1958, ketika militer Irak menggulingkan rezim utama klien Inggris. Catatan-catatan internal Amerika Serikat-Inggris memberikan laporan terbuka tentang urusan-urusan dan rencana-rencana mereka, latar belakang penting untuk memahami Perang Teluk pada 1991.<sup>361</sup> Nasser dari Mesir, sebagaimana tercatat, dianggap sebagai ancaman utama sampai kemenangan Israel pada 1967. Bantuan Amerika Serikat untuk Israel meningkat tajam, bahkan lebih pada 1970 ketika Israel melakukan pelayanan penting lainnya, yaitu membendung dukungan potensial Suriah untuk warga Palestina yang dibantai di Yordania.

Jatuhnya Shah pada 1979 merupakan sebuah pukulan serius. Presiden Carter segera mengirim jenderal NATO untuk berusaha menghasut kudeta militer. Ketika usaha itu gagal, dua pilar yang tersisa—Arab Saudi dan Israel—bergabung dengan Amerika Serikat dalam sebuah upaya untuk menggulingkan rezim dengan menyediakan bantuan militer. Ini merupakan alat konvensional untuk menggulingkan pemerintah sipil, berhasil digunakan di Indonesia dan Chile beberapa waktu yang lalu.

Memfaatkan hubungan dekatnya dengan rezim Shah, Israel membangun kembali kontak-kontak militer dan mengirim persenjataan Amerika Serikat, dengan didanai oleh Arab Saudi. Tujuan-tujuan dari operasi ini dijelaskan secara jelas di hadapan umum dengan segera,<sup>362</sup> tetapi sebagian besar diabaikan di Amerika Serikat.

Kemudian, operasi itu dibingkai dalam istilah yang lebih bisa diterima, yaitu kesepakatan “persenjataan untuk sandera,” meskipun itu bukanlah motivasi awalnya, karena memang tidak ada sandera. Proyek Amerika Serikat-Israel-Saudi sepenuhnya adalah reaksi wajar atas tumbangannya Shah, dengan pertimbangan kerangka dasar sistem kontrol. Ketika teman dan sekutu Washington, Saddam Hussein kurang disenangi karena tidak mematuhi perintah (yang merupakan kesalahan terbesarnya, dan program-program untuk mengembangkan senjata pemusnah massal merupakan konsekuensi kecil, sebagaimana yang ditunjukkan oleh catatan tentang dukungan Amerika Serikat-Inggris untuknya), Amerika Serikat mengalihkan pada “kebijakan pembendungan ganda,” yang ditujukan kepada Iran dan Irak.

Dalam konteks umum inilah, hubungan Amerika Serikat-Israel berkembang selama bertahun-tahun, meskipun Israel juga menjadi kontributor berharga bagi operasi-operasi Washington di Amerika Latin dan yang lainnya.<sup>363</sup> Perang Dingin selalu menjadi latar belakang, terutama karena ancaman terus-menerus akan perang besar. Namun, sebenarnya ini adalah faktor kedua, menurut catatan historis dan dokumenter. Hilangnya

penangkisan Rusia mengarah pada perubahan taktis yang penting, tetapi tidak ada perubahan penting dalam kebijakan-kebijakan dasar, atau dalam hubungan Amerika Serikat-Israel. Sebuah penilaian yang menurut saya cukup masuk akal diberikan pada April 1992 oleh Jenderal (Purnawirawan) Shlomo Gazit, mantan kepala intelijen militer Israel, yang kemudian menjadi pejabat tinggi Agensi Yahudi dan presiden Universitas Ben-Gurion, serta perancang dan analis strategis yang sangat dihormati. Dengan hancurnya Uni Soviet, ia menulis,

Tugas utama Israel tidak berubah sama sekali, dan tetap sangat penting. Lokasinya di pusat Muslim Arab Timur Tengah menakdirkan Israel untuk menjadi penjaga yang penuh pengabdian atas kestabilan di semua negara yang mengelilinginya. (Perannya) adalah untuk melindungi rezim yang sedang berjalan: untuk mencegah atau menghentikan proses-proses radikalisasi dan membendung meluasnya fanatisme agama fundamentalis.<sup>364</sup>

Meskipun disambut di Washington sebagai sebuah kemenangan besar, keberhasilan militer Israel pada 1967 memiliki ancaman serius. Menteri Pertahanan saat itu, Robert McNamara kemudian melaporkan bahwa “kita hampir saja berperang” ketika armada Amerika Serikat “mempersiapkan alat pengangkut (Soviet) di Mediterania”. Ia tidak memberikan rincian apa-apa, tetapi

itu mungkin terjadi ketika Israel menaklukkan Dataran Tinggi Golan setelah gencatan senjata, mendapat peringatan keras dari Uni Soviet, termasuk komunikasi khusus (*hotline*) yang tidak menyenangkan. Menyadari bahwa konfrontasi militer sangat berbahaya, kekuatan-kekuatan besar itu mengajukan penyelesaian diplomatik, yang dirumuskan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 242, November 1967.

Resolusi ini meminta Israel untuk menarik pasukan dari kawasan-kawasan yang sudah ditaklukkannya dan meminta traktat perdamaian penuh yang akan mengakui hak setiap negara untuk hidup dalam damai dan aman di dalam batas-batas yang diakui: singkatnya, perdamaian penuh sebagai balasan penarikan pasukan secara penuh, dengan penyesuaian-penyesuaian yang paling kecil dan menguntungkan, mungkin meluruskan batas yang bengkok.<sup>365</sup> Penting untuk diingat bahwa resolusi PBB 242 ditolak dengan keras—mengggunakan istilah di sini dalam pengertian netral merujuk pada penolakan terhadap hak-hak nasional atas *satu atau lainnya* dari kelompok-kelompok nasional yang menantang Palestina, tidak semata penolakan terhadap hak-hak Yahudi, sebagaimana dalam penggunaan rasis konvensional. Resolusi PBB 242 menuntut dibangunnya pemukiman di antara *negara-negara* yang ada: Palestina tidak disebut, terlepas dari rujukan tidak langsung pada “sebuah pemukiman yang adil untuk masalah pengungsi”.

Resolusi PBB 242 tetap menjadi landasan diplomasi internasional pada konflik Israel-Arab, tetapi dengan dua

perubahan utama. Yang pertama adalah pergantian penting dalam konsensus internasional, yang pada pertengahan 1970-an telah mengabaikan prinsip-prinsip para penolak resolusi dan menuntut sebuah negara Palestina di kawasan-kawasan yang diduduki. Amerika Serikat memakai pendirian para penolak, tetapi kini dalam isolasi internasional. Perubahan yang kedua berhubungan dengan interpretasi Amerika Serikat terhadap resolusi PBB 242. Perubahan itu dimulai sejak Februari 1971, ketika Presiden Sadat dari Mesir yang baru terpilih, menerima kebijakan resmi Washington, yang sebenarnya terjadi di balik itu dengan menawarkan sebuah perjanjian damai penuh sebagai balasan untuk penarikan Israel hanya dari kawasan Mesir. Israel dengan resmi menyambut hal tersebut sebagai tawaran perdamaian yang murni. Itu merupakan sebuah “tonggak bersejarah ... yang sangat terkenal” dalam jalan menuju perdamaian, tutur Yitzhak Rabin, mantan Duta Besar untuk Washington, dalam memoarnya. Namun, sembari menyambut pernyataan Mesir secara resmi “mengenai kesiapannya untuk mengambil bagian dalam perjanjian perdamaian dengan Israel”, Israel menolak tawaran tersebut, mengatakan bahwa mereka “tidak akan menarik pasukannya sampai garis batas sebelum 5 Juni 1967”, posisi yang terus dipertahankan sampai saat ini.

Amerika Serikat menghadapi dilema: Haruskah mereka mempertahankan posisi resminya, lalu bergabung dengan Mesir dalam sebuah konfrontasi dengan Israel? Atau, haruskah mereka mengubah interpretasi resolusi PBB

242, memilih pendapat Kissinger tentang “jalan buntu”: tidak ada negosiasi, hanya penyerangan? Begitu bujukan Kissinger. Sejak saat itu, Amerika Serikat menginterpretasikan resolusi PBB 242 berarti penarikan sejauh yang ditentukan Amerika Serikat dan Israel. Interpretasi sebelumnya terus dinyatakan lagi secara resmi sampai pemerintahan Clinton, yang menyatakan pada sesi PBB Desember 1993 bahwa resolusi PBB yang lama “usang dan menyalahi zaman” dari sudut pandang persetujuan Israel-PLO September 1993.<sup>366</sup>

Dukungan resmi terhadap resolusi 242 bagaimanapun tidak berarti, karena Washington terus menyediakan dukungan militer, diplomatik, dan keuangan untuk penggabungan bertahap Israel ke kawasan-kawasan tersebut. President Carter, misalnya, menyatakan kembali posisi resminya dengan penuh ancaman,<sup>367</sup> sembari meningkatkan bantuan Amerika Serikat untuk Israel sampai kira-kira setengah dari keseluruhan bantuan luar negeri Amerika Serikat, sebagai bagian dari pemukiman Kamp David. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 1971 telah dihilangkan dari ulasan dan tinjauan umum.<sup>368</sup>

Setelah penolakan pada 1971, Sadat memperingatkan bahwa jika upaya-upayanya untuk mencapai perdamaian terus ditolak, ia mau perang saja. Ia lalu dikeluarkan dengan hina, mengingat ini adalah periode arogansi rasa unggul diri dan rasis baik Israel maupun Amerika Serikat, yang kemudian dicela di Israel. Pemerintah Partai Buruh mulai menjalankan program-programnya untuk menyelesaikan pemukiman di Sinai timur laut, termasuk

pembangunan kota Yahudi Yamit setelah 10.000 petani dan orang Badui diusir dengan kekejaman luar biasa dengan pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Ariel Sharon (yang ditegur oleh komisi militer penyelidikan). Sadat memperingatkan bahwa “Yamit berarti perang,” tetapi diabaikan.<sup>369</sup>

Perang 1973 ternyata nyaris menjadi bencana bagi Israel—dan dunia. Saat itu, lagi, ada ancaman konfrontasi nuklir. Bahkan Kissinger paham bahwa pasukan saja tidak cukup. Ia kembali pada strategi cadangan biasa: karena Mesir tidak bisa diabaikan, penghalang Arab utama harus dihilangkan dari konflik. Hasilnya, dicapai oleh Carter di Kamp David, membebaskan Israel “untuk meneruskan operasi-operasi militer melawan PLO di Lebanon dan juga kegiatan pemukiman di Tepi Barat” (analisis strategis Israel Avner Yaniv),<sup>370</sup> ketika Israel mulai melakukannya segera dengan dukungan besar dari Pemerintah Carter dan penggantinya.

Sadat menjadi “tokoh perdamaian” yang sangat dipuja pada 1977, meskipun pendirian heroiknya kurang lebih sama dengan pendiriannya pada 1971. Pada 1977, ia bergabung dengan konsensus internasional, mendesak diakuinya hak-hak warga Palestina. Perbedaan yang penting adalah bahwa pada 1977, Amerika Serikat dengan enggan menyetujui usulan Sadat pada 1971, sebagai akibat perang 1973 (yang bisa disebut “Perang Kissinger”). Semua ini juga telah dihilangkan dari sejarah yang dibersihkan.



Isolasi Amerika Serikat masih menjadi lebih ekstrem saat konsensus internasional mengabaikannya. Masalah-masalah tersebut mencapai puncaknya pada Januari 1976, ketika Dewan Keamanan memperdebatkan sebuah resolusi, didukung oleh “negara-negara konfrontasi” Arab (Mesir, Yordania, Suriah) dan secara publik didukung oleh PLO, meminta penyelesaian dua-negara dalam resolusi PBB 242, tetapi kini dilengkapi dengan negara Palestina dalam kawasan-kawasan yang diduduki. Israel menolak menghadiri sesi ini, dan lebih memilih mengebom Lebanon, yang menewaskan 50 warga sipil, tanpa dalih apa pun kecuali pembalasan terhadap PBB. Resolusi ini didukung oleh Eropa, Rusia (yang sedang berada di arus utama diplomasi selama periode itu, negara-negara nonblok, dengan suara bulat.

Amerika Serikat memveto resolusi ini, dan memveto lagi pada 1980.<sup>371</sup> Di Majelis Umum, Amerika Serikat selalu memberikan suara sendiri (bersama Israel, kadang dengan beberapa negara klien lainnya) menentang resolusi-resolusi dengan tujuan serupa. Secara teknis, tidak ada hak veto di Majelis Umum, tetapi suara Amerika Serikat yang menolak resolusi, meskipun dalam isolasi (seperti dalam isu-isu biasa yang cukup luas), secara efektif adalah sebuah veto. Faktanya, malah veto ganda, karena peristiwa-peristiwa tersebut diveto secara khusus dari ulasan dan bahkan dari sejarah, sebagaimana peristiwa-peristiwa yang sudah diulas di sini. Amerika Serikat juga membendung serangkaian inisiatif diplomatik lainnya:

dari Eropa, negara-negara Arab, dan PLO. Pers umumnya sama sekali tidak menyebutkannya.

Catatannya penuh pelajaran. Memilih satu contoh di antara begitu banyak contoh, pada 10 Desember 1986, wartawan *New York Times* dari Israel, Thomas Friedman, menulis bahwa kelompok Israel Peace Now “tidak pernah lebih tertekan” karena “ketiadaan rekan berunding dari Arab.” Beberapa bulan kemudian, ia mengutip Shimon Peres ketika menyesalkan kurangnya “gerakan perdamaian di antara orang-orang Arab (seperti) yang kita miliki di antara orang-orang Yahudi”, dan mengatakan bahwa tidak boleh ada partisipasi PLO dalam perundingan “selama PLO masih menjadi organisasi penembak dan menolak berunding”. Ia berbicara selama hampir 3 tahun setelah Israel menolak tawaran lain Arafat untuk perundingan yang mengarah pada pengakuan saling menguntungkan, dan *Times* menolak memberitakan hal tersebut. Catat: *menolak*.

Enam hari sebelum artikel Friedman tentang tertekannya Peace Now, sebuah judul di jurnal Israel beroplah besar *Ma'ariv* berbunyi: “Arafat menyatakan kepada Israel bahwa ia siap berunding langsung.” Tawaran itu dibuat selama masa jabatan Peres sebagai perdana menteri. Penasihat pers Peres memperkuat laporan tersebut, mengomentari bahwa “ada keberatan prinsipiel terhadap kontak apa pun dengan PLO, yang berasal dari doktrin bahwa PLO tidak bisa menjadi rekan berunding.” Yossi Beilin, seorang antiperang ekstrem koalisi Partai Buruh Peres, menyatakan bahwa “usulannya ... ditolak

karena hal itu terlihat seperti upaya yang rumit untuk membangun kontak langsung ketika kita tidak siap untuk perundingan apa pun dengan unsur PLO.”

Pejabat tinggi lainnya mengambil pendirian yang lebih keras. Tak satu pun dari hal ini yang diberitakan di media arus utama Amerika Serikat, meskipun Friedman sendirian dalam menggunakan peristiwa ini untuk mengungkapkan satu dari keluh kesah berkalanya atas nasib pahit satu-satunya pasukan perdamaian di Timur Tengah, yang kekurangan rekan bernegosiasi dari negara-negara Arab. Segera setelahnya, ia menerima Penghargaan Pulitzer untuk “ulasan berimbang dan penuh informasi” mengenai Timur Tengah. Ini menjadi contoh yang cukup representatif dan ia ditunjuk sebagai kepala wartawan diplomatik *Times*.<sup>372</sup>

Ada istilah konvensional untuk keberhasilan Washington dalam membendung penyelesaian diplomatik, dalam isolasi internasional: istilah itu adalah “proses perdamaian”, sebuah pilihan terminologi yang tidak akan mengejutkan Orwell. Proses perdamaian dalam logika ini didukung oleh dua negara. Ada sebuah khayalan bahwa Pemerintahan Bush, Sr. akan mengambil langkah keras terhadap Israel.<sup>373</sup> Kebenarannya lebih dekat dengan sebaliknya. Contohnya adalah posisi resmi pemerintah pada Desember 1989 (Rencana Baker), yang mendukung tanpa syarat terhadap rencana pemerintah koalisi Israel Peres-Shamir Mei 1989.

Perencanaan tersebut menyatakan bahwa tidak boleh ada “tambahan negara Palestina ...” (Yordania telah

menjadi sebuah “negara Palestina”), dan bahwa “Tidak akan ada perubahan status terhadap Judea, Samaria, dan Gaza (kawasan-kawasan yang diduduki) selain yang sesuai dengan panduan-panduan dasar pemerintah (Israel).” Israel tidak akan melakukan perundingan dengan PLO. Namun, Israel akan mengizinkan “pemilihan-pemilihan umum yang bebas,” yang diselenggarakan di bawah kekuasaan militer Israel, dengan banyak pemimpin Palestina yang dipenjarakan tanpa tuduhan atau dikeluarkan. Perencanaan ini tidak diberitakan di Amerika Serikat selain syarat yang terakhir, yang dipuji sebagai tawaran positif dan bisa dicapai. Yang terbaca jelas adalah Baker betul-betul menyatakan kembali dukungan Amerika Serikat untuk “penarikan total dari kawasan dengan imbalan hubungan damai”, sementara ia diam-diam memberikan dukungan tegas bagi program-program yang memastikan bahwa hal-hal tersebut tidak akan terjadi.<sup>374</sup>

Selama bulan-bulan awal Intifada yang pertama (1988), upaya-upaya Washington yang semakin menyedihkan untuk berpura-pura bahwa Arafat tidak berkenan mempertimbangkan penyelesaian diplomatik mulai memperoleh ejekan internasional. Pemerintah Reagan lalu setuju menerima penawaran terus-menerus Arafat dan bersedia berunding; interpretasi standarnya adalah bahwa Arafat akhirnya menyerah pada anjuran serius Washington mengenai perdamaian dan diplomasi. Reaksi Washington yang sebenarnya tidak diberitakan di Amerika Serikat, tetapi terlihat jelas pada sesi pertama perundingan: Duta Besar Amerika Serikat Robert

Pelletreau memberi tahu Arafat bahwa ia harus membuang semua ide mengenai konsensus internasional—yang tidak bisa diterima karena itu adalah konsensus internasional—dan menghentikan “kerusuhan-kerusuhan” di kawasan-kawasan yang diduduki (Intifada), “yang kita pandang sebagai aksi teroris terhadap Israel”.

Singkatnya, PLO harus memastikan kembalinya *status quo* sebelum Intifada, sehingga Israel akan bisa melanjutkan perluasan dan penindasannya di kawasan-kawasan tersebut dengan dukungan Amerika Serikat. Hal itu sangat dipahami di Israel. Pada Februari 1989, Perdana Menteri Rabin meyakinkan delegasi Peace Now bahwa perundingan-perundingan tersebut hanyalah “diskusi-diskusi tingkat rendah” yang menghindari pembahasan isu-isu serius dan memberi Israel “setidaknya 1 tahun” untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan. “Penduduk-penduduk kawasan tersebut adalah subjek bagi kekerasan militer dan tekanan ekonomi,” jelas Rabin, dan “pada akhirnya, mereka akan hancur,” dan akan menerima syarat-syarat Israel. Namun, versi untuk publik PBB cukup berbeda.<sup>375</sup>

Bagian terakhir resolusi Majelis Umum PBB yang ditambahkan dalam resolusi PBB 242 dengan pengakuan hak-hak nasional warga Palestina dilakukan pada Desember 1990, bagian 144-2. Beberapa minggu kemudian, Amerika Serikat berperang dengan Irak, dan George Bush dengan penuh kemenangan mengumumkan Tatanan Dunia Baru dalam empat kata-kata sederhana: “(Apa yang) Kita Katakan Akan Terjadi”, tentunya di

Timur Tengah. Dunia paham dan menarik diri. Amerika Serikat akhirnya berada di posisi untuk menentukan sikap penolakan sepihak, dan melakukannya. Pertama di Madrid pada akhir 1991, lalu pada perjanjian Israel-PLO berturut-turut sejak 1993. Dengan ukuran-ukuran ini, “proses perdamaian” telah maju ke rencana-rencana bergaya Bantustan yang dimaksudkan Amerika Serikat dan Israel, sebagaimana yang jelas ada di catatan dokumenter, dan—yang lebih penting—catatan di tempat itu.

Tentunya, sudah jelas pada 13 September 1993, ketika Rabin dan Arafat dengan resmi menerima Deklarasi Prinsipiel (DOP) di Washington dengan penuh keriuhan. Uraian DOP ini memiliki sedikit ambiguitas.<sup>376</sup> Sejak saat itu ada beberapa hal yang mengejutkan terjadi.

DOP ini menyatakan bahwa “status permanen”, pemukiman terakhir pada masa depan, didasarkan semata pada resolusi PBB 242. Catatan historis yang dihilangkan membuat jelas hal yang sebenarnya dimaksudkan. *Pertama*, maksud yang berlaku pada resolusi PBB 242 adalah versi Amerika Serikat: penarikan sebagian, sebagaimana yang ditentukan Amerika Serikat dan Israel. *Kedua*, isu utama diplomasi sejak pertengahan 1970-an adalah tentang apakah penyelesaian diplomatik harus didasarkan pada resolusi PBB 242 saja, sebagaimana yang dituntut oleh Amerika Serikat, atau resolusi PBB 242 yang dilengkapi dengan resolusi-resolusi bahwa Amerika Serikat telah membendung pengakuan hak-hak nasional warga Palestina, posisi warga lain di dunia. DOP ini dibuat

dengan tegas untuk penolakan sepihak Washington. Seseorang bisa memilih untuk ditipu—beberapa memilih begitu. Namun, itu adalah sebuah pilihan, dan pilihan yang tidak bijaksana, khususnya bagi korban.

Arafat sekali lagi dipaksa untuk “tidak lagi mendukung teror”. Tujuan satu-satunya adalah penghinaan—bukan untuk Arafat secara pribadi, melainkan untuk orang-orang Palestina, karena bagi mereka Arafat adalah simbol nasionalisme.<sup>377</sup>

Sebagaimana yang diinformasikan Menteri Luar Negeri George Shultz kepada Reagan pada Desember 1988, Arafat telah mengatakan “Pa, pa, pa,” dan “man, man man,” tetapi ia belum mengatakan “Paman” dengan nada yang baik dan penuh kerendahan diri. Pentingnya penolakan lebih lanjut terhadap hak untuk menolak tidak diperhatikan, karena tidak ada hak semacam itu dalam kerangka doktrin Amerika Serikat. Hal ini dijelaskan dalam perundingan Amerika Serikat-PLO (yang tidak diberitakan) pada 1989, seperti yang baru saja diulas. Lalu, sebelumnya, pada Desember 1987, ketika Majelis Umum PBB memperdebatkan resolusi utamanya yang mengutuk terorisme internasional, ditentang oleh Amerika Serikat dan Israel saja karena resolusi ini mendukung “hak penentuan nasib sendiri, kebebasan, dan kemerdekaan, yang berasal dari Piagam PBB, atas orang-orang yang dicabut haknya secara paksa ..., khususnya orang-orang di bawah rezim kolonial dan rasis (maksudnya Afrika Selatan) dan pendudukan asing atau bentuk lain dominasi kolonial (maksudnya adalah kawasan-kawasan yang

diduduki Israel).<sup>378</sup> Keberhasilan Washington dalam memveto resolusi tersebut, dari pemberitaan dan juga sejarah, memiliki akibat-akibat penting bagi Lebanon dan wilayah-wilayah yang diduduki, meskipun Amerika Serikat kemudian melepaskan dukungannya kepada rezim Apartheid.

Sebagai balasan untuk menyerahnya Arafat, Amerika Serikat dan Israel tidak mengakui apa-apa.

DOP memasukkan proses perdamaian versi Amerika Serikat pada semua hal yang penting. Seseorang tidak bisa benar-benar menuduh Israel melanggar perjanjian Oslo, kecuali dalam rincian.<sup>379</sup> Tanpa melanggar susunan kata DOP (atau resolusi-resolusi berikutnya yang disusun dengan sangat hati-hati), Israel terus menempati dan menggabungkan kawasan-kawasan yang didudukinya dengan dukungan dan bantuan Amerika Serikat. Maksud-maksudnya tidak disembunyikan. Maksud itu diumumkan secara terbuka oleh Rabin dan Peres dan dilaksanakan oleh mereka dan pengganti-penggantinya.<sup>380</sup>

Skala pasti program-program pemukiman Amerika Serikat-Israel tidak sepenuhnya jelas karena hal-hal tersebut biasanya disembunyikan. Pemimpin-pemimpin pemukiman menduga bahwa jumlah penduduk di pemukiman meningkat dua kali lipat sampai 210.000 sejak perjanjian Oslo (tidak memasukkan 180.000 penduduk di Jerusalem Timur Arab, yang digabungkan secara efektif dalam pelanggaran terhadap peraturan-peraturan Dewan Keamanan PBB, tetapi dengan dukungan Amerika Serikat secara diam-diam). Mereka



melaporkan lebih jauh bahwa 10% dari penghuni tetap beralamat di dalam Israel, sehingga tidak dihitung. Pembangunan di pemukiman-pemukiman pada 2000 diberitakan lebih dari tiga kali sebanyak di Tel Aviv, lebih dari sepuluh kali sebanyak di Jerusalem, dan secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk di dalam Garis Hijau (Israel yang sebenarnya). Pertumbuhan penduduk dan pengeluaran publik juga lebih tinggi: 60% dari pembangunan di kawasan tersebut didanai negara, dibandingkan dengan 25% di dalam Israel, dan pemerintah telah melakukan berbagai bujukan untuk mendukung pemukiman.<sup>381</sup>

Formula Rabin-Peres, diadopsi oleh para penggantinya dan Washington, bahwa pemukiman tersebut akan dibatasi oleh “pertumbuhan alami”, di bawah kebijakan “pemukiman-pemukiman yang dibekukan”. Namun, “ada pembekuan dan ada realitas”, menurut laporan pers Israel, menambahkan bahwa kelompok sayap kanan ekstrem “gembira mengadopsi formula Rabin”, berterima kasih untuk “meningkat drastisnya otorisasi bangunan” di bawah Barak, yang diprakarsai di bawah Barak segera setelah ia menerima DOP.

Wartawan diplomatik Israel yang paling terkemuka, Akiva Eldar, menulis bahwa “Menurut statistik resmi, pemenuhan total dengan formal (Israel-Amerika Serikat) berarti bahwa Israel mengumumkan pembekuan total—juga menghapuskan 500 apartemen. Sekarang, ada 9.844 apartemen baru (dan kosong) yang belum juga selesai atau masih dibangun .... Sehingga Israel membuat olok-olok

atas kesepakatan Amerika, dan Amerika tetap diam”— dan tetap memberikan uang. Ia menambahkan bahwa rencana-rencana ekstremis agama (kebanyakan Amerika Serikat) untuk Hebron termasuk pembangunan situs arkeologis yang berharga, yang menghadapi protes keras dari Dewan Arkeologis. Tiga puluh delapan arkeologis senior Israel meminta Barak membatalkan rencana pembangunan (yang tetap dilakukan). Kepala Dewan Arkeologis mengutuk rencana tersebut sebagai “pelanggaran berat hukum dan adat yang memungkinkan penggalian dan penelitian arkeologis dilakukan di situs kuno di tanah kami,” yang menghancurkan “Hebron nenek moyang dan Raja David, dan infrastruktur historis arkeologis di Tanah Israel dan Warga Israel yang ada di tanah kami.” Dan, tentu saja, melanjutkan pencabutan hak milik dan penyiksaan terhadap warga Palestina, mayoritas yang sangat banyak.<sup>382</sup>

Pada akhir 2000, ketika masa Barak hampir berakhir, Menteri Pembangunan mengumumkan bahwa 10.000 unit sedang dalam proses pembangunan di kawasan yang diduduki, dua pertiga di pemukiman kota. Menteri Perumahan mengumumkan 25 juta dolar untuk menyubsidi pembangunan dan infrastruktur pada 2001, selain jumlah serupa yang diumumkan pada April untuk pembangunan “jalan *bypass*”—sebuah sistem jalan raya besar yang dirancang untuk menggabungkan penduduk di pemukiman dengan Israel, sembari membiarkan warga Palestina tidak kelihatan dan terisolasi.

“Pemerintahan Barak meninggalkan sebuah warisan yang mencengangkan untuk pemerintah Sharon.” Pers memberitakan saat perpindahan kekuasaan terjadi beberapa bulan kemudian: “Angka tertinggi pembangunan tempat tinggal di kawasan tersebut dimulai sejak Ariel Sharon masih menjadi Menteri Pembangunan dan Pemukiman pada 1992, sebelum perjanjian Oslo.” Tokoh-tokoh dalam Kementerian Barak mengungkapkan bahwa tingkat pembangunan baru meningkat terus-menerus sejak 1993 sampai 2000, ketika pembangunannya mencapai lima kali tingkat pembangunan 1993, 31,2 kali dari 1994, terus meningkat lebih jauh di bawah pemerintahan Sharon-Peres.<sup>383</sup> Pada Juli 2000, kontrak diberikan untuk 522 tempat tinggal baru di Har Homa Israel, sebuah proyek di tanah yang diambil alih dari sebuah daerah Arab di Jerusalem Tenggara yang kehilangan 90% tanahnya sejak pengambilalihan Israel pada 1967 melalui “*town planning*” (sebuah eufemisme untuk mengganti Arab dengan Yahudi, yang mengingatkan pada penggunaan “*urban planning*” di Amerika Serikat).

Proyek Har Homa, menurut Jabal Abu Ghneim, menyelesaikan pengelilingan Israel atas wilayah “Jerusalem” yang diperluas secara besar-besaran. Proyek ini dimulai pada bulan-bulan terakhir pemerintahan Partai Buruh Simon Peres, ditunda setelah protes keras di dalam negeri dan secara internasional selama masa pemerintahan Partai Likud Benjamin Netanyahu,

dilanjutkan kembali dengan penuh semangat (dan tanpa protes) di bawah Barak.

Bagi kelompok sayap kanan ekstrem Israel, proyek Partai Buruh Har Homa ini kurang penting dibandingkan dengan program E-1, yang menerima publikasi yang lebih sedikit. Program ini meliputi pembangunan rumah baru dan pembangunan jalan untuk memperluas Jerusalem ke kota Ma'aleh Adumim ke timur, yang pada hakikatnya membelah Tepi Barat menjadi dua. Anggota Knesset, Michael Kleiner, ketua perluasan "Front Tanah Israel" ("Hazit Eretz Yisrael"), menyambut pengumuman proyek ini dengan penuh apresiasi, mengamati bahwa rencana ini, yang "merupakan inisiatif mantan (Peres) Menteri Perumahan Benjamin Ben-Eliezer (kini Menteri Pertahanan di pemerintahan Sharon-Peres) dengan otorisasi Yitzhak Rabin", adalah "yang paling penting" dalam permintaan-permintaan Front, lebih dari Har Homa.<sup>384</sup>

Dalam pemerintahan Sharon-Peres, tugas merahasiakan program-program yang sedang berlangsung dan menolak protes-protes internasional diberikan kepada Menteri Luar Negeri Peres. Sebuah berita mengenai program-program pemerintah untuk pemukiman yang lebih luas berjudul "Peres menolak keberatan-keberatan internasional perihal pemukiman". Peres mengulangi formula "pertumbuhan alami" yang dirancang untuk membungkam protes, sebuah kontribusi tradisional para antiperang.<sup>385</sup>

Prinsip dasarnya digambarkan pada 1996, selama bulan-bulan terakhir Pemerintahan Peres, oleh Menteri Perumahan Ben-Eliezer, ketika ia mengumumkan rencana-rencana untuk Har Homa dan untuk melanjutkan program-program Rabin-Peres untuk memperluas Jerusalem Agung di semua arah, termasuk Ma'aleh Adumim (timur), Givat Ze'ev (utara), Beitar (selatan), dan di luarnya. Pemerintah Partai Buruh “melakukan semuanya diam-diam,” jelas Ben-Eliezer, dengan “perlindungan penuh dari Perdana Menteri (Peres),” dengan menggunakan istilah seperti “pertumbuhan alami” bukannya “pemukiman-pemukiman baru”. Politisi Partai Buruh antiperang, Yossi Beilin, mengecam keras masuknya pemerintah Netanyahu karena retorikanya yang penuh hasutan. Pemerintah Rabin, tulisnya, “meningkatkan pemukiman sampai 50%” di “Judea dan Samaria” (Tepi Barat) setelah perjanjian Oslo, tetapi “kami melakukannya dengan diam-diam dan bijaksana,” mengingat Anda dengan bodoh “menyatakan niatan Anda setiap pagi, menakuti para warga Palestina dan mengubah topik Jerusalem sebagai ibu kota Israel yang bersatu—hal yang disetujui oleh semua orang israel—dalam perdebatan di seluruh dunia.”

Pernyataan Beilin hanya tepat sebagian; “kebijakan diam-diam” memperluas dengan baik melewati Jerusalem.<sup>386</sup> Perbedaan-perbedaan gaya itu kelihatannya bisa dirunut sampai ke jumlah konstituen dari dua kelompok politik. Partai Buruh, partai kelompok orang-orang profesional yang terdidik dan para elite yang

berpaham Barat, lebih terbiasa dengan norma-norma Barat, dan memahami bahwa penyokongnya memilih “untuk tidak melihat” yang sedang mereka lakukan. Sementara Partai Likud, dengan metode-metode mentah untuk mencapai hasil yang sama pada dasarnya memalukan bagi humanis Barat, dan kadang mengarah pada konflik serta kejengkelan (lihat Catatan 373).

Ma’aleh Adumim digambarkan sebagai satu dari “tetangga Jerusalem” dalam pemberitaan Amerika Serikat. Karena itu, tawaran terakhir Clinton tidak mungkin lebih masuk akal dan murah hati ketika ia mengatakan bahwa “yang menjadi milik Yahudi harus menjadi milik Israel” sebagai “gagal menyebutkan”, menurut pers luar negeri, “bahwa ini akan membuat tambahan pemukiman Israel yang dibangunnya di Jerusalem timur yang didudukinya,” nyatanya jauh melewati semua arah. Namun, itu tidak tepat. Kelebihan terbesar “kompromi kreatif” Clinton “... adalah bahwa setidaknya kini kita tahu seperti apa satu-satunya kesepakatan terakhir yang realistis,” jelas Thomas Friedman. Presiden telah berbicara. Apa lagi yang harus dikatakan?<sup>387</sup>

Mereka yang dengan keras kepala dan tetap tidak puas akan menemukan bahwa Ma’aleh Adumim menggunakan 1/16 dari 50.000 dunam (1 dunam: 1.000 meter persegi) yang dibagikan dalam perencanaan Israel, sebuah presentasi standar, dirancang untuk mengizinkan “pertumbuhan alami”. Kisah Ma’aleh Adumim ini diceritakan kembali oleh B’Tselem (lihat Catatan 385).<sup>388</sup>

Kota ini didirikan di bawah pemerintahan Partai Buruh pada pertengahan 1970-an, dan berkembang pesat “dengan bantuan aliran sumber daya yang sangat besar dari pemerintah,” menurut laporan *website* kota. Rencana Jerusalem Metropolitan resmi mengantisipasi perluasan sebesar 285% dari 1994 ke 2010, untuk 60.000 penduduk. Tanah itu juga diambil alih dari beberapa desa Palestina, termasuk Abu Dis, yang menurut rencana para politisi antiperang, untuk dijadikan Al-Quds bagi warga Palestina (yaitu Jerusalem) dengan cara-cara muslihat linguistik, tetapi kehilangan tanahnya—berbeda dengan “Jerusalem” Israel, yang akan menduduki potongan Tepi Barat. Pemerintah negara menemukan bahwa telah ada “bangunan ilegal yang tersebar luas” oleh pemukim Yahudi. “Solusinya” sederhana, seperti di pemukiman lainnya: “menyediakan izin retroaktif daripada menghancurkan susunannya”. Solusinya adalah pemusnahan, kadang kejam, ketika warga Arab membangun secara ilegal, karena mereka harus bertahan hidup dengan kondisi keras yang memaksa pembangunan Arab.

Pengusiran orang Badui Jahalin sejak 1993 untuk mengizinkan perluasan lebih jauh Ma’aleh Adumim dilakukan dengan cara yang cukup kejam. Mereka berusaha “mencegah nasib mengerikan yang menimpa mereka”—dan kengerian itu sangat terlihat—“dengan mengajukan petisi Mahkamah Internasional”, yang mengikuti tradisinya dalam menaati otoritas negara dengan sabar, meskipun petisi tersebut menunjukkan

harapan bahwa IDF akan menghentikan pengusiran “sebagai sebuah tindakan murah hati”. Pada November 1999, Mahkamah Internasional menolak petisi Palestina yang lainnya, yang menolak perluasan lebih jauh Ma’aleh Adumim, menyatakan bahwa “itu akan memberikan kebaikan bagi penduduk tetangga (desa-desa Palestina) yang mungkin akan mengalami perkembangan ekonomi dan budaya” dari semua kota Yahudi.

Hasil akhirnya, B’Tselem menyimpulkan, bahwa di sini sampai kawasan-kawasan yang didudukinya, “warga lokal yang tak berdaya merupakan subjek penuh dari peraturan-peraturan yang disusun oleh kekuatan militer pendudukan Israel untuk memajukan kepentingan-kepentingan politiknya,” terus meningkat selama proses perdamaian Oslo.

Munisipalitas Ma’aleh Adumim menjelaskan bahwa “Tujuan politik dalam membangun kota adalah untuk membangun pemukiman di wilayah timur ibu kota Israel sepanjang jalur Jerusalem-Jericho,” sehingga memisahkan Ramallah dan daerah Palestina utara dari Bethlehem dan wilayah selatan. Setiap rencana perdamaian Amerika Serikat-Israel memasukkan beberapa versi mengenai kondisi ini, bersama dengan perluasan “Jerusalem” ke utara dan selatan. Seperti sebelumnya, proposal-proposal terakhir Clinton-Barak pada Januari 2001 memasukkan hal penting lain untuk kawasan utara, membagi sektor utara dengan efektif. Tiga daerah kantung terpisah dari Jerusalem, pusat tradisional kehidupan warga Palestina.<sup>389</sup> Mereka dikelilingi oleh pembangunan infrastruktur yang



sangat luas, termasuk “sistem jalan yang sangat besar, sepanjang 400 km yang mengelilingi pusat-pusat penduduk Palestina dan sistem jalan tersebut memungkinkan para pemukim dan pasukan militer melindungi mereka untuk bergerak dengan cepat dan aman melewati Tepi Barat.”<sup>390</sup>

Dibangun di tanah yang direbut dari Palestina seluas 160.000 dunam, sistem jalan melingkar juga menahan perluasan dan pembangunan desa-desa Palestina dan menghalangi arus perdagangan dan manusia, meskipun warga Arab masih bisa bepergian dengan yang disebut secara resmi sebagai “Jalan Raya Palestina”, yang kebanyakan cukup berbahaya dan penuh risiko. Jalan Bethlehem—Ramallah, misalnya (mungkin akan ditutup sepenuhnya jika formula Clinton-Barak, atau yang seperti itu, diimplementasikan). Tambahan lagi, “jalan masuk” menuju ke pemukiman Yahudi dihiasi dengan kolam renang-kolam renangnya dan kebun-kebun yang disirami dengan baik (sementara desa-desa dan kota-kota warga Palestina hanya memiliki sedikit air, bahkan kadang tidak ada sama sekali kalau musim kering). Jika seorang pemukim lewat di jalan masuk, semua lalu lintas Palestina dihentikan, “menyebabkan keterlambatan dan kemarahan”. Penutupan secara teratur yang dilakukan Israel semakin memenjarakan warga Palestina, “kadang menghalangi atau menahan, bahkan lalu lintas darurat seperti ambulans.”<sup>391</sup> Pers Israel telah memberitakan banyak contoh kekejaman dan penghinaan yang disengaja

yang dilakukan oleh pasukan pencaplok yang bertindak tanpa pengendalian.

Setiap langkah dilakukan dengan otorisasi dan subsidi Amerika Serikat, disalurkan melalui beragam kanal, bersama dengan dukungan militer dan diplomatik yang penting. Amerika Serikat juga mengalami banyak masalah dalam upayanya untuk memastikan bahwa meningkatnya teror negara selama konfrontasi sekarang ini bebas dari pengamatan, dengan akibat yang mungkin akan menghambat. Pada 27 Maret 2001, Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang memanggil pengamat-pengamat internasional. Menurut sumber-sumber Eropa yang dikutip dalam pers Israel, proposalnya “dibatalkan” oleh “empat penolakan” Washington, yang “mengejutkan perwakilan keempat negara-negara Eropa yang merancang resolusi tersebut—Irlandia, Inggris, Norwegia, dan Prancis.” Amerika Serikat menolak penyebutan kata “serangan, atau prinsip tanah-untuk-perdamaian, pemukiman, atau hukum internasional dan Konvensi Jenewa. Negara-negara Arab dan sekutunya telah mengabaikan resolusinya sendiri, dengan harapan Eropa bisa “berunding dengan Amerika mengenai formula tersebut”. Seorang diplomat Amerika Serikat menjelaskan bahwa “Amerika Serikat percaya bahwa PBB harus menghindari perdebatan pemukiman” dan bahwa “isu Konvensi Jenewa” harus diputuskan antara Israel dan Palestina, tanpa “keputusan lebih dulu” melalui campur tangan PBB.<sup>392</sup>

Masalah mengenai Konvensi Jenewa cukup penting.<sup>393</sup> Konvensi ini diadopsi sebagai akibat Perang Dunia II untuk membendung praktik-praktik Nazi, termasuk pemindahan penduduk dari negara penakluk ke kawasan yang berhasil didudukinya atau aksi-aksi lain yang bisa membahayakan penduduk sipil.<sup>394</sup> Tanggung jawab untuk memantau ketaatan terhadap Konvensi ditugaskan ke Palang Merah Internasional, yang telah menentukan bahwa program pemukiman Israel melanggar Konvensi Keempat. Posisi Palang Merah Internasional telah disahkan dengan berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB.

Penerapan Konvensi terhadap kawasan-kawasan yang diduduki Israel juga telah ditegaskan oleh Amerika Serikat, oleh Duta Besar PBB George Bush (September 1971), dan dengan bergabung dalam mengadopsi resolusi Dewan Keamanan 465 (1980), yang mengutuk pemukiman Israel sebagai “pelanggaran terang-terangan” terhadap konvensi. Bahkan Clinton enggan untuk mengambil sikap publik dalam pelanggaran terang-terangan terhadap bagian utama hukum kemanusiaan internasional; Amerika Serikat kemudian abstain ketika Dewan Keamanan memanggil Israel pada Oktober 2000 “untuk mematuhi dengan sangat hati-hati tanggung jawabnya di bawah Konvensi Jenewa Keempat”, yang lagi-lagi dilanggar dengan sangat mencolok (resolusi 1323, disahkan dengan angka 14-0).

Di bawah Konvensi tersebut adalah tanggung jawab Pihak yang Menandatangani, termasuk kekuasaan Eropa

dan Amerika Serikat “untuk menghormati dan memastikan hormat” pada Konvensi itu “dalam kondisi apa pun”. Mereka “harus melakukan apa pun yang mereka bisa untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari Konvensi ini bisa diterapkan secara universal”, Palang Merah Internasional menetapkan. Selanjutnya, tanggung jawab Washington untuk mencegah pemukiman dan pengambilalihan wilayah, juga mencegah hukuman kolektif dan penggunaan intimidasi, penindasan, dan kekerasan lainnya. Palang Merah Internasional juga menyatakan (pada Februari 2001) bahwa penutupan dan blokade Israel merupakan pelanggaran tanggung jawabnya terhadap Konvensi, tanpa menyebut penggunaan pasukan yang sangat besar dan melanggar hukum berkali-kali yang dikecam oleh setiap organisasi hak asasi manusia di Israel, Amerika Serikat, dan di mana pun. Dan lagi, PBB, dalam sebuah resolusi yang didukung Uni Eropa, mengesahkannya dengan suara bulat selain Amerika Serikat.<sup>395</sup>

Dengan demikian, Amerika Serikat secara tegas melanggar kewajibannya sebagai Pihak yang Menandatangani Konvensi. Tidak saja tidak bertindak hormat pada Konvensi, sebagaimana yang harusnya dilakukan, tetapi malah secara aktif melakukan pelanggaran terhadap konvensi tersebut. Semua kegiatan penting Amerika Serikat-Israel di wilayah tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional. Kelonggaran-kelonggaran yang ditawarkan Clinton dan

Barak—yang didefinisikan sebagai satu-satunya rencana yang “realistis” dan telah memperoleh pujian untuk kemurahan hati—tidak pernah ada, terlebih selain Rusia yang menyatakan “kelonggaran-kelonggaran dari kemurahan hati” ketika menarik pasukan dari Afganistan atau dari Jerman ketika ia terusir dari Prancis yang didudukinya. Hampir tidak perlu bahkan untuk mendiskusikan rencana-rencana khusus, yang memuakkan ketika rencana itu merupakan alasan-alasan moral dasar.

Ada alasan bagus Washington menginginkan rujukan pada Konvensi Jenewa diberangus, dan alasan media sangat bekerja sama—bahkan sampai menginformasikan kepada para pembaca bahwa “wilayah yang diperselisihkan” dianggap sebagai kawasan yang diduduki oleh warga Palestina, bukan Israel, yang memang cukup benar: warga Palestina dan yang lainnya, selain Israel dan negara pelindung adidayanya.

Ada beberapa kekuatan-kekuatan substansial di Israel yang telah lama mendukung negara Palestina di kawasan yang diduduki Israel. Yang terkemuka di antaranya adalah Asosiasi Industrialis Israel, Dov Lautman, merekomendasikan model NAFTA yang kemudian dirundingkan—“sebuah transisi dari kolonialisme ke neokolonialisme,” wartawan dari jurnal Partai Buruh mengomentari, “sebuah situasi yang serupa dengan hubungan antara Prancis dan banyak bekas koloninya di Afrika.” Koordinator operasi Israel di wilayah tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari kerjanya adalah untuk

“mengintegrasikan ekonomi kawasan-kawasan tersebut ke dalam ekonomi Israel.”<sup>396</sup> Negara kecil bergaya Bantustan akan mengizinkan perusahaan-perusahaan Israel untuk membangun pabrik-pabrik di sisi perbatasan Palestina, menyediakan buruh murah tanpa harus memikirkan lingkungan atau ketidakleluasaan lain dalam mencari keuntungan, juga meringankan perhatian-perhatian terhadap mereka yang diejek sebagai “jiwa-jiwa yang indah” bisa melihat perlakuan terhadap para pekerja dan meminta syarat dan gaji yang pantas.

Lainnya lagi dalam model NAFTA, negara yang terpisah akan memberikan senjata yang berguna terhadap kelas pekerja Israel, menawarkan cara-cara untuk membatasi gaji dan keuntungannya, dan untuk meruntuhkan serikat pekerja. Misalnya di Amerika Serikat, tempat perusahaan membangun kapasitas yang berlebih di luar negeri yang bisa digunakan untuk mematahkan pemogokan, dan mengancam “pemindahan” ke Meksiko untuk mengacaukan organisasi para serikat pekerja, sebuah konsekuensi penting NAFTA yang mungkin membuat perusahaan-perusahaan Israel terkesan.<sup>397</sup> Pekerja-pekerja miskin Israel di “kota-kota berkembang” dan sektor Arab tentu saja akan terkena imbasnya, seperti yang sudah terjadi. Selama serangan gencar neoliberal pada 1990-an, para pekerja Israel di pelabuhan berjuang melawan privatisasi pelabuhan dan pembongkaran perjanjian-perjanjian perundingan kolektif yang mendukung hak-hak yang sudah mereka menangkan. Asosiasi pekerja berusaha melakukan aksi pemogokan dengan membelokkan kapal

kargo ke Mesir dan Siprus, tetapi itu menyebabkan pengeluaran transportasi yang sangat mahal. Sebuah pelabuhan di Gaza akan lebih pas. Dengan gabungan otoritas lokal dengan gaya standar neokolonial, operasi-operasi pelabuhan bisa dipindahkan ke sana, dan pemogokan pecah, lalu pelabuhan-pelabuhan Israel dipindahtangankan ke tangan swasta tanpa diketahui sebabnya.<sup>398</sup>

Tidak mengejutkan jika Israel semakin menyerupai Amerika Serikat, dengan ketidaksetaraan dan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, tidak ada peningkatan gaji dan kondisi kerja yang memburuk, serta pengikisan sistem sosial yang awalnya berfungsi dengan baik. Seperti di Amerika Serikat, ekonomi didasarkan pada sektor negara yang dinamis, kadang disembunyikan di balik rubrik industri militer. Sehingga tidak mengejutkan juga kalau Amerika Serikat harus menyokong rencana-rencana yang membuat pionirnya terlihat sangat mirip dengan sponsornya sendiri.

Ada alasan-alasan nasionalis untuk menentang perluasan wilayah. Satu masalah yang membangkitkan perhatian adalah “krisis demografis” yang merupakan akibat dari tingkat kelahiran Yahudi dan Arab yang berbeda (dan di antara penduduk Yahudi, perbedaan antara penduduk yang sekuler dan yang religius). Proyeksi demografis menunjukkan bahwa pada masa yang akan datang Arab Israel dan Yahudi yang sangat religius, banyak non-Zionis, akan menjadi bagian utama dari populasi penduduk. Sebuah konferensi tokoh-tokoh

terkemuka mengenai masalah itu pada Maret 2001 menerima perhatian yang cukup banyak dari media, begitu juga usulan dari analis terhormat Shlomo Gazit untuk pembangunan sebuah kediktatoran sementara untuk mengimplementasikan langkah internal yang keras dalam menyelesaikan masalah “bahaya demografis”, yang ia anggap sebagai “ancaman paling serius yang dihadapi Israel”. Untuk alasan yang sama, ia mengeluarkan sebuah usulan keras untuk menarik diri secara total dari kawasan-kawasan yang diduduki Israel, tidak seperti rencana Clinton-Barak atau yang lainnya.<sup>399</sup>

Makna esensial proses perdamaian Oslo dipahami dengan baik oleh para penentang perang terkemuka di Israel. Sebelum bergabung dengan pemerintah Barak sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri, sejarawan Shlomo Ben-Ami mengamati dalam sebuah kajian akademik bahwa “praktiknya, perjanjian Oslo dibangun di atas dasar neokolonialisme, dalam sebuah kehidupan yang selamanya bergantung kepada yang lainnya.” Dengan tujuan-tujuan ini, persetujuan Clinton-Rabin-Peres dirancang untuk memaksa warga Palestina “untuk bergantung secara penuh kepada Israel” yang menciptakan “sebuah situasi kolonial yang berlanjut”, yang diharapkan menjadi “dasar permanen” untuk “situasi ketergantungan”. Ben-Ami kemudian menjadi kepala perunding dan penyusun proposal Barak.<sup>400</sup>

Selangkah demi selangkah, Amerika Serikat dan Israel telah bekerja keras selama 30 tahun untuk membangun sebuah sistem ketergantungan permanen neokolonial.



Proyek ini mengambil bentuk baru begitu “proses perdamaian Oslo” terjadi, dirancang dalam DOP, dan dijelaskan dengan lebih terperinci dalam perjanjian-perjanjian sementara. Rencana-rencana ini telah diimplementasikan ke dalam program pemukiman dan pembangunan yang terus dijalankan, tidak peduli orang yang sedang berkuasa, kadang sangat efektif di bawah kepemimpinan partai Buruh, yang cenderung lebih kebal dari kritikan. Secara keseluruhan, rencana dan implementasinya telah sangat bergantung pada dukungan militer, diplomatik, dan finansial Amerika Serikat dan khususnya, dukungan ideologis untuk opini terdidik yang vokal.

- Tim Arango dan Thomas Erdbrink, "U.S. and Iran Both Attack ISIS, but Try Not to Look Like Allies," *New York Times*, 3 Des, 2014. <https://www.nytimes.com/2014/12/04/world/middleeast/iran-airstrikes-hit-islamic-state-in-iraq.html?mcubz=0>.
- Mark Mazzetti, "C.I.A. Study of Covert Aid Fueled Skepticism About Helping Syrian Rebels," *New York Times*, 14 Okt, 2014. <http://www.nytimes.com/2014/10/15/us/politics/cia-study-says-arming-rebels-seldom-works.html>.
- Piero Gleijeses, *Visions of Freedom (University of North Carolina Press, 2013)*.
- Lyndon Johnson, "Remarks to American and Korean Servicemen," 1 Nov, 1966, <http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=27974>.
- Keyakinan kuat orang Amerika Serikat abad 19 bahwa AS ditakdirkan untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Amerika Utara.—peny. John Lewis Gaddis, *Surprise, Security, and the American Experience (Harvard, 2004)*.
- Edward Baptist, *The Half Has Never Been Told (Basic Books, 2014)*, analisis yang jitu dan jernih tentang sejarah perbudakan Amerika yang ganjil, dan ketergantungan perkembangan ekonomi pada kekayaan yang dihasilkan dari kerja paksa.
- Palestine Liberation Organization/Organisasi Pembebasan Palestina.—peny.
- "Origins and Fundamental Causes of International Terrorism," UN Sekretariat, diterbitkan ulang dalam M. Cherif Bassiouni, ed., *International Terrorism and Political Crimes (Charles Thomas, 1975)*.
- Claire Sterling, Walter Laqueur; lihat Bab 5. Untuk bahasan lebih lanjut, lihat karya saya, *Towards a New Cold War (TNCW) (Pantheon, 1982)*, mulai hlm. 47, dan tulisan saya di buku Chomsky, Jonathan Steele, dan John Gittings, *Superpowers in Collision (Penguin, 1982, edisi revisi, 1984)*. Untuk ulasan dan dokumentasi lainnya, simak Edward S. Herman, *The Real Terror Network (South End Press, 1982)*.
- Terdapat kategori berbeda berkenaan kejahatan agresi yang jauh lebih parah, seperti dalam kasus serangan AS terhadap Vietnam Selatan, kemudian seluruh Indochina; invasi Soviet ke Afganistan; invasi yang didukung AS di Timor Leste dan Lebanon oleh

sekutunya di Indonesia dan Israel, dll. Kadang kategorinya tampak samar; kita akan mengulas beberapa kasus.

*Washington Post*, 30 Juni 1985; *Time*, 11 Oktober 1982; Goodman, *New York Times*, 7 Februari 1984.

Lihat catatan kaki nomor 10 dan Bab 5 hlm. 247—252.

*Economist*, 14 Juni; *Victoria Brittain*, *Guardian*, 6 Juni; Anthony Robinson, *Financial Times*, 7 Juni 1986, dari Johannesburg. Juga ada laporan dari *BBC World Service*. Yang tenggelam itu mungkin kapal makanan untuk Kuba. Lihat pula *Israeli Foreign Affairs*, Juli 1986.

Tidak disinggung sama sekali di *New York Times*, *Wall Street Journal*, *Christian Science Monitor*, serta harian dan mingguan lain yang terdaftar dalam indeks majalah. *Washington Post* mencantumkan 120 kata dari Moskwa di hlm. 17, 8 Juni, melaporkan kecaman Soviet terhadap serangan Afrika Selatan.

Sebagai latar belakang, pada Oktober 1976, satu unit pesawat Cubana dihancurkan oleh bom dalam penerbangan, menewaskan 73 orang, termasuk seluruh tim medali emas Olimpiade Kuba (bandingkan kejadian aktual “pembantaian Munich”, salah satu momen puncak terorisme Palestina). Aksi teroris itu menyeret nama Orlando Bosch, tokoh terorisme internasional terkemuka, yang telah dilatih CIA bersama sekutu dekatnya terkait perang teroris melawan Kuba dan “memiliki hubungan dekat dengan (dan menerima upah dari) polisi rahasia Cile dan Venezuela”, yang, pada gilirannya, “diajari CIA dan menjaga hubungan dekat dengannya hari ini” (Herman, *Real Terror Network*, 63). Apa tanggapan AS? Pertanyaan ini terlalu teoretis, karena bila seorang tentara Kuba diduga ada di dekat Venezuela, mungkin akan menimbulkan serangan besar terhadap Havana. Tentang invasi Israel ke Lebanon, lihat Bab 2 dan referensi yang dikutip. Sekitar 200 orang Rusia terbunuh saat “beroperasi di wilayah pasukan pertahanan udara Suriah” selama serangan Israel (yang sewenang-wenang dan tidak terduga) terhadap pasukan Suriah di Lebanon, menurut *Aviation Week & Space Technology*, 12 Desember 1983. Pasukan Suriah kemudian memasuki Lebanon dengan

persetujuan AS dan Israel, dan dijadwalkan untuk menyudahi masa tinggal 6 tahun kemudian pada musim panas 1986. Mengenai peristiwa ini, lihat kajian saya, *Fateful Triangle (South End Press, 1983)*.

Strategi pemaksaan perubahan kebijakan suatu negara, biasanya dengan mengganti pemerintahnya.—peny.

Tentang dunia nyata, lihat Gabriel Kolko, *Politics of War (Random House, 1968)*, kajian klasik dan masih tak tertandingi, meski ada banyak kajian penting lainnya; *TNCW*; dan karya saya, *Turning the Tide (TTT) (South End Press, 1985)*, dan sumber yang dikutip. Terkait ulasan yang lebih baru, lihat *Deterring Democracy (Verso, 1991; Hill & Wang, 1992)*, Bab 11, dan sumber-sumber yang dikutip. Melvyn Leffler, "Adherence to Agreements: Yalta and the Experiences of the Early Cold War", *International Security*, Musim Panas 1986; Leffler menyimpulkan, "Sebenarnya, pola kepatuhan Soviet [terhadap Yalta, Potsdam, dan kesepakatan perang lainnya] tidak berbeda secara kualitatif dari pola Amerika." Perlu dicatat bahwa di Yunani dan Korea Selatan pada akhir 1940-an, Amerika Serikat melancarkan operasi pembantaian massal sebagai bagian dari program di seluruh dunia untuk menghancurkan perlawanan antifasis, yang sering kali mendukung kolaborator Nazi dan Jepang.

Arsip Soviet mengungkapkan, "Intelijen AS dan Inggris mendukung aksi pemberontakan bawah tanah Ukraina dan Polandia melawan pasukan Soviet jauh sebelum kemenangan atas Jerman," menjerat ratusan ribu tentara Soviet dan membunuh ribuan petugas, sehingga memperlambat pembebasan Eropa secara signifikan dari pemerintahan Nazi, dengan dampak yang terlalu mengerikan untuk dibicarakan. Hal ini berlanjut tanpa perubahan substansial setelah perang. Jeffrey Burds, "The Early Cold War in Soviet West Ukraine, 1944—1948," *The Carl Beck Papers*, No. 1505, Januari 2001, Center for Russian and East European Studies, University of Pittsburgh. Mungkin ini catatan paling signifikan sejauh ini dari arsip Rusia yang sudah dirilis, dan paling sedikit diketahui.

Lihat *TNCW* (Bab 3) dan pendahuluan saya di buku Morris Morley dan James Petras, *The Reagan Administration and Nicaragua* (Monograph Series No. 1, Institute for Media Analysis, New York, 1987).

Landasannya telah diletakkan di Amerika Serikat dan dalam serangkaian konferensi tentang para teroris masa depan yang diselenggarakan Israel, yang memiliki kepentingan jelas dalam operasi propaganda ini. Mengomentari konferensi terorisme kedua yang diadakan Israel di Washington, Wolf Blitzer mengamati bahwa fokus pada terorisme Arab dan antusiasme yang diungkapkan banyak pembicara sangat penting bagi terorisme dan agresi Israel (khususnya, invasi 1982 ke Lebanon), memberikan "dorongan besar yang nyata untuk kampanye *Hasbara* Israel sendiri di Amerika Serikat, sebagaimana diakui semua orang yang terlibat" (Blitzer, *Jerusalem Post*, 29 Juni 1984); kata "*hasbara*", secara harfiah berarti 'penjelasan', digunakan untuk propaganda Israel, mengungkapkan tesis bahwa karena posisi Israel sangat jelas dalam setiap masalah, hanya perlu memberi penjelasan; propaganda tentu digunakan demi menyembunyikan sesuatu. Untuk keterangan lebih lanjut tentang berbagai pendapat dalam konferensi tersebut, lihat Bab 3, Catatan 212.

Program Kennedy terbatas pada poin kedua dan ketiga dari agenda Reagan; pertama, yang ditetapkan dengan dukungan Kongres Demokrat yang secara langsung mengabaikan keinginan publik, mencerminkan penurunan kekuatan AS dalam tahun-tahun intervensi. Tidak perlu lagi untuk mewujudkan "masyarakat hebat di dalam negeri dan rencana besar di luar negeri", dalam kata-kata penasihat Kennedy, Walter Heller, sehingga poin pertama harus diabaikan. Mengenai sikap publik, lihat *TTT* (Bab 5) dan Thomas Ferguson dan Joel Rogers, *Atlantic Monthly*, Mei 1986. Mengenai hubungan antara program Reagan dengan fase terakhir pemerintahan Carter, yang diperluas oleh para pendukung Reagan, lihat *TNCW* (Bab 7) dan *TTT* (Bab 4 dan Bab 5). Lihat juga Joshua Cohen dan Joel Rogers, *Inequity and Intervention* (*South End Press*, 1986).

Mengenai masalah ini, lihat *TNCW*, khususnya Bab 1 dan Bab 2.

Program hak asasi manusia, sebagian besar merupakan inisiatif Kongres yang mencerminkan perubahan kesadaran publik, bukannya tidak signifikan, terlepas dari eksploitasi untuk tujuan propaganda dan dengan penerapan yang hipokrit, yang secara konsisten mengecualikan kejahatan negara sekutu, justru berkebalikan dengan dakwaan umum. Lihat Chomsky dan Herman, *Political Economy of Human Rights*, khususnya Volume I.

*World Press Review*, Februari 1986.

Kajian teknis yang dikutip Charles Glaser dan Steve Fetter, "National Missile Defense and the Future of U.S. Nuclear Weapons Policy", *International Security*, 26.1, Musim Panas 2001.

Lihat Strobe Talbott dan Nayan Chanda, *The Age of Terror* (*Basic Books* dan *Yale University Center for the Study of Globalization*, 2001).

Keterangan lebih lanjut, lihat di bawah. Mengenai detail dan sumber yang tidak dikutip di sini, lihat bab berikutnya. Adapun tentang terorisme internasional pada periode yang lebih awal, lihat Chomsky dan Edward Herman, *The Political Economy of Human Rights* (*South End Press*, 1979, dua volume). Untuk tinjauan umum soal fase pertama "perang melawan teror", lihat Alexander George, ed., *Western State Terrorism* (*Polity/Blackwell*, 1991).

Sekolah pelatihan tempur bagi tentara Amerika Latin.—peny.

Andrew Bounds, "How the Land of Maize [Guatemala] became a Land of Starvation," *Financial Times*, 11 Juni 2002.

Carothers, "The Reagan Years," dalam Abraham Lowenthal, ed., *Exporting Democracy* (*Johns Hopkins University Press*, 1991); *In the Name of Democracy* (*University of California Press*, 1991); *New York Times Book Review*, 15 November 1998.

Mei 2002, saya mendengarkan selama sekian jam, testimoni pribadi *campesinos* (para petani) dan masyarakat adat tentang pengalaman traumatis mereka saat diusir dari tanah dengan fumigasi—yang merusak berbagai tanaman, meracuni anak-anak dan tanah mereka, dan menewaskan ternak—membuat lahan tersebut bebas digunakan untuk ekstraksi sumber daya oleh perusahaan multinasional, dan akhirnya, mungkin, ekspor hasil tani dengan benih yang disediakan Monsanto setelah keanekaragaman

hayati dan tradisi pertanian dari masa lampau hancur. Ini terjadi di Cauca, tempat orang miskin berhasil memilih gubernur mereka sendiri, pemimpin masyarakat yang dibanggakan, mungkin yang pertama di muka bumi. Keberhasilan kubu sosial tersebut menyebabkan peningkatan tajam aksi teror paramiliter dan represi gerilya, dan fumigasi yang bahkan tanpa pemeriksaan lebih dulu untuk melihat apakah ada koka (semak tropis di Amerika) atau bunga *poppy* yang tumbuh di antara pohon kopi dan tanaman beragam lainnya, dan semuanya hancur. Cauca menduduki peringkat pertama dalam hal pelanggaran hak asasi manusia pada 2001, tidak ada capaian kecil dalam aksi teror negara ini. Gagasan bahwa AS memiliki hak untuk menghancurkan hasil panen yang tidak disukai di negara lain diterima secara wajar di negara adidaya teroris, tetapi tetap sangat aneh mengingat nyaris tidak ada komentar satu pun—tentu tidak ada yang berhak untuk memusnahkan zat mematikan yang diproduksi di North Carolina dan Kentucky.

Saya berkesempatan untuk menyaksikan sejumlah dampak langsung di Diyarbakir, ibu kota bayangan bagi orang Kurdi, pada Februari 2002. Seperti di Kolombia, ada begitu banyak inspirasi yang mengemuka saat melihat keberanian para korban, dan intelektual setempat yang mendukung mereka dan terus-menerus menghadapi hukuman yang kejam, yang bisa sangat keras.

Untuk resensi, lihat buku saya *New Military Humanism* (Common Courage, 1999), *A New Generation Draws the Line* (Verso, 2000), *Rouge States* (South End Press, 2000). Lihat Human Rights Watch (HRW), *The Sixth Division: Military-paramilitary Ties and U.S. Policy in Colombia* (September 2001). Juga *Crisis in Colombia* (Februari 2002), disusun HRW, Amnesty International, dan Washington Office on Latin America untuk sidang dengar pendapat, sebuah tinjauan yang luar biasa rinci tentang kejahatan dan kekebalan hukum militer Kolombia. Catatan itu lagi-lagi diabaikan Departemen Luar Negeri, yang memberi jaminan kepada Kolombia atas dasar “perbaikan” hak asasi manusia yang nyata di mata pemerintah, meskipun tidak bagi orang lain, termasuk negara-negara sekutu.

- Dalam hal ini pengabdian dilakukan Sekretaris Negara Colin Powell, *Memorandum*, (1 Mei 2002).
- Judith Miller, *New York Times*, 30 April 2000, hlm. 1. Tanpa kutipan, artikelnya mengulas laporan Departemen Luar Negeri terakhir tentang teror, yang juga mengecualikan dua negara teroris terkemuka lainnya (Aljazair dan Spanyol) atas capaiannya dalam memerangi teror. Steven Cook, "U.S.–Turkey Relations and the War on Terrorism," Analysis Paper No. 9, *America's Response to Terrorism*, 6 November 2001, Brookings.
- Lihat Catatan 33. Untuk ulasan yang lebih komprehensif mengenai fase terkini "perang melawan teror", lihat kajian saya, 9–11 (Seven Stories, 2001) dan esai di Ken Booth and Tim Dunne, ed., *Worlds in Collision* (Palgrave, 2002) dan James Sterba, ed., *Terrorism and International Justice* (Oxford, 2002).
- Israel Defense Forces (IDF).—peny.
- Yossi Beilin, *Mehiro shel Ihud* (Revivim, 1985), 42; ulasan penting tentang rekam jejak kabinet di bawah Partai Buruh. Untuk lebih detailnya, lihat buku saya, *Fateful Triangle* (FT) (South End Press, 1983; edisi baru 1999), Bab 4, 5.1, 3, dan 5.
- Justin Huggler dan Phil Reeves, *Independent*, 25 April 2002.
- Beilin, *Mehiro shel Ihud*, 147.
- Untuk laporan kekejaman yang mengejutkan atas perintah komando tinggi, dengan kekebalan hukum yang nyata, mengacu pada keterangan pers berbahasa Ibrani di Israel, lihat buku saya *Necessary Illusions* (South End Press, 1989), Apendiks 4.1. Juga FT, Bab 8, termasuk sejumlah pengamatan pribadi, diterbitkan oleh pers Ibrani. Lihat Boaz Evron, *Yediot Ahronot*, 26 Agustus 1988, untuk mendapati reaksi yang dimulai dengan keraguan hingga ia menemukan bukti yang lebih mengerikan lagi dalam catatan harian Kibbutz. Untuk diskusi dan analisis lebih lanjut, lihat Zachary Lockman dan Joel Beinin, ed., *Intifada* (South End Press, 1989); Joost Hiltermann, *Behind the Intifada* (Princeton, 1991); Patricia Strum, *The Women are Marching* (Lawrence Hill, 1992).
- Lihat esai Mouin Rabbani, Sara Roy, dan yang lainnya di Roane Carey, ed., *The New Intifada* (Verso, 2001); dan Roy, *Current History*,



- Januari 2001.
- WFP/Program Pangan Dunia.—peny.
- Brian Whitaker, *Guardian*, 22 Mei 2002.
- Armev, CNBC, "Hardball," 1 Mei 2002. Lewis, "Solving the Insoluble," *New York Times*, 13 April 1998. Saat menjabat, Rabin sendiri menolak kemungkinan adanya negara Palestina, seperti halnya Shimon Peres.
- Clive Ponting, *Churchill (Sinclair-Stevenson, 1994)*, hlm. 132; Churchill, *The Second World War, Vol. 5 (Houghton Mifflin, 1951)*, hlm. 382.
- Sebutan bagi AS oleh mereka yang menganggapnya sebagai penindas negara tetangga di selatan.—peny.
- Piero Gleijeses, *Conflicting Missions (University of North Carolina, 2002)*, hlm. 16, 22, dan 26, mengutip JFK, CIA, dan Pemerintah, dari dokumen rahasia yang dirilis; *Foreign Relations of the United States, 1961–63, Vol. XII, American Republics*, mulai hlm. 13.
- STRATCOM/Komando Strategis.—peny.
- Patrick Tyler, *New York Times*, 25 April 2002; John Donnelly, *Boston Globe*, 28 April 2002.
- David Johnston, Don Van Natta Jr. dan Judith Miller, "Qaeda's New Links Increase Threats From Far-Flung Sites," *New York Times*, 16 Juni 2002. Bab 6, Catatan 327, di bawah.
- Teori psikologi yang mempelajari tindakan eksternal manusia.—peny.
- Tentang masalah yang dibahas di sini, lihat *TNCW*, terutama Bab 1 dan Bab 2.
- Dikutip Richard Fox, *Reinhold Niebuhr (Pantheon, 1985)*, hlm. 138.
- Grup pemberontak yang didanai oleh kelompok politik sayap kanan Amerika Serikat, pada 1979 sampai dengan awal 1990-an, untuk melawan Junta Rekonstruksi Nasional partai Sandinista, Nikaragua.—peny.
- John Dillin, *Christian Science Monitor*, 22 April 1986.
- "Sebagian besar orang Amerika Serikat di segala bidang mendukung rencana perdamaian Saudi" (Mark Sappenfield, *Christian Science Monitor*, 15 April 2002, laporan hasil jajak pendapat). Rencana tersebut, yang diadopsi sejumlah negara Arab pada Maret 2002, mengulangi seruan penyelesaian dua negara sesuai kesepakatan

internasional yang telah berlaku sejak 1976 (lihat di bawah), yang terus ditentang Washington.

*New York Times*, 2 Juni 1985.

*New York Times*, 17 Maret 1985.

Lihat *TNCW* (hlm. 267, 300, dan 461); *FT* (hlm. 67 dan 189).

Rabin, *The Rabin Memoirs* (Little, Brown, 1979, hlm. 332). Demi menjaga sikap moderat, Rabin menilai "pengungsi dari Jalur Gaza dan Tepi Barat" harus dipindahkan ke Timur Sungai Yordan; lihat *TNCW* (hlm. 234) untuk kutipan yang representatif. Lihat *FT* mengenai konsep lama tentang "pemindahan" penduduk asli sebagai solusi atas masalah ini, dan variannya sekarang; misalnya, oleh Rabi Kahane, atau tokoh sosialis demokratis, Michael Walzer, yang menyarankan agar mereka yang "marginal secara bangsa"—yaitu, warga Arab di Israel—akan "dibantu" untuk pergi. Ungkapan "marginal secara bangsa" menyingkap kontradiksi antara prinsip demokrasi standar dan zionisme arus utama, dan realisasinya di Israel. Lihat *TNCW* dan *FT* untuk bahasan lebih lanjut mengenai masalah ini, yang nyaris tak pernah disinggung di AS.

Friedman menghadirkan sejumlah laporan serius dan profesional dari Lebanon, sepanjang perang 1982, dan adakalanya dari Israel; lihat contohnya pada laporannya soal Jalur Gaza, 5 April 1986.

Friedman, *New York Times Magazine*, 7 Oktober 1984; *New York Times*, 17 Maret 1985; editorial, *New York Times*, Maret 1985; dan banyak lagi berita dan pendapat lainnya.

Lihat Bab 2, Catatan 141 dan bagian teks, untuk rinciannya. Untuk diskusi lebih lanjut mengenai "proses perdamaian" dan "penolakan" dalam pengertian non-Orwellian tentang berbagai istilah ini—yaitu, di dunia nyata—dan keberhasilan sistem indoktrinasi menghilangkan fakta tersebut dari catatan sejarah, lihat *FT*.

Untuk bahasan lebih lanjut, lihat ulasan saya terkait memoar Kissinger, diterbitkan ulang dalam *TNCW*.

Tawaran Anwar Sadat ini merupakan tanggapan atas usulan Mediator PBB, Gunnar Jarring, yang diterima Sadat. Israel secara resmi mengakui ini sebagai tawaran perdamaian yang serius, tetapi

memilih melakukan ekspansi wilayah untuk mewujudkan perdamaian. Ketika Jarring meninggal pada 29 Mei 2002, berita kematiannya diwartakan di surat kabar utama AS, tetapi peristiwa terpenting dalam karier politiknya dihilangkan, kecuali satu: *Los Angeles Times*, yang dengan keliru menyatakan kedua belah pihak menolak usulan Jarring. (Dennis McLellan, 1 Juni 2002, diterbitkan ulang dalam *Boston Globe*).

Eric Pace, *New York Times*, 7 Oktober 1981.

Untuk diskusi lebih lanjut, lihat *TTT* dan esai saya dalam *U.S. International and Security Policy: The New Right in Historical Perspective*, *Psychohistory Review* 15.2, Musim Dingin 1987 (Lawrence Friedman, ed.), dan di Thomas Walker, ed., *Reagan vs. The Sandinistas* (*Westview*, 1987). Juga pendahuluan saya untuk buku Morley and Petras, *The Reagan Administration*. Catatan mengenai berbagai tipu muslihat mengenai hal ini sungguh mengesankan.

Salah satu nilai etika resmi tentara Israel, yang antara lain menyatakan prajurit hanya akan menggunakan senjata dan kekuatannya sejauh yang dibutuhkan untuk memenuhi misi, dan tetap menjaga kemanusiannya.—peny.

Mengenai masalah ini, termasuk konsep awal "aset strategis, berbagai negosiasi pasca-1973 yang mengarah pada persetujuan Kamp David 1979, dan langkah cepat yang diambil AS untuk melemahkan "Rencana Reagan" September 1982 serta "Rencana Shultz" untuk Lebanon beberapa bulan kemudian lihat *FT*. Kenyataannya, yang cukup jelas saat itu, sangat berbeda dengan versi yang diulang-ulang media dan sebagian besar cendekiawan, meski sebagian diakui beberapa tahun kemudian; Lihat, misalnya, Bab 2, Catatan 130 dan teks.

Rubinstein, *Davar*, harian resmi Partai Buruh, 5 Agustus 1983.

Jenderal (Purnawirawan) Mattityahu Peled, "American Jewry: 'More Israeli than Israelis'," *New Outlook*, Mei—Juni 1975.

Pail, "Zionism in Danger of Cancer," *New Outlook*, Oktober—Desember 1983, Januari 1984.

Untuk detailnya, lihat *TNCW*, mulai hlm. 247. Mengenai peraturan baru, lihat Aryeh Rubinstein, *Jerusalem Post*, 14 November 1985.

Untuk ulasan pengamat Israel, membandingkan hukum Israel dan Apartheid Afrika Selatan, lihat Ori Shohet, "No One Shall Grow Tomatoes ....," *Ha'aretz Supplement* (27 September 1985, diterjemahkan dalam *News from Within* (Jerusalem), 23 Juni 1986), yang membahas berbagai ketentuan untuk memastikan diskriminasi terhadap warga Arab Israel dan Arab pada umumnya di wilayah pendudukan berkaitan dengan tanah dan hak lain. Judul tulisannya mengacu pada peraturan militer yang mewajibkan orang Arab di Tepi Barat mendapatkan izin untuk menanam pohon buah atau sayuran, salah satu ketentuan yang digunakan guna memungkinkan Israel mengambil alih tanah di wilayah pendudukan dengan alasan perizinan yang tidak lengkap.

Paul Berman, "The Anti-Imperialism of Fools," *Village Voice*, 22 April 1986, mengutip "sebuah esai yang inspiratif" karya Bernard Lewis di *New York Review* yang menguraikan tentang doktrin ini. Untuk penggunaan licik lainnya dari konsep anti-semitisme, lihat *FT*, mulai hlm. 14. Mengenai pembantaian Doueimah, lihat *TTT*, hlm. 76.

Analisis, *Pentagon Papers*, Gravel edition, *Beacon Press* 1971, II.22. Ancaman militer AS, sebagaimana diakui, sangat penting untuk memungkinkan AS mencegah penyelesaian politik yang disiapkan pada Konferensi Jenewa 1954.

Untuk ulasan lebih lanjut, lihat *TNCW* dan *For Reasons of State* (*Pantheon*, 1973).

Julia Preston, *Boston Globe*, 9 Februari 1986.

Untuk bahasan mengenai hal ini, lihat referensi di Catatan 67. Poin yang dipermasalahkan adalah berbagai pernyataan yang diizinkan di forum nasional, bukan kontribusi individu, yang harus dinilai berdasarkan keahlian mereka sendiri.

Lihat, misalnya, Timothy Garton Ash, "New Orthodoxies: I," *Spectator* (London), 19 Juli 1986. "Perdebatan mengenai 'kesetaraan moral' di AS", yang menggelikan, (hanya satu kubu yang mendapat perhatian publik, meski ada kepura-puraan untuk mengimbangi kubu yang bertentangan) perlu dibahas terpisah.

Shaul Bakhash, *New York Review of Books*, 14 Agustus 1986.

"Non-Orwellian Propaganda Systems," *Thoreau Quarterly*, Musim

- Dingin/Musim Semi 1984.
- Reich, *New York Times*, 24 Juli 1986; Heller, *New York Times*, 10 Juni 1986.
- New York Times*, 21 April 1986.
- New York Times*, 17—18 Oktober 1985.
- Ha'aretz*, 22 Maret 1985; untuk sumber lain, lihat *FT*, hlm. 54, 75, dan 202.
- Herzog, Yossi Beilin, *Mechiro shel Ihud* (Tel Aviv, 1985), hlm. 147. Gazit, *Hamakel Vehagezer* (Tel Aviv, 1985), dikutip dalam *Hamishmar*, 7 November 1985. Rabin, *Washington Post*, 6 Desember 1975; *Newsweek*, 15 Desember 1975; *TNCW*, 267—268. Saat merujuk pada Reagan, saya bukan menyoal sosok simbolis, melainkan para pembuat kebijakan dan pakar kehumasan pemerintah.
- Yediot Ahronot*, 15 November 1985.
- Ze'ev Schiff, *Ha'aretz*, 8 Februari 1985; Lihat *FT* untuk kesaksian partisipan, yang tak disinggung di AS, dan untuk penyangkalan fakta oleh para pembela teror Israel, dengan alasan media tersebut anti-Semit dan "pro-PLO", sementara "orang Arab membesar-besarkan" dan "tidak ada beban untuk berbohong" dalam "budaya Arab" (Martin Peretz, pandangan terakhir dimuat di *New Republic*, 29 Agustus 1983).
- Lihat Catatan 131.
- Godfrey Jansen, *Middle East International*, 11 Oktober 1985, mengutip *LAT*, 3 Oktober 1985.
- Terbit di *Against the Current*, Januari 1986.
- Bandingkan dengan *FT*, hlm. 127 dan 176.
- Bernard Gwertzman, *New York Times*, 2 dan 7 Oktober 1985.
- Beverly Beyette, *Los Angeles Times*, laporan tentang International Conference on Terrorism, *Los Angeles Times*, 9 April 1986.
- Edward Schumacher, *New York Times*, 22 Oktober 1985.
- New Republic*, 21 Oktober 1985; 20 Januari 1986; *Associated Press*, 4 April 1986.
- Robert McFadden, "Terror in 1985: Brutal Attacks, Tough Response," *New York Times*, 30 Desember 1985.

UPI, *Los Angeles Times*, 28 Desember 1985; McFadden, "Terror in 1985"; Dershowitz, *New York Times*, 17 Oktober 1985. Alexander Cockburn, *Nation*, 2 November 1985, sepengetahuan saya, ini satu-satunya catatan tentang kemunafikan yang memalukan itu.

Ross Gelbspan, *Boston Globe*, 16 Desember 1985. Mengenai kekejaman Contra, lihat laporan reguler American Watch dan sejumlah kajian rinci lainnya, antara lain, *Report of Donald T. Fox, Esq. and Prof. Michael J. Glennon to the International Human Rights Law Group and the Washington Office on Latin America*, April 1985. Mereka mengutip pejabat tinggi Departemen Luar Negeri yang menggambarkan sikap AS sebagai "kelalaian yang disengaja". Catatan mengerikan ini pun umumnya diabaikan media dan bahkan dengan tegas ditolak (tanpa bukti) oleh para pembela kekejaman Barat, misalnya Robert Conquest, "Laying Propaganda on Thick," *Daily Telegraph* (London), 19 April 1986, yang meyakinkan kita bahwa tuduhan Oxfam dan yang lainnya tidak hanya keliru, tetapi juga "konyol". Penaklukan disorot karena paparan kejahatan Komunis dan penarikan dukungan para pembelanya. Lihat juga Gary Moore, *National Interest*, Musim Panas 1986, dengan pesan serupa; atau Jeane Kirkpatrick (*Boston Globe*, 16 Maret 1986), yang mengatakan, "Contras berusaha keras agar tidak merugikan warga sipil. Aksi mereka tidak seberapa dibandingkan dengan kebrutalan sistematis yang dilakukan pemerintah Sandinista terhadap pembangkang dan lawannya"; kebohongan dan dukungan semacam ini untuk kekejaman Soviet tidak akan ditoleransi di media. Lihat juga Catatan 127 dan Bab 3 Catatan 206. Prosedur yang biasa diterapkan adalah dengan tidak menyangkalnya, tetapi hanya mengabaikan kekejaman yang dilakukan proksi atau klien Barat. Untuk dukungan yang lebih menggelikan, kita dapat mencermati fabrikasi yang ditujukan untuk mengklaim bahwa kritik terhadap kekerasan AS diajukan dengan mengabaikan laporan tentang kekejaman musuh resmi. Untuk menemukan beberapa contoh, termasuk kebohongan yang cukup mencolok, lihat *Political Economy of Human Rights*, Vol. II; "Decade of Genocide in Review," tulisan saya di *Inside Asia*

(London), Februari—Maret 1985 (dicitak ulang dalam *James Peck*, Ed., *The Chomsky Reader*; Pantheon, 1987), dan "Visions of Righteousness," *Cultural Critique*, Musim Semi 1986; Christopher Hitchens, "Chorus and Cassandra," *Grand Street*, Musim Gugur 1985.

*New York Times*, 29 Juni 1985.

Dan di Israel. Setelah ia berkuasa, terjadi peningkatan penyiksaan di penjara, penahanan administratif, pengusiran yang melanggar hukum internasional, dan penyegelan rumah, praktik yang lazim di bawah pemerintahan Partai Buruh sebelumnya yang dipuji kelompok liberal kiri Amerika, tetapi berkurang atau dihentikan pada masa Menachem Begin. Danny Rubinstein, *Davar*, 4 Februari 1986; Eti Ronel, *Al Hamishmar*, 11 Juni 1986. Mengenai penggunaan kekerasan, lihat *Ha'aretz*, 24 Februari 1986; and Ghadda Abu Jaber, *1985 Policy of Torture Renewed*, Alternative Information Center, Jerusalem, Februari 1986; Koteret Rashit, 7 Mei 1986. Lihat juga Amnesty International, "Town Arrest Orders in Israel and the Occupied Territories," 2 Oktober 1984.

Curtis Wilkie, *Boston Globe*, 10 Maret 1985; Julie Flint, *Guardian* (London), 13 Maret 1985; Jim Muir, *Middle East International*, 22 Maret 1985; Breindel, *New York Times* Op-Ed, 28 Maret 1985; Nora Boustany, *Washington Post*, 12 Maret 1985. Grafiti di dinding itu muncul di Joseph Schechia, *The Iron Fist* (ADC, Washington, 1985).

*Guardian* (London), 2 dan 6 Maret, 1985.

Ilya, *Jerusalem Post*, 27 Februari 1985; Magnus Linklater, Isabel Hilton, dan Neal Ascherson, *The Fourth Reich* (Hodder & Stoughton, London, 1984, 111); *Der Spiegel*, 21 April 1986 (lihat Bab 3); *New York Times*, 13 Maret 1985.

Ihsan Hijazi, *New York Times*, 1 Januari 1986; Hijazi mencatat bahwa laporan dari Israel tampak berbeda.

*Christian Science Monitor*, 30 Januari 1986.

Untuk lebih rinci, lihat *FT*. Atau bandingkan, misalnya, apa yang muncul di *Newsweek* dengan apa yang dikatakan kepala biro Tony Clifton dalam buku *God Cried* (Clifton dan Catherine Leroy,

Quartet, 1983), yang diterbitkan di London. Atau simak *My War Diary* oleh Kolonel Dov Yermiya, salah satu pendiri tentara Israel, yang diterbitkan dengan melanggar sistem sensor di Israel (lihat *FT* untuk banyak kutipan) dan kemudian terbit dalam terjemahan bahasa Inggris (*South End Press*, 1983), tetapi sama sekali diabaikan media, meski jelas merupakan karya yang sangat penting. Masih ada banyak contoh lainnya.

Landrum Bolling, ed., *Reporters Under Fire* (Westview, 1985). Memuat, misalnya, kritik terhadap media oleh Anti-Defamation League of B'nai Brith dan tuduhan lainnya yang nyaris tidak masuk akal (lihat *FT* untuk analisis berbagai dokumen ini), tetapi tidak membahas kajian American-Arab Anti-Discrimination Committee yang menyajikan bukti "bias pro-Israel yang konsisten" dalam liputan tentang perang.

Kifner, *New York Times*, 10 Maret 1985; Muir, *Middle East International*, 22 Februari 1985; Mary Curtius, *Christian Science Monitor*, 22 Maret 1985; Jim Yamin, *Christian Science Monitor*, 25 April 1985; Yamin, wawancara, *MERIP Reports*, Juni 1985; David Hirst, *Guardian* (London), 2 April 1985; Robert Fisk, *Times* (London), 26 dan 27 April 1985; *Philadelphia Inquirer*, 28 April 1985. Mengenai upaya Israel menyulut pertikaian di wilayah Chouf dari pertengahan 1982, lihat *FT*, mulai hlm. 418.

*Middle East International*, 22 Maret 1985.

UPI, *Boston Globe*, 22 September 1984; Olmert, wawancara, *Al Hamishmar*, 27 Januari 1984; Hirsh Goodman, *Jerusalem Post*, 10 Februari 1984; Wieseltier, *New Republic*, 8 April 1985; mengenai Hasbara, lihat Pendahuluan, Catatan 24.

Don Oberdorfer, "The Mind of George Shultz," *Washington Post Weekly*, 17 Februari 1986; Rubin, *New Republic*, 2 Juni 1986; Friedman, *New York Times*, 16 Februari 1986, di antara sejumlah laporan lain. Seperti Wieseltier, Rubin menegaskan, "terorisme yang disponsori Suriah ini ... bukan bentuk kemarahan atas kegagalan Barat mengupayakan perdamaian, tetapi upaya untuk memblokir diplomasi sepenuhnya", karena "hampir semua solusi yang tersedia merupakan ancaman bagi pemerintah Suriah." Rubin tahu Suriah



telah mendukung solusi diplomatik yang sesuai konsensus internasional, tetapi karena mereka terpencil dari kubu penolak di AS, solusi ini tidak "bisa dibayangkan" dan tidak dihitung sebagai "pilihan diplomatik"; lebih lanjut lihat Bab 1. Tentang persepsi Lebanon, lihat Bab 5, Catatan 302.

*Los Angeles Times*, 18 Oktober 1985.

*New York Times*, 18 Oktober 1985.

Ze'ev Schiff, "The Terror of Rabin and Berri," *Ha'aretz*, 8 Maret 1985; juga Jenderal Ori Or, komandan komando utara IDF, IDF radio; FBIS, 15 April 1985.

Gershon Schocken, editor of *Ha'aretz, Foreign Affairs*, Musim Gugur 1984.

Shimon Peres, *New York Times*, 8 Juli 1983. Tentang kekejaman di Khiam, lihat *TNCW* hlm. 396-397; *FT* hlm. 191; Yoram Hamizrahi, Davar, 7 Juni 1984; laporan media dikutip dalam terbitan Israeli Democratic Front, *Nisayon Leretsach-Am Bilvanon: 1982* (Tel Aviv, 1983).

Jim Muir, *Sunday Times* (London), 14 April 1985; *Christian Science Monitor*, 15 April 1985; Joel Greenberg, *Christian Science Monitor*, 30 Januari 1986; Sonia Dayan, Paul Kessler dan Géraud de la Pradelle, *Le Monde diplomatique*, April 1986; Menachem Horowitz, *Ha'aretz*, 30 Juni 1986.

*Information Bulletin 21*, 1985, International Center for Information on Palestinian and Lebanese Prisoners, Deportees, and Missing Persons, Paris. *Israel & Palestine* (Paris, Juli 1986). Tentang penjara yang dikelola IDF di Lebanon, lihat *FT*, mulai hlm. 23.

Benny Morris dan David Bernstein, *JP*, 23 Juli 1982; untuk perbandingan oleh wartawan Israel mengenai kehidupan di bawah bayang-bayang PLO dan umat Kristen sekutu Israel di Lebanon, dengan gambaran yang sangat berbeda dari gambaran standar Amerika, lihat *FT* mulai hlm. 186. Yang tidak kalah penting, laporan dari Lebanon oleh wartawan Israel, Attallah Mansour, tentang Maronite. Lebih lanjut mengenai Nabatiya, lihat *FT* hlm. 70 dan 187.

*Economist*, 19 November 1977.

John Cooley, dalam Edward Haley dan Lewis Snider, ed., *Lebanon in Crisis* (Syracuse, 1979). Lihat *TNCW* hlm. 321; *FT* hlm. 70 dan hlm. 84.

Edward Haley, *Qaddafi and the United States since 1969* (Praeger, 1984), hlm. 74.

James Markham, *New York Times*, 4 Desember 1975.

AP, *New York Times*, 21 Februari 1986; Julie Flint, *Guardian* (London), 24 Februari 1986; Ihsan Hijazi, *New York Times*, 28 Februari 1986; AP, 20 Februari 1986. Satu-satunya laporan terperinci di AS, sepengetahuan saya, dihadirkan Nora Boustany, *Washington Post*, 1 Maret, meskipun sebagian besar peran IDF dikecualikan, mungkin oleh editor, karena wartawan di tempat kejadian mengetahui dengan baik apa yang sedang terjadi—termasuk penembakan oleh helikopter tempur Israel terhadap penduduk desa yang melarikan diri dari desa, pemukulan dan penyiksaan di hadapan petugas Israel, dan lain-lain, seperti dituturkan beberapa orang secara pribadi.

Ihsan Hijazi, *New York Times*, 25 Maret 1986; Dan Fisher, *Los Angeles Times*, 28 Maret 1986; *Associated Press*, 7 April 1986; Hijazi, *New York Times*, 8 April 1986.

Lihat, contohnya, Robert Leiken, "Who Says the Contras Cannot Succeed?," *Washington Post*, 27 Juli 1986—tanpa argumen yang jelas, menolak catatan kekejaman yang ekstensif oleh para teroris yang ia dukung dengan gaya apologis biasa (lihat Catatan 100), dan dengan gaya Maois yang akrab dalam tulisannya.

Peres, *New York Times*, 8 Juli 1983; Breindel, *New York Times*, Op-Ed, 28 Maret 1983; *New York Times*, 16 September 1983 dan 3 Juni 1985; Kamm, *New York Times*, 26 April 1985; Friedman, *New York Times*, 9 Januari 1985, 20 Februari 1985, dan 18 Februari 1985; Brzezinski, *New York Times*, 9 Oktober 1983; Reagan, konferensi pers, *New York Times*, 29 Maret 1984 dan 28 Oktober 1983. Simak juga ucapan Rabi Alexander Schindler, Presiden Union of American Hebrew Congregations (Reform): PLO "mengancam untuk menghancurkan segala yang tersisa dari Beirut, daripada menyerah"; mengirim pasukan untuk mengawasi kepergian

mereka alih-alih membiarkan Israel menyelesaikan semuanya “jelas merupakan tugas paling memalukan” yang pernah diberikan kepada Mariner (UPI, *Boston Globe*, 28 Oktober 1984). Gambaran menarik tentang pemahaman keagamaan menyokong kekerasan negara ini diabaikan dalam berita *Times* pada hari yang sama.

*New York Times*, 7 Juni 1983.

Quandt, *American–Arab Affairs*, Musim Gugur 1985; Hillel Schenker, Wawancara dengan David Shipler, *New Outlook* (Tel Aviv), Mei 1984.

Oposisi Partai Buruh mendukung perang ini, sebagian karena hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa 98 persen pendukung Likud dan 91 persen pendukung Labor menganggapnya sah untuk dilakukan. Kala perang berakhir dengan pengeboman Beirut pada pertengahan Agustus, dukungan untuk Begin dan Sharon mencapai 82 persen dan 78 persen, dan merosot menjadi 72 persen dan 64 persen usai pembantaian Sabra-Shatila. Lihat *FT*, hlm. 251–262, hlm. 394, dan mulai hlm. 378.

Philip Weiss, *New Republic*, 10 Februari 1986.

Schiff dan Ya’ari, *Israel’s Lebanon War* (Simon & Schuster, 1984), hlm. 35; John Kifner, *New York Times*, 25 Juli 1981. Schiff dan Ya’ari menyatakan, “Kendati ada banyak kesulitan untuk menentukan target dan mencapai tujuan langsung, lebih dari 100 orang terbunuh,” termasuk 30 “teroris”. Buku Schiff-Ya’ari adalah terjemahan dari versi asli yang berbahasa Ibrani; sekitar 20 persen dari versi asli dihapuskan oleh lembaga sensor Israel, menurut Ya’ari (*Kol Hair*, 2 Februari 1984), atau sekitar 50 persen menurut cendekiawan Amerika, Augustus Norton, dengan mengutip seorang “koresponden yang dihormati—yang tidak berhubungan dengan penulis” (*Middle East Journal*, Musim Panas, 1985). Penyensoran di Nikaragua, di bawah serangan tentara bayaran AS, menimbulkan kemarahan besar di Amerika. Penyensoran paling ekstrem di Israel, tentu saja, ditujukan terhadap orang-orang Arab, termasuk yang menjadi warga Israel. Lihat *FT*, mulai hlm. 139, dan *TTF*, mulai hlm. 73 untuk contoh lebih lanjut. Untuk perbandingan lebih rinci antara sensor di Israel dan

Nikaragua, dan rekam jejak AS yang jauh lebih buruk, di bawah ancaman yang lebih rendah (sebagaimana dicatat Hakim Mahkamah Agung Brennan), lihat buku saya, *Necessary Illusions*, (South End Press, 1989), Bab 5 dan Lampiran, juga Apendiks II.2.

Walsh, *Washington Post Weekly*, 4 Maret 1985; Wilkie, *Boston Globe*, 18 Februari 1985.

*FT*, hlm. 448 dan hlm. 440, mengutip pers Israel; *News from Within* (Tel Aviv), 1 Oktober 1985; *Yediot Ahronot*, 4 November 1983.

*Ha'aretz*, 25 Juni 1982; lihat *FT*, mulai hlm. 200, untuk kutipan lebih lanjut dan analisis serupa oleh pengamat Israel.

B. Michael, *Ha'aretz*, 13 November 1983; Bachar, *Yediot Ahronot*, 11 November 1983; Morris, *JP*, 5 Juni 1984.

*New Republic*, yang gigih membela Israel dari "pegiat media" yang "meyakini segala yang buruk terkait negara Yahudi (dan nyaris sepenuhnya merefleksikan sisi baik musuhnya)" mengecam *Washington Post* karena "bersekongkol dalam fitnah keji" dengan menyatakan Sharon telah berupaya mengukuhkan "Orde Baru" (istilah Hitler) di Lebanon (Martin Peretz, *New Republic*, 18 Maret, 1985; *New Republic*, 9 Maret, 1984). Istilah itu memang digunakan Hitler, Sharon pun memakainya, sebagaimana umumnya pengamat Israel. Sebulan sebelum Peretz mengecam *Washington Post* karena menyajikan fakta yang akurat, berita utama di surat kabar utama sayap kanan, *Yediot Ahronot*, menyatakan: "Sharon mengungkapkan rencananya untuk membentuk 'orde baru,'" mengutip Duta Besar AS, Morris Draper, yang menuturkan kembali ucapan Sharon dalam pertemuan tertutup Jewish Federation di Los Angeles (23 Februari, 1984). Penggunaan istilah ini sudah lazim; lihat *FT* untuk contoh lain, dan mengenai kasus lain ketika *New Republic* menghindari sumber berita tertentu dari Israel agar tidak menyimpang dari garis kebijakan partai (misalnya, mulai hlm. 215 dan mulai hlm. 258).

Olmert, *Ma'ariv*, 22 November 1983; Milson, *Koteret Rashit*, 9 November 1983; Sharon, dikutip Ze'ev Schiff, *Ha'aretz*, 23 Mei 1982; Milshtein, *Hadashot*, 26 September 1984; Rubinstein, *Ha'olam Haze*, 8 Juni 1983. Mengenai aspirasi Ben-Gurion sebelum

dan setelah Israel berdiri, lihat *FT*, hlm. 51 dan mulai hlm. 160; Shabtai Tevet, *Ben-Gurion and the Palestinian Arabs* (Oxford, 1985) dan ulasan Benny Morris, *Jerusalem Post*, 11 Oktober 1985.

*FT*, hlm. 199, mengutip wawancara di *Ha'aretz*, 4 Juni 1982; *FT*, hlm. 117 dan hlm. 263.

*Nouvel Observateur*, 4 Mei 1984; *Observer* (London), 29 April 1984; *Jerusalem Post*, 16 Mei; *San Francisco Examiner*, 5 Mei 1984; *Washington Post*, 8 Juli 1984. Lihat, "Manufacture of Consent," Desember 1984, terbitan *The Community Church*, Boston, and "United States and the Middle East," *ENDpapers* (UK), Musim Panas 1985, untuk lebih detailnya. Mengenai sikap Israel sebelumnya untuk menghindari penyelesaian politik, dengan dukungan AS, lihat *FT* dan Beilin, *Mehiro shel Ihud*.

*Ha'aretz*, 29 September 1985 (dikutip Amnon Kapeliouk, *Le Monde diplomatique*, November 1985); Koteret Rashit, 9 Oktober 1985.

Julie Flint, *Guardian Weekly*, 19 Januari 1986.

*Washington Post* tidak menyebut ini sebagai "aksi teroris" yang dilakukan "komandan teroris" Menachem Begin. Haganah juga tampaknya terlibat; lihat Bab 5, Catatan 315.

Christian Williams, Bob Woodward, dan Richard Harwood, "Who Are They?," *Washington Post*, 10 Februari 1984; editorial, *New York Times*, 19 Mei 1976. Tentang realitasnya, lihat *TNCW* dan *FT*. Pandangan sejumlah organisasi hak asasi manusia menarik untuk dicatat. Jadi, untuk memastikan tidak ada informasi yang tak menyenangkan, International League for Human Rights menarik perwakilannya dari Israel dengan alasan Partai Buruh yang berkuasa telah berusaha menghancurkannya dengan cara yang sangat kasar sehingga mereka diblokir oleh Pengadilan Israel; Lihat buku saya, *Peace in the Middle East?* (Pantheon, 1974, hlm. 196—197), *FT* hlm. 142 dan hlm. 178, dan referensi yang dikutip. Perilaku seperti itu terhadap negara lain akan menimbulkan kemarahan, tetapi hal itu tidak memengaruhi reputasi Liga Internasional. Demikian pula, jurnal hak asasi manusia *Human Rights Internet*, yang hanya melaporkan pelanggaran hak asasi manusia tanpa ulasan lebih lanjut, mengizinkan Anti-Defamation League

leluasa menanggapi dakwaan terhadap Israel—sebuah praktik yang dikecualikan untuk negara lain; Demikianlah, Partai Komunis, yang memiliki reputasi yang sebanding dengan ADL sebagai organisasi hak asasi manusia, tidak diberi ruang untuk menanggapi tuntutan terhadap Uni Soviet.

*New Outlook*, Tel Aviv, Oktober 1985; *Davar*, 18 Juli 1985. Ahli sejarah militer Uri Milshstein menuliskan, bertolak belakang dengan laporan umum, Israel mengawali konflik yang mengarah pada “perang atrisi” serbuan tank ke kubu Mesir, membunuh puluhan serdadu; *Monitin*, Agustus 1984.

Thomas Friedman, *New York Times*, 31 Januari 1986.

Hirst, *Manchester Guardian Weekly*, 20 April 1986; Harkabi, dikutip Amnon Kapeliouk, *Le Monde diplomatique*, Februari 1986.

PLO mengklaim bahwa ketiga orang Israel yang dibunuh telah terlibat dalam operasi ini, tuduhan yang sangat tidak masuk akal menurut wartawan Israel David Shaham (John Bulloch, “PLO Victims were Mossad Agents,” *Daily Telegraph* [London], 3 Oktober 1985; Shaham, *Al Fajr*, 29 November 1985).

*Ha’aretz*, 12 Juni 1986. Laporan itu tak menunjukkan adanya persidangan.

*FT*, hlm. 77; David Shipler, *New York Times*, 25 November 1983; *New York Times*, 26 Januari 1984. Pada 1989, *Washington Post* memuat cerita tentang pembebasan orang Palestina yang ditahan pemerintah karena motif politik—banyak yang ditempatkan di penjara kontroversial, Ketziot di Negev, ruang penyiksaan lainnya. Cerita tersebut menyebutkan, “Sementara itu, sebelum fajar merekah, angkatan laut Israel menghentikan sebuah kapal yang berlayar dari Lebanon ke Siprus dan menangkap 14 orang yang disebut tersangka teroris”, membawa mereka ke Israel untuk “diinterogasi”. Organisasi perdamaian Israel, Dail’Kibbush, melaporkan bahwa pada 1986—1987, pengadilan militer Israel menjatuhkan hukuman terhadap puluhan orang yang diculik di laut atau di Lebanon karena “menjadi anggota organisasi terlarang”, tetapi tak punya kegiatan atau rencana anti-Israel; Orang-orang Palestina yang diculik diduga anggota PLO, dan

orang Lebanon anggota Hizbullah dan setidaknya ada satu kasus yang melibatkan anggota organisasi Sy'ah utama, Amal, semuanya organisasi yang sah secara hukum di Lebanon. Linda Gradstein, *Washington Post*, 6 April 1989; "Political Trials," Dai l'Kibbush, Jerusalem, Agustus 1988, *News from Within*, 14 Desember 1988. *New York Times*, 30 Juni 1984 dan 1 Juli 1984; *Boston Globe*, 1, 4, dan 12 Juli 1984; *Middle East Reporter* (Beirut), 30 Juni 1984; *Observer* (London), 1 Juli 1984; Jansen, *Middle East International*, 13 Juli 1984.

Thomas Friedman, *New York Times*, 5 Februari 1984; AS "menahan diri untuk tidak menghakimi tindakan Israel"; (*New York Times*, 5 Februari); juga Norman Kempster, *Los Angeles Times*, 5 Februari 1986.

*News from Within* (Jerusalem), 1 November 1985.

*Los Angeles Times-Boston Globe*, 29 Juni 1984. Mengenai represi di Golan, lihat *FT*, mulai hlm. 132.

Lihat Uri Milshstein, *Monitin*, Agustus 1984, untuk laporan terkini.

Lihat Pendahuluan.

*FT*, mulai hlm. 188.

*Rabin Memoirs*, hlm. 280—281.

*New York Times*, 12 Oktober 1985. Sementara itu, *Times* mengecam Iran, "yang tak kunjung mengekstradisi atau menghukum orang-orang yang membajak pesawat sipil Kuwait dan membunuh dua warga Amerika pada Desember 1984" dan mendesak agar Barat memboikot Libia jika Qaddafi tetap "melindungi pembajak". Editorial, *New York Times*, 14 Mei 1986. Namun, tidak disinggung sedikit pun tentang mereka yang melindungi pembajak pesawat Soviet, atau tentang catatan panjang pembajakan pesawat dan kapal laut oleh sekutu Washington: Israel.

Abraham Sofaer, *Foreign Affairs*, Musim Panas 1986.

Livia Rokach, *Israel's Sacred Terrorism*, yang mengacu pada catatan harian Moshe Sharett (*AAUG*, 1980, mulai hlm. 20); "Sixty Minutes," CBS, 19.00, 19 Januari 1986.

Sune Persson, *Mediation and Assassination* (London, 1979); Michael Bar-Zohar, *Ben-Gurion: A Biography* (Delacorte, 1978), hlm. 180–

181; Stephen Green, *Taking Sides* (Morrow, 1984), mulai hlm. 38.; Kimche, *Seven Fallen Pillars* (Secker & Warburg, 1953), hlm. 272–273. Sama halnya dengan pembunuh Lord Moyne, dari grup teroris yang sama, yang diberi penghormatan dengan dibuatkan peranko penghargaan, bersama teroris lainnya; *FT*, hlm. 166.

*Globe & Mail* (Toronto), 9 Oktober 1985.

*New York Times*, 27 September 1985, keterangan foto tanpa cerita; *Asian Wall Street Journal*, 22 Agustus 1985, dikutip Alexander Cockburn, *Nation*, 2 September 1985; Housego, *New York Times Book Review*, 20 Juli 1986. Di Prancis, negara teroris lainnya, tak ada protes atas kekejaman atau hukuman yang dilakukan Prancis terhadap Selandia Baru dalam “aksi balasan” karena mengadili para teroris yang tertangkap. Sebaliknya, dalam laporan dari Paris setelah penyelesaian dengan Selandia Baru disebutkan, “tindakan tersebut tidak menimbulkan kritik, melainkan patriotisme. Dalam pandangan Prancis, Selandia Baru dan Perdana Menteri-nya, David Lange, merupakan penjahat karena menangkap dua agen, yang secara tidak adil ditahan, dalam pandangan umum di sini, atas kejahatan yang dilakukan demi melayani kepentingan nasional. Di Prancis, kematian anggota kru Greenpeace, atau fakta bahwa kedaulatan Selandia Baru telah dilanggar hanya sedikit diulas. “Meskipun pemerintah Sosialis berjanji untuk melakukan “tindakan hukum” jika ada “tindakan kriminal”; “satu-satunya tindakan hukum yang dilakukan adalah mengancam beberapa pejabat pemerintah Prancis karena telah mengungkapkan informasi kepada pers”, dan “tidak ada penyelidikan terbuka” tentang hal ini (*New York Times*, 30 Juli 1986). Terjadi demonstrasi di Paris setelah tenggelamnya kapal tersebut, beserta 150 orang dan seorang intelektual terkemuka: René Dumont. Meski dihadiri awak media, aksi tersebut tidak mendapat tempat dalam liputan TV dan pers lainnya, termasuk pers Sosialis dan *Libération*. *Le Monde* merilis berita empat baris setelah demonstrasi berakhir. French Greens dan kelompok perdamaian Prancis “ragu-ragu untuk menantang *chauvinisme* yang merebak di Prancis gara-gara kasus Greenpeace”, sementara kongres Partai Sosialis memberikan “sambutan megah”



kepada Menteri Hernu, yang secara resmi bertanggung jawab atas kekejaman tersebut (Diana Johnstone dan Elizabeth Schilling, *In These Times*, 23 Oktober 1985). Terorisme Prancis terhadap Greenpeace bermula dari demonstrasi pertama mengenai uji coba nuklir Prancis di koloni Pasifik pada 1972, ketika kapal penyapu ranjau Prancis menabrak dan hampir menenggelamkan kapal Greenpeace, dan kemudian pasukannya "berkerumun di atas kapal, dengan kejam memukuli hingga hampir menyebabkan kebutaan (direktur Greenpeace) David McTaggart dan satu anggota kru lainnya dengan pentungan" (James Ridgeway, *Village Voice*, 8 Oktober 1985, yang juga menyinggung penganiayaan Soviet terhadap Greenpeace).

Lihat artikel saya, "Watergate: A Skeptical View," *New York Review*, 20 September 1973; editorial, *More*, Desember 1975; dan pendahuluan untuk N. Blackstock, Ed., *COINTELPRO* (Vintage, 1976). Versi tambahan untuk pendahuluan itu, "Domestic Terrorism," *New Political Science* 21.3, 1999.

Shultz, *Boston Globe*, 25 Juni 1984; *New York Times*, 25 Juni 1984 dan 30 Desember 1983; *Associated Press*, *Boston Globe*, 23 April 1984; *New York Times*, 1 April 1984; *International Herald Tribune*, 5 Mei 1986; Colin Nickerson, *Boston Globe*, 3 Februari 1986, mengenai konvensi ini. *Africasia*, Juli 1985, untuk lebih rinci tentang penangkapan pasukan Afrika Selatan, yang lagi-lagi diabaikan di AS. Mengenai pesawat sipil ini, lihat *Boston Globe*, *New York Times*, *Washington Post*, 11 November 1983; *Boston Globe*, 21 Februari 1984. Insiden yang nyaris tak diberitakan ini terjadi di tengah histeria massa atas penembakan KAL 007 oleh Uni Soviet, yang diterbitkan tujuh halaman penuh dalam laporan terpisah *Times* pada September 1983. Selanjutnya, terutama setelah kekejaman teroris 9-11, terjadi perubahan citra pasukan yang direkrut, diatur, dan dilatih CIA dan rekan-rekannya untuk melanjutkan perang melawan Rusia (bukan membantu orang Afghanistan). Bin Laden dan rekan-rekannya tidak lagi "setara secara moral dengan para Bapak Bangsa" (Ronald Reagan; lihat Samina Amin, *International Security* 26.5, Musim Dingin 2001/2). Aksi teroris mereka di Rusia

cukup serius, sehingga nyaris memicu perang Rusia-Pakistan (John Cooley, *Global Dialogue* 2.4, Musim Gugur 2000).

Barry Munslow dan Phil O'Keefe, *Third World Quarterly*, Januari 1984. Sepanjang era Reagan, dampak kerusakan Afrika Selatan di negara tetangga menyebabkan 1,5 juta orang terbunuh dan kerugian lebih dari US\$60 miliar, sementara Washington terus mendukung Afrika Selatan dan mengecam ANC Nelson Mandela sebagai salah satu "kelompok teroris terkejut" di dunia. Joseba Zulaika dan William Douglass, *Terror and Taboo* (Routledge, 1996), hlm. 12. Catatan 1980–1988; Merle Bowen, *Fletcher Forum*, Musim Dingin 1991. Mengenai ekspansi perdagangan AS dengan Afrika Selatan setelah Kongres memberikan sanksi khusus pada 1985 (mengesampingkan hak veto Reagan), lihat Gay McDougall, Richard Knight, dalam Robert Edgar, Ed., *Sanctioning Apartheid* (Africa World Press, 1990).

Dan Fisher, *Los Angeles Times*, 21 Juni 1985; McGrory, *Boston Globe*, 21 Juni 1985; David Adams, *New Statesman*, 19 April 1985; *New York Times*, 21 Juni 1985. Mengenai Ansar, lihat *FT*, mulai hlm. 23; wawancara, Hotam, 11 April 1986. Lihat juga Amnesty International, "The detention of Palestinians and Lebanese in the military prison of Atlit" [in Israel], 18 April 1984, tentang tahanan Palestina dan Lebanon yang dipindahkan dari Lebanon Selatan dan diasingkan tanpa bisa menjalin komunikasi dengan keluarga atau Palang Merah, dan menolak kehadiran pengacara dan bukti apa pun mengenai penahanan dan pemindahan mereka secara ilegal ke Israel.

*Los Angeles Times*, 1 Juli 1985.

David Ignatius, *Wall Street Journal*, 18 Juni 1985.

*New York Times*, 21 Juni 1985, 18 Juni 1985, dan 1 Juli 1985.

Bernard Lewis, *New York Review*, 15 Agustus 1985; *New Republic*, 8 Juli 1985; Reagan, *Address to the American Bar Association*, 8 Juli 1985 (*Boston Globe*, 9 Juli 1985); Podhoretz, *Los Angeles Times*, 26 Juni 1985; *New York Times*, 2 Juli 1985.

Thomas Friedman, *New York Times*, 23 Juni 1985; *New York Times*, 19 Juni 1985.

*Associated Press, Boston Globe*, 4 Juli 1985; *Friedman, New York Times*, 4 Juli 1985; *Boston Globe*, 4 Juli 1985.

John Cooley, *Green March, Black September* (Frank Cass, London, 1973), hlm. 197; lihat *FT* dan Beilin, *Mehiro shel Ihud*, untuk pernyataan serupa.

*FT*, hlm. 181—182.

Rabin, berbicara di hadapan Knesset, *Hadashot*, 27 Maret 1985; Tamari, wawancara, *Monitin*, Oktober 1985. Mengenai pandangan para tentara, lihat ringkasan dari terjemahan terbitan Israel di *FT*, yang berbeda dari bahan-bahan yang muncul dalam *Hasbara* (lihat Pendahuluan, Catatan 24). Atau, ulasan prajurit terjun payung, Ari Shavit, mengenai invasi Lebanon 1978, diterbitkan di *Koteret Rashit* (13 Mei 1986) sebagai pembanding dalam diskusi tentang operasi komando militer ini, yang mengingat “sejenis ekstase” yang memenuhi unit tentara saat menembaki desa-desa, atau tempat apa saja, setelah “jelas bahwa di sini tidak akan terjadi perang”, melainkan semacam “camping”. Tentu tentara lain pun akan merasakan hal yang sama, tetapi “kesucian tangan” mereka ternyata dongeng semata.

Rokach, *Israel's Sacred Terrorism*; Uri Milshtein, *Al Hamishmar*, 21 September 1983; Kennett Love, *Suez* (McGraw-Hill, 1969), mulai hlm. 10, hlm. 61–62.

*New York Times*, 4 Desember 1984. Untuk kajian akademis, lihat *TNCW*, hlm. 331.

*Los Angeles Times*, 24 November 1983; *Boston Globe*, 19 Desember 1983; *New York Times*, 20 Desember; *Boston Globe*, 20 Desember 1983.

*Globe & Mail* (Toronto), 11 Juli 1985; *Boston Globe*, 24 Juli 1985; *New York Times*, 24 Juli 1985; *Boston Herald*, 25 Juli 1985; *New York Times*, 5—6 Januari 1984; *Boston Globe*, 5—6 Januari 1984.

Lihat Bab 1. James Markham, *New York Times*, 3 Desember 1975, melaporkan bahwa 57 tewas, berdasarkan keterangan orang Palestina dan Lebanon; lihat teks pada Catatan 124. *New York Times*, 23 Maret 1985; *New York Times*, 4 Desember 1975.

*Time*, 5 Maret 1973; *New York Times*, 22 Februari 1973, menyatakan

15 orang tewas.

Tidak ada bukti pendukung dalam kasus jet Libia, tetapi tuduhan Soviet mungkin benar, meski jelas tidak bisa menjadi pembenaran atas kejahatan tersebut; Lihat R. W. Johnson, *Shoot-Down* (Viking, 1986), kajian yang sangat menarik karena menelanjangi kebohongan pemerintah AS. Muncul sejumlah ulasan yang mengecam buku tersebut. Joel Brinkley menyebut buku itu "cacat" karena "nada sumbangnya" yang "bisa dibilang menghina" tokoh-tokoh besar di Pemerintahan Reagan, dan dengan keliru mengatakan semua itu bersumber dari pers Amerika (*New York Times Book Review*, 20 Juli 1986). Douglas Feaver mengklaim Johnson "melecehkan tesisnya dengan informasi yang salah tentang berbagai hal yang mudah diperiksa", mencatat bahwa di hlm. 2 ia mengutip laporan International Civil Aviation Organization secara tidak lengkap (*Book World, Washington Post Weekly*, 7 Juli 1986). Dan memang mudah dicek, Johnson mengutip kalimat Feaver secara lengkap di hlm. 234, sesuai relevansinya, dan hanya mengutip bagian yang relevan di hlm. 2.

*New York Times*, 22—23 Februari 1973; editorial, 23 Februari 1973; 25—26 Februari 1973. Amiram Cohen, *Hotam*, 10 Februari 1984. Insiden ini hanya diingat sekilas dalam kasus KAL 007, yang diiringi pernyataan bohong bahwa "Israel langsung bertanggung jawab" dan "memberi ganti rugi"; Michael Curtis, surat pembaca, *New York Times*, 2 Oktober; Martin Peretz, *New Republic*, 24 Oktober 1983.

Untuk membandingkan reaksi terhadap dua peristiwa ini, lihat Robert Scheer, *Guardian Weekly*, 25 September 1983; untuk pembahasan insiden serupa lainnya, yang juga berlalu begitu saja, lihat tulisan saya, "1984: Orwell's and Ours," *Thoreau Quarterly*, Musim Dingin/Musim Semi 1984, dan "Notes on Orwell's Problem" dalam *Knowledge of Language* (Praeger, 1986).

Tentang pengusiran Lydda-Ramle, lihat Benny Morris, *Middle East Journal*, Musim Dingin 1986; mengenai kasus lain, lihat *FT, TTT*, dan sumber yang dikutip. Schocken, *Foreign Affairs*, Musim Gugur 1984. Mengenai upaya untuk membunuh pemimpin politik Palestina pada 1948, yang dirancang Moshe Dayan, lihat Uri

Milshtein, *Al Hamishmar*, 21 September 1983; *Hadashot*, 11 Januari 1985. Laporan intelijen Israel yang baru diungkap pada 30 Juni 1948 menyimpulkan bahwa dari 391 ribu pengungsi Arab (152 ribu dari luar daerah yang ditetapkan bagi Israel dalam rekomendasi Partisi PBB), setidaknya 70 persen melarikan diri akibat operasi militer Yahudi (terutama Haganah/IDF), termasuk pengusiran langsung. Toh, perkiraan dianggap terlalu rendah, sebagaimana dianalisis oleh Benny Morri. Laporan tersebut juga mencatat bahwa peristiwa ini terjadi di tengah upaya keras kepemimpinan Arab untuk membendung pengungsian. Ia juga mencatat “keadaan eksodus paruh kedua”, dari Juli sampai Oktober, “merupakan kisah yang berbeda”; “Setelah Juni 1948, ada lebih banyak lagi rencana pengusiran” (*Middle Eastern Studies* [London], Januari 1986; wawancara dengan Haim Bar’am, *Kol Ha’ir*, 9 Mei 1986).

Untuk meninjau beberapa kisah versi Israel (termasuk satu-satunya catatan yang muncul di media utama AS, pembelaan memalukan oleh Ze’ev Schiff dan Hirsh Goodman di *Atlantic Monthly*), lihat James Ennes, “The USS Liberty: Back in the News”, *American-Arab Affairs*, Musim Dingin 1985—1986. Mungkin yang paling menarik adalah Yitzhak Rabin—saat itu kepala staf komando—yang menggambarkan serangan di kapal sebagai “perkembangan paling mengkhawatirkan di seluruh operasi militer”, ketika ia mengalami “teror belaka”. Ia menempatkannya pada 7 Juni (yang benar 8 Juni), kesalahan yang tak terbayangkan, yang mungkin bisa dipahami sebagai upaya untuk mengaburkan alasan yang jelas untuk serangan tersebut: menyembunyikan dari Amerika Serikat rencana invasi ke Suriah setelah gencatan senjata. Rabin, *Memoirs*, mulai hlm. 108. Dalam memoarnya, ilmuwan terkemuka Raymond Garthoff, dengan koneksi intelijen dan pengalaman pribadi yang lengkap, menuliskan, “Agen militer dan intelijen kita sepakat bahwa ini adalah serangan udara dan laut Israel yang disengaja dan tidak beralasan, tetapi Presiden Johnson telah memutuskan untuk menerima permintaan maaf Israel yang terlambat dan mengklaim hal itu disebabkan oleh kesalahan

identifikasi kapal AS, tidak peduli betapa kurang kredibelnya alasan ini. *A Journey Through the Cold War* (Brookings Institution, 2001), hlm. 214.

Tentang kasus Lebanon selatan, lihat Mark Bruzonsky, *Middle East International*, 16 Mei 1986; juga *Boston Globe*, 15 April 1986; David Shipler, *New York Times*, 16 April 1986. Lihat Houston Chronicle (AP), 18 Mei 1984, (UPI) 21 Mei 1984, mengenai kasus pengusaha New Mexico, Mike Mansour, yang dipenjarakan 22 hari, dan berdasarkan pengakuannya, disiksa serta dipaksa menandatangani surat pengakuan, yang ia tolak.

Robert Tucker, *Commentary*, Oktober 1982.

Dario Fernandez-Morera, *History of European Ideas*, Vol. 6, No. 4, 1985.

*Laporan Amnesti Internasional 1985* (London, 1985); *Political Killings by Government* (AI Report, London, 1983).

William Beecher, *Boston Globe*, 15 April 1986.

Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa dari September 1980, Nikaragua mulai mengirimkan persenjataan untuk gerilyawan yang sebagian besar termobilisasi oleh perang teroris Carter-Duarte melawan warga, sangat sedikit jumlahnya, bahkan jika kita memercayai bukti dokumenter yang tersedia. Bukti aliran persenjataan sejak awal 1981 sebenarnya nol (bandingkan dengan TTT dan kesaksian analisis CIA, David MacMichael, di hadapan Mahkamah Internasional; UN A/40/907, S/17639, 19 November 1985). Tak terbantahkan lagi bahwa menyediakan persenjataan untuk orang-orang yang berusaha mempertahankan diri sendiri dari serangan teroris yang disokong Amerika Serikat adalah kejahatan, jika bukan bukti upaya untuk menaklukkan Separuh Belahan Dunia. Sidang Mahkamah Internasional yang berlangsung pada Juni 1986 menyatakan bahwa penyediaan persenjataan itu berjalan "sampai bulan-bulan awal 1981," meskipun dugaan-dugaan lebih jauh "tidak dapat benar-benar dibuktikan," dan memutuskan bahwa sebagai masalah hukum, penyediaan persenjataan, meskipun sungguh terjadi, tidak bisa mendasari pembenaran "serangan bersenjata" sebagai respons

Amerika Serikat, sebagaimana ditegaskan oleh pemerintah Amerika. Dapat disimpulkan bahwa tindakan Amerika Serikat "mencederai prinsip-prinsip (Piagam PBB) yang melarang penggunaan ancaman atau kekerasan" dalam masalah-masalah internasional, bersama dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Pemerintah Amerika Serikat mengabaikan pendapat Mahkamah Internasional, menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah yurisdiksi Mahkamah Internasional; sebagai reaksi meningkatnya "penggunaan kekerasan yang melanggar hukum" yang baru saja dikutuk oleh Mahkamah Internasional, termasuk perintah-perintah resmi pertama kepada tentara sewaan untuk menyerang target-target yang merupakan warga yang lemah. Sementara itu, para advokat Ketertiban Dunia sepakat bahwa Amerika Serikat memang seharusnya tidak tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Internasional karena Amerika "masih membutuhkan kebebasan untuk melindungi kebebasan," seperti yang terjadi di Nikaragua (Thomas Franck, *New York Times*, 17 Juli 1986)." Pendukung Contra, Robert Leiken dari Carnegie Endowment for International Peace (Lembaga Carnegie untuk Perdamaian Internasional) "menyalahkan pengadilan tersebut, yang ia nyatakan cacat karena 'meningkatnya persepsi' adanya hubungan dekat dengan Uni Soviet" (Jonathan Karp, *Washington Post*, 28 Juni 1986) merupakan hubungan dekat yang secara misterius muncul setelah pengadilan di mahkamah yang sama menguntungkan Amerika Serikat dalam kasus Iran.

Editorial, *Washington Post*, (*Guardian Weekly*, 22 Februari 1981); Alan Riding, *New York Times*, 27 September 1981. Lihat TTT untuk referensi lain yang tidak disebutkan di sini atau di bawah.

Ambrose Evans-Pritchard, *Spectator*, 10 Mei 1986; dengan tugas penyembelihan yang berhasil dilakukan, ia menambahkan, sejumlah mayat "tergeletak dan tubuh-tubuh dibuang ke tengah Danau Ilopango secara diam-diam di malam hari dan hanya sedikit sekali yang dibuang ke tepi untuk memperingatkan orang-orang yang mandi di sana bahwa represi masih terus berlangsung." Editorials, *New Republic*, 2 April 1984 dan 7 April 1986. Tentang

kejahatan-kejahatan terbaru, lihat Americas Watch, *Settling into Routine* (Mei 1986), yang memberitakan bahwa pembunuhan-pembunuhan politis—90 persen dilakukan oleh pasukan bersenjata Duarte—terus terjadi lebih dari empat korban setiap harinya, sebuah kemajuan nyata di negara teroris ini, bersama dengan sejumlah kejahatan-kejahatan pemerintah lainnya. Jika melihat kembali peristiwa tersebut, kenyataannya kadang diakui, misalnya oleh School of the America, yang melatih pegawai-pegawai Amerika Latin untuk tugas-tugas sejenis yang mereka telah lakukan di El Salvador, dan dengan bangga menyatakan bahwa pada 1980-an, “Teologi Pembebasan ... telah ditaklukkan dengan bantuan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.” Dikutip dari Adam Isacson dan Joy Olson, *Just the Facts* (Washington: Latin America Working Group and Center for International Policy, 1999), hlm. ix.

Chris Krueger dan Kjell Enge, *Security and Development Conditions in the Guatemalan Highlands* (Washington Office on Latin America, 1985); Alan Nairn, “The Guatemala Connection,” *Progressive*, Mei 1986; Benjamin Beit-Hallahmi, *The Israeli Connection* (Pantheon, 1987).

Herman dan Brodhead, *Demonstration Elections* (South End Press 1984). Mereka mendefinisikan konsep tersebut merujuk pada pemilihan-pemilihan yang “diadakan dan dirancang oleh kekuasaan asing, terutama untuk menjinakkan warga yang resah,” mereka mendiskusikan beberapa contoh lain dan juga menunjukkannya secara terperinci bahwa pemilihan-pemilihan tersebut tak kurang menggelikannya dibanding pemilihan-pemilihan yang dilakukan di bawah pemerintahan Soviet. Istilah “pemilihan-pemilihan demonstrasi” dipinjam dan disalahgunakan secara sungguh-sungguh dengan merujuk pada Nikaragua oleh Robert Leiken (*New York Review*, 5 Desember 1985). Lihat surat Brodhead dan Herman bersama surat lainnya dari pengamat-pengamat Parlemen Inggris (26 Juni 1986) dan tanggapan Leiken, yang secara diam-diam mengakui ketepatan kritik mereka (dengan mengelak darinya) sembari menegaskan bahwa mereka menyusun konsep mereka “sebagai sebuah cara untuk memfokuskan perhatian pada imperialisme Barat seraya menjauhkannya dari imperialisme Soviet



... sejalan dengan keyakinan mereka bahwa hanya ada satu penjahat adidaya"; ini merupakan tanggapan umum para pendukung teror negara, dalam hal ini, membutuhkan penenggelaman kritik tajam Brodhead dan Herman perihal pemilihan di Polandia dan yang lainnya. Lihat Alexander Cockburn (*Nation*, 29 Desember 1985 dan 10 Mei 1986) dan tanggapan Leiken (*New York Review of Books*, 26 Juni 1986); juga pengantarku untuk Morley dan Petras, *The Reagan Administration*.

Council on Hemispheric Affairs, *Washington Report on the Hemisphere*, 16 April 1986. Dari pelantikan Presiden Cerezo pada Januari sampai Juni, pembunuhan yang terjadi kira-kira sejumlah 700 orang, meningkat 10 persen dari tahun sebelumnya. Seberapa banyak pembunuhan yang bersifat politik, atau berapa jumlah persisnya, tidak diketahui (Edward Cody, *Washington Post*, 6 Juli 1986). Alan Naim dan Jean-Marie Simon memperkirakan kalau pembunuhan yang bersifat politik mencapai lebih dari 60 per bulan, mereka adalah korban dari "sistem terorisme politik yang efisien" yang dijalankan oleh militer Guatemala menggunakan alat-alat seperti "dokumen komputer tentang wartawan, mahasiswa, pemimpin, warga yang tergabung dalam kelompok kiri, politisi, dan lainnya" (*New Republic*, 30 Juni 1986). "Birokrasi Guatemala perihal kematian ini terlihat lebih mulus dibandingkan kapan pun sejak pertengahan 1960-an." Mereka menyimpulkan dan menggarisbawahi bahwa "Cerezo sama sekali tidak mengecam satu pun pembunuhan yang dilakukan oleh tentara," dan bahwa "menteri dalam negerinya mengatakan bahwa pembunuhan politik kini sudah bukan masalah lagi."

John Haiman dan Anna Meigs, "Khaddafy: Man and Myth," *Africa Events*, Februari 1986.

Lihat *TTT* untuk pilihan yang lebih banyak; juga bab 2, Catatan 99, 127, dan rujukan pada Catatan 199 di atas.

Michael Ledeen, *National Interest*, Musim Semi 1986. Lihat Catatan 196 dan teks.

Editorial, *New York Times*, 20 April 1985; *Washington Post*, 11 Januari 1986; Rabin, *Boston Globe*, 25 Januari 1986; *El Pais* (Madrid), 25

April 1986.

E. J. Dionne, "Syria Terror Link Cited by Italian," 25 Juni 1986; para editor *Times* sadar betul bahwa sisa kasus pemerintah Amerika Serikat yang mereka dukung tetap belum dapat dibuktikan kebenarannya.

*New York Times*, 27 Juni 1985; *Christian Science Monitor*, 25 Maret 1986. Lihat Leslie Cockburn, *Out of Control* (*Atlantic Monthly Press*, 1987), hlm. 26. Tentara bayaran Kuba yang berperang melawan tentara proksi Amerika Serikat yang menyerang Nikaragua menduga bahwa mereka dilatih di sebuah basis paramiliter di Florida; Stephen Kinzer, *New York Times*, 26 Juni 1986. Pemerintah Amerika Serikat menanggapi para anggota komplotan yang berusaha menggulingkan kediktatoran Suriname di New Orleans (yang digambarkan oleh kejaksaan Amerika Serikat sebagai "'batu loncatan' bagi para tentara bayaran yang ingin terlibat di Amerika Selatan dan Tengah"), mendakwa mereka dengan pelanggaran terhadap Undang-undang Netralitas Amerika Serikat (*Christian Science Monitor*, 30 Juli 1986), sebagaimana sebelumnya membendung upaya-upaya untuk menggulingkan rezim pembunuh Duvalier yang didukungnya di Haiti. Kepala intelijen Contra, Horacio Arce, yang menyeberang ke Meksiko pada 1988, menggambarkan pelatihannya bersama pelatih-pelatih Amerika Serikat di El Salvador dan di sebuah basis pelatihan di Amerika Serikat, persenjataan mengalir dari Israel, kontak-kontak CIA-nya di Honduras, dan detail lainnya, termasuk tujuan penyerangan terhadap target-target orang sipil untuk merusak program-program sosial. Lihat Bab 5, Catatan 295.

Bob Woodward dan Charles Babcock, *Washington Post*, 12 Mei 1985; lihat Bab 5, Catatan 309.

Ihsan Hijazi, *New York Times*, 20 April 1986. Pembaca cermat *Times* akan menemukan, dalam benaman berita dari Athena oleh Henry Kamm (29 Mei 1986), sebuah pengutukan terhadap terorisme oleh Presiden Assad, khususnya pembunuhan 144 warga Suriah dalam sebuah "aksi teroris besar", yang mungkin merujuk pada pengeboman bus-bus Suriah.

Philip Shenon, *New York Times*, 14 Mei 1985; Lou Cannon, Bob Woodward, et al., *Washington Post*, 28 April 1986.

*New Republic*, 20 Januari 1986; Edwin Meese, *Associated Press*, 4 April 1986, lihat Bab 2.

Frank Greve, *Philadelphia Inquirer*, 18 Mei 1986.

Nef, *Middle East International* (London), 4 April 1986; Johnson, *Sunday Telegraph* (London), 1 Juni 1986. Di tempat lain, konferensi propaganda tentang terorisme di Washington yang diselenggarakan oleh Israel (lihat Bab Pendahuluan, Catatan 41), Johnson memuji Israel karena mengambil "langkah-langkah tegas" untuk memerangi "kanker teroris" seperti dalam invasi atas Lebanon pada 1982: "Kebenarannya adalah, dengan keberanian moral dan fisik untuk melanggar batas kedaulatan negara, dan dengan meletakkan hukum moral di atas formalitas hak-hak negara. Israel untuk kali pertamanya berhasil menyerang jantung kanker tersebut, meredam pertumbuhannya dan membuangnya segera" (dikutip oleh Wolf Blitzer, *Jerusalem Post*, 29 Juni 1985)—bertentangan dengan maksud Israel, sebagaimana dibahas dalam Bab 2, tetapi maksud itu sendiri, merupakan sebuah pertunjukan keberanian moral dan fisik yang sangat mengesankan, dan sebuah pandangan menarik dalam konsep Johnson tentang "hukum moral."

Haley, *Qaddafi and the U.S.*, mulai hlm. 271. Untuk rincian-rincian yang lebih banyak tentang obsesi Reagan dengan Libia dan rencana-rencana untuk membunuh Qaddafi, lihat Seymour Hersh, *New York Times Magazine*, 27 Februari 1987. Tulisan penting Hersh muncul selama masa terungkapnya beberapa skandal, dalam hal ini skandal Iran-Contra, yang membangkitkan banyak perhatian, tetapi menghindari aspek-aspek yang paling penting. Lihat Bab 4, dan untuk latar belakang dan hal-hal yang lebih terperinci, lihat Jonathan Marshall, Peter Dale Scott, dan Jane Hunter, *The Iran-Contra Connection* (South End Press, 1987) dan *Culture of Terrorism*.

Larry Speakes, TV nasional, 7:30 p.m., 14 April 1986; *New York Times*, 16 April 1986; *Associated Press*, 14 April 1986; *New York Times*, 15 April 1986; Lewis, *New York Times*, 17 April 1986; Bernard

Weinraub, *New York Times*, 15 April 1986; Jeff Sallot, *Globe & Mail* (Toronto), 24 April 1986.

Haley, *Qaddafi and the U.S.*, hlm. 8 dan 264.

*New Statesman*, 16 Agustus 1985.

Lihat *FT*, hlm. 210; Haley, *Qaddafi and the U.S.*, yang melakukan upaya yang patut dipuji untuk mengangap serius pertunjukan ini.

"CIA, tidak boleh memberikan bantuan militer kepada pemberontak-pemberontak Nikaragua, diam-diam mengalirkan beberapa juta dolar kepada para pemberontak itu untuk proyek-proyek politik selama tahun lalu, kata pejabat pemerintah Amerika Serikat," juga mengizinkan "CIA untuk mempertahankan pengaruh kuat terhadap gerakan pemberontak, meskipun ada larangan Kongresional sejak Oktober 1984 sampai September 1985, yang melarang CIA untuk mengeluarkan uang "yang akan mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung, operasi-operasi militer atau paramiliter di Nikaragua," kata pejabat tersebut. Salah satu tujuan yang disebutkan pejabat Amerika Serikat sebagai "program utama" adalah "menciptakan keadaan supaya (kelompok Contra) menjadi sebuah inti politik paling baru di antara sekutu-sekutu kita di Eropa." Anggota Kongres Sam Gejdenson menyatakan bahwa "Kami mencurigai bahwa CIA tidak pernah benar-benar menarik diri, tetapi keterlibatan langsung CIA di perang Contra bisa jadi mengejutkan para pengamat." Dokumen-dokumen UNO (Contra) yang diperoleh *Associated Press* "menunjukkan bahwa dana politik UNO mengalir ke organisasi-organisasi militer yang bergabung dengan kelompok-kelompok penghimpun" yang dibentuk oleh Amerika Serikat, sementara beberapa dana lainnya digunakan untuk menyuap para pejabat Honduras dan Kosta Rika "supaya para pemberontak bisa beroperasi di negara-negara tersebut." Sebagian besar uang ini dialirkan melalui sebuah bank berbasis London di Bahama. *Associated Press*, 14 April 1986; *Boston Globe*, 14 April 1986. Pengungkapan-pengungkapan ini berlalu tanpa dikomentari saat itu, dan sedikit dikomentari beberapa waktu setelahnya. Sesudah itu, *Miami Herald* melaporkan bahwa lebih dari US\$2 juta dari

US\$27 juta yang disediakan oleh Kongres untuk "bantuan kemanusiaan" digunakan untuk menyuap pejabat Honduras "supaya menutup mata pada kegiatan-kegiatan ilegal di Honduras" (editorial, *Boston Globe*, 13 Mei 1986), bersama dengan sejumlah bukti korupsi yang diterima dengan perhatian terbatas.

Hersh, *New York Times Magazine*, 27 Februari 1987.

Associated Press, 27 Maret 1986, mengutip *El Pais* (Madrid).

R. C. Longworth, *Chicago Tribune*, 30 Maret 1986.

Richard Higgins, *Boston Globe*, 25 Maret 1986.

Fred Kaplan, *Boston Globe*, 26 Maret 1986.

*London Sunday Times*, 6 April 1986.

Cockburn, *Wall Street Journal*, 17 April 1986; juga *Nation*, 26 April 1986. Lelyveld, *New York Times*, 18 April 1986.

Tentara kulit hitam GI lainnya yang terluka meninggal beberapa bulan kemudian.

*New York Times*, 16 April 1986.

*New York Times*, 18 April 1986; berita *Times* menyatakan bahwa pada pukul 7 malam, pesawat-pesawat F-111 mengebom sasaran-sasaran militer "dekat Benghazi" dan "dekat Tripoli," dan bahwa pada pukul 7.06 malam, mereka mengebom "bandara militer Tripoli, sebagai sasaran terakhir." Sebagaimana yang telah diberitakan, pesawat-pesawat F-111 juga mengebom pemukiman penduduk di Tripoli.

*Associated Press*, 14 April 1986.

James Markham, *New York Times*, 25 April 1986.

*Der Spiegel*, 21 April 1986; halaman depan menampilkan frasa "Terror against Terror," sebuah slogan Gestapo yang terkenal, yang mungkin tidak dipilih tanpa sengaja. Lihat juga artikel Norman Bimbaum, pada isu yang sama.

Teks wawancara yang diberikan oleh wartawan Amerika kepada *Stars and Stripes* di Jerman. Lihat juga Hersh, *New York Times*, 27 Februari 1987.

Lihat misalnya, James Markham, *New York Times*, 31 Mei, mengutip seorang "polisi penyelidik Berlin Barat" yang "mengatakan ia percaya bahwa Kedutaan Libia di Berlin Timur 'mengetahui' perihal

serangan tersebut”—merupakan “kepastian-kepastian” yang disebutkan sebelumnya—dan mengutip Manfred Ganschow, tetapi tidak ada dalam sangkalannya terhadap bukti apa pun. Atau, lihat Robert Suro. *New York Times*, 3 Juli, tentang kemungkinan keterlibatan Suriah dan Abu Nidal, teroris anti-Arafat, dalam pengeboman diskotek ini, merujuk pada “bukti yang dilaporkan menunjukkan” keterlibatan Libia (huruf miring dari saya). Atau, Bernard Weinraub, *New York Times*, 9 Juni, merujuk pada kemungkinan terlibatnya Suriah dan apa yang “dinyatakan” oleh pejabat pemerintah bahwa mereka tahu soal penyadapan-penyadapan yang dilakukan Libia. Pada tahun-tahun berikutnya, jaringan Suriah kembali ditekankan, oleh pemerintah Amerika Serikat dan Jerman, pengadilan dan intelijen, tetapi lagi-lagi tidak ada dasar yang kuat untuk tuduhan awal tersebut. Lihat, *inter alia*, Robert Mc-Cartney, *Washington Post*, 11 dan 12 Januari 1988. lihat juga Hersh, *New York Times*, 27 Februari 1987, mengenai penyangkalan-penyangkalan terhadap pernyataan Washington oleh Ganschow dan pejabat-pejabat Jerman, dan mengenai pengakuan internal bahwa bukti-buktinya sangat lemah. Pada tahun-tahun berikutnya, Libia disebut terlibat dalam aksi teror. Pernyataan atau penemuan-penemuan berikutnya mungkin, tidak relevan dengan apa pun yang didiskusikan di sini.

Shaul Bakhash, *New York Review of Books*, 14 Agustus 1986.

*Christian Science Monitor*, 22 April 1986; lihat Bab 1, Catatan 55.

*Toronto Globe & Mail*, editorial, 28 Maret 1986, 18 Maret 1986, dan 5 Maret 1986, secara khusus merujuk pada Nikaragua.

Lihat *Associated Press*, *International Herald Tribune*, 6 Mei 1986, untuk pembahasan yang lebih mendalam; *New York Times*, 6 Mei 1986, yang menyebut dengan lebih singkat, dan teks pernyataan menentang terorisme.

*Associated Press*, 14 April 1986; survei mengenai reaksi pers dunia, *Associated Press*, 15 April 1986; survei mengenai reaksi editorial Amerika Serikat, 16 April 1986; editorial, *New York Times*, 15 April 1986; Peres, *New York Times*, 16 April 1986.

Setelah pengeboman Libia, ada begitu banyak rujukan pada tindakan

hukum Jefferson terhadap pembajak barbar. Kelihatannya tidak ada seorang pun yang menengok kembali sejarah untuk menggambarkan masa ketika "New York menjadi sebuah pasar pencuri tempat para pembajak merampas barang-barang yang dibawa melalui laut luas," ketika pembajakan memperkaya koloni-koloni Amerika, seperti yang dilakukan Inggris sebelum mereka (Nathan Miller, *The Founding Finaglers* [David McKay, 1976], hlm. 25—6), Pembajakan sama sekali bukan penemuan pertama Afrika Utara.

*Associated Press*, 21 April 1986; *New York Times*, 20 April 1986; survei terhadap reaksi kalangan agama, *Associated Press*, 17 April 1986; juga 19 April 1986, yang memberitakan soal konferensi empat belas kelompok komunitas agama di Seattle yang mengutuk pengeboman berlawanan dengan dukungan terhadap pengeboman itu oleh Dewan Rabi Washington Barat; Nye, *Boston Globe*, 16 April 1986; Rostow, *New York Times*, 27 April 1986.

Glass, *Spectator* (London), 3 Mei 1986; Cockburn, *In These Times*, 23 Juli 1986.

*Dissent*, Musim Panas 1986. Mengamati tempat kejadian, Ramsey Clark menyimpulkan dari pola pengeboman bahwa di daerah pinggiran kota yang makmur menjadi tempat paling banyak korban sipil, yang kelihatannya menjadi sasaran khusus yang disengaja; *Nation*, 5 Juli 1986. Pertanyaan ini tidak relevan dengan isu terorisme (Clark tentu saja tidak menyarankan sebaliknya).

*New Republic*, 6 September 1982; untuk contoh-contoh lain tentang interpretasi kekerasan negara dengan beragam pelaku, lihat Bab 1, Bab 2 di atas, dan *FT*.

*Washington Post* edisi mingguan, 4 Agustus 1986.

Ignatius, *Washington Post Weekly*, 28 Juli 1986.

*Christian Science Monitor*, 25 Juni 1986, 16 Juli 1986.

*Economist*, 26 Juli 1986; *Christian Science Monitor*, 24 Juli 1986.

Seseorang harus melihat angka-angka ini dengan hati-hati, mengingat adanya pertimbangan ideologi yang masuk ke dalam penetapan sebuah tindakan sebagai tindakan "teroris". Sehingga, pengeboman atas klinik-klinik aborsi tidak dimasukkan dalam

kategori "terorisme" pada waktu itu, dan mungkin sampai sekarang. Menurut kolumnis Cal Thomas dari Moral Majority, ada 300 pengeboman "di klinik-klinik di mana aborsi dilakukan" dari 1982 sampai akhir 1984, yang menurutnya "mungkin bukan ide yang baik ... secara taktis, dan juga politis"—meskipun kelihatannya baik secara moral; *Boston Globe*, 30 November 1984.

AP, *Globe & Mail* (Toronto), 4 Juli 1986; Stephen Engelberg, "Para Pejabat Mengatakan bahwa FBI Sudah Mengantongi Nama-Nama Tersangka Peledakan, yaitu Kelompok Ekstremis Yahudi," *New York Times*, 17 Juli 1986; Peyman Pejman, *Washington Post*, 5 Juli dan 17 Juli 1986.

Lihat Catatan 210 dan Bab 2. Ingat bahwa catatan mengenai terorisme Zionis terhadap warga sipil berlangsung sejak bertahun sebelumnya, jauh sebelum pembentukan Negara Israel; lihat *FT*, mulai hlm. 164.

7 Juni 1982.

*Business Week*, 10 Agustus 1981. Haley, *Qaddafi and the U.S.*, hlm. 98.

Lihat catatan-catatan pendahuluan.

Bahkan termasuk buku-buku dan *paper* teknis tentang ilmu linguistik, karena dosa-dosa yang mungkin begitu menyinggung Abrams, meskipun dengan sasaran-sasaran lainnya.

Di fakta-fakta yang bocor di Inggris, lihat Alexander Cockburn, *Nation*, 22 November 1986. Beberapa di antaranya termasuk klaim bahwa mereka tidak keberatan dengan isi artikel, tetapi hanya keberatan dengan ketidakpantasan dalam memperbolehkan sebuah diskusi "pengendalian pikiran" di sebuah masyarakat yang "tidak biasa, jika bukan satu-satunya, dalam hal minimnya pengekangan terhadap kebebasan berekspresi" (kata-kata pembuka saya). Klaim tersebut jelas-jelas tidak bisa dipertahankan, meskipun jika ada seseorang menerima prinsip hebat yang ada di baliknya. Jurnal tersebut telah memublikasikan artikel-artikel perihal ini tanpa menimbulkan respons histeris, ancaman-ancaman untuk membatalkan langganan, surat-surat dari Departemen Luar Negeri, dsb." Lihat, misalnya, Carole dan Paul Bass, "Censorship American-style," yang berhubungan dengan betapa kisah-kisah kontroversial dikalahkan



oleh "kekuatan pasar dan penerbit-penerbit yang ketakutan" (*Index on Censorship*, 3/85). Perbedaannya adalah bahwa di kasus terbaru, artikel tersebut berhubungan dengan perlakuan media terhadap negara yang ingin disembah, bukannya didiskusikan secara kritis dengan standar-standar yang juga bisa dipakai ke lainnya.

*America and the World 1983, Foreign Affairs*, Musim Dingin 1983. Pada tahun-tahun kemudian, kecenderungan-kecenderungan penggambaran Watts menjadi masalah perhatian elite juga di Amerika Serikat. Analis politik terkemuka, Samuel Huntington memperingatkan bahwa bagi dunia—sebagian besar—Amerika Serikat "menjadi negara adidaya yang berengsek," dianggap sebagai "ancaman luar tunggal yang paling besar terhadap masyarakat-masyarakat mereka." Versi "realis" yang dominan tentang teori hubungan internasional memperkirakan kalau koalisi bisa saja muncul untuk menyeimbangkan negara adidaya, sehingga pendiriannya harus dipertimbangkan kembali untuk alasan-alasan pragmatis, ia menambahkan. Ia menulisnya sebelum pengeboman Amerika Serikat-Inggris terhadap Serbia, yang membangkitkan ketakutan dan perhatian dunia secara mendalam. Selanjutnya mengomentari unilateralisme pemerintahan Clinton dan (George W. Bush), pakar politik terkenal, Robert Jervis (Presiden Asosiasi Ilmu Politik Amerika), menyatakan lagi kesimpulan Huntington, menulis bahwa "Di mata dunia, sebenarnya, negara berengsek yang paling utama saat ini adalah Amerika Serikat." *Foreign Affairs*, Maret/April 1999; Juli/Agustus 2001.

*Boston Globe*, 28 Oktober 1986; 4 November 1986. Robert C. Johansen, "The Reagan Administration and the U.N.: The Costs of Unilateralism," *World Policy Journal*, Musim Gugur 1986.

Richard Bernstein, "The UN versus the United States," *New York Times Magazine*, 22 Januari 1984. Bukan "the U.S. versus the UN," seperti dalam anggapan-anggapan yang diakuinya.

United States Information Agency—Agensi Informasi Amerika Serikat.—peny.

Michael White, *Guardian Weekly*, 9 November 1986. Ini bukanlah bukti bahwa dunia "ter-Finlandia" atau "dikuasai Komunis" seperti yang dibayangkan oleh kelompok sayap kanan Amerika Serikat; jajak pendapat yang sama menunjukkan bahwa kebanyakan warga Eropa juga sangat kritis terhadap Uni Soviet.

Lihat Bab 3, Catatan 237.

Jeffrey Smith, *Washington Post*, 9 November 1986.

Rencana ini dilakukan secara rahasia oleh arahan Keamanan Nasional pada 14 Januari 1983 (No. 77, *Management of Public Diplomacy Relative to National Security*). Alfonso Chardy, "Secrets Leaked to Harm Nicaragua, Sources Say," *Miami Herald*, 13 Oktober 1986.

*Newsweek*, 3 Agustus 1981. Dalam program pengaburan kebenaran terhadap Libia, lihat Bab 3. untuk program-program pengaburan kebenaran lainnya dan kerja sama media, lihat *Turning the Tide*; Edward S. Herman dan Frank Brodhead, *The Bulgarian Connection (Sheridan Square, 1986)*.

Alfonso Chardy, Knight-Ridder Service, *Boston Globe*, 28 Oktober 1986.

Robert Reinhold, "Ex-General Hints at Big Role as U.S. Champion of Contras," *New York Times*, 14 Oktober 1986. Chris Horrie, *New Statesman*, 31 Oktober 1986, memberitakan Konferensi Tahunan WACL, yang mencatat secara khusus keunggulan RENAMO (kelompok gerilya yang didukung oleh Afrika Selatan yang meneror Mozambik) dan hubungan mesranya dengan Singlaub, dan mungkin juga pemerintah Amerika Serikat. Scott Anderson dan John Lee Anderson, *Inside the League* (Dodd, Mead & Co., 1986); menurut laporan mereka hanya ADL dan pemerintah Amerika Serikat yang menyembunyikan dokumentasinya dan menolak bekerja sama dalam riset mereka. Lihat *Necessary Illusions*, Lampiran V.4, informasi yang lebih banyak mengenai hubungan Reagan-Bush (No. 1) dan kelompok Neo-Nazi serta unsur-unsur yang berkaitan, anti-Semit yang bersalah hanya karena "antik dan pucat" dibandingkan dengan kelompok anti-Semit sebenarnya yang mendukung konsensus internasional atas solusi dua negara (*New Republic*).

Dalam kasus-kasus ini, lihat *TTT* dan sumber-sumber yang dikutip. Lihat Michael McClintock, *Instruments of Statecraft* (Pantheon, 1992), dalam hal bantuan atas pedoman-pedoman Nazi dalam mengembangkan dokumen-dokumen kontra Amerika Serikat paska-perang, dengan bantuan jenderal-jenderal Wehrmacht. Juga Jeffrey Burds, "The Early Cold War in Soviet West Ukraine, 1944-1948," *The Carl Beck Papers* No. 1505, Januari 2001, Pusat Kajian Rusia dan Eropa Timur, Universitas Pittsburgh, tentang dukungan Barat terhadap tentara-tentara partisan Hitler selama perang, dalam upaya untuk memperlambat serangan Rusia terhadap Nazi.

Kurang dan lebihnya perhatian-perhatian terhadap hak asasi manusia atas Iran, pelacakan secara mendalam mengenai pengabdian Iran terhadap kepentingan-kepentingan Amerika Serikat atau pembangkangan terhadapnya, lihat Mansour Farhang dan William Dorman, *The U.S. Press and Iran* (California University, 1987); dan untuk diskusi lebih lanjut, *Necessary Illusions*, Bab 5 dan lampiran 5.2-3.

Untuk kasus-kasus ini, lihat *FT* saya, mulai hlm. 457.

Michael Widlanski, "The Israel/U.S.-Iran Connection," Tel Aviv, *Austin American Statesman*, 2 Mei 1986.

Lihat William C. Rempel dan Dan Fisher, "Arms Sales Case Putting Focus on Israel's Policies," *Los Angeles Times*, 5 Mei 1986, mencatat bahwa "penyelidik-penyelidik veteran Amerika Serikat" mengatakan "ada sedikit keraguan mengenai aliran senjata dari Israel ke Iran, yang setidaknya masih terus berlangsung" selama 5 tahun terakhir, mengutip perkiraan Jerman Barat tentang setengah miliar dolar perlengkapan militer. Douglas Frantz, "Israel Tied to Iranian Arms Plot," *Chicago Tribune*, 24 April 1986; Reuvan Padhatzur, *Ha'aretz*, 28 April 1986. Ada banyak materi mengenai hal ini yang telah diedarkan oleh Jane Hunter, editor jurnal terkemuka *Israeli Foreign Affairs*.

Leslie H. Gelb, "Iran Said to Get Large-Scale Arms from Israel, Soviet, and Europeans," *New York Times*, 8 Maret 1982.

Patrick Seale, "Arms Dealers Cash in on Iran's Despair," *Observer*

(London), 4 Mei 1986.

Miles Wolpin, *Military Aid and Counterrevolution in the Third World* (Lexington Books, 1972), hlm. 8 dan 128, mengutip Pemeriksaan Kongresional; mengenai Brasil, *New York Times*, 1 November 1970. Untuk tanggapan publik terhadap pembunuhan massal Indonesia, dan latar belakangnya, lihat *Year 501* (South End Press, 1993); dan mengenai 1958, Audrey dan George Kahin, *Subversion as Foreign Policy*. (New Press, 1995).

Untuk diskusi lebih lanjut, lihat *Towards a New Cold War*; Laird dikutip oleh Thomas Ferguson dan Joel Rogers, *Right Turn* (Hill & Wang, 1986), hlm. 97, sebuah diskusi penting mengenai faktor-faktor dalam masalah dalam negeri.

Untuk penjelasan lebih mengenai hal ini, lihat *Towards a New Cold War*, *Fateful Triangle*, dan rujukan pada Bab 3, Catatan 198.

Lihat Bab 1.

Lihat buku-buku yang saya kutip sebelumnya; juga Allan Nairn, *Progressive*, Mei 1986 dan September 1986.

Haley, *Qaddafi and the U. S.*, hlm. 31.

Lihat Bab 3.

Di antara sumber-sumber lainnya, lihat Edward S. Herman, *The Real Terror Network* (South End Press, 1982); Herman dan Frank Brodhead, *The Rise and Fall of the Bulgarian Connection* (Sheridan Square Publications, 1986); Alexander George, "The Discipline of Terrorology," dalam George, ed., *Western State Terrorism* (Polity/Blackwell, 1991). Juga diskusi Walter Laqueur dalam *The Age of Terrorism* (Little, Brown, and Co., 1987). dalam *Necessary Illusions* saya, 278ff.; lihat buku ini untuk rujukan-rujukan, yang tidak dikutip di sini.

"States, Terrorism and State Terrorism," dalam Robert Slater dan Michael Stohl, *Current Perspective on International Terrorism* (Macmillan, 1988). Stohl menyimpulkan bahwa "Dalam hal diplomasi koersif teroris, Amerika Serikat telah ... jauh lebih aktif di Dunia Ketiga dibandingkan Uni Soviet." Kajian-kajian lain menunjukkan pola serupa. Dalam sebuah tinjauan kembali mengenai konflik-konflik militer sejak Perang Dunia II, Ruth Sivard

menemukan bahwa 95% telah dilakukan di Dunia Ketiga, dan kebanyakan kasus melibatkan pasukan luar negeri dengan "kekuatan Barat sekitar 79% dalam intervensi tersebut, dan komunis 6%"; *World Military and Social Expenditures 1981 (World Priorities, 1981)*, hlm. 8.

United States Code Congressional and Administrative News, Kongres ke-98, Sesi kedua, 19 Oktober 1984, Vol. 2; par. 3077, 98 STAT. 2707 (West Publishing Co., St. Paul, Minn.).

*US Army Operational Concept for Terrorism Counteraction* (Pamflet TRADOC No. 525—537, 1984); Robert Kupperman Associates, *Low Intensity Conflict*, 30 Juli 1983. Keduanya dikutip di Michael Klare dan Peter Kornbluh, eds, *Low Intensity Warfare* (Pantheon, 1988), hlm. 69 dan 147. Kutipan aslinya dari Kupperman merujuk secara khusus pada "ancaman pasukan militer"; penggunaannya dimaksudkan dengan jelas.

*Jerusalem Post*, 4 Agustus 1988. Lihat juga Mark Heller, hlm. 36.

Jenderal John Galvin, pemimpin Komando Selatan (SOUTHCOM); Fred Kaplan, *Boston Globe*, 20 Mei 1987. Kinsley, *Wall Street Journal*, 26 Maret 1987. Lihat Catatan 295 di bawah. Untuk rincian-rincian yang lebih jauh, lihat *Culture of Terrorism*, hlm. 43 dan 77.

Untuk rincian tentang upaya penghancuran yang sangat berhasil itu, lihat *Culture of Terrorism* dan *Necessary Illusions*. Untuk penghancuran seketika persetujuan-persetujuan Esquipulas IV Februari 1989 oleh Gedung Putih dan anggota kongres anti oerang dengan kerja sama media, lihat artikel saya di *Z Magazine*, Mei 1989, dicetak kembali dalam *Deterring Democracy* (Verso, 1991, Hill & Wang 1992, *extended edition*).

Richard Boudreaux dan Marjorie Miller, *Los Angeles Times*, 5 Oktober 1988; *Associated Press*, 21 November 1987; Witness for Peace, *Civilian Victims of the U. S. Contra War*, Februari—Juli 1987, hlm. 5. *The Civilian Toll 1986—1987*, Americas Watch, 30 Agustus 1987; Americas Watch Petition to U. S. Trade Representative, 29 Mei 1987.

*Boston Globe*, 9 November 1984, mengutip komentar-komentar serupa juga oleh para penentang perang Demokrat Christopher

Dodd.

Pencarian di *Boston Globe* liberal, mungkin yang paling antagonis atas Sandinista di antara jurnal-jurnal utama Amerika Serikat, mengungkapkan satu rujukan editorial mengenai fakta bahwa Nikaragua membutuhkan kekuatan udara "untuk menangkis serangan-serangan dari CIA melalui Contra, dan untuk menghentikan atau menghalangi pengiriman perbekalan melalui udara" (9 November 1986).

Dikutip oleh Stohl, *Current Perspectives on International Terrorism*. Sayangnya hal itu tidak dilakukan di pengadilan-pengadilan.

Kirkpatrick, *Commentary*, Januari 1981; Kristol, *Wall Street Journal*, 11 April 1986; 13 Desember 1973.

Lihat *Necessary Illusions*, hlm. 60.

Julia Preston, *Boston Globe*, 9 Februari 1986; MacMichael, lihat *Culture of Terrorism*; Doyle McManus, *Los Angeles Times*, 28 Mei 1988; Vaky, lihat *Necessary Illusions*.

*Ibid.*, 204—205. Ketika taktik-taktik itu akhirnya berhasil, semuanya digambarkan cukup jelas di media-media arus utama, dan dipuji sebagai sebuah "Kemenangan bagi Peran Adil Amerika Serikat" yang membuat warga Amerika "Bersatu dalam kebahagiaan" (judul *New York Times*), yang menunjukkan bahwa "kita hidup pada abad romantis" (Anthony Lewis). Untuk kutipan dan latar belakang, lihat *Deterring Democracy*, Bab 10.

Untuk dokumentasi masalah ini, lihat *Necessary Illusions*.

*Torture in Latin America*, LADOC (Dokumentasi Amerika Latin), Lima 1987, laporan First International Seminar on Torture in Latin America (Buenos Aires, Desember 1985), dipersembahkan untuk "sistem penindas" yang "dengan pengetahuan pembuangan dan teknologi multinasional teror, mengembangkan pusat-pusat khusus yang tujuannya adalah untuk mencari metode-metode sempurna eksploitasi, penindasan, dan ketergantungan terhadap individu dan warga secara keseluruhan" dengan menggunakan "terorisme negara yang terinspirasi dari Doktrin Keamanan Nasional." Doktrin ini bisa dilacak sampai keputusan historis Pemerintahan Kennedy untuk mengubah misi militer Amerika Latin

ke dalam "keamanan internal", dengan konsekuensi-konsekuensi yang lebih jauh.

Raymond Garthoff, *Reflections on the Cuban Missile Crisis* (Brookings Institution, 1987), hlm. 17.

*Ibid.*, mulai hlm. 16, 78, dan 89, juga hlm. 98. Lihat rujukan-rujukan pada Catatan 281. Juga Bradley Earl Ayers, *The War that Never Was* (Bobbs-Merrill, 1976); Warren Hinckle dan William Turner, *The Fish is Red* (Harper & Row, 1981); William Blum *The CIA* (Zed, 1986); Morris Morley, *Imperial State and Revolution* (Cambridge, 1987); Taylor Branch dan George Crile, "The Kennedy Vendetta: Our Secret War on Cuba," *Harper*, Agustus 1975.

Lihat *Towards a New Cold War*, hlm. 48—49; *Culture of Terrorism*, hlm. 40; Stohl, *Current Perspectives on International Terrorism*.

*Jerusalem Post*, 16 Agustus 1981; lihat *FT*, Bab 5, bagian 1, 3, 4 untuk kutipan-kutipan, latar belakang, dan penggambaran yang lebih jauh. Lihat Bab 2, Catatan 175.

Glass, *Index on Censorship* (London), Januari 1989.

Lihat *FT*, mulai hlm. 184., dan sumber-sumber yang dikutip.

Ehud Ya'ari, *Egypt and the Fedayeen* (Ibrani) (*Givat Haviva*, 1975), mulai hlm. 27.; sebuah kajian penting berdasarkan dokumen-dokumen Mesir dan Yordania yang berhasil diperoleh. Pada saat yang sama, Salah Mustapha, atase militer Mesir di Yordania, terluka parah karena bom surat yang dikirim dari Jerusalem Timur, yang kemungkinan berasal dari sumber yang sama; *ibid.*

*Lohamei Herut Israel* atau Pejuang Kemerdekaan Israel.—peny.

Sejarawan militer Israel Uri Milshtein, *Hadashot*, 31 Desember 1987, merujuk pada buku Eliav 1983, *Hamevukash*.

Lihat Bab 2. *Ha'aretz*, 5 April 1989.

Lihat Bab 3, Catatan 206.

Boustany, *Washington Post Weekly*, 14 Maret 1988; Woodward, *Veil* (Simon & Schuster, 1987), mulai hlm. 396.

Mengenai Operasi Tangan Besi dan Pengeboman Tunis, lihat Bab 2.

Lihat Bab 3.

Lihat Edward Herman, *The Terrorism Industry* (Pantheon, 1990); Herman dan Gerry O'Sullivan, "'Terrorism' as Ideology and Cultural

Industry," George, ed., *Western State Terrorism*.  
 Lawrence Harke, *University of Miami Law Review*, Vol. 43, 1989, mulai hlm. 667.

Bernadotte, lihat Bab 2, Catatan 163. Shamir, "Terror," *Hazit*, Agustus 1943; bagian-bagiannya dicetak kembali di *Al-Hamishmar*, 24 Desember 1987. Berlin, *Personal Impressions* (Viking, 1981), hlm. 50.

Lihat *FT*, hlm. 164—165.; Gafi Amir, *Yediot Ahronot Supplemeni*, 14 Agustus 1988. De Haan, lihat *Towards a New Cold War*, hlm. 461—462.

Israel Shahak, "Distortion of the Holocaust," *Kol Ha'ir*, 19 Mei 1989. Enbal, *Yediot Ahronot*, 3 Agustus 1990. Lihat Zuckerman, *A Surplus of Memory* (California University, terjemahan 1990 dari bahasa Ibrani).

Resolusi Majelis Umum PBB 42/159 (7 Desember 1987), kelihatannya tidak dilaporkan di teks Amerika Serikat, muncul dalam Lampiran III, *State Terrorism at Sea*, makalah. EAFORD No. 44, Chicago, 1988. Lihat Bab 2, Catatan 168.

Untuk rincian-rinciannya, lihat *Necessary Illusions*. Juga artikel-artikel saya di *Z Magazine*, Maret 1989 dan September 1989, bagian-bagiannya dicetak ulang pada 1999 di edisi terbaru *FT*.

Penekanan di dalam JP. Lihat rujukan-rujukan catatan sebelumnya. Tidak bisa diterimanya Konferensi Internasional tidak dikendalikan oleh Washington, tetapi mengikuti dari pertentangannya terhadap pemukiman politik yang sesuai dengan konsensus internasional yang mendekati universal.

Lihat Bab 2.

Lihat Bab 2, Catatan 112. *New York Times*, 28 November 1988.

Lihat Bab 2.  
*New York Times*, 30 September 1986.

Charles Tilly, *Coercion, Capital, and European States* (Blackwell, 1990).

Maureen Dowd, *New York Times*, 23 Februari 1991.

Delapan bulan kemudian, FBI hanya bisa mengatakan bahwa "para penyidik percaya kalau ide serangan 11 September atas gedung World Trade Center dan Pentagon datang dari pemimpin-



pemimpin Al-Qaeda di Afganistan,” meskipun perencanaan dan pendanaan, menurut mereka, bisa dilacak sampai ke Jerman dan Saudi Arab. “Kami pikir dalangnya ada di Afganistan, pemimpin tinggi di Al-Qaeda,” kata direktur FBI Robert Mueller dalam “komentar-komentar paling rinci yang ia nyatakan di depan publik mengenai asal muasal serangan” 11 September. Walter Pincus, *Washington Post*, 6 Juni 2002. Jika sumber ini hanya berupa dugaan 8 bulan kemudian, tentu saja tidak mungkin diketahui saat itu. Pada 5 Oktober, Inggris mengeluarkan apa yang mereka nyatakan sebagai bukti jelas, yang “tidak ada keraguan sama sekali” mengenai kesalahan Bin Laden dan Taliban, Perdana Menteri Blair mengungkapkan. Bukti itu cukup tipis, jika kita mempertimbangkan kemasukakalan kasus dan intensitas penyelidikan. Media-media yang lebih serius tampak tidak peduli. *Wall Street Journal* menggambarkan bahwa dokumen-dokumen itu “lebih seperti sebuah lembaran tuduhan dibanding bukti-bukti rinci” (Mark Champion, *Wall Street Journal*, 5 Oktober hal 12). Namun tak ada bedanya, sebuah cerita lain muncul, mengutip pejabat senior Amerika Serikat, yang menjelaskan: “Kasus kejahatan ini tidak relevan. Rencananya adalah untuk membasmi Bin Laden dan organisasinya”—dan siapa pun yang mungkin merintang jalan. Ini adalah beberapa kepentingan yang menurut norma dan budaya intelektual, tidak bisa membenarkan tindakan-tindakan yang kemudian dilakukan.

Ricardo Stevens, *NACLA Report on the Americas*, November/Desember 2001. Ia menyatakan “seberapa mirip korban-korban ini dengan anak-anak lelaki dan perempuan, bagi mereka yang tidak sampai dilahirkan pada 20 Desember (1989) yang mereka jatuhkan pada kita di Chorrillo. Seberapa mirip mereka dengan para ibu, kakek, dan nenek-nenek tua, yang semuanya juga tak berdosa dan mati tanpa nama, yang terornya disebut *Just Cause* dan terorisnya disebut pembebas.” Barrio Chorrillo “memikul penderitaan” atas invasi Amerika Serikat, komentar editor, menambahkan bahwa “jumlah korban sipil dari invasi singkat Amerika Serikat tidak diketahui; tetapi perkiraan yang dapat dipercaya mencapai sekian

ribu korban.”

Andy Thomas, *Effects of Chemical Warfare: A Selective Review and Bibliography of British State Papers* (Institut Riset Perdamaian Internasional Stockholm/SIPRI, Taylor & Francis, 1985), Bab 2. Sasaran-sasaran penggunaan senjata kimia ini adalah “suku-suku tidak beradab” (Afganistan), tetapi juga warga Rusia, selama invasi 1919, yang dianggap sangat sukses oleh komando militer. Lihat *Turning the Tide*, 126; *Deterring Democracy*, mulai hlm. 181. Lihat juga Thomas Whiteside, *New Yorker*, 11 Februari 1991. juga Robin Young, *The Times* (London), 3 Januari 1997, yang menggambarkan semua itu sebagai “dokumen-dokumen yang baru saja dirilis.” Konsekuensi-konsekuensi nasihat Churchill kelihatannya tidak diketahui. Pada 1992, Perdana Menteri John Major mengumumkan sebuah inisiatif “pemerintah terbuka.” Tindakan pertamanya adalah untuk menghapus dokumen-dokumen mengenai hal ini dari Kantor Catatan Publik. George Robertson, *Freedom, the Individual, and the Law* (Penguin, edisi ketujuh, 1993), hlm. 198.

*New Republic*, 2, 1984; 5 November 2001.

Alexis de Tocqueville, *Democracy in America* (Everyman’s Library, 1994), Vol. I, hlm. 355.

Christina Lamb, *London Daily Telegraph*, 9 Desember 2001. Doug McKinlay, *Guardian*, 3 Januari 2002; Kim Sengupta, *Independent*, 4 Januari 2002.

Elisabeth Bumiller dan Elizabeth Becker, *New York Times*, 17 Oktober 2001. Pada Maret 2002, Program Pangan Dunia melaporkan bahwa angka orang yang membutuhkan bantuan makanan telah meningkat sampai 9 juta. Barbara Crossette, *New York Times*, 26 Maret; Ahmed Rashid, *Wall Street Journal*, 26 Juni 2002.

John Burns, *New York Times*, 16 September 2001.

Samina Amin, *International Security* 26.3, Musim Dingin 2001–2002. “UN Food Agency Warns of Mass Starvation in Afghanistan,” AFP, 28 September 2001; Edith Lederer, “U.S. Bombing Disrupting Planting which Provides 80 percent of Annual Grain Harvest,” *Associated Press*, 18 Oktober 2001. Delapan bulan kemudian,

Program Pangan Dunia melaporkan bahwa “stok gandum sangat tipis, dan tidak ada bantuan dana untuk mengisinya lagi”; Rashid, *Wall Street Journal*. Pada hari pertemuan AFSC, ketika percakapan ini dilakukan, agensi pangan internasional sedang bertemu di Wina untuk menilai situasi pada akhir perang, menyimpulkan bahwa lebih dari sejuta orang “tidak bisa mereka jangkau” karena gangguan perang dan “menghadapi kematian sebab kelaparan dan penyakit” (Imre Karacs, *Independent on Sunday*, 9 Desember 2001).

Tania Branigan, *Guardian*, 30 Oktober 2001. Howard, *Foreign Affairs*, Januari/Februari 2002. Carla Del Ponte, kepala jaksa penuntut kejahatan-kejahatan perang PBB, mendesak bahwa sebuah pengadilan internasional akan menjadi jalan terbaik untuk menuntut Osama bin Laden (AP, *Boston Globe*, 20 Desember 2001).

Begitu pegeboman dimulai, Bush memperingatkan Afganistan bahwa mereka akan terus dibom sampai pihak yang berkuasa menyerahkan Bin Laden dan rekan-rekannya. Beberapa minggu kemudian, Wakil Laksamana Departemen Pertahanan Inggris, Sir Michael Boyce, mengumumkan bahwa pegeboman akan terus berlangsung “sampai orang-orang di negara itu menyadari bahwa hal ini akan terus berlangsung sampai kepemimpinan di negara itu berubah,” yang ternyata merupakan pengumuman pertama tentang tujuan-tujuan baru perang. Patrick Tyler dan Elisabeth Bumiller, 12 Oktober 2001, mengutip Bush; Michael Gordon, *New York Times*, 28 Oktober 2001, mengutip Boyce.

Barry Bearak, *New York Times*, 25 Oktober 2001; John Thornhill dan Farhan Bokhari, *Financial Times*, 25—26 Oktober 2001; John Burns, *New York Times*, 26 Oktober 2001; Indira Lashkmanan, *Boston Globe*, 25—26 Oktober 2001.

Anatol Lieven, *Guardian*, 2 November 2001.

Colin Nickerson dan Indira Lakshmanan, *Boston Globe*, 27 September 2001.

*News*, Islamabad, 27 November 2001; *Times of India*, 26 November 2001.

Boucher, *Mideast Mirror* (London), 15 Maret 1991. Untuk rujukan lebih mengenai topik ini, lihat esai saya di Cynthia Peters, ed., *Collateral Damage* (South End Press, 1992), dan "Kata Penutup," dalam *Deterring Democracy* (1992, extended edition).

Strategi Nasional Keamanan Amerika Serikat (White House, Maret 1990). Untuk kutipan-kutipannya, lihat *Deterring Democracy*, Bab 1.

Di konferensi G-15 di Jamaika pada Februari 1999, sebuah pertemuan penting diadakan di Amerika Serikat. Dina Izzat, *Al-Ahram Weekly*, 11–17 Februari 1999. Lihat *New Military Humanism* (Common Courage, 1999), Bab 6, untuk diskusi lainnya.

Dikutip oleh Thomas Fox, *Irak* (Sheed & Ward, 1991), hlm. ix: lihat artikel saya di Peters, ed., *Collateral Damage*, untuk banyak contoh lainnya.

*New Military Humanism*. Untuk tujuan-tujuan perang resmi dan tinjauan catatan dokumenter pra-pengeboman dari sumber-sumber resmi Barat, lihat juga *A New Generation Draws the Line* (Verso, 2000).

Christopher Hellman, *Defense Monitor* (Washington), Agustus 2001. Untuk diskusi yang lebih luas dan sumber-sumber yang menyertainya, lihat *Peering into the Abyss of the Future* (Lakdawala Memorial Lecture, New Delhi, 3 November 2001; Institut Ilmu Sosial, New Delhi).

Graham Usher, "The al-Aqsa Intifada," *Middle East International*, 13 Oktober 2000.

John Dugard (Afrika Utara), Kamal Hossain (Bangladesh), dan Richard Falk (Amerika Serikat), *Question of the Violation of Human Rights in the Occupied Arab Territories, including Palestine*, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Komisi Hak Asasi Manusia, E/CN/2001/121, 16 Maret 2001. Israel menolak bekerja sama, tetapi sumber-sumber Israel yang cukup luas berhasil dikumpulkan. Beberapa laporan awal tentang Intifada Al-Aqsa, lihat Human Rights Watch, *Israel, the Occupied West Bank and Gaza Strip, and the Palestinian Authority Territories*, vol. 1.3 (E), Oktober 2000; Amnesty Internasional, "Israel and the Occupied Territories: Excessive Use of Lethal

Force,” 19 Oktober 2000. Lihat Adam Leigh, “Human Rights Groups Condemn the Use of “Excessive and Deadly Force,”” *Independent* (London), 18 Oktober 2000.

Untuk banyak contoh lainnya, lihat *Fateful Triangle (FT)*; khususnya Bab 4, bagian 5), *World Orders, Old and New* (1996, Epilog). Juga catatan pengantar.

HRW, *Center of Storm*, 11 April 2001. Daniel Williams, *Washington Post*, 16 April 2001. Untuk contoh-contoh yang lebih awal di Hebron, lihat rujukan di catatan sebelumnya. Bahkan pengalaman pribadi yang singkat sangat mengejutkan.

HRW, *Center of the Storm*. Dalam sebuah laporan pandangan mata dari Netzarim, wartawan terkenal Israel, Amira Haas menggambarkan kegagalan memberitakan tembakan dari pemukiman dan mesin tembakan IDF dari “menara pengintai dari kejauhan ... terhadap ribuan pendemo yang tidak bersenjata” untuk menahan agar mereka tidak mendekati posisi-posisi benteng tempat para tentara tidak berada dalam bahaya. Hass, “Media Omissions, Army Lies,” *Le Monde Diplomatique*, November 2000.

HRW, *Center of the Storm. Report on Israeli Settlement* (Washington DC), November—Desember 2000, mencatat konfirmasi dari wakil kepala staf IDF Moshe Ya’alon.

Jenderal Amos Yaron, wakil direktur, *Globes* (jurnal Arena Bisnis Israel), 21 Desember 2000. Jika seorang Jenderal Serbia memiliki rekam catatan Yaron, ia pasti disidang di Den Haag, seperti bukti dari laporan Komisi Kahan mengenai pembantaian Sabra-Shatila. Lihat *FT*.

Amnon Barzilai, *Ha’aretz*, 3 Oktober 2000; juga Avi Hoffmann, *Jerusalem Post*, 8 September. Uri Blau, *Kol Ha’ir*; 26 Januari 2001, dengan sebuah foto “Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat dalam sebuah latihan di Negev.”

Robin Hughes, *Jane’s Defence Weekly*, 4 Oktober 2000; Charles Sennott, *Boston Globe*, 4 Oktober 2000; Dave McIntyre (Washington), *Deutsche Presse-Agentur*, 3 Oktober 2000. Gideon Levy, *Ha’aretz*, 24 Desember 2000, dan Graham Usher, *Middle East Report*, Musim Dingin 2000, tentang pembunuhan-

pembunuhan di Beit Sahur pada 9 November 2000. Pada Februari 2002, pers Israel memberitakan 48 pembunuhan dengan 26 korban "tambahan yang tidak disengaja." Sementara IDF menyatakan korbannya 21, dengan 18 korban tambahan yang tidak disengaja. Di banyak kasus, termasuk kasus-kasus dengan segera menaikkan tingkat lingkaran kekerasan, helikopter dan misil Amerika Serikat-lah yang digunakan. Mahkamah Internasional menolak permohonan pelarangan pembunuhan berencana tanpa hukuman. Gideon Lavy, *Ha'aretz*, 3 Februari; Laporan mengenai misi Komite Hak Asasi Manusia Ingrid dan Wales, April 2002, menyimpulkan bahwa "Tidak ada pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling dasar dan norma-norma kemanusiaan yang lebih lagi dibandingkan pembunuhan terencana dan berdarah dingin, yang direncanakan dan diketahui oleh negara."

Ann Thompson Cary, "Mempersenjatai Israel ....," *News and Observer* (Raleigh NC), 12 Oktober 2000. Pencarian *data-base* di sini dan di bawah oleh David Peterson.

"Amnesty Internasional USA Calls for Cessation of All Attack Helicopter Transfers to Israel," rilis Amnesti Internasional, 19 Oktober 2000. *Aviation Week & Space Technology*, 26 Februari 2001, *Jane's Defence Weekly*, 28 Februari 2001, dan jurnal militer lainnya. *International Defense Review*, 1 April 2001. Reuters, AFP, 19 Februari 2001; Associated Press, 20 Februari 2001, halaman-halaman bisnis; *Wall Street Journal*, 20 Februari 2001, sebuah kalimat di bagian B, hlm. 10, di pengumuman-pengumuman bisnis. *America*, 5 Maret 2001. Lihat juga Robert Fisk, "Death in Bethlehem, Made in America," *Sunday Independent*, 15 April 2001. Jane Perlez, "U. S. Gingerly Discusses Taking More Active Role," *New York Times*, 17 Mei 2001; William Orme, *World Briefing*, 17 Mei 2001.

Laurie Copans, *Boston Globe*, 3 Maret 2001.

Lihat Bab 6, Catatan 343; *Deterring Democracy*, Bab 1. Untuk sumber-sumber yang tidak disertakan di bawah, lihat *World Orders*.

Untuk tinjauan kembali atas catatan-catatan tersebut, lihat *Deterring Democracy*, Bab 6.

Lihat Bab 4.

Lihat Israel Shahak, *Israel Global Role* (Association of Arab-American University Graduates (AAUG), 1982); Benjamin Beit-Hallahmi, *The Israeli Connection* (Pantheon, 1987); Jane Hunter, *Israel's Foreign Policy* (South End Press, 1987). Lebih umum, Jonathan Marshall, Peter Dale Scott, dan Jane Hunter, *The Iran-Contra Connection: Secret Teams and Covert Operations in the Reagan Era* (South End Press, 1987).

*Yediot Ahronot*, April 1992, dikutip oleh Israel Shahak, *Middle East International*, 19 Maret 1993.

Susunan resolusi 242 sengaja dibiarkan tidak jelas dengan harapan ada jaminan setidaknya persetujuan formal antara Israel dan negara-negara Arab. "Penarikan" dipahami secara umum (oleh Amerika Serikat juga) berarti batas-batas sebelum Juni 1967, dengan penyesuaian kecil dan saling menguntungkan. Itu tetap menjadi kebijakan resmi Amerika Serikat, meskipun pada 1971 tidak masuk dalam kebijakan operatif. Lihat di bawah.

Pemerintahan Clinton juga mendesak penghapusan komite khusus hak-hak warga Palestina, yang diistilahkannya sebagai "berat sebelah, tidak berguna, dan tidak penting," dan menolak untuk mengancam kegiatan pemukiman srael karena itu "tidak produktif untuk memperdebatkan sahnya sebuah isu." Clinton juga memutarbalikkan dukungan resmi Amerika Serikat yang sudah berlangsung lama pada Resolusi PBB 194, 11 Desember 1948 yang menegaskan hak kembalinya pengungsi-pengungsi Palestina. Jules Kaigan, *Middle East International*, 17 Desember 1993; Jaringan keadilan Timur Tengah, Februari—Maret 1994. Lihat *World Orders*, Bab 3.

Lihat Jimmy Carter, meninjau kembali deklarasi resmi selama 1991, *Washington Post*, 26 November 2000.

Lihat Bab 1.

Lihat *FT*, mulai hlm. 105.

Yaniv, *Dilemmas of Security* (Oxford, 1987), mulai hlm. 70.

Lihat Bab 1 tentang interpretasi dan reaksi Israel.

Untuk ulasan yang lebih luas, lihat *Necessary Illusions*, Lampiran 5.2.

Dasarnya adalah kejengkelan Amerika Serikat terhadap

kekurangajaran di bawah Yitzhak Shamir. Ketika akhirnya kembali ke norma, tanpa perubahan penting substansinya, keramahan Amerika Serikat pun kembali.

Baker dikutip oleh Carter, *Washington Post*, 26 November 2000. Ingat, Baker menggunakan kata "kawasan" bukan "kawasan tertentu" atau "kawasan-kawasan." Dalam diplomasi Amerika Serikat sejak 1971, penghilangan kata sandang dalam versi berbahasa Inggris Resolusi PBB 242 (tetapi tidak berlaku secara sama dengan versi berbahasa Prancis) telah menjadi alat untuk menyatakan bahwa resolusi PBB 242 hanya berarti penarikan sebagian, berbeda dengan interpretasi internasional, termasuk Amerika Serikat sampai 1971. Ada banyak perdebatan legalistik mengenai masalah ini; sia-sia, karena maksud deklarasi ini ditentukan oleh tokoh-tokoh yang paling berkuasa, yang diterima dalam sistem doktrinal, meskipun bertentangan dengan kata-kata yang sebenarnya. Ada banyak contohnya. Untuk tinjauan kembali beberapa perjanjian perdamaian, lihat *New Military Humanism*, 114—128.

Lihat Bab 5.

Seberapa pun nilainya, saya tidak mengatakan ini dalam tinjauan kembali. Lihat artikel saya di *Z Magazine*, Oktober 1993 (bertanggal 2 September), yang mendiskusikan rancangan Deklarasi Prinsipiel. Lihat *World Orders*, Bab 3 di dalam dokumen.

Para penguasa kelihatannya merasa bahwa permainan ini menghibur. Mereka mengulanginya lagi, misalnya, ketika Arafat dikurung di kampnya di Ramallah pada April 2002, dikelilingi oleh tank-tank Israel, dan diperingatkan dengan keras untuk tidak lagi mendukung terorisme, sebuah sikap yang tak bermakna sebagaimana dipahami semua orang, tetapi penting untuk tujuan menghina warga Palestina. Sebaliknya, Sharon ditunjuk sebagai "tokoh perdamaian" oleh Presiden Bush, yang dipuji karena mengatur pembebasan Arafat dari tahananannya dengan imbalan pengawasan Amerika Serikat-Inggris terhadap pembunuh yang dituduh membunuh menteri kabinet Israel Rehavam Ze'evi. Ze'evi terbunuh dalam reaksi terhadap naiknya lingkaran kekerasan Israel dengan pembunuhan pertama seorang pemimpin politik, Abu Ali



Mustafa, dalam sebuah serangan misil dengan helikopter Amerika Serikat; dan tidak ada tuduhan terhadap pembunuhan itu. Pembunuhan Mustafa berlalu begitu saja (terlepas dari beberapa komentar tentang kehadiran warga Amerika Serikat di rumah apartemen yang diserang oleh pembunuh dari IDF), tetapi reaksinya sangat berbeda ketika Ze'ev dibunuh sebagai balasan. Ini sangat tidak bisa dipahami karena seharusnya ada upaya untuk menghukum mereka yang bertanggung jawab membunuh Mustafa. Untuk pemeriksaan yang lebih mendalam mengenai dua kasus ini, lihat Mouin Rabbani, *Znet* ([www.zmag.org](http://www.zmag.org)), 19 Juni 2002.

Lihat Bab 5.

Perjanjian-perjanjian tersebut disusun dengan hati-hati oleh para perunding Israel (dengan dukungan Amerika Serikat) dengan syarat-syarat yang tidak jelas dan kadang bertentangan, menghindari celah, kondisi-kondisi timbal balik yang samar, dan sebagainya, dengan segala cara untuk memungkinkan pendukung-pendukung pendudukannya menyatakan bahwa Israel tidak melanggar perjanjian. Sebaliknya, kelonggaran dari warga Palestina susah dijangkau, dan dengan relasi kuasa, sebenarnya. Untuk ulasan mengenai perjanjian Interim Oslo II, lihat *World Orders* (edisi 1996, Penutup).

*Ibid.*

Shlomo Tsezna, "bangunan di kawasan-kawasan tersebut dibekukan, lalu dilanjutkan dengan sangat cepat," *Ma'ariv*, 18 Agustus 2000; Akiva Eldar, *Ha'aretz*, 1 Mei 2001. Lihat juga *Economist*, 26 April 2001, dan berita-berita yang sangat banyak di luar negeri dan khususnya pers arus utama Israel, banyak yang diulas di *World Orders* dan edisi *FT* terbaru 1999.

Tsezna, *Ma'ariv*, 18 Agustus 2000; Eldar, *Ha'aretz*, 1 Mei 2001.

*Report on Israeli Settlement*, November—Desember 2000. Shlomo Tsezna, *Ma'ariv*, 27 Februari 2001. Sharon kerap dicela sebagai penjahat perang; begitu juga dengan Peres. Di antara pencapaian-pencapaiannya adalah operasi-operasi Tangan Besi yang kejam di Lebanon pada pertengahan 1980-an dan invasi

terhadap Lebanon pada 1996, yang didukung oleh Clinton sampai protes internasional terhadap pengeboman kamp pengungsi PBB di Qana, yang menewaskan lebih dari 100 penduduk sipil yang mengungsi ke sana, menjadi sangat keras sampai akhirnya Clinton harus menarik dukungan dan memerintahkan Israel untuk menghentikan agresi, sebagaimana yang dilakukannya.

Baruch Kra, *Ha'aretz*, 6 Februari 2000. Diterjemahkan dalam *Report on Israeli Settlement*, Maret—April 2000. Mengenai semua kasus ini, lihat lagi *World Orders*. Mengenai Har Homa, lihat artikel saya di Haim Gordon, ed., *Looking Back at the June 1967 War* (Praeger, 1999), paper dari konferensi 1997 di universitas Ben Gurion, Beersheva; kutipan-kutipan di edisi FT 1999 yang lebih lengkap.

Ziv Maor dan Aluf Benn, *Ha'aretz*, 10 April 2001.

Organisasi Hak Asasi Manusia Israel B'Tselem melaporkan pada Mei 2002, bahwa pemukim mengontrol 42 persen Tepi Barat. Nagav Shragai, *Ha'aretz*, 13 Mei 2002; Dan Izenberg, *Jerusalem Post*, 14 Mei 2002; tidak diberitakan di pers nasional Amerika Serikat. Mengutip B'Tselem dan sumber-sumber lainnya, *Economist* (22 Juni 2002) memperkirakan bahwa Israel mengontrol 80 persen Tepi Barat, dengan 20 persen "dinyatakan secara ilegal" menjadi "tanah negara," yang juga menghalangi warga Palestina, dan 20 persen lainnya dikontrol oleh IDF. Kebijakan pemerolehan tanah tersebut menyebabkan desa-desa Palestina "terpencar-pencar dan terisolasi, di antara pemukiman-pemukiman (Yahudi)," yang dibubarkan untuk mencapai hasil ini, duga B'Tselem. "Komunitas-komunitas Palestina telah menjadi pemukiman di tengah-tengah Tepi Barat Israel," menurut pengamatan analis Palestina. Program ini terus diperluas di bawah pemerintahan Sharon. Dan, semua ini dilakukan dengan dukungan diam-diam Amerika Serikat dan pendanaan tidak langsung dari Amerika Serikat.

Jane Perlez, *New York Times*, 26 Desember 2000. Perlez, *New York Times*, 8 Januari 2001; Judy Dempsey, *Financial Times*, 9 Januari 2001; Friedman, 2 Januari 2001.

Nadav Shragai, *Ha'aretz*, 16 Februari 2000. Yuval Ginbar, *On the Way to Annexation: Human Rights Violations Resulting from the Establishment and*

*Expansion of the Ma'aleh Adumim Settlement* (B'Tselem, Juli 1999).  
*Report on Israeli Settlement*, Januari—Februari 2000.

Untuk rincian-rincian lebih lanjut mengenai kebijakan-kebijakan kantonisasi, dan bagaimana kebijakan itu diimplementasikan oleh Amerika Serikat dan Israel, lihat Sara Roy, dalam Roane Carey, ed., *The New Intifada*, dan *Current History*, Januari 2002. Ada kemajuan-kemajuan yang dipertimbangkan dalam perundingan-perundingan tidak resmi di Taba, Januari 2001. Rinciannya ada di sebuah dokumen yang disiapkan oleh utusan khusus Uni Eropa, Miguel Moratinos, yang diterima sebagai dokumen yang valid oleh kedua kubu, dan diulas secara luas oleh wartawan diplomatik Israel terkemuka, Akiva Eldar (*Ha'aretz*, 15 Februari 2002). Perundingan-perundingan ini dihentikan oleh Perdana Menteri Barak, yang juga "menginstruksikan kepala perundingannya, Gilad Sher, untuk memberi tahu warga Palestina bahwa peta yang ditampilkan oleh menteri dalam negeri Shlomo Ben-Ami waktu itu, yang mengurangi wilayah pemukiman (termasuk bidang tanah Ma'aleh Adumim-Givat Ze'ev) sampai hanya 5 persen dari Tepi Barat, tidak dianggap valid." Status bidang tanah tersebut, yang membagi dua Tepi Barat, tetap menjadi poin utama perdebatan, begitu juga Kamp David. Palestina mengajukan sebuah peta yang jelas (berlawanan dengan banyak propaganda), dengan Israel menguasai 3 persen dari Tepi Barat dan "barter tanah yang adil secara ukuran dan nilai dan dalam wilayah berbatasan dengan perbatasan Palestina, dan di sekitarnya yang dicaplok oleh Israel." Israel menolak, dan menawarkan wilayah yang lebih kecil di perbatasan Sinai. Ada ketidaksetujuan-ketidaksetujuan lainnya, tetapi dapat dibayangkan bahwa perundingan ini mungkin mencapai kesepakatan jika tidak dibatalkan.

Dugard et al., *Questions of the Violation of Human Rights*.

*Ibid.*

Amira Hass, "Empat penolakan Amerika Serikat membatalkan resolusi Dewan Keamanan," *Ha'aretz*, 13 April 2001. Penolakan Washington yang begitu sering terhadap Hak Asasi Manusia (di samping musuh-musuhnya) menjadi sebuah alasan dalam

pemilihan Swedia, Prancis, dan Austria, dibanding Amerika Serikat untuk tiga kursi Barat di Komisi Hak Asasi Manusia segera setelahnya. Banyak hipotesis lain: Barbara Crossette, Christopher Marquis, *New York Times*, 4 Mei 2001. Menteri Luar Negeri Colin Powell dikutip ketika mengatakan bahwa pemungutan suara tentang Palestina membuat marah negara-negara yang ingin membalas. David Sanger, *New York Times*, 9 Mei 2001. Powell mungkin merujuk pada veto Dewan Keamanan, atau mungkin pada resolusi yang disponsori Uni Eropa pada tanggal 18 April 2001; lihat Catatan 394 di bawah. Pada 14 Desember 2001, Amerika Serikat kembali memveto resolusi Dewan Keamanan yang meminta pengiriman monitor untuk mengawasi pengurangan kekerasan. Sepuluh hari sebelumnya, Amerika Serikat memboikot—lalu mengganggu—konferensi internasional di Jenewa yang menegaskan lagi penerapan Konvensi Jenewa Keempat dalam kawasan-kawasan yang diduduki, sehingga sebagian besar aksi Amerika Serikat-Israel adalah kejahatan perang—dan “pelanggaran-pelanggaran berat” yang banyak itu adalah kejahatan perang yang sangat serius. Ini termasuk pemukiman dan praktik “pembunuhan yang disengaja, penyiksaan, pengasingan yang tak sesuai hukum, pencabutan dengan sengata hak-hak atas pengadilan yang adil, perusakan besar-besaran, dan pemberian properti ... yang dilakukan secara melanggar hukum dan tanpa alasan.” Conference of High Contracting Parties, *Report on Israeli Settlement* Januari—Februari 2002.

Untuk ulasannya, lihat Human Rights Watch, *Center of the Storm*, Juga Francis Boyle, “Law and Disorder in the Middle East,” *The Link* 35.1, Januari—Maret 2002, dan artikel Allegra Pacheco di Carey, ed., *The New Intifada*.

Ada syarat-syarat yang berhubungan dengan kebutuhan militer yang tidak bisa dilakukan pada kasus-kasus masa kini.

Agence France Presse, “UN Human Rights Commission Condemns Israel on Three Counts,” 18 April 2001. Angka pemungutan suaranya 50-1; Kosta Rika abstain dan satu negara tidak hadir. Ada beberapa penyebutan dalam pers Amerika Serikat (19 April),

tetapi tidak ada di pers nasional.

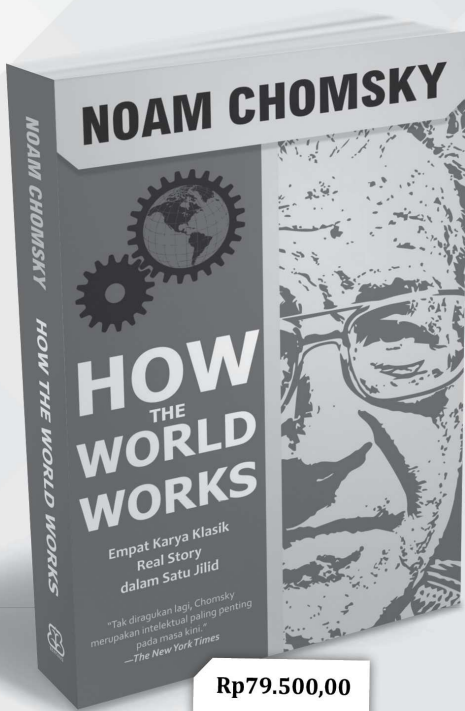
Asher Davidi, *Davar*, 17 Februari 1993; diterjemahkan oleh Zachary Lockman dalam *Middle East Report* (MERIP), September—Oktober 1993.

Lihat Kate Bronfenbrenner, *Uneasy Terrain: The Impact of Capital Mobility on Workers, Wages, and Union Organizing* (Cornell, 6 September 2000), di bawah kontrak dengan Komisi Review Defisit Perdagangan Amerika Serikat, memperbaharui sebuah kajian 1997, juga dijalankan di bawah aturan NAFTA. Kajian-kajian serupa kerap diabaikan dalam ulasan publik, tetapi tidak oleh para pekerja (atau, mungkin, para pegawai).

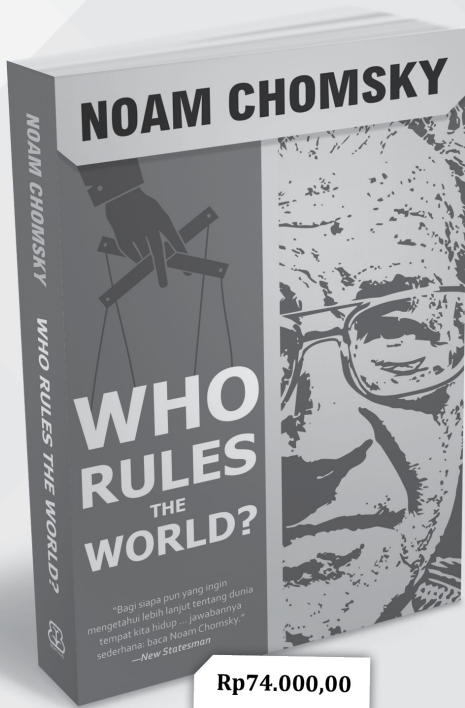
Lihat wartawan ekonomi Efraim Davidi, "Globalization and Economy in the Middle East," *Palestine-Israel Journal* VII.1 dan 2, 2000.

Ya'ir Sheleg, *Ha'aretz*, 24 Maret 2001, tentang konferensi dan reaksi-reaksi. Shlomo Gazit, Amir Rappoport, *Yediot Ahronot*, 26 Maret 2001; juga Reuven Weiss, meninjau kembali latar belakang khusus Gazit.

Ben-Ami, *A Place for All* (Ibrani) (Hakkibutz Hameuchad, 1998). Dikutip dari Efraim Davidi, "Globalization and Economy."



**Rp79.500,00**



**Rp74.000,00**



# READ

anytime  
anywhere

Kini, buku-buku  
Bentang Pustaka  
juga tersedia dalam  
bentuk digital.

- Praktis ✓
- Cepat ✓
- Mudah ✓

**DAPATKAN  
SEGERA !**



▶ Google play



# Table of Contents

1. [Kata Pengantar Edisi Baru](#)
2. [Kata Pengantar Edisi Pertama \(1986\)](#)
3. [Pendahuluan \(2002\)](#)
4. [1 Pengendalian Pikiran: Kasus Timur Tengah](#)
5. [2 Terorisme Timur Tengah dan Sistem Ideologis Amerika](#)
6. [3 Libia dalam Demonologi \(Rekayasa Sistematis untuk Membuat Sesuatu Menjadi Menakutkan\) Amerika Serikat](#)
7. [4 Peran Amerika Serikat di Timur Tengah](#)
8. [5 Terorisme Internasional: Bayangan dan Kenyataan](#)
9. [6 Dunia Setelah 11 September](#)
10. [7 Amerika Serikat/Israel-Palestina](#)

## Landmarks

1. [Cover](#)
2. [Table of Contents](#)